

RPJMD KABUPATEN MANGGARAI

2011 - 2015



VISI

"TERWUJUDNYA MANGGARAI YANG MAKMUR,
SEJAHTERAH, ADIL, MERATA DAN BERKELANJUTAN YANG
DIRIDHOI TUHAN YANG MAHA ESA"



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2011-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kesinambungan Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai memerlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat Visi, Misi, arah kebijakan, Program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan menjadi indikator pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan selama lima tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011-2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 017 Seri E Nomor 009);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI

dan

BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN
2011-2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah rencana lima tahunan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah bagian dari RKPD yang sudah disepakati oleh DPRD yang berisi kebijakan pelaksanaan RKPD dalam hal keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi kebijakan mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan arahan atas perlakuan terhadap pembiayaan daerah dalam 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Bupati Tahun 2011-2015.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sistimatika RPJMD Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB IX	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB X	PENUTUP

Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2011-2015 dijabarkan dalam RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 5

- (1) SKPD menyusun Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra-SKPD dijabarkan lebih lanjut dalam Renja-SKPD.
- (3) Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala SKPD untuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Realisasi pencapaian target, penyerapan dana serta kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian kedua

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (4) Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (6) Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

RPJMD disesuaikan paling lama 12 (dua belas) bulan dalam hal Ranperda tentang RTRW yang menjadi acuan penyusunan RPJMD telah ditetapkan terdapat beberapa perbedaan yang substantif.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2006 Nomor 7 Seri F Nomor 1);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 10 Seri F Nomor 3);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

**Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 11 Mei 2011**

BUPATI MANGGARAI,

CHRISTIAN ROTOK

**Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 11 Mei 2011**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI,**

**PAULUS P. BERO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19531006 198203 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2011 NOMOR 1**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2011-2015**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip Penyelenggaraan desentralisasi ialah otonomi seluas-luasnya. Otonomi seluas-luasnya diartikan sebagai daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), mengamanatkan kepada pemerintah daerah dan tanggung jawab yang lebih besar dan luas untuk mempercepat laju pembangunan di daerahnya melalui kebijakan otonomi daerah yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun cultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakatnya. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan yang lebih besar dalam melaksanakan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan demi keselarasan pembangunan antar wilayah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan

adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bab II tentang prinsi-prinsip pembangunan daerah yang mengamanatkan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan nasional.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog

antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan mengacu visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas.



BUPATI MANGGARAI

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/119.a/2011

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 2011-2015**

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai 2011-2015 telah ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2011, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Meenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 017 Seri E Nomor 009);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 0);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai 2011-2015.
- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Menunjuk Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai untuk :
- a. melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;

- b. membuat peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud bila dipandang perlu; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Manggarai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 11 Mei 2011

BUPATI MANGGARAI,

CHRISTIAN ROTOK

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..	I-1
1.3. Hubungan antar Dokumen	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
1.5. Maksud dan Tujuan	I-7
BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	II-1
2.1.1.3. Topografi	II-3
2.1.1.4. Geologi	II-3
2.1.1.5. Klimatologi	II-3
2.1.1.6. Penggunaan Lahan	II-4
2.1.2. Wilayah Rawan Bencana	II-7
2.1.3. Demografi	II-10
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-12
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	II-13
2.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi	II-16

2.2.3	PDRB Perkapita	II-21
2.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-22
2.3.1.	Urusan Wajib	II-22
2.3.1.1	Pendidikan	II-22
2.3.1.2.	Kesehatan.....	II-36
2.3.1.3.	Keluarga Berencana	II-67
2.3.1.4.	Pekerjaan Umum.....	II-68
2.3.1.5.	Penataan Ruang.....	II-75
2.3.1.6.	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	II-76
2.3.1.7.	Perusahaan Daerah	II-81
2.3.1.8.	Lingkungan Hidup.....	II-82
2.3.1.9.	Penanggulangan Bencana Alam.....	II-89
2.3.1.10.	Pertanahan.....	II-94
2.3.1.11.	Kependudukan dan Catatan Sipil	II-95
2.3.1.12.	Sosial	II-97
2.3.1.13.	Tenaga kerja dan Transmigrasi	II-101
2.3.1.14.	Koperasi dan UKM	II-105
2.3.1.15.	Penanaman Modal Daerah.. ..	II-108
2.3.1.16.	Kebudayaan	II-110
2.3.1.17.	Pemuda dan Olahraga.....	II-111
2.3.1.18.	Politik, Perlindungan Masyarakat dan Hukum	II-117
2.3.1.19.	Keamanan dan Ketertiban Sosial	II-118
2.3.1.20.	Hukum	II-120
2.3.1.21.	Agama.....	II-125

2.3.1.22.	Pemerintahan Umum	II-126
2.3.1.23	Pelayanan Perijinan Terpadu	II-130
2.3.1.24	Kepegawaian.....	II-143
2.3.1.25.	Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	II-146
2.3.2.	Urusan Pilihan.....	II-148
2.3.2.1.	Ketahanan Pangan	II-148
2.3.2.2.	Kelembagaan Pendukung Penyuluhan Pertanian (PPL)	II-150
2.3.2.3.	Tanaman pangan dan Holtikultura	II-151
2.3.2.4.	Perkebunan.....	II-156
2.3.2.5	Kelautan dan Perikanan	II-159
2.3.2.6.	Peternakan.....	II-161
2.3.2.7.	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-164
2.3.2.8.	Pariwisata.....	II-171
2.3.2.9.	Perdagangan dan Industri....	II-172
2.3.2.10.	Kehutanan	II-174
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah ..	II-180
BAB III.	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2.	Neraca Daerah.....	III-12
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-18
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-18
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	III-20
3.3.	Kerangka Pendanaan	III-22

3.3.1.	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.....	III-23
3.3.2.	Proyeksi APBD	III-24
3.3.3.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-26
BAB IV.	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.2.	Isu Strategis.....	IV-2
BAB V.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1.	Visi	V-1
5.2.	Misi.....	V-1
5.3.	Tujuan dan Sasaran	V-3
BAB VI.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	VI-1
6.1.	Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	VI-4
BAB VII.	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VII-1
7.1.	Kebijakan Umum Pembangunan Daerah.....	VII-1
7.2.	Program Pembangunan Daerah.....	VII-1
BAB VIII.	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANAAN	VIII-1
BAB IX.	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X.	PENUTUP.....	X - 1
10.1.	Pedoman Transisi	X-1
10.2	Kaidah Pelaksanaan.....	X-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kawasan Budidaya di Kabupaten Manggarai	2 – 5
Tabel 2.2 Obyek Wisata Budaya Yang Potensial	2 – 6
Tabel 2.3 Obyek Wisata Alam Yang Potensial	2 – 6
Tabel 2.4 Lokasi Daerah Potensi Tsunami di Kabupaten Manggarai.....	2 – 8
Tabel 2.5 Desa/Kelurahan Rawan Banjir di Kabupaten Manggarai	2 – 8
Tabel 2.6 Potensi Daerah Longsor....	2 – 9
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Manggarai Tahun 2010	2 – 10
Tabel 2.8 PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2005-2009	2 – 13
Tabel 2.9 Kontribusi 3 Sektor Atas Dasar Harga berlaku Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2009	2 – 14
Tabel 2.10 Kontribusi 3 Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005 – 2009 Kabupaten Manggarai.....	2 – 15
Tabel 2.11 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai.....	2 – 16
Tabel 2.12 Hasil Analisis Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai.....	2 – 17
Tabel 2.13 Laju Inflasi PDRB Kabupaten Manggarai 2005 – 2010.....	2 – 18
Tabel 2.14 Laju Inflasi Sektoral 2005 – 2010	2 – 19
Tabel 2.15 PDRB Perkapita Tahun 2005 s.d 2010 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Manggarai.....	2 – 20
Tabel 2.16 PDRB Perkapita Tahun 2005 s.d 2010 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Manggarai.....	2 – 20
Tabel 2.17 Pendapatan Regional Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku	2 – 21
Tabel 2.18 Pendapatan Regional Perkapita Berdasarkan Harga Konstan.....	2 – 22
Tabel 2.19 APK Menurut Tingkat Pendidikan.....	2 – 23
Tabel 2.20 Disparitas APK Menurut Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2009/2010	2 – 24

Tabel	2.21	Perkembangan APM Kabupaten Manggarai (%) dari Tahun Pelajaran 2005/2006 – 2009/2010	2 – 25
Tabel	2.22	APS Menurut Jenjang Pendidikan.....	2 – 25
Tabel	2.23	Rasio Gender.....	2 – 26
Tabel	2.24	Penduduk 10 Tahun keatas Menurut Jenjang Pendidikan	2 – 27
Tabel	2.25	Kelulusan dan Persentase Kelulusan Tingkat SD	2 – 28
Tabel	2.26	Kelulusan dan Persentase Kelulusan Tingkat SMP.....	2 – 29
Tabel	2.27	Kelulusan dan Persentase Kelulusan Tingkat SMA	2 – 29
Tabel	2.28	Kelulusan dan Persentase Kelulusan Tingkat SMK	2 – 29
Tabel	2.29	Tingkat Pendidikan Guru Per Jenjang Sekolah Tahun 2009/2010.....	2 – 30
Tabel	2.30	Data Pelaksanaan Kualifikasi Guru di Kabupaten Manggarai Tahun 2007 – 2010.....	2 – 31
Tabel	2.31	Program Sertifikasi Guru dan Pengawas Kabupaten Manggarai Tahun 2007-2010	2 – 31
Tabel	2.32	Rasio Siswa Terhadap Guru	2 – 32
Tabel	2.33	Rasio Siswa Terhadap Ruang Kelas.....	2 – 32
Tabel	2.34	Data Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Manggarai 2005/2006 – 2009/2010	2 – 33
Tabel	2.35	Program Kecakapan Hidup dan Kesetaraan.....	2 – 34
Tabel	2.36	Keanggotaan Perpustakaan Umum Daerah.....	2 – 34
Tabel	2.37	Rekapitulasi Pengadaan Buku Perpustakaan Daerah Tahun 2005-2010	2 – 35
Tabel	2.38	Data Pengunjung Perpustakaan Daerah Tahun 2005-2010.....	2 – 35
Tabel	2.39	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010	2 – 36
Tabel	2.40	Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010.....	2 – 38
Tabel	2.41	Data Penyebab Ibu Sakit Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010	2 – 39
Tabel	2.42	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010	2 – 40
Tabel	2.43	Deteksi Bumil Resti dan Komplikasi Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010	2 - 43
Tabel	2.44	Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010.....	2 – 43
Tabel	2.45	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010.....	2 – 44
Tabel	2.46	Penyebab Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010.....	2 – 45
Tabel	2.47	Penyebab Bayi Sakit Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010.....	2 – 46
Tabel	2.48	Angka Kematian Neonatal (0-28 hari) Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010	2 – 47
Tabel	2.49	Pelayanan Kesehatan Neonatal Kabupaten Manggarai Tahun 2007-2010	2 – 47
Tabel	2.50	Cakupan Imunisasi Bayi dan Desa UCI Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010	2 – 48

Tabel 2.51	Angka Kematian Anak (Akaba) Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010.....	2 – 49
Tabel 2.52	Penyebab Kematian anak Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010.....	2 – 49
Tabel 2.53	Penyebab Anak Sakit Kabupaten Manggarai Tahun 2007 – 2010.....	2 – 50
Tabel 2.54	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2007 – 2010	2 – 50
Tabel 2.55	Status Gizi Balita Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010	2 – 51
Tabel 2.56	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Pemberian Asi Eksklusif Kabupaten Manggarai Tahun 2005 - 2010	2 – 52
Tabel 2.57	Sepuluh Jenis Penyakit Terbanyak Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010.....	2 – 54
Tabel 2.58	Kunjungan Rawat Jalan dan Inap Puskesmas Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010.....	2 – 54
Tabel 2.59	Cakupan Rawat Jalan RSUD Menurut Jenis Pelayanan Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010.....	2 – 55
Tabel 2.60	Sepuluh Penyakit Terbanyak Rawat Jalan RSUD Kabupaten Manggarai 2005-2010.....	2 – 55
Tabel 2.61	Sepuluh Penyakit Terbanyak Rawat Inap RSUD Kabupaten Manggarai 2005-2010.....	2 – 56
Tabel 2.62	Penyebab Kematian terbanyak di RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010	2 – 56
Tabel 2.63	Jumlah dan Jenis Penyakit Menular Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010.....	2 – 58
Tabel 2.64	Capaian Hasil Pantauan PHBS Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010.....	2 – 61
Tabel 2.65	Jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010	2 – 62
Tabel 2.66	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010	2 – 63
Tabel 2.67	Indikator Pelayanan RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010.....	2 – 64
Tabel 2.68	Rasio Tenaga Kesehatan disbanding Target Nasional Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010	2 – 65
Tabel 2.69	Perkembangan dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010	2 – 66
Tabel 2.70	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Jumlah PUS dan Cakupan Pelayanan KB Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010.....	2 – 67
Tabel 2.71	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Manggarai Tahun 2005 s.d 2010	2 – 69

Tabel 2.72	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Manggarai	2 – 70
Tabel 2.73	Pembangunan Jembatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010.....	2 – 70
Tabel 2.74	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Manggarai Tahun 2005 s.d 2009	2 – 71
Tabel 2.75	Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010.....	2 – 71
Tabel 2.76	Status Rumah Tinggal	2 – 72
Tabel 2.77	Konstruksi Rumah Tinggal di Kabupaten Manggarai	2 – 72
Tabel 2.78	Pelayanan Air Minum Bersih Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010	2 – 74
Tabel 2.79	Jalan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan Tahun 2005-2010	2 – 74
Tabel 2.80	Jalan Lingkungan Perkotaan (Kota Kecamatan) Tahun 2005-2010.....	2 – 74
Tabel 2.81	Pembangunan Drainase Perkotaan (Kota Kecamatan) Tahun 2005-2010.....	2 – 75
Tabel 2.82	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai.....	2 – 76
Tabel 2.83	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Manggarai.....	2 – 77
Tabel 2.84	Rasio Ijin Trayek Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai.....	2 – 77
Tabel 2.85	Rasio Ijin Trayek Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Manggarai	2 – 78
Tabel 2.86	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai.....	2 – 78
Tabel 2.87	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1(satu) tahun Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Manggarai	2 – 79
Tabel 2.88	Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai.....	2 – 79
Tabel 2.89	Jumlah Penumpang Angkutan Udara Kabupaten Manggarai Tahun 2005 s.d 2010	2 – 80
Tabel 2.90	Jaringan Komunikasi Kabupaten Manggarai Tahun 2005 s.d 2010.....	2 – 80
Tabel 2.91	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Manggarai Tahun 2005 s.d 2010.....	2 – 81
Tabel 2.92	Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Komodo Tahun 2006 – 2010	2 – 81
Tabel 2.93	Debit Air PDAM Tirta Komodo Tahun 2005 – 2010 (Liter/detik)	2 – 81
Tabel 2.94	Data Pelayanan PDAM Tahun 2010	2 – 82
Tabel 2.95	Luas lahan yang direhabilitasi mulai tahun 2006 s.d 2010	2 - 83
Tabel 2.96	Kondisi Mangrove di Manggarai per Desember 2010.....	2 – 83
Tabel 2.97	Rehabilitasi hutan Mangrove tahun 2006 s.d 2010	2 – 84
Tabel 2.98	Konservasi Daerah Tangkapan air & sumber sumber air tahun 2006 – 2010.....	2 – 84
Tabel 2.99	Data Sampah terangkut dari Tahun 2006 s.d 2010.....	2 – 86

Tabel	2.100	Produksi Sampah dari Tahun 2006 s.d 2010.....	2 – 86
Tabel	2.101	Data Kualitas Sumber Mata Air	2 – 87
Tabel	2.102	Kualitas air sungai	2 – 88
Tabel	2.103	Potensi Tsunami	2 – 90
Tabel	2.104	Sungai –sungai dan anak sungai potensi banjir.....	2 – 90
Tabel	2.105	Dampak Bencana Banjir	2 – 91
Tabel	2.106	Potensi Daerah Longsor.....	2 – 92
Tabel	2.107	Data Bencana di Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010	2 – 93
Tabel	2.108	Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2006 – 2010 Kabupaten Manggarai	2 – 94
Tabel	2.109	Jumlah Penduduk, KK dan Perkembanagn kepemilikan KK dan KTP Di Kabupaten Manggarai tahun 2005-2010.....	2 – 95
Tabel	2.110	Perkembangan Jumlah dan Prosentase Kepemilikan Akta – akta Capil di Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010.....	2 – 96
Tabel	2.111	Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS) Kabupaten Manggarai Tahun 2010	2 – 97
Tabel	2.112	Perlindungan dan kesejahteraan Sosial di Kab. Manggarai Tahun 2005-2008.....	2 – 101
Tabel	2.113	Penduduk Usia 10 tahun keatas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu	2 – 101
Tabel	2.114	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pengangguran Terbuka dan Setengah Pengangguran Tenaga Kerja di Kab. Manggarai Tahun 2005 – 2010.....	2 – 102
Tabel	2.115	Penduduk Manggarai Berusia 10 Tahun keatas Menurut Lapangan pekerjaan Utama di Kabupaten Manggarai tahun 2005-2010.....	2 – 103
Tabel	2.116	Jumlah Pengiriman TKI Menurut Kecamatan Kab. Manggarai Tahun 2005-2010	2 – 103
Tabel	2.117	Data Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun 2005-2010 Kab. Manggarai.....	2 – 104
Tabel	2.118	Data Kerja Antar Daerah (AKAD) Kab. ManggaraiTahun 2009/2010.....	2 – 104
Tabel	2.119	Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2008/2009	2 – 104
Tabel	2.120	Data Pencari Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010.....	2 – 104
Tabel	2.121	Penyerapan Tenaga Kerja Menurut tingkat Pendidikan Kabupaten Manggarai Tahun 2006 – 2010.....	2 – 105
Tabel	2.122	Jenis Koperasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010	2 – 105
Tabel	2.123	Kondisi Perkoperasian di Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010	2 – 106
Tabel	2.124	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2005 s.d 2010.....	2 – 106
Tabel	2.125	Kondisi UKM di Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010.....	2 – 107
Tabel	2.126	Jumlah UKM non BPR/LKM 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai.....	2 – 107

Tabel	2.127	Jumlah BPR/LKM Kabupaten Manggarai Tahun 2005 s.d 2010.....	2 – 108
Tabel	2.128	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai.....	2 – 109
Tabel	2.129	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai	2 – 109
Tabel	2.130	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai	2 – 110
Tabel	2.131	Perkembangan Seni, Budaya Daerah tahun 2005 s/d 2010.....	2 – 110
Tabel	2.132	Data Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2006 s/d 2010 Kabupaten Manggarai.....	2 – 112
Tabel	2.133	Data Jumlah Siswa Prestasi untuk Kegiatan Paskribra Tahun 2006 s/d 2010 Kabupaten Manggarai.....	2 – 113
Tabel	2.134	Data Jumlah Kegiatan Kepemudaan Berupa Sosialisasi Kespro, Napza, HIV/AIDS Tahun 2006 s/d 2010	2 – 114
Tabel	2.135	Cabang Olahraga / Organisasi Olahraga di Kabupaten Manggarai.....	2 – 114
Tabel	2.136	Data Jumlah Lapangan Bola sepak milik Pemda Manggarai.....	2 – 115
Tabel	2.137	Data Jumlah Lapangan Bola Volley milik Pemda Manggarai.....	2 – 115
Tabel	2.138	Data jumlah Lapangan Bola Basket milik Pemda Manggarai	2 – 115
Tabel	2.139	Data jumlah Lapangan Tennis Lantai milik Pemda Manggarai.....	2 – 115
Tabel	2.140	Jumlah Organisasi Olahraga di Kecamatan	2 – 116
Tabel	2.141	Data Kegiatan/Pertandingan Olahraga yang pernah di ikuti	2 – 116
Tabel	2.142	Jumlah Kasus Kriminalitas dan Kasus Kriminalitas yang diselesaikan tahun 2006-2010.....	2 – 118
Tabel	2.143	Jumlah LSM Aktif Kabupaten Manggarai Tahun 2006 s.d 201.....	2 – 119
Tabel	2.144	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2006 s/d 2010 Kabupaten Manggarai.....	2 – 119
Tabel	2.145	Hasil Audit/Pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Manggarai Tahun 2006-2010.....	2 – 120
Tabel	2.146	Jumlah Produk Hukum Kabupaten Manggarai Tahun 2006-2010.....	2 – 121
Tabel	2.147	Jumlah Desa Penyuluhan Hukum tahun 2006-2010.....	2 – 122
Tabel	2.148	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2006 s/d 2010.....	2 – 122
Tabel	2.149	Pelanggaran Terhadap hukum Positif di Kabupaten Manggarai Tahun 2006-2010.....	2 – 124
Tabel	2.150	Jumlah Tempat Ibadah dan Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Manggarai Tahun 2006 - 2010	2 – 125
Tabel	2.151	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2005 – 2010 dan Periode 2011 – 2015	2 – 126
Tabel	2.152	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Perkantoran Tahun 2006 - 2008.....	2 – 127
Tabel	2.153	Jumlah dan Status Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun 2006-2010.....	2 – 128
Tabel	2.154	Jenis Perijinan di Kabupaten Manggarai	2 – 130

Tabel	2.155	Rekapitulasi Perijinan dan Nonperijinan Bulan Juli – Desember 2010.....	2 – 131
Tabel	2.156	Rekapitulasi Waktu Rata-rata Pelayanan Perijinan dan Non perijinan Bulan Juli – Desember 2010	2 – 135
Tabel	2.157	Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Bulan Agustus – Desember 2010.....	2 – 139
Tabel	2.158	Rekapitulasi SKRD Bulan Juli – Desember 2010	2 – 141
Tabel	2.159	Data Prajabatan Tahun 2005 – 2009.....	2 – 143
Tabel	2.160	Data PNS yang mengikuti Diklat Struktural sampai Tahun 2010.....	2 – 143
Tabel	2.161	Data Mahasiswa Tugas Belajar, ijin Belajar dan Co-Ass Kedokteran Tahun 2005 – 2010.....	2 – 144
Tabel	2.162	Data Jabatan Struktural Tahun 2010	2 – 144
Tabel	2.163	Data Kualifikasi PNS Kabupaten Manggarai	2 – 145
Tabel	2.164	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Tahun 2006-2010	2 – 146
Tabel	2.165	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Tahun 2006 – 2010	2 – 146
Tabel	2.166	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Tahun 2006 – 2010.....	2 – 147
Tabel	2.167	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Tahun 2006-2010	2 – 147
Tabel	2.168	Posisi ketersediaan pangan pokok produksi dalam daerah dan kebutuhan konsumsi Masyarakat Kabupaten Manggarai Tahun 2009.....	2 – 148
Tabel	2.169	Hasil Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Indikator SKPG keadaan s/d 30 September 2010	2 – 149
Tabel	2.170	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan di Kab. Manggarai Tahun 2005-2010.....	2 – 151
Tabel	2.171	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2005 – 2010.....	2 – 152
Tabel	2.172	Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2005 – 2010	2 – 152
Tabel	2.173	Produksi Sayur-sayuran Tahun 2006-2010.....	2 – 153
Tabel	2.174	Produksi Buah-buahan Tahun 2006 – 2010.....	2 – 154
Tabel	2.175	Produksi Tanaman Biofarmaka Tahun 2006 – 2010	2 – 154
Tabel	2.176	Realisasi Penyaluran Pupuk Tahun 2006 – 2010	2 – 155
Tabel	2.177	Kebutuhan Benih Padi Sawah, Padi Gogo, Jagung, Kedelai dan Kacang Hijau Tahun 2008 – 2010 di Kabupaten Manggarai.....	2 – 155
Tabel	2.178	Perkembangan Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010	2 – 155
Tabel	2.179	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan	2 – 156
Tabel	2.180	Perkembangan Produktivitas Rata-rata Komoditi Perkebunan	2 – 157

Tabel	2.181	Pengembangan Pola Budidaya Pertanian / Perkebunan.....	2 – 158
Tabel	2.182	Pengendalian Hama Terpadu	2 – 158
Tabel	2.183	Penerapan Teknologi Perkebunan	2 – 159
Tabel	2.184	Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kab. Manggarai Tahun 2005 – 2010.....	2 – 160
Tabel	2.185	Perkembangan Alat Tangkap di Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010	2 – 160
Tabel	2.186	Perkembangan Produksi Ikan Air Tawar di Kab. Manggarai Tahun 2005-2010.....	2 – 161
Tabel	2.187	Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010.....	2 – 162
Tabel	2.188	Perkembangan antarpulau Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010.....	2 – 162
Tabel	2.189	Data Penyebaran Ternak Bantuan Pemerintah.....	2 – 162
Tabel	2.190	Data Pemotongan Ternak (Rph Ruteng).....	2 – 163
Tabel	2.191	Data Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan (2005 s/d 2010)	2 – 163
Tabel	2.192	Data Anggota Kelompok Penerima Ternak Bantuan Pemerintah	2 – 163
Tabel	2.193	Penerima Sektor Pertambangan tahun 2005 – 2010.....	2 – 164
Tabel	2.194	Potensi pertambangan , mineral dan batuan.....	2 – 165
Tabel	2.195	Realisasi Ekspor Mangan tahun 2007-2010.....	2 – 166
Tabel	2.196	Penyebaran lokasi bahan galian Golongan C.....	2 – 167
Tabel	2.197	Jumlah Pengelolaan Air Tanah/Air Permukaan (AT/AP).....	2 – 168
Tabel	2.198	Potensi Air Terjun di Kabupaten Manggarai	2 – 168
Tabel	2.199	Potensi Panas Bumi di Kabupaten Manggarai	2 – 169
Tabel	2.200	Hasil Pengeboran Sumur PLTP Ulumbu	2 – 169
Tabel	2.201	Kecepatan Angin dan Perkiraan Besarnya Potensi Listrik yang bisa dibangkitkan	2 – 170
Tabel	2.202	Realisasi Pemasangan PLTS sampai pada tahun 2010 di Kab. Manggarai	2 – 170
Tabel	2.203	Pelayanan Listrik Perusahaan Negara Ranting Ruteng	2 – 171
Tabel	2.204	Data Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2005-2010.....	2 – 172
Tabel	2.205	Perkembangan Perusahaan Perdagangan, Penyerapan Tenaga kerja dan pedagang non formal /eceran/asongan di Kab. Manggarai Tahun 2006-2010.....	2 – 173
Tabel	2.206	Jumlah Unit Usaha di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010	2 – 173
Tabel	2.207	Luas Kawasan Hutan di Kab. Manggarai	2 – 174
Tabel	2.208	Luas Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan.....	2 – 175
Tabel	2.209	Luas Lahan Kritis di luar Kawasan Hutan.....	2 – 175
Tabel	2.210	Rekapitulasi Perkembangan Luas Lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	2 – 175
Tabel	2.211	Rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan.....	2 – 176
Tabel	2.212	Rehabilitasi Lahan Kritis di luar kawasan hutan.....	2 – 176

Tabel	2.213	Rekapitulasi Rehabilitasi Lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan.....	2 – 177
Tabel	2.214	Prosentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kab. Manggarai atas dasar harga konstan Tahun 2000 (Dalam Ribuan Rp)	2 – 178
Tabel	2.215	Prosentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kab. Manggarai atas dasar Harga Berlaku (dalam ribuan rp)	2 – 179
Tabel	2.216	Angka Konsumsi RT Per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2005 s.d 2006.....	2 – 180
Tabel	2.217	Angka Konsumsi RT Per kapita Menurut Kecamatan Tahun 2005 - 2009	2 – 180
Tabel	2.218	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2005 s.d 2009 Kabupaten Manggarai	2 – 181
Tabel	2.219	Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2005 s.d 2009 Kab. Manggarai	2 – 183
Tabel	2.220	Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2005 s.d 2009 Kab. Manggarai.....	2 – 183
Tabel	2.221	Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2009 Menurut Kecamatan Kabupaten Manggarai.....	2 – 183
Tabel	2.222	Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2005-2009 Kab. Manggarai.....	2 – 184
Tabel	2.223	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai	2 – 185
Tabel	3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 s.d Tahun 2010 Kabupaten Manggarai	3 – 3
Tabel	3.2	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2006-2010.....	3 – 9
Tabel	3.3	Struktur Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Berdasarkan Penerima Manfaat	3 – 10
Tabel	3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2006-2010	3 – 11
Tabel	3.5	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Manggarai.....	3 – 14
Tabel	3.6	Ringkasan Perkembangan NERACA DAERAH 2006-2008.....	3 – 17
Tabel	3.7	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Manggarai Tahun 2008 – 2010.....	3 – 19
Tabel	3.8	Analisis Proporsi Belanja Kabupaten Manggarai.....	3 – 20
Tabel	3.9	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manggarai	3 – 21
Tabel	3.10	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manggarai.....	3 – 22
Tabel	3.11	Realisasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Manggarai	3 – 23
Tabel	3.12	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kab.Manggarai	3 – 24
Tabel	3.13	Proyeksi Pendapatan, belanja dan SILPA Kabupaten Manggarai 2012 – 2015.....	3 – 26
Tabel	3.14	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Kabupaten Manggarai.....	3 – 28
Tabel	3.15	Rencana Pembangunan kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai.....	3 – 29

Tabel	8.1	Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	8 – 2
Table	9.1	Penetapan Indikator kinerja Daerah	9 - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai 2011- 2015 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada 03 Juni 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen strategis dari langkah awal untuk merealisasi janji-janji yang telah disampaikan kepada publik pada saat pelaksanaan kampanye PEMILUKADA.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Penyusunan RPJMD dilakukan sesuai prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah (pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah) meliputi:

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 – 2015 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2.
- 2) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

- Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 - 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 - 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
 - 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 - 17) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 ;
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
 - 21) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M Ppn/04/2010 dan Nomor Pmk 95/Pmk 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2011-2015;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025;

1.3. Hubungan antar Dokumen

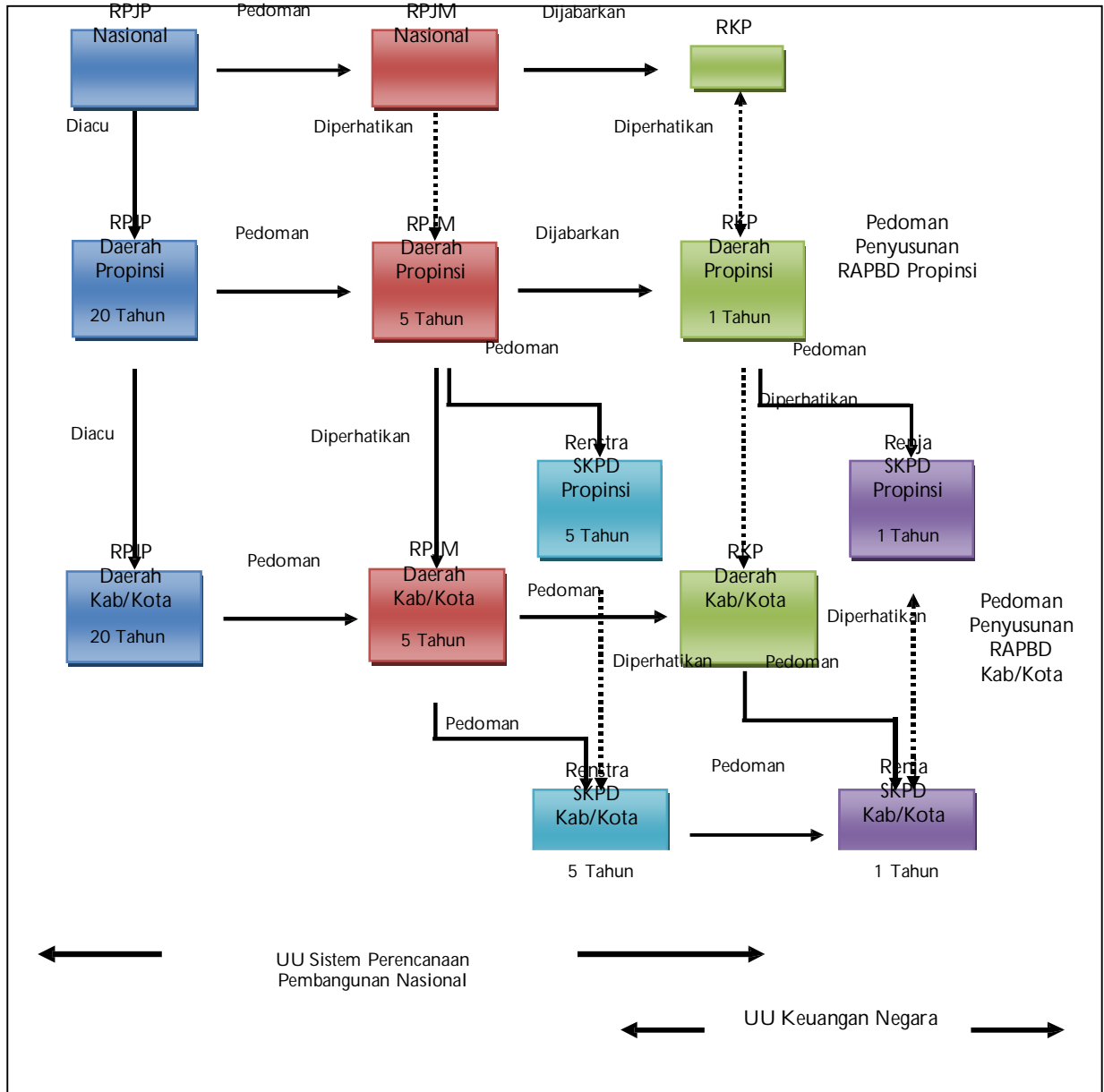
Dalam kaitan dengan **sistem perencanaan pembangunan** sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang No. 25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011-2015 merupakan satu kesatuan dari RPJP Nasional, RPJM Nasional dan RPJP Provinsi, RPJMD Provinsi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Kabupaten Manggarai 2005-2025. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah ini selanjutnya menjadi acuan bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya - selama periode perencanaan - akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Manggarai, yang dari keberadaan RKPD Kabupaten Manggarai tersebut, selanjutnya, akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD

Selanjutnya, dalam kaitan dengan **sistem keuangan** sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJM Daerah Kabupaten kedalam RKPD Kabupaten Manggarai untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Manggarai

Diagram hubungan antara Dokumen RPJM Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011-2015 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut ini :

Diagram
1.1.

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU No. 25 Tahun
2004



1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Sistematika Penulisan
 - 1.4. Maksud dan Tujuan
 - 1.5. Hubungan RPJM Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- 2.1. Aspek Geografis dan Demografi
 - 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
- 3.1. Perkembangan Keuangan Daerah
 - 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.3. Kerangka Pendanaan
- BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**
- 4.1. Permasalahan Pembangunan
 - 4.2. Isu Strategis
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
- 5.1. Visi
 - 5.2. Misi
 - 5.3. Tujuan dan Sasaran
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
- BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**
- BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**
- 9.1 Program Transisi
 - 9.2 Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011-2015 adalah:

- a. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- b. memberikan arah pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan;
- c. terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Manggarai;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. terlaksananya sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah;

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011-2015 adalah :

- a. memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. menjadi pedoman bagi semua dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) SKPD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun;
- c. sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Manggarai yaitu 1.669,42 Km² atau 166.942 Ha. Secara administratif Kabupaten Manggarai dibagi menjadi 9 Kecamatan, 132 Desa dan 17 Kelurahan dengan pusat pemerintahan di Kota Ruteng Kecamatan Langke Rembong dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

-  Sebelah Barat : Kabupaten Manggarai Barat;
-  Sebelah Utara : Laut Flores;
-  Sebelah Timur : Kabupaten Manggarai Timur;
-  Sebelah Selatan : Laut Sawu.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

1). Posisi Astronomis

Secara astronomis wilayah Kabupaten Manggarai terletak diantara 8°14'27,32" LS - 8°54'57,17" 0 LS dan 120°13'41,34" BT-120°32'47,22" BT (data peta rupa bumi Indonesia),

2) Posisi Geostrategic

Kabupaten Manggarai terletak di Pulau Flores bagian Barat yang diapiti oleh 2 Kabupaten hasil Pemekaran yakni Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur sehingga potensial untuk menjadi pusat jasa dan sumber energi listrik dengan beroperasinya PLTP Ulumbu dan potensi di bidang pertanian dan perkebunan di Pulau Flores Bagian Barat.

2.1.1.3. Topografi

Komposisi ketinggian wilayah Kabupaten Manggarai dari permukaan laut yakni:

- a. 0 – 100 m dpl : 28.512 Ha (17,079%)
- b. 100 – 500 dpl : 64.362 Ha (38,553%)
- c. 500 – 1.000 dpl : 56.528 Ha (33,861%)
- d. > 1.000 m dpl : 17.540 Ha (10,507%)

Kemiringan Tanah

- a. 0 – 2° : 5.621 Ha (3,367%)
- b. 2 - 15° : 18.732 Ha (11,220%)
- c. 15 – 40° : 52.986 Ha (31,739%)
- d. > 40° : 89.603 Ha (53,673%)

2.1.1.4. Geologi

Komposisi jenis tanah di Kabupaten Manggarai terdiri dari :

- a. Latosol : 53,357 km² (31,96%)
- b. Mediterian : 60,984 km² (36,53%)
- c. Litosol : 52,601 km² (31,51%)

2.1.1.5. Klimatologi

Secara umum Kabupaten Manggarai mengenal 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti dengan jumlah curah hujan rata-rata 2.440,9 mm. Rata-rata bulan basah setiap tahun yakni 7 (tujuh) bulan.

Rata-Rata Kelembaban Udara yakni:

Januari	: 91%	Mei	: 85%	September	: 81 %
Pebruari	: 94%	Juni	: 81%	Oktober	: 82 %
Maret	: 87%	Juli	: 78 %	Nopember	: 87 %
April	: 85%	Agustus	: 84 %	Desember	: 89%

Arah Kecepatan Angin

❑ Januari	: Barat Laut/15 knots	Juli	: Tenggara/ 15 knots
❑ Pebruari	: Barat Laut/30 knots	Agustus	: Barat / 11 knots
❑ Maret	: Barat Daya/25 knots	September	: Timur/ 15 knots
❑ April	: Barat Tenggara/20 knots	Oktober	: Barat / 15 knots
❑ Mei	: Barat /12 knots	Nopember	: Utara / 15 knots
❑ Juni	: Timur Laut/19 knots	Desember	: Barat / 30 knots

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Kawasan pemanfaatan di wilayah Kabupaten Manggarai merupakan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi. Pada wilayah pesisir dan laut terdapat berbagai kegiatan yang memanfaatkan potensi sumberdaya tersebut, diantaranya untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, industri kelautan dan lainnya.

Kondisi kawasan lindung di pesisir Kabupaten Manggarai pada saat ini dijadikan areal tambak oleh masyarakat, sehingga perlu diatur dalam pembatasan konversi hutan bakau agar kelestarian sumberdaya tetap terjaga.

A. Kawasan Budidaya

kawasan budidaya mencakup pemanfaatan kawasan budidaya darat dan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan kelautan.

Pemanfaatan Kawasan Budidaya

Pengembangan pemanfaatan ruang di kawasan budidaya bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung lingkungan Kabupaten Manggarai, menciptakan penyerapan lapangan pekerjaan, terciptanya keserasian dengan rencana struktur tata ruang yang dikembangkan.

Pemanfaatan ruang kawasan budidaya darat meliputi :

1. Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), yang terbagi dalam :
 - a. Kawasan hutan produksi tetap
 - b. Kawasan hutan produksi terbatas
 - c. Hutan produksi yang dapat dikonversi
2. Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), yang terbagi dalam :
 - a. Pertanian
 - b. Perkebunan

- c. Perikanan
- d. Permukiman

3. Kawasan Budidaya Non Pertanian

Kawasan Pertambangan.

Kawasan pertambangan diarahkan berdasarkan hasil explorasi/penelitian dari Dinas Pertambangan Kabupaten Manggarai bahwa potensi kandungan mineral yang ada terdiri dari **zeolit** (Desa Watu Baur, Desa Rura Kecamatan Reok), **silika** (Desa Pong Leko Kecamatan Ruteng), **Tras** (Desa Longko Kecamatan Langke Rembong), **feldspar** (Desa Ruis Kecamatan Reok), **Sirtu** (Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok), **emas** (Desa Nggalak, Desa Kajong, Desa Lante Kecamatan Reok, Desa Wae Renca Kecamatan Cibal) , **timah** (Desa Paka Kecamatan Satar Mese, Potensi **Geothermal** (Desa Lungar /Ulumbu Kecamatan Satar Mese) siap dikembangkan.

Alokasi kawasan budidaya dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1.
Kawasan Budidaya di Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Kawasan Budidaya Non Pertanian (Ha)	Kawasan Budidaya Pertanian dan Hutan Produksi (Ha)					Jumlah
			TPLB	TPLK	TTB	HPT	HP	
1.	Reok	819	3.610	-	1.122	-	17.625	23.177
2.	Cibal	1.482	729	-	4.540	-	-	6.751
3.	Wae Rii	1.328	726	-	4.542	-	-	6.596
4.	Langke Rembong	2.220	1.602	-	2.098	-	-	5.920
5.	Ruteng	2.000	1.332	-	3.394	548	-	7.274
6.	Rahong Utara	1.000	-	-	4.042	1.167	-	6.209
7.	Lelak	761	-	-	1.100	655	-	2.516
8.	Satar Mese	1.455	4.663	3.483	2.030	3.554	-	15.185
9.	Satar Mese Barat	1.077	4.852	4.516	1.043	6.423	-	17.912
	Jumlah	12.142	17.514	7.999	23.911	12.347	17.625	91.540

Sumber : RTRW Kabupaten Manggarai

B. Kawasan Pariwisata

a. Obyek Wisata Budaya yang Potensial

Tabel 2.2. Obyek wisata budaya yang potensial

No	Nama Obyek	Daya tarik
1.	Kampung Ruteng Pu'u	Kampung Tua Dengan Halaman Bundar Yang Di Kelilingi Batu Tersusun Rapi.
2	Liang Bua	Gua tempat Fosil Homo Floresiensis, Gajah Kerdil, Kadal Raksasa dan berbagai Artefak, serta terdapat Stalagtit dan Stalagmit
3	Compang Cibal	Kampung Tradisional dengan tempat persembahan bagi para leluhur pada pelataran
4	Kampung Welo	Pusat Kerajaan Manggarai pertama, terdapat Niang, meriam kuno dan tambur unik "Loke Nggerang" terbuat dari kulit seorang gadis
5	Kampung Todo	Benteng pertahanan perang dan meriam kuno
6	Kampung Pongkor	Kampung tua, rumah adat dan mata air panas di lembah indah di kelilingi pegunungan
7	Wae Rebo	Rumah adat tempat tinggal Raja Baroek (Raja Wunut)
8	Mbaru Wunut	Rumah adat tempat tinggal Raja Baroek (Raja Wunut)
9	Geraja St. Yosef Ruteng	Bangunan tua yang eksotis dan artistik
10	Makam Motang Rua	Pemakaman pahlawan Manggarai <i>Guru Amenuampung Rombo Pongkor "Motang Rua", di Beo Kina</i>

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Tahun 2010

b. Obyek Wisata Alam yang Potensial

Tabel 2.3. Obyek wisata alam yang potensial

No	Nama Obyek	Daya tarik
1.	Torong Besi	Panorama alam pantai yang indah dan gua Maria tempat ziarah umat Katolik
2	Hutan Ine Mbele	Hutan lindung di pinggir pantai di dalamnya terdapat kera, lebah madu dan ribuan kalong.
3	Golo Curu	Bukit indah di utara kota Ruteng Tempat Patung Bunda Maria di tahtakan
4	Cunca Lega	Air terjun tertinggi Kabupaten Manggarai di Rahong Utara
5	Cara	Bentuk khas pembagian tanah komunal di Manggarai yang berbentuk sarang laba-laba
6	Poco Ranaka	Gunung Tertinggi di NTT dengan panorama alam yang indah
7	Liang Woja	Gua besar dengan stalagtit dan stalagmit di Desa Barang Kecamatan Cibal
8	Pantai Ketebe	Pantai berpasir putih dengan air jernih dan trumbu karang di Desa Robek Kecamatan Reok
9	Tengku Romot (budaya)	Pantai yang indah dengan pasir halus di Kelurahan Wangkung Kecamatan Reok
10	Sengari	Meriam kuno peninggalan zaman Kerajaan Goa di Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok

11	Pulau Mules	Pulau dengan padang rumput yang luas, di dalamnya terdapat rusa liar di desa Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat
12	Ulumbu	Sumber mata air panas dan gas alam terbesar di NTT, di Desa Wewo Kecamatan Satar Mese.
13	Ine Damba	Periuk besar dari tanah liat di Desa Ceka Luju Kecamatan Satar Mese Barat
14	Kawasan Poco Leok	<ul style="list-style-type: none"> • Pangkal emas, lopa emas, dan kerangka kera di Mocok • Meriam kuno dan mata air panas di Lungar Kecamatan Satar Mese
15	Pantai pasir putih	Pasir putih berbentangan luas nan indah di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satar Mese Barat

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Tahun 2010

C. Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Kawasan tersebut adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama memberikan kesempatan pada daerah tersebut untuk berkembang menjadi daerah perkotaan dengan daerah pemukiman berkonsentrasi tinggi yang ditunjang oleh kegiatan pembangunan perkotaan yang pesat.

Adapun permukiman perdesaan, karakteristiknya membentuk pola yang menyebar dalam setiap kecamatan dengan kelompok permukiman yang menyebar pula dalam setiap desa. Keberadaan permukiman perdesaan ini dengan masing-masing pusat-pusat desanya tidak begitu signifikan luasnya dalam pola ruang eksisting kabupaten Manggarai.

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Memperhatikan topografi Kabupaten Manggarai maka kabupaten Manggarai sangat rentan terhadap bencana berikut wilayah Kabupaten Manggarai yang rentan terhadap bencana dan jenis bencana:

a. *Gempa Bumi*

Seluruh wilayah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari 9 Kecamatan, 132 Desa dan 17 Kelurahan merupakan daerah potensi rawan bencana gempa bumi karena kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik.

b. Gunung Api.

Kabupaten Manggarai memiliki sebuah gunung api yang masih aktif yaitu : Gunung anak gunung Ranaka. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1987. berdasarkan data yang diperoleh dari Pos Pemantauan Gunung api, Gunung anak Ranaka di Lando Kab. Manggarai selama bulan april 2010 dari pagi hingga malam hari Gunung kebanyakan tertutup kabut 0I-0III, terkadang pada pagi dan siang hari gunung tampak jelas, disaat tampak jelas dari pos terlihat asap putih tipis, tekanan gas lemah, tinggi asap antara 0- 15 m diatas puncak . Hal ini menunjukkan bahwa gunung api anak ranaka dinyatakan aktif normal.

Kondisi ini menunjukan bahwa Kabupaten Manggarai masih terdapat gunung api yang perlu diantisipasi khususnya pada desa-desa sekitarnya yaitu: Kecamatan Wae Rii yaitu desa satar nkeling, desa golo cadon, desa golo mendo, desa wae rii dan desa ranaka.

c. Tsunami / Gelombang Pasang.

Daerah / wilayah kabupaten Manggarai yang berada di pesisir pantai merupakan daerah/wilayah potensi rawan bencana tsunami yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.4. Lokasi Daerah Potensi Tsunami di Kabupaten Manggarai

Kecamatan	Desa / Kelurahan
Kecamatan Reok	Kelurahan Reok, Salama, Baru, Mata Air, Desa Lemarang, Wangkung, Robek dan Para Lando.
Kecamatan Satar Mese Barat	Desa Borik, Satar Ruwuk, Nuca Molas, Satar Lenda, Satar Luju, Ceka Luju, Terong dan Hilihintir
Kecamatan Satar Mese	Tal, Paka, Legu, Langgo, Koak dan Tado

Sumber data : BPBD Kab. Manggarai Tahun 2010

d. Banjir

Ada beberapa wilayah di Kabupaten Manggarai yang berpotensi banjir seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Desa/Kelurahan Rawan Banjir di Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Sungai	Desa/Kelurahan
1	Reok	Sungai Wae Kuli	Desa Toe, Desa Lemarang dan Desa Para Lando
		Sungai Wae Mbeak	Desa Bajak, Desa Watu Tango dan Desa Ruis
		Sungai Wae Kaap	Sebagian Desa Ruis, Kelurahan Wangkung dan Mata Air
		Sungai Wae Pesi	Bajak Reo, Mata Air, Baru, Salama
2	Cibal	Sungai Wae Renca	Wae Renca dan Wae Renca
		Sungai Wae Naong	Pinggang Bea Mese, Rado dan Ds. Riung

No	Kecamatan	Sungai	Desa/Kelurahan
3	Rahong Utara	Sungai Wae Racang	Desa Golo Langkok, Liang Bua dan Manong
		Sungai Wae Rii	Dimpong, Buar, Bangka Ruang dan Manong
		Sungai Wae Lega	Tengku Lese, Buar dan Bangka Ruang.
4	Satar Mese Barat	Sungai Wae Mese	Hilihintir, Terong, Popo dan Golo Ropong
5	Satar Mese	Sungai Wae Koe	Paka dan Legu, Jaong, Golo Lambo, Ngkaer, Pongkor dan Tal
6	Kec. Langke Rembong	Sungai Wae Garit	Kelurahan Golo Dukal dan Kelurahan Wali
7	Kec. Ruteng	Wae Palo, Wae Rajong, Wae Ireng dan Wae Kuncce	Desa Kakor, Benteng Kuwu, Belang Turi, Meler dan Pong Leko
8	Kec. Wae Rii	Wae Mulu, Wae Racang dan Wae Kokak	Desa Lalong, Golo Wua, Golo Watu, Ranggi, Wae Mulu Golo Cador, Compang Ndehes, Golo Cual, desa Bere dan desa Poco

Sumber data : BPBD Kab. Manggarai Tahun 2010

e. Tanah Longsor

Intensitas curah hujan yang melampaui batas normal menyebabkan wilayah Kabupaten Manggarai sering Mengalami longsor yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda. Daerah potensi bencana tanah longsor berdasarkan hasil pemetaan bersama pada Lokakarya Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Hotel Dahlia yang dilakukan oleh Fird, YBDM dan unsur terkait Pemerintah Kabupaten Manggarai yang diundang ikut serta dalam kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6. Potensi daerah longsor

Sebaran Wilayah	Desa	Waktu Kejadian	Dampak
Kec. Cibal	Gapong, Perak, Riung, Langkas, Bea Mese, Timbu, Lenda, Nenu, Compang Cibal, Rado, Bere, Golo, Welu, Golo Ncuang dan Wae Codi	2007	- Terjadi Korban jiwa meninggal dunia dan hilang sebanyak 29 orang dan puluhan lainnya cedera berat dan ringan. - Jalan Raya yang menghubungkan transportasi Ruteng-Reo putus, sarana air minum bersih rusak, lahan pertanian rusak, rumah tinggal warga tertimbun dan rusak, tanah terbelah.
Kecamatan Ruteng	Beo Rahong, Golo Worok, Poco Likang dan Belang Turi	2007	Jalan raya terputus, sarana air minum bersih rusak, rumah ada yang hancur dan tertimbun longsor, tanaman perkebunan rusak.
Kecamatan Rahong Utara	Golo Langkok, Dimpong, Compang Dari, Manong, Pong Lenggong dan Buar	2007	Jalan Raya terputus, sarana air minum bersih rusak, rumah ada yang hancur dan tertimbun longsor, tanaman perkebunan rusak.
Wae Rii	Desa Ranaka, Compang Ndehes	2007	Desa Ranak terputusnya jalan negara lin tas Flores dan Desa Ndehes terputusnya jalur transportasi Ruteng – Reok.

Sebaran Wilayah	Desa	Waktu Kejadian	Dampak
Langke Rembong	Kelurahan Wali	2007	Jalur transportasi jalan negara menuju Manggarai Barat terputus di Wae Garit
Satar Mese Timur	Wilayah Golo Lusang	2008	Transportasi Ruteng-Iteng terputus

Sumber data : BPBD Kab. Manggarai Tahun 2010

f. Kebakaran

Ancaman kebakaran di Kabupaten Manggarai mengenal 2 musim yaitu musim hujan 7 bulan dan musim kemarau 5 bulan. Pada musim kemarau kejadian kebakaran rumah penduduk dan kebakaran hutan cukup besar

g. Kekeringan

Ancaman kekeringan kerap kali menjadi langganan setiap tahun bagi masyarakat Kabupaten Manggarai. Dampak langsung dari ancaman kekeringan adalah Gagal tanam, gagal panen dan Kebakaran.

Wilayah Kecamatan yang sering dilanda kekeringan adalah Kecamatan Satar Mese, Kec. Satar Mese Barat, Kec. Reok dan Kecamatan Cibai bagian Utara.

h. Bencana Sosial

Bencana sosial merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Manggarai terutama wabah penyakit dan masalah konflik social perebutan batas tanah dan masalah tanah baik orang perorangan maupun kelompok.

2.1.3. Demografi

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduknya yakni 292.037 jiwa dan 59.982 KK, dengan tingkat Kepadatan penduduk sebesar 175 jiwa / Km².

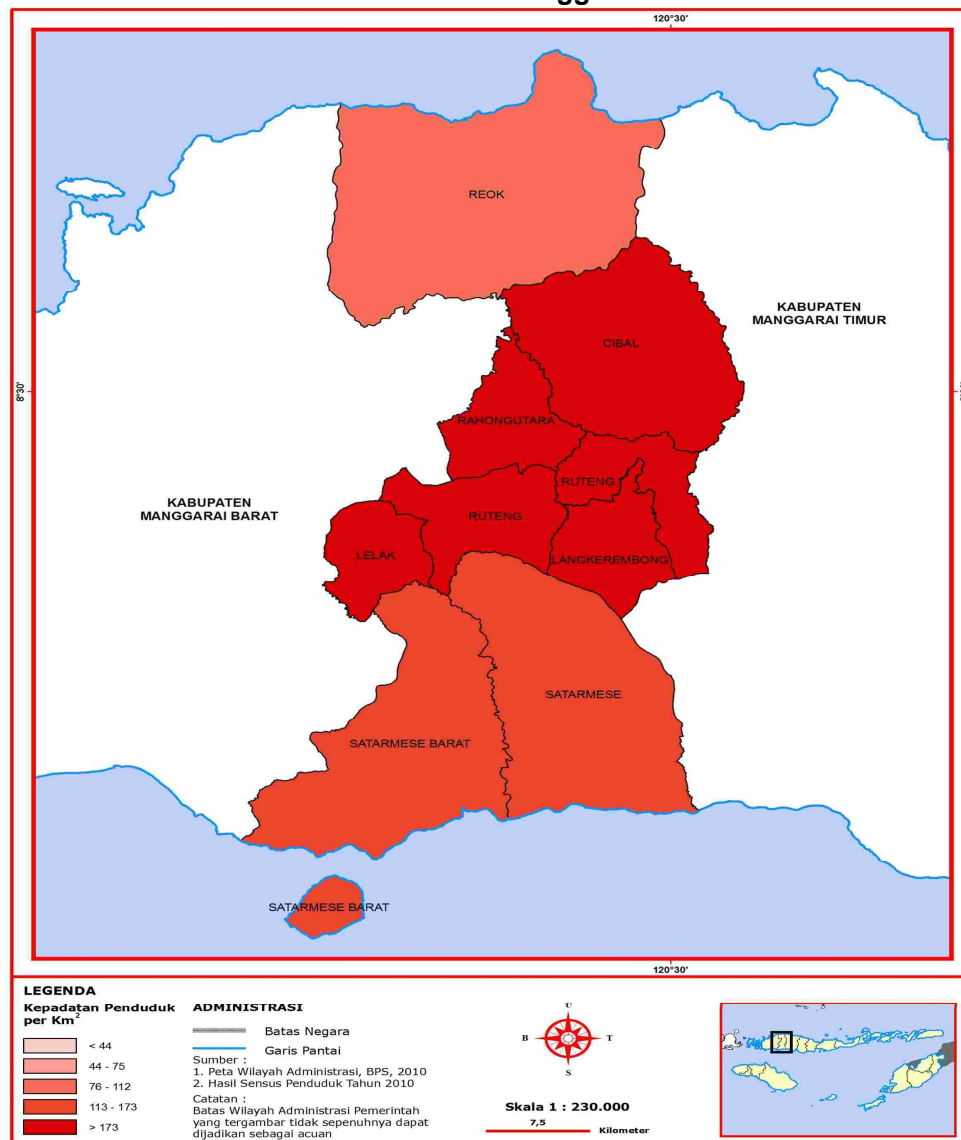
Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Kecamatan	Penduduk			Sex ratio
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
1	2	3	4	5
Satar Mese	14.904	15.543	30.447	96
Satar Mese Barat	14.483	15.352	29.835	94
Langke Rembong	32.342	33.886	66.228	95
Ruteng	19.142	19.808	38.950	97
Wae Rii	12.803	12.790	25.593	100

Kecamatan	Penduduk			Sex ratio
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
1	2	3	4	5
Lelak	5.354	5.465	10.819	98
Rahong Utara	10.110	10.568	20.678	96
Cibal	18.422	19.355	37.777	95
Reok	16.0127	15.698	31.710	102
Total Manggarai	143.572	148.465	292.037	97

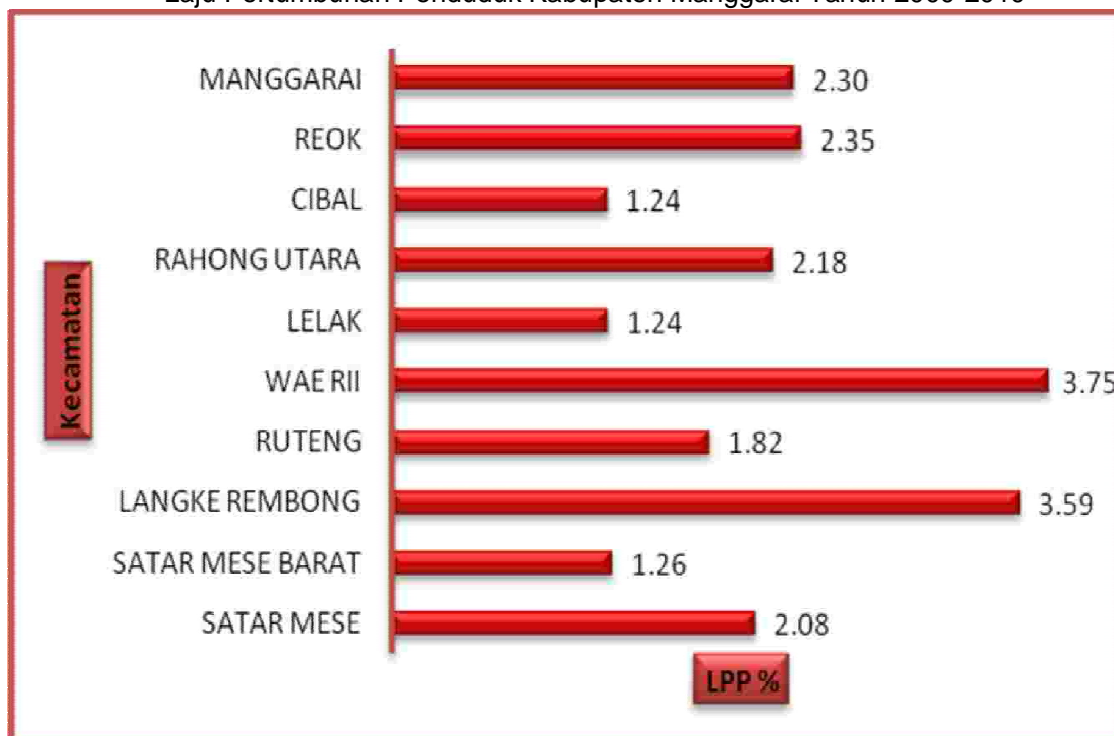
Sumber Data : BPS Kabupaten Manggarai (Sensus Penduduk 2010)

Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Manggarai



Sumber Data : BPS Kabupaten Manggarai (Sensus Penduduk 2010)

Diagram 2.1.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Manggarai Tahun 2000-2010



Sumber Data : BPS Kabupaten Manggarai (Sensus Penduduk 2010)

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kondisi umum daerah ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, salah satu aksentuasinya terlihat pada kinerja pembangunan daerah bidang ekonomi sebagai perwujudan implementasi misi pertama RPJMD 2005 – 2010, yaitu agenda meningkatkan perekonomian masyarakat Manggarai. Untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, diindikasikan oleh capaian kinerja indikator ekonomi makro sesuai sasaran, strategi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan daerah di bidang ekonomi. Variabel pengukur capaian kinerja indikator ekonomi itu, meliputi : pertumbuhan ekonomi, Laju inflasi, Pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan dan pendapatan regional (antarkecamatan).

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten, yang bertautan dengan aspek kesejahteraan masyarakat Manggarai, tabulasi dan diagram di bawah ini merupakan visualisasi yang representatif atas kondisi perekonomian daerah.

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian kabupaten Manggarai pada lima tahun terakhir berdasarkan data PDRB atas harga berlaku dan harga konstan tahun 2005 – 2009 mengalami pertumbuhan positif. PDRB kabupaten Manggarai pada tahun 2005 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp.657,904,478,728,- mengalami kenaikan menjadi Rp.1,074,681,959,833,- pada tahun 2009 atau pertumbuhan rata-rata 12,84 persen. Sedangkan berdasarkan harga konstan juga mengalami kenaikan dari Rp.454,741,977,822,- menjadi Rp.585,914,824,726,- atau pertumbuhan rata-rata sebesar 5.96 persen mendekati target pertumbuhan rerata RPJMD 2005 – 2010 sebesar 6 persen.

Tabulasi dan diagram hubungan nilai total PDRB dari 9 sektor dan 9 kecamatan atas dasar harga berlaku selama lima tahun sebesar Rp.4.152.976.132.000,- dan harga konstan sebesar Rp.2.748.301.878.000,- serta pertumbuhan ekonominya terlihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

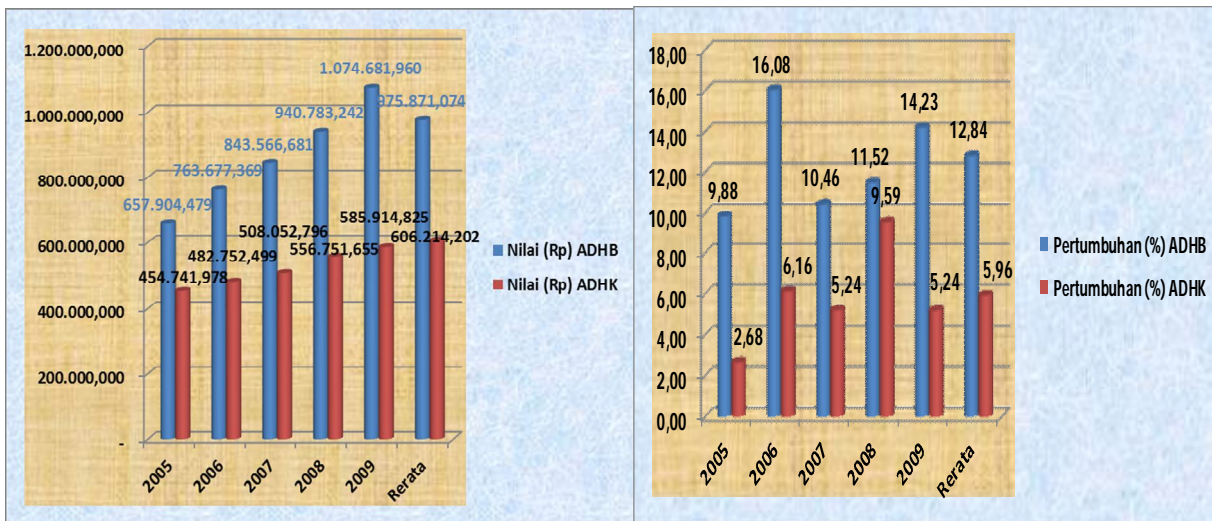
Tabel 2.8.
PDRB Dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Manggarai
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2005-2009 (Rp.000)

Tahun	ADHB		ADHK	
	Nilai (Ribu)	Pertumbuhan	Nilai (Ribu)	Pertumbuhan
		(%)		(%)
2005	657.904,479	9,88	454.741,978	2,68
2006	763.677,369	16,08	482.752,499	6,16
2007	843.566,681	10,46	508.052,796	5,24
2008	940.783,242	11,52	556.751,655	9,59
2009	1.074.681,960	14,23	585.914,825	5,24
Total	4.879.355,369	62,18	3.031.071,010	28,91
Rerata	975.871,074	12,84	606.214,202	5,96

Sumber Data : BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Diagram 2.2.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan



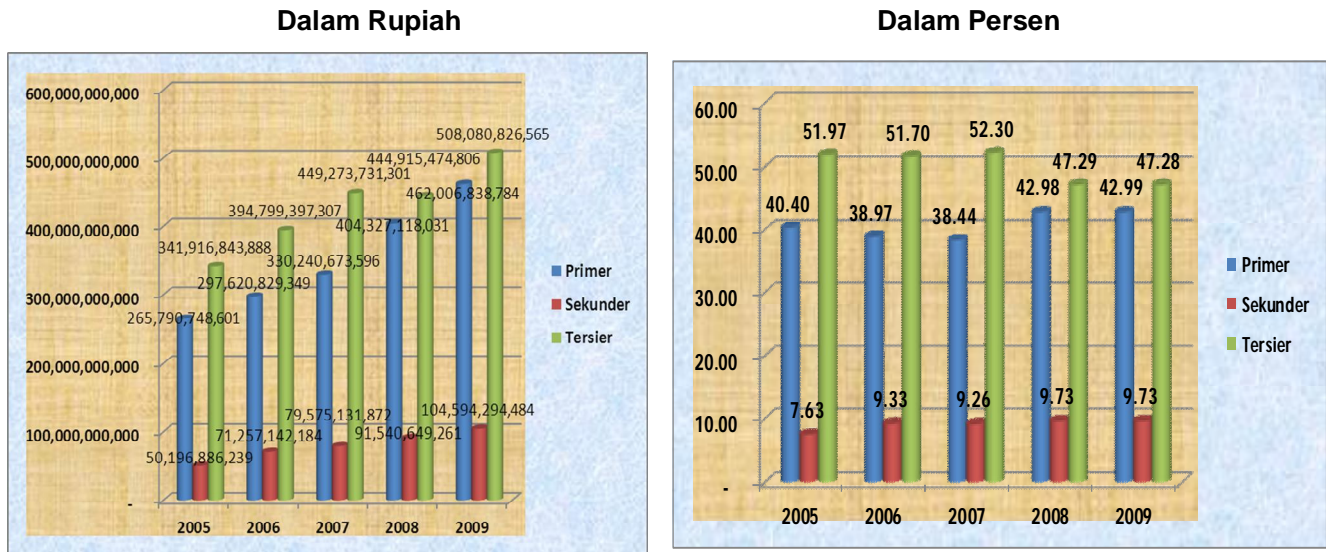
Bila 9 sektor perkonomian daerah diintegrasikan ke dalam 3 sektor menurut lapangan usaha utama, Visualisasi yang representatif terlihat pada tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 2.9.
Kontribusi 3 Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Manggarai
Tahun 2005-2009

Sektor	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Primer	265,790,748,601	297,620,829,349	330,240,673,596	404,327,118,031	462,006,838,784
Sekunder	50,196,886,239	71,257,142,184	79,575,131,872	91,540,649,261	104,594,294,484
Tersier	341,916,843,888	394,799,397,307	449,273,731,301	444,915,474,806	508,080,826,565
PDRB	657,904,478,728	763,677,368,840	859,089,536,768	940,783,242,098	1,074,681,959,833

Sumber Data : BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Diagram 2.3.
Kontribusi 3 Sektor Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009
Kabupaten Manggarai

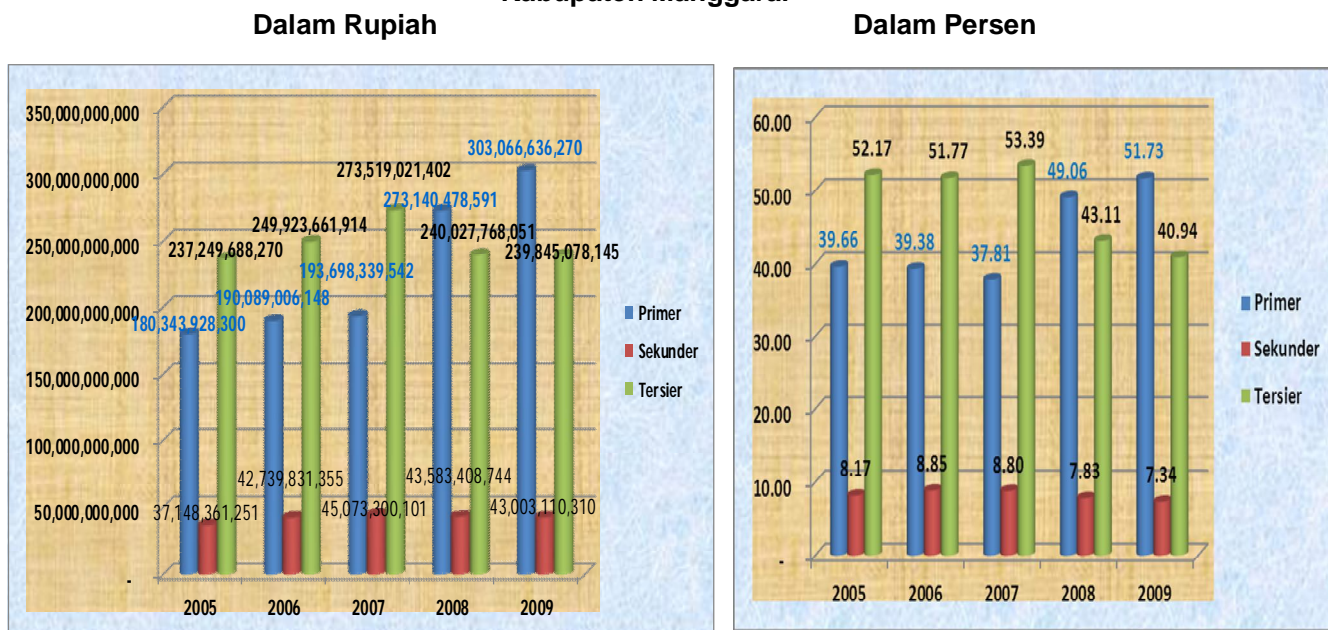


Tabel 2.10.
Kontribusi 3 Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005-2009
Kabupaten Manggarai

Sektor	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Primer	180,343,928,300	190,089,006,148	193,698,339,542	273,140,478,591	303,066,636,270
Sekunder	37,148,361,251	42,739,831,355	45,073,300,101	43,583,408,744	43,003,110,310
Tersier	237,249,688,270	249,923,661,914	273,519,021,402	240,027,768,051	239,845,078,145
PDRB	454,741,977,822	482,752,499,418	512,290,661,045	556,751,655,385	585,914,824,726

Sumber Data : BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Diagram 2.4.
Kontribusi 3 Sektor Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005-2009
Kabupaten Manggarai



2.2.2. Laju Pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi

Angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi menunjukkan gambaran riil dari kondisi pembangunan ekonomi. Proporsi antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi selama lima tahun rata-rata laju inflasi lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan angka laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,96 persen, sedangkan laju inflasi 6,33 persen. Angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2005 – 2009 ditunjukkan dengan table di bawah ini.

Tabel 2.11.
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009
Kabupaten Manggarai

Sektor	2005		2006		2007		2008		2009	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Pertanian	5.77	2.40	11.92	5.46	10.82	1.60	11.65	21.49	14.29	11.59
Pertambangan & Penggalian	14.17	7.13	12.93	4.29	13.39	7.60	11.05	-0.45	13.89	-1.58
Industri Pengolahan	-9.57	3.68	13.34	5.62	4.68	4.68	14.52	0.54	14.57	-1.40

Listrik, Gas & Air bersih	16.62	2.04	15.29	5.27	7.50	-0.61	14.42	7.94	14.93	0.86
Konstruksi	13.20	1.62	47.34	17.27	12.53	5.97	11.22	-1.29	14.18	-1.45
Perdagangan, Hotel & Restoran	26.96	5.23	16.19	5.05	11.08	8.50	12.07	-1.22	14.31	-0.50
Pengangkutan & Komunikasi	6.87	4.56	10.86	5.12	8.25	5.89	12.10	2.84	14.19	0.60
Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan	9.79	5.27	15.37	5.58	43.62	32.47	12.16	2.42	14.30	-0.13
Jasa-jasa	10.28	7.68	16.05	5.44	10.73	7.24	10.93	1.78	14.14	-0.05
PDRB	9.88	2.68	16.08	6.16	12.49	6.12	11.52	9.59	14.23	5.24

Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2009

Diagram 2.5.
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009
Kabupaten Manggarai

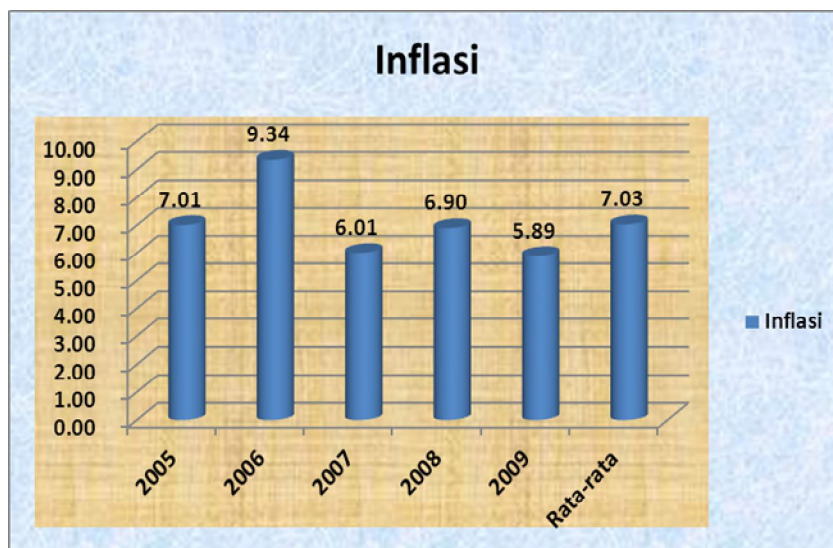


Tabel 2.12
Hasil Analisis Nilai Inflasi Rata-Rata
Tahun 2005 s.d 2010
Kabupaten Manggarai

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Inflasi	7.01	9.34	6.01	6.90	5.89	-	7.03

Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2009

Diagram 2.6.
Hasil Analisis Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai

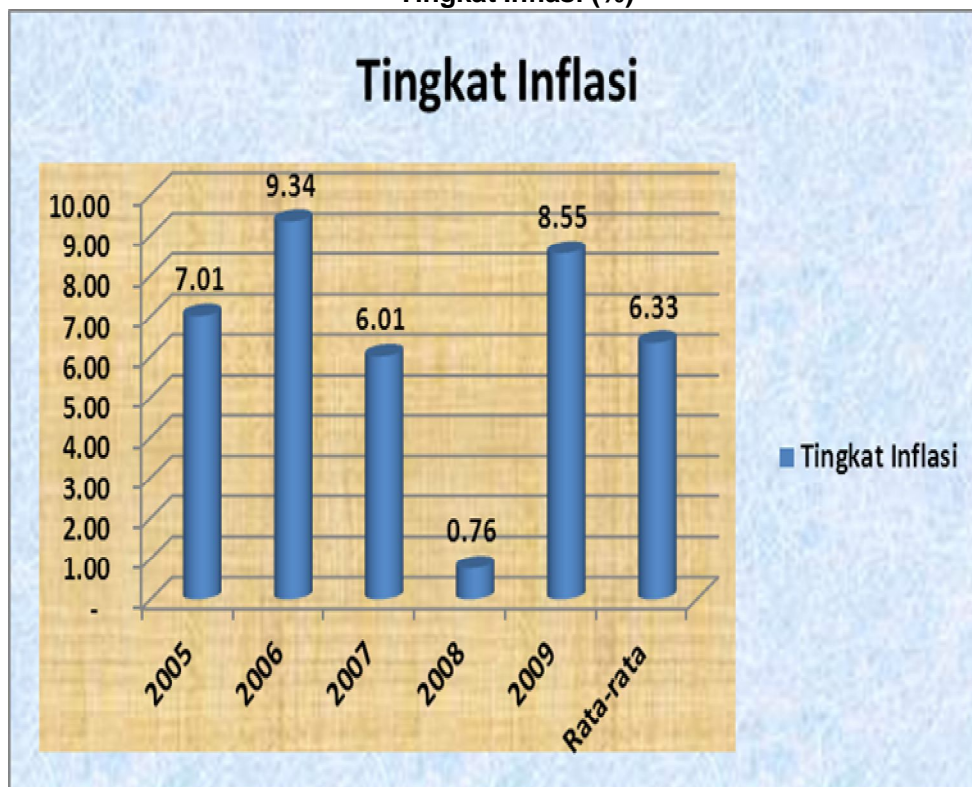


Tabel 2.13.
Laju Inflasi PDRB Kabupaten Manggarai 2005-2010

Tahun	PDRB(hb)	PDRB(hk)	PDRB(IHI)	Tingkat Inflasi (%)
1	2	3	4	5
2005	657,904,478,728	454,741,977,822	145	7.01
2006	763,677,368,840	482,752,499,418	158	9.34
2007	859,089,536,768	512,290,661,045	168	6.01
2008	940,783,242,098	556,751,655,385	169	0.76
2009	1,074,681,959,833	585,914,824,726	183	8.55
Rata-rata				6.33

Sumber Data : BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Diagram 2.7.
Tingkat Inflasi (%)



Tabel 2.14.
Laju Inflasi Sektoral 2005-2010

Sektor	Laju Inflasi Sektoral						Rata-rata Laju Inflasi (%)	Kriteria Inflasi
	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Pertanian	8.37	6.12	2.34	-8.10	2.42	-	2.23	Ringan
Pertambangan & Penggalian	6.57	8.29	-6.76	11.56	15.72	-	7.08	Ringan
Industri Pengolahan	-12.77	7.31	70.64	13.91	16.20	-	9.06	Sedang
Listrik, Gas & Air bersih	14.29	9.52	0.03	6.01	13.95	-	8.76	Ringan
Konstruksi	11.40	25.65	7.95	12.67	15.87	-	14.71	Sedang
Perdagangan, Hotel & Restoran	20.65	10.60	-1.75	13.45	14.88	-	11.57	Sedang
Pengangkutan & Komunikasi	2.21	5.45	11.37	9.01	13.51	-	8.31	Ringan
Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan	4.29	9.28	3.21	9.51	14.45	-	8.15	Ringan
Jasa-jasa	2.42	10.07	8.92	8.99	14.20	-	8.92	Ringan

Sumber Data : BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2010

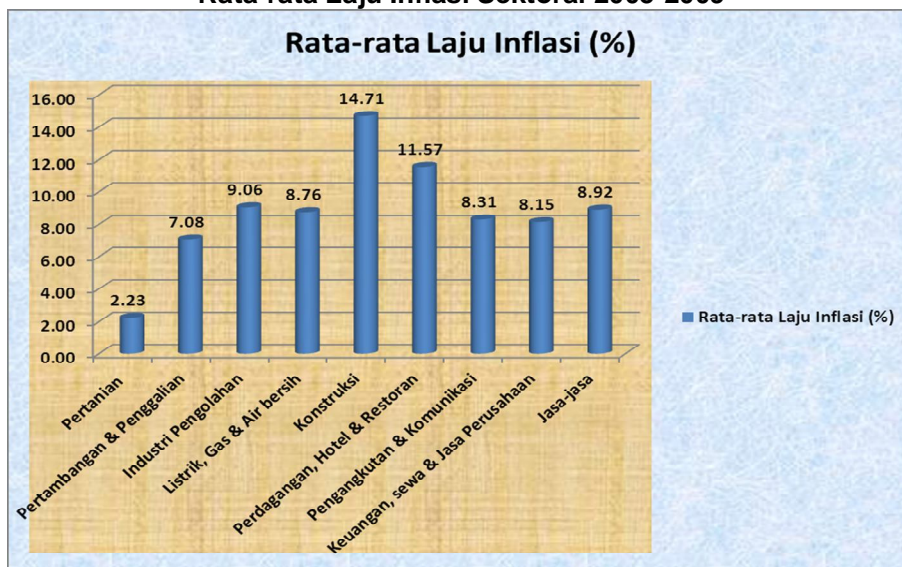
Kriteria inflasi Tahunan:

1. Inflasi ringan: < 10 %, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan

regional/daerah dan membuat orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung maupun investasi

2. Inflasi sedang: 10-30 %,
3. Inflasi berat: 30-100 %,
4. Hiper inflasi: > 100 %, keadaan perekonomian menjadi kacau balau dan perekonomian menjadi lesu, orang menjadi tidak bersemangat bekerja, menabung, mengadakan investasi dan memproduksi karena harga meningkat sangat cepat.

Diagram 2.8.
Rata-rata Laju Inflasi Sektoral 2005-2009



Tabel 2.15.
PDRB Perkapita Tahun 2005 s.d 2009
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Manggarai

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
Nilai PDRB (Rp)	657,904,478,728	763,677,368,840	859,089,536,768	940,783,242,098	1,074,681,959,833
Jumlah penduduk (jiwa)	267,067	272,937	275,214	282,289	294,869
PDRB Perkapita (Rp/jiwa)	2,463,444	2,797,999	3,121,533	3,332,695	3,644,608

Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2009

Tabel 2.16.
PDRB Perkapita Tahun 2005 s.d 2009
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Manggarai

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
Nilai PDRB (Rp)	454,741,977,822	482,752,499,418	512,290,661,045	556,751,655,385	585,914,824,726
Jumlah penduduk (jiwa)	267,067	272,937	275,214	282,289	294,869
PDRB Perkapita (Rp/jiwa)	1,702,726	1,768,732	1,861,427	1,972,275	1,987,034

Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2009

2.2.3. PDRB Per Kapita

Pendapatan Perkapita

Analisis ini dilakukan berdasarkan harga yang berlaku (Current Price) dan Harga Konstan (tetap) atau Konstan Price. Perhitungan menurut Current Price, berguna untuk memberi gambaran mengenai kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity) rata – rata penduduk daerah terhadap barang-barang, dan sebagai bahan perbandingan dalam menunjukkan perbedaan tingkat kemakmuran suatu daerah dalam tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya atau perbandingan dengan daerah lain.

1. Pendapatan perkapita menurut Harga Konstan (Konstan Price) menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran suatu daerah dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh penambahan produksi dan kenaikan harga-harga produksi nasional.
2. Kenaikan pendapatan regional menurut Harga yang berlaku (Current Prices) belum memberikan gambaran yang sempurna tentang perkembangan tingkat kemakmuran yang sebenarnya, sebab kenaikan harga dalam pendapatan perkapita belum dinetralisir.
3. Pertambahan kemakmuran di daerah dicerminkan oleh perkembangan yang sebenarnya dalam produksi nasional. Oleh karena itu, untuk menggambarkan perkembangan kemakmuran masyarakat Manggarai perlu dihitung pendapatan perkapita dengan harga tetap (konstan price), sehingga dipandang mengalami pertambahan kemakmuran jika pendapatan perkapita menurut harga tetap atau pendapatan perkapita rill terus bertambah.

Tabel 2.17.
Pendapatan Regional Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku

No.	Kecamatan	2005	2006	2007	2008	2009	Jumlah	Rata-rata / Kecamatan
		HB	HB	HB	HB	HB	HB	HB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Satar Mese	1,854,537	1,703,760	1,896,925	2,059,177	2,110,796	9,625,195	1,925,039
2	Satar Mese Barat	-	2,162,981	2,399,436	2,633,745	2,670,701	9,866,863	1,973,373
3	Langke Rembong	4,586,054	4,227,709	4,611,591	5,084,730	5,157,924	23,668,008	4,733,602
4	Ruteng	1,865,355	1,938,317	2,128,734	2,271,431	2,303,139	10,506,976	2,101,395
5	Wae Rii	2,104,994	3,475,137	3,861,756	4,286,024	4,342,323	18,070,234	3,614,047
6	Lelak	-	4,775,334	5,221,500	5,557,112	5,636,260	21,190,206	4,238,041
7	Rahong Utara	-	4,851,609	5,310,851	5,674,670	5,764,699	21,601,829	4,320,366
8	Cibal	1,593,014	2,396,149	2,642,520	2,917,438	2,955,745	12,504,866	2,500,973
9	Reok	2,273,063	3,249,814	3,593,978	3,972,842	4,025,209	17,114,906	3,422,981
Perkapita Kab Manggarai		14,277,017	28,780,810	31,667,291	34,457,169	34,966,796	144,149,083	28,829,817
Rata-rata Pendapatan / Kapita		2,379,503	3,197,868	3,518,588	3,828,574	3,885,200	16,016,565	3,203,313

Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2009

Tabel 2.18.
Pendapatan Regional Perkapita Berdasarkan Harga Konstan

No.	Kecamatan	2005	2006	2007	2008	2009	Jumlah	Rata-rata / Kecamatan
		HK	HK	HK	HK	HK	HK	HK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Satar Mese	1,221,498	1,087,766	1,142,456	1,323,471	1,295,101	6,070,292	1,214,058
2	Satar Mese Barat	-	1,380,956	1,445,102	1,462,145	1,406,878	5,695,081	1,139,016
3	Langke Rembong	3,406,364	2,699,182	2,777,412	2,929,394	2,620,781	14,433,133	2,886,627
4	Ruteng	1,137,924	1,237,519	1,282,067	1,402,541	1,412,511	6,472,562	1,294,512
5	Wae Rii	1,017,634	2,218,703	2,325,810	2,747,468	2,510,564	10,820,179	2,164,036
6	Lelak	-	3,048,814	3,144,739	3,436,182	3,499,598	13,129,333	2,625,867
7	Rahong Utara	-	3,097,511	3,198,553	3,501,683	3,510,850	13,308,597	2,661,719
8	Cibal	1,084,471	1,529,822	1,591,504	1,822,336	1,679,357	7,707,490	1,541,498
9	Reok	1,602,489	2,074,845	2,164,536	2,593,376	2,333,808	10,769,054	2,153,811
Jmlh Perkapita Kab Manggarai		9,470,380	18,375,118	19,072,179	21,218,596	20,269,448	88,405,721	17,681,144

Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2009

Tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat manggarai ditinjau dari pendapatan perkapita rata-rata selama lima tahun terlihat pada kolom (9) pada kedua tabel di atas untuk harga berlaku dan harga konstan. Kecamatan yang pendapatan perkapita tertinggi adalah kecamatan Langke Rembong Rp. 4.733.602.000.- jika dibandingkan dengan 8 (delapan) wilayah kecamatan lainnya. demikian juga untuk harga mengungguli kecamatan lainnya

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

A. Pemerataan akses Pendidikan

Indikator Kunci pemerataan akses pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rata – rata lama sekolah, Buta Aksara dan disparitas Gender.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Berikut ini data capaian APK selama lima tahun terakhir

Tabel 2.19.
APK Menurut Tingkat Pendidikan

Tkt.Pendidikan	APK				
	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
1.PAUD					
Jlh Pend.4-6 thn	32386	34958	35762	25753	26550
Jlh Siswa TK	1251	1188	1344	1119	924
APK PAUD	3,9	3,40	3,76	4,35	3,48
2.SD					
Jlh Pend.7-12 thn	69010	86436	88424	44360	45265
Jlh siswa SD	79648	93295	93832	52177	53903
APK 7-12 thn	115	108	113	117,62	119,08
3.SMP					
Jlh Pend.13-15 thn	26738	28746	29407	22701	23164
Jlh Siswa SMP	16865	19494	21895	15158	16242
APK SMP	63,10	67,8	76,90	66,77	70,11
4.SLTA					
Jlh Pend.16-18 thn	27609	28010	28654	20448	20865
Jlh Siswa SLTA	11079	10245	12927	11063	12280
APK SLTA	40,13	44,11	52,07	54,10	58,86
5.PT					
Jlh.Pend.19-24 thn	156735	161582	166580	171732	177044
Jlh mhs		543	1255	1658	3223
APK PT		0,34	0,75	0,97	1,82

Sumber : penduduk dari Dispenduk, siswa dari Dinas PPO Tahun 2010

Dari data tersebut di atas secara keseluruhan APK pada tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Manggarai pada tahun pelajaran 2008/2009 dan 2009/2010 setelah pemekaran dengan kabupaten Manggarai Timur lebih dari 100%. Hal ini terjadi karena siswa/siswi yang sedang sekolah pada jenjang SD terdiri dari berbagai kelompok usia dan kemungkinan adanya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah.APK tingkat SMP setelah pemekaran dengan kabupaten Manggarai Timur pada tahun Pelajaran 2008/2009 dan tahun pelajaran 2009/2010 belum mencapai target APK nasional sebesar 95% pada tahun 2009 yaitu tahun berakhirnya penuntasan Wajib Pendidikan Dasar 9 tahun.

2. Disparitas APK

Disparitas Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Manggarai Tahun 2009/2010

Tabel 2.20.
Disparitas APK Menurut Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2009/2010

No	Kecamatan	APK Tingkat TK	APK Tingkat SD (Termasuk Paket A)	APK Tingkat SMP (Termasuk Paket B)	APK Tingkat SM (Termasuk Paket C)
1	Langke Rembong	26,30	128,04	128,25	231,70
2	Ruteng	1,68	117,06	63,12	50,88
3	Wae Ri'i	0,00	107,03	23,08	0
4	Cibal	2,00	122,65	59,20	29,00
5	Reok	2,73	102,67	70,51	59,68
6	Satar Mese	0,00	130,06	47,22	10,90
7	Satar Mese Barat	0,00	120,10	55,64	16,16
8	Lelak	0,00	128,82	44,19	0
9	Rahong Utara	0,00	121,61	40,47	0
	Rata-rata	5,61	119,08	70,11	58,86

Sumber : Data penduduk Dispenduk Kab. Manggarai 2010, data siswa Dinas PPO Tahun 2010

Disparitas APK antar kecamatan terlihat ada kesenjangan yang cukup besar yaitu dari yang terendah berturut-turut sebagai berikut : Kecamatan Wae Ri'i, Kecamatan Rahong Utara, Kecamatan Lelak, Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, kecamatan Cibal, menyusul kecamatan Cibal dan kecamatan Reok. Untuk itu perluasan akses pendidikan terutama pada jenjang SLTP harus diarahkan pSada beberapa wilayah kecamatan tersebut. Sedangkan pada jenjang SLTA hanya Kecamatan Langke Rembong yang memiliki APK yang melampaui target sedangkan 8 (delapan) kecamatan lain masih harus menjadi perhatian ke depan.

Tingginya APK SMA/MA/SMK/Paket C di Kecamatan Langke Rembong terutama disebabkan oleh banyaknya pilihan lembaga pendidikan yang tersedia (17 sekolah).

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Manggarai relatif mengalami peningkatan sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel.2.21.
Perkembangan APM Kabupaten Manggarai (%)
dari Tahun Pel. 2005/2006 – 2009/2010

Tkt.Pendidikan	APM				
	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
1.PAUD					
Jlh Pend.4-6 thn	32386	34958	35762	25753	26550
Jlh Siswa 4-6 thn	749	1188	832	727	657
APM PAUD	2,31	3,40	2,33	2,96	2,47
2.SD					
Jlh Pend.7-12 thn	83843	86436	88424	44360	45265
Jlh siswa 7-12 thn	70241	80350	78907	44280	45684
APM 7-12 thn	83,78	92,96	89,24	99,82	109,37
3.SMP					
Jlh Pend.13-15 thn	26738	28746	29407	22701	23164
Jlh Siswa SMP	12626	14539	16191	11413	11474
APM SMP	47,22	50,58	55,06	50,26	49,53
4.SLTA					
Jlh Pend.16-18 thn	27609	28010	28654	20448	20865
Jlh Siswa SLTA	8077	7406	9406	7894	8891
APM SLTA	29,25	26,44	32,83	38,61	42,61

Sumber : Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Capil, Data Siswa Dinas PPO 2010

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan perbandingan antara jumlah kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada beberapa jenjang pendidikan dengan kelompok usia sekolah tertentu.

Tabel.2.22.
APS Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	APS (%)	
	2008/2009	2009/2010
SD/MI	93,55	94,69
SMP/MTs	76,77	90,03
SMA/SMK/MA	44,69	61,07

Sumber : Dinas PPO Kab.Manggarai Tahun 2010

Pada Tahun Pelajaran 2008/2009 APS usia 7 – 12 tahun sebesar 93,55% mengindikasikan keberadaan 6,45% penduduk usia 7 – 12 tahun yang belum/tidak sekolah lagi; sedangkan Tahun Pelajaran 2009/2010 meningkat menjadi 94,69% yang mengindikasikan keberadaan 5,31% penduduk usia 7 – 12 tahun yang belum/tidak sekolah lagi. APS usia 13 – 15 tahun pada tahun pelajaran 2008/2009 adalah 76,77% mengindikasikan keberadaan 23,23% penduduk usia 13 -15 tahun yang belum/tidak sekolah lagi; sedangkan pada tahun pelajaran 2009/2010 meningkat menjadi 80,03% yang mengindikasikan keberadaan 19,97% penduduk usia 13 – 15 tahun yang belum/tidak sekolah lagi. APS usia 16 – 18 tahun pada tahun pelajaran 2008/2009 sebesar 44,69% mengindikasikan keberadaan 55,31% penduduk usia 16 – 18 tahun yang belum/tidak sekolah lagi; sedangkan pada tahun pelajaran 2009/2010 meningkat menjadi 61,07% yang mengindikasikan keberadaan 38,93% penduduk usia 18 – 18 tahun yang belum atau tidak sekolah lagi.

5. Rata – rata lama sekolah

Derajat pendidikan suatu daerah dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduknya. Oleh karena setiap jenjang pendidikan harus ditempuh selama waktu tertentu dan berjenjang, maka semakin tinggi rata-rata lama sekolah penduduk suatu daerah dapat diartikan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk daerah tersebut dan semakin tinggi pendidikan penduduk daerah tersebut. Hasil survei Pendidikan tahun 2008 yang dilakukan oleh BPS Pusat rata – rata lama sekolah penduduk Kabupaten Manggarai sebesar 6,43 tahun pada tahun 2008 menunjukkan status pendidikan rata – rata penduduk Kabupaten Manggarai hanya tamatan SD atau Kelas 1 SMP. Pada tahun 2009 meningkat menjadi 6,61 tahun (**Sumber : Data Statistik Daerah tahun 2010**) menunjukkan status pendidikan orang Manggarai rata-rata hanya sampai kelas VI atau kelas I SMP.

Tabel 2.23.
Rasio Gender

Jenjang Pendidikan	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
SD					
Laki-laki	22443	25765	21467	27095	27855
Perempuan	23085	23282	24752	25082	26056
L/p	1 :1,03	1:0,90	1:1,15	1: 0,92	1: 0,90
SMP					
Laki-laki	5572	6302	6856	7710	8067

Jenjang Pendidikan	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Perempuan	4868	5784	6537	7448	8175
L/P	1: 0,87	1: 0,91	1: 0,95	1: 0,96	1:1,01
SLTA					
Laki-laki	4901	5246	5391	5606	6280
Perempuan	4589	4884	5174	5457	6000
L/P	1: 0,94	1: 0,93	1: 0,96	1: 0,97	1: 0,96

Sumber : Dinas PPO Kab.Manggarai Tahun 2010

Pada tabel tersebut di atas menggambarkan perbandingan jumlah siswa laki- laki dengan jumlah siswa perempuan pada setiap jenjang pendidikan hampir sama. Hal ini menunjukan adanya kesetaraan jender dalam pendidikan.

6. Tingkat Pendidikan Penduduk Masih Rendah

Tabel 2.24.
Penduduk 10 tahun ke atas menurut pendidikan

Ijasah yg dimiliki	LL		PP		LL + PP	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tdk mempunyai Ijasah	42243	43,19	44942	43,69	87185	43,44
SD/MI sederajat	29990	30,66	35431	34,44	65421	32,60
SLTP/MTS/sederajat	9865	10,09	10836	10,53	20701	10,32
SMA/MA/sederajat	9336	9,55	7128	6,93	16464	8,20
SMK	2635	2,69	2150	2,09	4785	2,38
Diploma I dan II	624	0,66	615	0,60	1257	0,63
Diploma III/Sarmud	805	0,82	615	1,02	1420	0,71
Diploma IV/S1	2202	2,25	1045	0,10	3247	1,62
S2/S3	92	0,09	108	0,01	200	0,10
Jumlah	97810	100	102870	100	200680	100

Sumber Data : Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2009

Dari tabel tersebut di atas, penduduk Manggarai berusia 10 tahun ke atas yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi baru mencapai 3,06% dengan perincian:

- D1/D2 (0,63 %)
- D3/Sarmud (0,71) ,
- S1/D4 (1,62 %) dan
- S2/S3 (0,10%).

Sedangkan 10,58 % menamatkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Ini menunjukkan komposisi penduduk Manggarai umur 10 tahun ke atas masih didominasi oleh penduduk yang hanya menyelesaikan/belum menyelesaikan pendidikan dasar yaitu sebesar 86,36 % dengan rincian:

- Tidak/belum menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 43,44%,
- Tamat SD sebesar 32,60% dan
- Tamat SMP/MTs sebesar 10,32%.

Rendahnya tingkat pendidikan pada sebagian besar masyarakat Manggarai mengakibatkan belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan baik di tingkat regional, nasional maupun global.

B. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Indikator kunci Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan adalah:

- Persentase lulusan
- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
- Guru bersertifikasi Pendidik
- Perolehan medali emas pada olimpiade internasional
- Dosen berkualifikasi S2/S3
- Jumlah Program studi di Perguruan Tinggi
- Rasio jumlah siswa dan guru
- APK Perguruan Tinggi
- Rasio mahasiswa profesi terhadap jumlah lulusan S1/D4

1. Persentase Lulusan Ujian Akhir

Persentase lulusan ujian akhir sekolah.berikut adalah tabel persentase lulusan ujian akhir sekolah selama lima (5) tahun terakhir :

Tabel 2.25.
Kelulusan dan Persentasi Kelulusan Tingkat SD

Tahun Pelajaran	Jmlh Peserta	Jmlh tidak lulus	% tidak lulus	Jmlh Lulus	% Lulus
2005/2006	8956	0	0	8956	100
2006/2007	9122	0	0	9122	100
2007/2008	5828	301	5,16	5527	94.84
2008/2009	6220	0	0	6220	100
2009/2010	6789	115	1,69	6674	98.31

Sumber Data : Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.26.
Kelulusan dan Persentasi Kelulusan Tingkat SMP

Tahun Pelajaran	Jmlh Peserta	Jmlh tidak lulus	% tidak lulus	Jmlh Lulus	% Lulus
2005/2006	3114	473	15,19	2641	84.81
2006/2007	3469	549	15,83	2920	84.17
2007/2008	3629	1361	37,50	2268	62,50
2008/2009	4109	624	15,19	3485	84,81
2009/2010	4501	2553	56,71	1948	43,29 (ujian Utama)

Sumber Data : Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.27.
Kelulusan dan Persentase Kelulusan Tingkat SMA

Tahun Pelajaran	Jmlh Peserta	Jmlh tidak lulus	% tidak lulus	Jmlh Lulus	% Lulus
2005/2006	1458	441	30,25	1017	69,75
2006/2007	1518	427	28,13	1091	71,87
2007/2008	2563	1169	45,61	1394	54,39
2008/2009	2618	792	30,25	1826	69,75
2009/2010	2792	2058	73,71	734	26,29 (lulus ujian Utama)

Sumber Data : Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.28.
Kelulusan dan Persentase Kelulusan Tingkat SMK

Tahun Pelajaran	Jmlh Peserta	Jmlmah tidak lulus	% tidak lulus	Jmlh Lulus	% Lulus
2005/2006	495	121	24,44	374	75.56
2006/2007	533	3	0,56	530	99.44
2007/2008	641	88	13,73	553	86.27
2008/2009	666	163	24,47	503	75,53
2009/2010	815	426	52,27	389	47.73

Sumber Data : Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel tersebut di atas menunjukkan pada jenjang SMP/MTs dari tahun ke tahun persentasenya makin menurun, sedangkan tingkat SMA/SMK prosentasenya fluktuasi.

2. Kualifikasi Guru

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 42 Ayat 1 berbunyi pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang

kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pada tabel berikut digambarkan kondisi tingkat pendidikan guru di Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2010.

Tabel 2.29.
Tingkat Pendidikan Guru Per Jenjang Sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010

TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
TINGKAT SEKOLAH	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
TK	55	12	5	4	1		77
RA	7		3		1		11
SD	999	23	647	176	238		2.083
MI	24		19	1	7		51
SLB	4	7	8	5	4		28
SMP	31	74	75	157	299		636
MTS	2		5	7	27		41
SMA	5	2	7	101	350	3	468
MA	1			3	30	1	35
SMK	14	2	3	44	57		120
JUMLAH	1.142	120	772	498	1.014	4	3.550

Sumber Data : Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 3.550 guru di Kabupaten Manggarai pada tahun 2010 mencapai 1.018 orang yang sudah memenuhi syarat kompetensi berkualifikasi minimal S1 (28,68%), sedangkan 2.532 guru (71,32%) guru belum memenuhi kualifikasi minimum seperti tuntutan undang – undang. 71,32% guru yang tersebut harus sudah S1 pada tahun 2014. Hal ini merupakan salah satu masalah di bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai. Untuk memenuhi kualifikasi guru maka Pemerintah Kabupaten Manggarai menyelenggarakan program kualifikasi bagi guru yang belum memenuhi persyaratan yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai dengan 2010 baik yang dibiayai oleh pemerintah daerah maupun biaya sendiri oleh guru yang bersangkutan dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.30.
Data Pelaksanaan Kualifikasi Guru di Kabupaten Manggarai tahun 2007 – 2010

TAHUN	SUBSIDI PEMERINTAH			BIAYA SENDIRI			A+B		KMT	MRAI + KMT
	A			B						
	SPG	D2	JUMLAH	SPG	D2	JLH				
2007	158	147	305	0	0	0	305	REGULER	211	516
2009	93	72	165	19	34	53	218	PPKHB		
2010	83	32	115	17	46	63	178	PPKHB		
	334	251	585	36	80	116	701			

Sumber Data : Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

3. PROGRAM SERTIFIKASI GURU DAN PENGAWAS

Tabel 2.31.
Program Sertifikasi Guru dan Pengawas Kab. Manggarai Tahun 2007 - 2010

THN	STATUS PEGAWAI			JENJANG												TINGKAT PEND			TTL
	P N S	NO N PNS	J M L	TK	SD	SMP	WASD IKDAS	J M L	SMA	SMK	WA SDI KME N	JL H	S1	NON S1	J M L				
				N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S				
2007	194	28	222	0	0	33	82	11	0	99	104	13	5	1	0	123	22	0	222
2008	59	20	79	0	0	0	0	29	3	0	32	26	14	4	3	0	47	79	79
2009	90	47	137	0	0	49	4	18	15	6	92	13	14	1	14	3	45	64	137
2010	101	28	129	2	0	49	1	30	12	8	102	11	9	1	5	1	27	30	129
TTL	444	123	567	2	0	18	8	9	41	14	325	154	50	11	23	4	245	39	567

Sumber Data : Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel di atas memperlihatkan bahwa guru yang disertifikasi sampai tahun 2010 berjumlah 567 orang dengan perincian guru PNS berjumlah 444 orang (78,31 %) dan 123 guru swasta (21,69 %). Guru menurut jenjang sekolah terdiri dari 2 orang guru TK (0,35%), Guru SD 109 orang (19,22%), 200 orang guru SMP/MTs (35,27%), 238 guru SLTA (41,98%), 14 pengawas SD (2,47%) dan 4 orang pengawas sekolah menengah (0,71%). Memperhatikan uraian di atas maka masih ada 2983 guru (84,028%) yang belum mengikuti program sertifikasi sampai tahun 2010.

4. Rasio Siswa Terhadap Guru

Tabel 2.32.
Rasio siswa terhadap guru

Jenjang Pendidikan	2008/2009	2009/2010
1.PAUD		
Jlh Siswa	1.119	924
Jlh Guru	88	88
Σ siswa/ Σ Guru	1:13	1:11
2.SD		
Jlh Siswa	52.177	53.903
Jlh Guru	1.797	2.162
Σ siswa/ Σ Guru	1:29	1:25
2.SLTP		
Jlh Siswa	15.158	16.242
Jlh Guru	652	677
Σ siswa/ Σ Guru	1:23	1:24
2.SMA/MA/		
Jlh Siswa	11.063	12.280
Jlh Guru	652	623
Σ siswa/ Σ Guru	1:17	1:20

Sumber Data : Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kebutuhan guru pada setiap jenjang pendidikan telah memenuhi syarat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Namun sampai saat ini pada sekolah-sekolah tertentu masih kekurangan guru karena penyebaran belum merata.

5. Rasio Siswa Terhadap Ruang Kelas

Tabel 2. 33.
Rasio Siswa Terhadap Ruang Kelas

Jenjang Pendidikan	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
1. PAUD					
Jlh Siswa	1.251	1.188	1.344	1.119	924
Jlh Ruang Kelas					
Σ siswa/ Σ R.Kelas					

Jenjang Pendidikan	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
2. SD					
Jlh Siswa	79.648	93.295	93.832	52.177	53.903
Jlh Ruang Kelas	1.260	1.390	1.491	1.684	1.741
Σ siswa/ Σ R.Kelas	1: 63	1 : 67	1:63	1:31	1:32
3. SLTP					
Jlh Siswa	26.738	28.746	29.407	15.158	16.242
Jlh Ruang Kelas	291	291	304	280	358
Σ siswa/ Σ R.Kelas	1:91	1 : 99	1 : 97	1:54	1:45
4. SLTA					
Jlh Siswa	11.897	10.245	12.927	11.063	12.280
Jlh Ruang Kelas	261	272	294	325	355
Σ siswa/ Σ R.Kelas	1 : 46	1 : 38	1 : 44	1:34	1:35

Sumber Data : Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa kebutuhan ruang kelas pada tiap jenjang pendidikan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

6. Program Keaksaraan Fungsional

Tabel 2.34.

Data Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Manggarai 2005/2006 – 2009/2010

No	Tahun	Pend. Buta Huruf Usia 15 - 45 Tahun			Intervensi Program KF		
		L	P	JLH	L	P	JLH
1	2005/2006	969	3362	4331	0	740	740
2	2006/2007	1158	3516	4677	140	560	700
3	2007/2008	1773	3289	5062	220	1200	1420
4	2008/2009	2865	2672	5537	220	1200	1420
5	2009/2010	2810	3503	6313	605	795	1600
	Jumlah						

Sumber Data : Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Manggarai yang buta aksara (orang yang buta huruf dan orang yang sudah lupa huruf) meningkat dari tahun ke tahun. Intervensi terhadap program ini masih terbilang rendah. Pada Tahun Pelajaran 2008/2009 hanya mencapai 1420 dari 5537 orang (25,65 %) penduduk buta aksara yang berhasil

diberantas, pada Tahun Pelajaran 2009/2010 malah menurun menjadi 25,34% (1600 orang dari 6313 orang penduduk).

7. Program Kecakapan Hidup dan Kesenjangan

Tabel 2.35.
Program Kecakapan Hidup dan Kesenjangan

No	Tahun	Kecakapan Hidup	Program Paket		
			A	B	C
1	2005/2006	60 Warga belajar	636	785	752
2	2006/2007	280 warga belajar	180	697	1099
3	2007/2008	305 warga belajar	208	563	1781
4	2008/2009	335 warga belajar	1610	2297	1321
5	2009/2010	99 warga belajar	278	1114	893
	<i>Jumlah</i>		<i>2912</i>	<i>5456</i>	<i>5846</i>

Sumber Data : Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

C. Perpustakaan Daerah

Tabel 2.36.
Keanggotaan Perpustakaan Umum Daerah

Kategori	2006		2007		2008		2009		2010	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SD	5	2	109	129	0	2	53	79	7	14
SLTP	1	8	4	3	9	4	5	17	1	9
SLTA	0	1	1	2	6	17	9	22	6	16
PT	1	162	0	3	135	214	66	103	110	155
UMUM	104	56	108	77	99	96	85	93	67	105
Jumlah	231	230	222	214	252	333	218	314	191	299
Jumlah L + P	461		436		585		533		490	

Sumber Data : Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Manggarai Tahun 2010

Tabel di atas menggambarkan peningkatan yang signifikan pada jumlah anggota perpustakaan. Hal ini menunjukkan meningkatnya minat baca masyarakat Manggarai baik di kalangan pelajar maupun masyarakat umum. Kondisi ini perlu diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Tabel 2.37.
Rekapitulasi Pengadaan Buku Perpustakaan Daerah Tahun 2005-2010

Tahun	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
2005	5350	29435
2006	1559	6113
2007	1626	6860
2008	1819	4947
2009	1221	2935
2010	650	1942
Jumlah	11983	52232

Sumber Data : Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Manggarai Tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan data jumlah koleksi buku dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan kurangnya alokasi dana di samping harga buku yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.38.
Data Pengunjung Perpustakaan Daerah Tahun 2005-2010

KEL/THN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD	6674	7688	6628	8447	8047	10780
SLTP	4303	7358	8967	9068	10673	9778
SLTA	3727	6919	10133	14036	15728	14883
PT	6854	16233	21407	27210	25234	29270
UMUM	3685	4550	4325	4311	4263	3982
TOTAL	25243	42768	51460	63072	63945	68693

Sumber Data : Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Manggarai Tahun 2010

Data pada Tabel di atas menunjukan jumlah kelompok pengunjung perpustakaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pengunjung terbanyak berasal dari kalangan Perguruan Tinggi. Fakta ini menunjukkan adanya peningkatan minat baca pada semua kelompok pengunjung perpustakaan di Kabupaten Manggarai.

2.3.1.2. Kesehatan

Kualitas kesehatan masyarakat Manggarai, secara umum tercermin melalui indikator Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak, Status Gizi Balita; Usia Harapan Hidup (UHH); berdasarkan indikator kesehatan tersebut maka kondisi kesehatan di Kabupaten Manggarai tahun 2005-2010 dapat digambarkan sebagai berikut :

A. ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI DAN ANAK

Kondisi umum kesehatan ibu, bayi dan anak di Kabupaten Manggarai tercermin melalui indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Neonatal dan Angka Kematian Anak (AKABA).

1. ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)

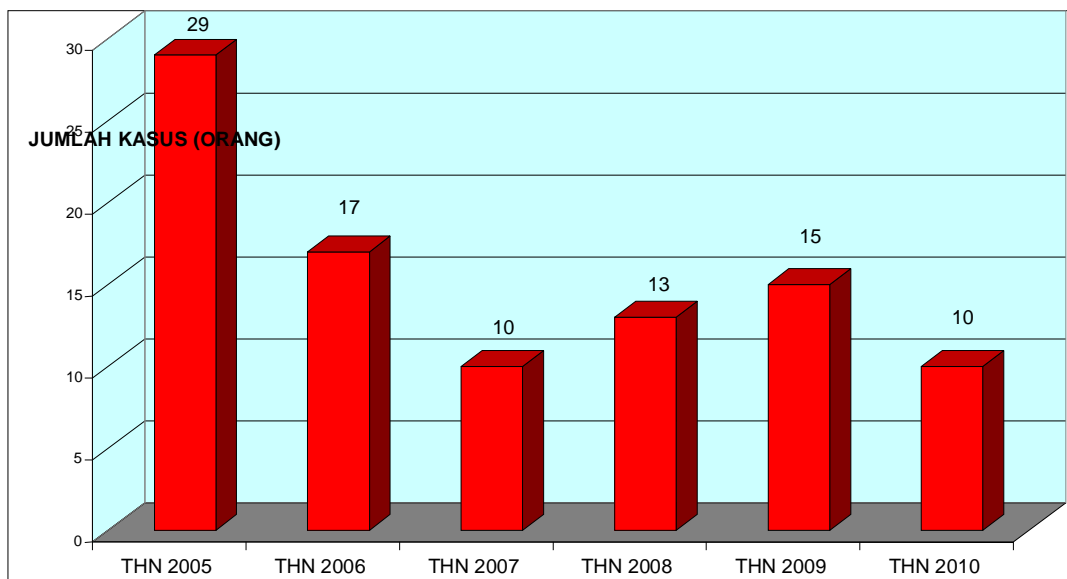
Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 AKI Indonesia sebesar 228/100.000 Kelahiran Hidup (KH) dan target RPJMN tahun 2009 sebesar 226 per 100.000 KH. Di Kabupaten Manggarai, perkembangan kesehatan ibu selama tahun 2005-2010 berdasarkan indikator AKI dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39.
Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Kasus Kematian	T a h u n					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kelahiran Hidup	6.549	6.132	5.882	5.781	5.799	5.811
2	Kematian Ibu Absolut	29	17	10	13	15	10
3	Kematian Ibu Per 100.000 KH	442,82	277,23	170,01	224,87	258,66	172,08

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Diagram 2.9.
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010



Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Berdasarkan data dan diagram AKI tersebut diatas terlihat bahwa AKI di Kabupaten Manggarai selama tahun 2005-2010 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2005 terjadi 29 kasus kematian ibu atau sebesar 442,82/100.000 KH, menurun menjadi 17 kasus atau 277,23/100.000 KH tahun 2006, menurun lagi menjadi 10 kasus atau 170/100.000 KH tahun 2007. Sedangkan tahun 2008 meningkat menjadi 13 kasus atau 224,87/100.000 KH, meningkat lagi menjadi menjadi 15 kasus atau 258,66/100.000 KH tahun 2009. Pada tahun 2010 menurun lagi menjadi 10 kasus (172,08/100.000 KH).

Kondisi AKI di Kabupaten Manggarai tahun 2010 sebesar 172,08/100.000 KH, jika dibandingkan dengan AKI Nasional sebesar 228/100.000 KH dan target RPJMN tahun 2009 sebesar 226 per 100.000 KH, maka AKI di Kabupaten Manggarai telah jauh dibawah hasil survey dan target RPJMN tersebut. Hal ini menunjukkan perkembangan positif kinerja sektor kesehatan dalam memberi pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, lahir dan nifas.

Data AKI di atas dapat dikaji lebih mendalam dengan melihat faktor Penyebab Kematian Ibu, Penyebab Ibu Sakit, Pelayanan Kesehatan Ibu, Pendekteksiaan Bumil Resiko Tinggi dan Komplikasi, serta Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan sebagaimana dipaparkan dalam uraian berikut.

4. PENYEBAB KEMATIAN IBU

Penyebab kematian ibu lazim dipilah berdasarkan penyebab langsung dan tidak langsung. Rata-rata penyebab langsung kematian ibu di Manggarai tahun 2005-2010 adalah pendarahan sebanyak 58 kasus (61.70%), Hipertensi Dalam kehamilan (eklamsi) 17 kasus (18.08%) dan Infeksi 8 kasus (8.51%). Penyebab tidak langsung AKI adalah karena penyakit yang diderita sebelum dan selama kehamilan seperti Anemia, Malaria, hepatitis, jantung, TB Paru, HIV/AIDS, dll.

Tabel 2.40.
Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Penyebab	Kasus/Tahun						Total	%
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
A.	Penyebab Langsung								
1	Perdarahan	24	11	4	8	6	5	58	61.7
2	HDK / Eklamsi	2	1	2	4	6	2	17	18.1
3	Infeksi	2	4	1	0	1	0	8	8.51
B.	Penyebab tdk.langsung								
1	Malaria	0	0	0	0	0	1	1	1.06
2	Hepatitis	0	0	0	0	1	0	1	1.06
3	Jantung	0	0	0	0	1	1	2	2.12
4	Lain-lain	1	1	3	1	0	1	7	7.44
Total		29	17	10	13	15	10	94	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Penyebab kematian ibu tidak langsung lainnya sangat dipengaruhi oleh status gizi bumil, status kesehatan reproduksi bumil seperti kehamilan resiko tinggi yang tidak disadari bumil dan tidak terdeteksi oleh tenaga kesehatan, kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat, aksesibilitas ke pusat pelayanan kesehatan, serta mutu pelayanan pada fasilitas kesehatan. Selain itu status ekonomi, pendidikan, kurangnya informasi, tradisi sosial budaya, serta faktor geografis turut pula mempengaruhi kematian ibu.

Pada beberapa kasus kematian ibu sering juga ditemukan penyebabnya berhubungan dengan “4 Terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak) dan “3 Terlambat” yakni terlambat memutuskan untuk mencari pertolongan bagi kasus kegawatdaruratan obstetrik, terlambat mencari tempat rujukan yang disebabkan oleh keadaan geografis dan masalah transportasi, serta terlambat memperoleh penanganan yang adekuat ditempat rujukan karena kurangnya sumber daya dan fasilitas kesehatan pada pusat rujukan.

Faktor penunjang lain penyebab kematian ibu adalah masih relatif rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih yang pada tahun 2010 baru mencapai 73,4% dari target 90%. Disamping itu jumlah tenaga bidan masih sangat terbatas yakni dari 149 desa/kelurahan yang ada, baru 101 desa/kelurahan yang memiliki tenaga bidan, sehingga masih ada pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun bayi (26,6%). Distribusi tenaga bidan yang tidak merata dimana bidan lebih banyak bertugas di sarana kesehatan di perkotaan dan sekitarnya dibandingkan di pedesaan. Serta masih kurangnya kemampuan bidan dalam penanganan kasus-kasus kegawatdaruratan kebidanan (obstetri).

5. PENYEBAB IBU SAKIT

Banyak faktor penyebab Ibu Sakit, namun rata-rata penyebab yang terdeteksi selama tahun 2005-2010 adalah Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar 65,89%, Anemia 20%, Pendarahan 4,22%, HDK/Eklamsi 4,04%, Infeksi 0,80% dan penyebab lainnya sebesar 5,04%.

Tabel 2.41.
Data Penyebab Ibu Sakit Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Penyebab	Kasus/Tahun						Rata2 2005-2010	
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	%
1	Anemia (Hb <11gr %)	1,058	616	643	648	424	389	3,778	20.00
2	Perdarahan	114	305	82	92	107	98	798	4.22
3	Infeksi	38	55	22	13	17	6	151	0.80
4	HDK/Eklamsi	42	133	106	134	167	182	764	4.04
5	Bumil KEK	4,165	3,253	3,000	815	562	653	12,448	65.89
6	Lain-lain		156	205	188	209	195	953	5.04
Total		5,417	4,518	4,058	1,890	1,486	1,523	18,892	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Secara keseluruhan terjadi penurunan angka ibu sakit dari tahun ke tahun, kecuali HDK/Eklamsi tetap mengalami peningkatan. Karena itu deteksi dini dan perujukan lebih awal terhadap bumil potensial HDK dan Eklamsi sangat perlu mendapat perhatian dan intervensi program kesehatan.

6. PELAYANAN KESEHATAN IBU

Perkembangan capaian indikator AKI yang positif selain dipengaruhi tindakan kuratif terhadap penyebab langsung kematian ibu, juga dipengaruhi efektifitas cakupan

pelayanan kesehatan ibu berdasarkan parameter sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.42.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Parameter	Tahun						Rata2 2005-2010	
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	%
	Jumlah Ibu Hamil	7,898	7,091	6,803	7,402	6,794	6,765	36,461	100
1	Kunj. Pertama Bumil (K1)	7,898	7,091	6,803	7,402	6,794	6,765	42,753	100
2	Kunj. Keempat Bumil (K4)	4,365	4,481	4,335	4,772	4,240	4,631	26,824	73.57
3	Pemberian vaksin TT 2	1,825	2,268	1,934	2,543	2,631	3,311	14,512	39.80
4	Pemberian tablet Fe 3	5,837	6,001	4,475	5,436	6,586	5,730	34,065	93.43
5	Persalinan oleh Nakes	4,345	4,435	4,580	4,368	4,483	4,486	26,697	73.22
6	Persalinan Nakes Maskin	0	0	2,753	3,059	2,896	3,048	11,756	42.34
7	Kunjungan Nifas KN2	5,654	5,519	5,458	5,312	5,736	5,588	33,267	91.24
8	Vit A Nifas	3,224	6,044	3,830	5,388	4,339	5,394	28,219	77.40
9	Bumil yg Punya Buku KIA	-	-	-	7,402	6,794	10,000	24,196	66.36

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Parameter cakupan pelayanan ibu dikatakan bermutu apabila kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan sebanyak 4 kali selama kehamilan (masing-masing 1 kali kunjungan pada triwulan pertama (K1 murni), 1 kali kunjungan pada triwulan kedua dan 2 kali kunjungan pada triwulan ketiga). Di Manggarai kesenjangan kunjungan tersebut tampak pada perbedaan K1 (kunjungan pertama pada triwulan pertama) dan K4 (kunjungan ke 4 pada triwulan ketiga). Rata-rata K1 ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan mencapai 100%. Namun angka ini bukan K1 murni tetapi sebagai gambaran bahwa semua ibu hamil pernah mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan rata-rata K4 mencapai 73,57%. Jika K1 dan K4 dibandingkan maka terlihat bahwa masih terdapat 26,43% ibu yang tidak melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan selama 4 kali dalam masa kehamilan.

Berdasarkan parameter pemberian imunisasi tetanus pada usia kehamilan 5 dan 7 bulan (TT2), rata-rata sangat rendah karena baru mencapai 39,80%, berarti sebanyak 60,20% ibu tidak mendapat pelayanan imunisasi TT2. Kondisi ini perlu mendapat kajian lebih lanjut apakah karena kelalaian petugas atau keengganan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan. Idealnya cakupan pelayanan imunisasi TT2 sekurang-kurangnya harus sama dengan K4.

Berdasarkan parameter pemberian tablet Fe3, rata-rata 93,43% ibu hamil telah mendapat tambahan zat besi selama masa kehamilan. Normalnya 100% ibu hamil harus mendapat tambahan zat besi selama kehamilan. Dalam konteks ini perlu memberi perhatian terhadap penyediaan dan distribusi zat besi sesuai prediksi pemeriksaan K1-K4.

Berdasarkan parameter Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (bidan atau dokter) rata-rata mencapai 73,22%, sedangkan 26,78% persalinan lainnya tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena masih cukup banyak persalinan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan. Persoalannya terletak pada keterbatasan jumlah tenaga bidan yang ada, pengetahuan dan kesadaran bumil dan keluarga masih rendah, serta tradisi persalinan oleh dukun masih kuat dianut masyarakat. .

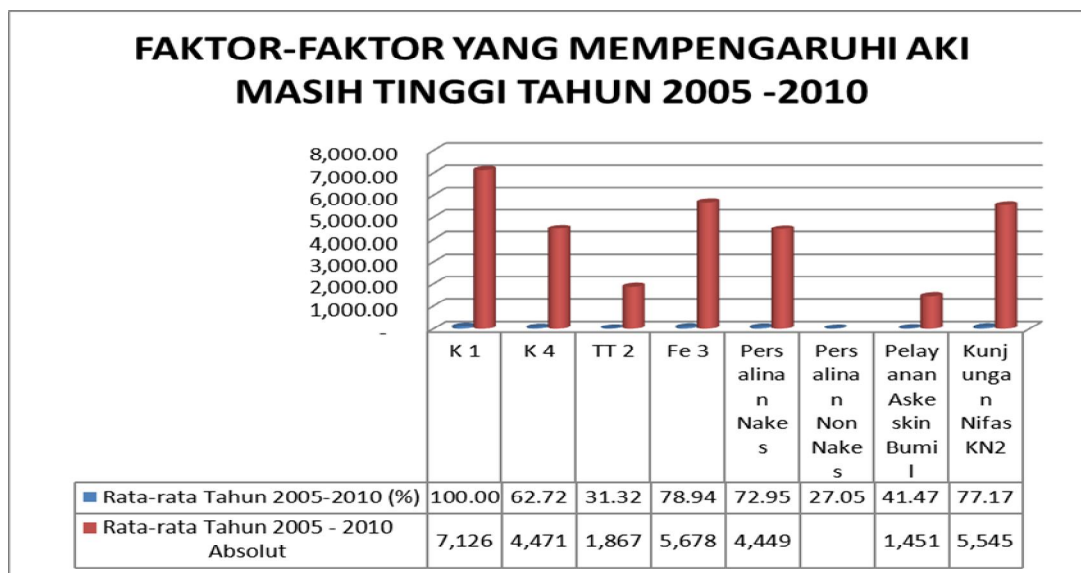
Hal yang cukup menarik jika melihat cakupan 2 kali kunjungan pasca melahirkan (KN2), rata-rata 91,24% ibu nifas tergerak mengunjungi fasilitas kesehatan untuk diperiksa. Seandainya kesadaran yang sama juga terjadi pada K1 murni sampai K4, maka kemungkinan penjarangan ibu hamil resiko tinggi akan lebih baik dilakukan dan tentu saja akan mengurangi bahaya resiko kehamilan dan melahirkan. Sedangkan pemberian vitamin A Nifas yang mencapai 77,40% tidak proporsional dengan capaian KN2, artinya terdapat 13,84% ibu nifas yang tidak mendapat suplemen vitamin A. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan dan distribusi stok vitamin A harus tetap terjaga cukup di fasilitas pelayanan kesehatan saat kunjungan ibu nifas.

Berdasarkan parameter cakupan pelayanan ibu hamil masyarakat miskin, rata-rata mencapai 42,34% selama tahun 2007-2009. Hal ini tidak berarti bahwa bumil dari keluarga miskin hanya berjumlah demikian, bisa juga beberapa diantaranya tidak mengetahui manfaat kartu gakin yang juga bisa dimanfaatkan untuk meringankan biaya persalinan di fasilitas kesehatan.

Sedangkan penggunaan Buku KIA (KMS) baru digalakan selama 3 tahun terakhir mencapai 66,36%, sehingga sangat disarankan penyediaan buku tersebut rutin diadakan setiap tahun karena sangat besar manfaatnya bagi ibu hamil yang kebanyakan jarang memiliki kalender pemeriksaan tersendiri.

Parameter pelayanan selama kehamilan (ANC) dikatakan bermutu apabila kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan sebanyak 4 kali selama kehamilan (masing-masing 1 kali kunjungan pada triwulan pertama (K1 murni), 1 kali kunjungan pada triwulan kedua dan 2 kali kunjungan pada triwulan ketiga). Kondisi saat ini kesenjangan kunjungan tersebut tampak pada diagram berikut ini :

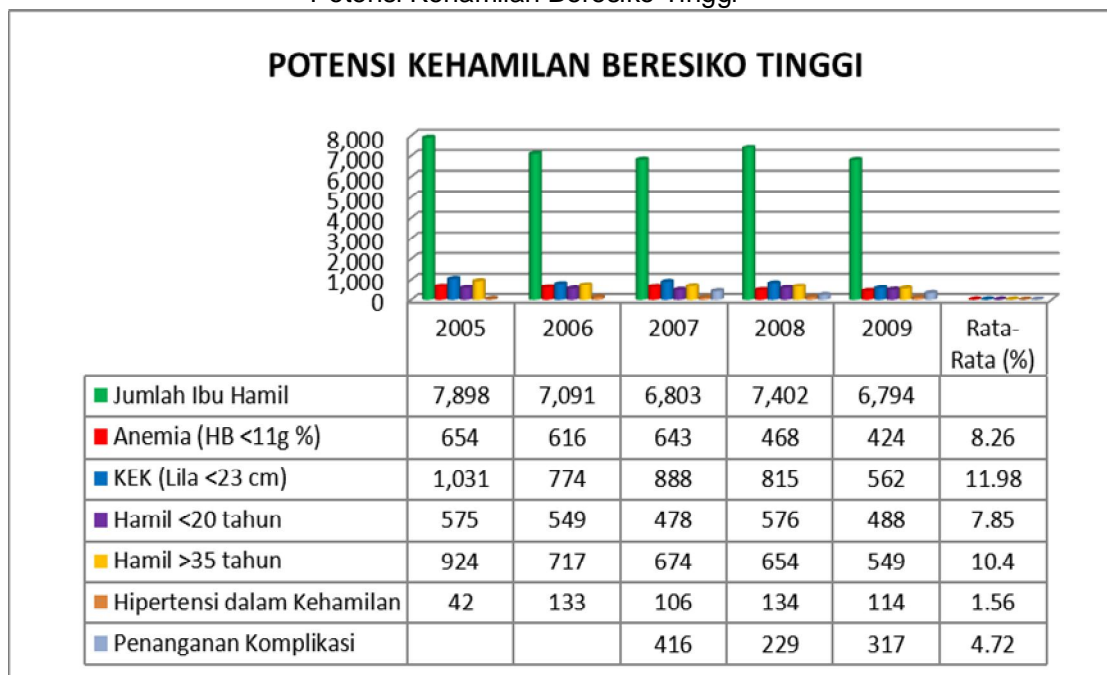
Diagram 2.10.
Faktor-faktor yang mempengaruhi AKI masih tinggi



7. Deteksi Bumil Resiko Tinggi dan Komplikasi

Data AKI dan Ibu Sakit pada pembahasan diatas juga berkaitan erat dengan potensi kehamilan beresiko tinggi (resti) karena kesehatan ibu kurang memadai seperti terlihat pada diagram dan tabel berikut ini :

Diagram 2.11.
Potensi Kehamilan Beresiko Tinggi



Tabel 2.43.

Deteksi Bumil Resti dan Komplikasi Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Parameter	Tahun						Rata2	
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005-2010	
	Jumlah Ibu Hamil	7,898	7,091	6,803	7,402	6,794	6,765	Total	%
1	Anemia (HB <11g %)	654	616	643	468	424	389	3,194	7.47
2	KEK (Lila <23 cm)	1,031	774	888	815	562	653	4,723	11.05
3	Hamil <20 tahun	575	549	478	576	488	412	3,078	7.20
4	Hamil >35 tahun	924	717	674	654	549	563	4,081	9.55
5	Hipertensi dalam Kehamilan	42	133	106	134	114	182	711	1.66
6	Penanganan Komplikasi			416	229	317	145	1,107	2.59

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2005-2010

8. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Kebijakan nasional tentang persalinan mengharuskan setiap kelahiran dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Perkembangan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan non tenaga kesehatan tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44.

Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Tahun	Total Persalinan	Ditolong Nakes		Ditolong Non Nakes	
			Total	%	Total	%
1	2005	6.651	4.345	65,33	2.306	34,67
2	2006	6.207	4.435	71,45	1.772	28,55
3	2007	5.962	4.580	76,82	1.382	23,18
4	2008	5.864	4.368	74,49	1.496	25,51
5	2009	5.894	4.483	76,06	1.411	23,94
6	2010	5.883	4.486	76,25	1.397	23,75
Total/Rata2		36.461	26.697	73,22	9.764	26,78

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2005-2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa cakupan pertolongan persalinan setiap tahun mengalami peningkatan. Rata-rata pencapaian pertolongan persalinan tahun 2005-2010 oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 73,22%, namun masih terdapat 26,78% bulin ditolong oleh tenaga non kesehatan (dukun bersalin). Idealnya pertolongan persalinan hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan dan dokter).

Beberapa penyebab rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih antara lain karena masih kurangnya tenaga bidan yang tersebar di desa (baru tersedia 101 bidan untuk melayani 149 desa/kelurahan yang ada), distribusi tenaga bidan yang tidak merata (bidan lebih banyak bertugas di sarana kesehatan perkotaan dan sekitarnya

dibandingkan di pedesaan), kurangnya kemampuan bidan dalam penanganan kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri, belum semua desa memiliki sarana kesehatan seperti Poskesdes, serta belum optimalnya KIE oleh petugas kesehatan. Disamping itu upaya kemitraan bidan-dukun belum efektif untuk mengalihkan kepercayaan masyarakat yang begitu kuat terhadap dukun bersalin ke tenaga kesehatan.

B. ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)

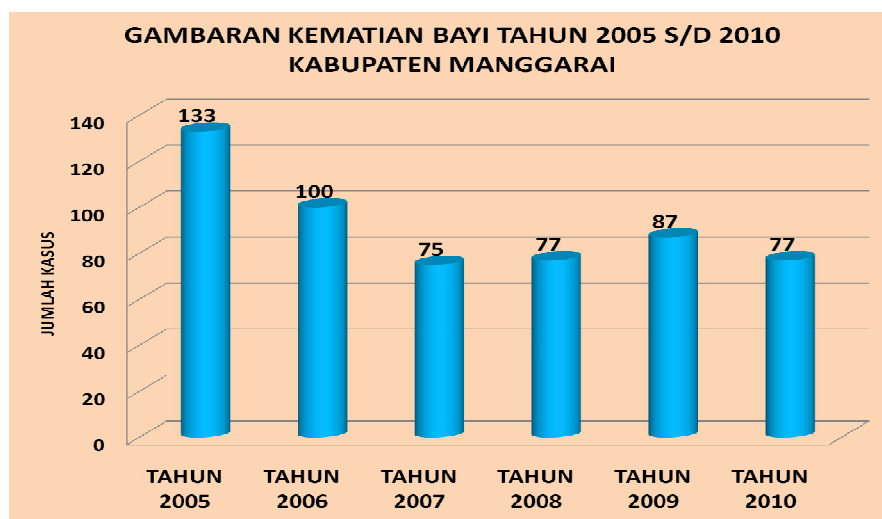
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian yang terjadi pada bayi (usia 0 s/d <1 tahun) selama setahun. Berdasarkan SDKI tahun 2007 AKB nasional mencapai 34/1.000 KH. Perkembangan kesehatan bayi selama tahun 2005-2010 berdasarkan indikator AKB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45.
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Kasus Kematian	T a h u n					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kelahiran Hidup	6.549	6.132	5.882	5.781	5.799	5.811
2	Kematian Bayi Absolut	133	100	75	77	87	77
3	Kematian Bayi Per 1000 KH	20,31	16,31	12,75	13,32	15,00	13,25

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Diagram 2.12.
Gambaran Kematian Bayi



Tabel dan diagram AKB tersebut di atas menunjukkan penurunan secara fluktuasi kondisi perkembangan kematian bayi selama tahun 2005-2010.

Kondisi AKB di Kabupaten Manggarai tahun 2010 sebesar 13,25/1.000 KH telah menunjukan perkembangan positif jika dibandingkan dengan hasil SDKI AKB Nasional tahun 2007 sebesar 34/1.000 KH. Kajian lebih mendalam terhadap AKB dapat ditelusuri melalui identifikasi Penyebab Kematian Bayi, Penyebab Bayi Sakit, serta Kematian Bayi Neonatal sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. PENYEBAB KEMATIAN BAYI

Penyebab kematian Bayi di Kabupaten Manggarai selama tahun 2005-2010 secara umum bervariasi. Secara detail penyebab kematian bayi dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.46.
Penyebab Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Penyebab	Kejadian/Tahun						Rata2 2005- 2010 %
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Pneumonia/ISPA	47	46	25	18	17	31	33.33
2	Diare	6			9	4	4	4.17
3	Infeksi	1	2	1	-	1	-	0.91
4	Asfiksia	34	18	-	-	35	23	19.93
5	Kelainan bawaan	8	2	-	-	-	-	1.81
6	Cacat bawaan	2	2	3	-	1	4	2.17
7	Partus lama	8	2	-	-	-	-	1.81
8	Letak Sungsang	1	-	-	-	-	-	0.18
9	Hipotermi	1	1	-	-	-	-	0.36
10	BBLR	8	6	-	-	9	3	4.71
11	Serotinus	1	-	-	-	-	-	0.18
12	Imatur	-	2	-	-	-	-	0.36
13	Prematur	4	6	-	-	1	-	1.99
14	Perdarahan tali pusat	1	-	-	-	-	-	0.18
15	Febris Convucin	5	3	4	-	-	-	2.17
16	Aterisia ani	2	-	-	-	-	-	0.36
17	Marasmus	2	-	-	-	-	-	0.36
18	Gemeli	-	1	-	-	-	-	0.18
19	Trauma lahir	-	2	-	-	-	-	0.36
20	Kelainan jantung	-	5	-	-	1	-	1.09
21	Kecelakaan	-	1	-	-	-	-	0.18
22	Obstruksi usus	-	1	-	-	-	-	0.18
23	Contucin Cerebri	-	-	1	-	-	-	0.18
24	Lain-lain	2	-	41	50	21	12	22.83
Total		133	100	75	77	90	77	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Faktor lain penyebab kematian Bayi adalah status gizi ibu hamil yang Kurang Energy Kronis (BUMIL KEK), penanganan persalinan yang kurang baik, cakupan imunisasi bayi yang rendah, masih tingginya penyakit-penyakit infeksi berbasis lingkungan selain ISPA dan diare, seperti TB Paru, Asma, dll. Selain itu faktor-faktor seperti sosial ekonomi, pendidikan, higiene, topografi, sarana transportasi, sanitasi lingkungan, kualitas dan kuantitas tenaga yang terbatas, serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bayi yang masih terbatas.

2. PENYEBAB BAYI SAKIT

Penyebab Bayi Sakit di Kabupaten Manggarai rata-rata tahun 2005-2010 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.47.
Penyebab Bayi Sakit Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Penyebab	Kasus/Tahun						Rata2 2005-2010	
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	%
1	Pneumonia / (ISPA)	1,555	1,442	1,004	402	368	243	5,014	9.98
2	Diare	7,893	6,399	6,695	1,727	1,776	1,733	26,223	52.17
3	Campak	-	1	6	-	-	-	7	0.01
4	Malaria	-	2,082	1,897	485	501	325	5,290	10.52
5	Gizi Kurang	-	5,426	3,687	2,489	-	779	12,381	24.63
6	Gizi Buruk	-	722	456	121	-	49	1,348	2.68
Total		9,448	16,072	13,745	5,224	2,645	3,129	50,263	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

3. KEMATIAN NEONATAL

Tinggi rendahnya AKB sangat dipengaruhi oleh Angka Kematian Neonatal yaitu kematian yang terjadi pada bayi usia 0-28 hari, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor bawaan anak sejak lahir. Faktor yang berkaitan dengan pelayan kesehatan terhadap seorang ibu hamil selama masa kehamilannya juga mempengaruhi kematian Neonatal seperti pemberian tablet tambah darah selama hamil, imunisasi anti Tetanus, kualitas ante natal care dan penanganan terhadap penyakit penyerta yang diderita ibu hamil. (lihat tabel)

Tabel 2.48.
Angka Kematian Neonatal (0-28 Hari) Kabupaten manggarai Tahun 2005-2010

No	Kasus Kematian	T a h u n						Total 2005- 2010
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Kelahiran Hidup	6.549	6.132	5.882	5.781	5.799	5.811	35.954
2	Kematian Absolut	82	43	48	48	63	45	329
3	Kematian per 1.000 KH	12,52	7,01	8,16	8,30	10,86	7,74	9.15

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Data total kematian neonatal di atas jika dibandingkan dengan keseluruhan kematian bayi (AKB) maka rata-rata kematian neonatal memberi kontribusi sebesar 59,93% dari total kematian bayi selama tahun 2005-2010 atau rata-rata sebesar 9,15/1.000 KH.

4. Pelayanan Kesehatan Bayi Neonatal

Parameter lain yang menjelaskan efektifitas pelayanan kesehatan bayi neonatal adalah cakupan pemberian imunisasi Hepatitis (B) 0-7 hari yang rata-rata selama tahun 2007-2009 baru mencapai 51,95%. Artinya rata-rata masih terdapat 58,05% bayi tidak mendapat imunisasi HB saat dilahirkan hingga usia 7 hari. Hal ini berbeda dengan data pemberian Vitamin K1 injeksi yang telah mencapai 76,85%.

Perkembangan positif lainnya bahwa rata-rata 92,61% bayi baru lahir mendapat pemeriksaan petugas kesehatan, walaupun idealnya harus mencapai 100%. Demikian pula penanganan komplikasi neonatal terlihat meningkat. (lihat tabel)

Tabel 2.49.
Pelayanan Kesehatan Neonatal Kabupaten Manggarai Tahun 2007-2010

No	Parameter	Tahun				Rata2 2005- 2010	
		2007	2008	2009	2010	Total	%
	Jumlah Kelahiran Hidup	5.882	5.781	5.799	5.811	23.273	100
1	Imunisasi HB 0 - 7 hari	2.468	3.046	3.558	4.399	13.471	57.88
2	KN 1	5.000	5.425	5.747	5.820	21.992	94.50
3	Vit K1 Injeksi	4.580	4.357	4.483	4.521	17.941	77.09
4	Penanganan Komplikasi Neonatal Risti	78	360	322	25	785	3.37
5	Inisiasi Menyusu Dini	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

5. Pelayanan Imunisasi Bayi

Imunisasi dasar lengkap pada bayi bertujuan untuk menurunkan penyebab kematian dan kesakitan bayi akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Hal ini juga dapat terukur melalui cakupan luas Desa/Kelurahan Universal Child Immunisation (Desa/Kelurahan UCI). (lihat tabel)

Tabel 2.50.
Cakupan Imunisasi Bayi dan Desa UCI Kabupaten Manggarai Tahun 2005 - 2010

No	Indikator	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Sasaran	8.124	7.942	6.851	7.028	7.333	6.984
2	Bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	6.439 (79,25%)	6.469 (81,45%)	5.440 (79,40%)	5.517 (78,50%)	6.524 (88,97%)	6.228 (89,18%)
3	Desa/kelurahan Universal child Immunisation	59 (41,15%)	61 (43,57%)	65 (46,43%)	74 (53,48%)	98 (65,77%)	109 (73,15%)

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Pemberian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2010 mencapai 89,18%, berarti terdapat kesenjangan sebesar 10,82%. Kondisi kesenjangan tersebut sejalan dengan tingkat partisipasi masyarakat di posyandu dan tingkat kunjungan bayi ke fasilitas kesehatan yang belum optimal sebagaimana telah diuraikan pada tabel di atas.

Berdasarkan cakupan Desa/Kelurahan UCI, terlihat adanya peningkatan cakupan dari tahun ke tahun namun belum mencapai target nasional sebesar $\geq 80\%$. Kondisi tersebut disebabkan masih terbatasnya sarana Cold Chain (rantai dingin) penyimpan vaksin, jumlah tenaga kesehatan, lemahnya aspek supervise dan evaluasi secara berjenjang, belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan yang berdampak pada kurang akuratnya laporan, serta kurangnya peran pokja posyandu terutama dalam penggerakkan sasaran.

C. ANGKA KEMATIAN ANAK DAN BALITA (AKABA)

Angka Kematian Anak dan Balita (AKABA) adalah jumlah kematian yang terjadi pada anak usia 1-5 tahun selama setahun. Rata-rata Kematian Anak (usia 1 s/d 5 thn) periode 2005-2010 sebesar 0.56% atau rata-rata sebesar 4,35 per 1.000 KH. Kematian terendah terjadi tahun 2008 sebesar 16 kasus atau 2,77 per 1.000 KH. (lihat tabel)

Tabel 2.51.
Angka Kematian Anak (AKABA) Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Kematian	Tahun						Total 2005- 2010
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Kelahiran Hidup	6.549	6.132	5.882	5.781	5.799	5.811	35.954
2	Kematian Balita 1-5 tahun	39	29	26	16	21	12	143
3	Kematian Balita per 1.000 KH	5,96	4,73	4,42	2,77	3,62	2,07	3.98

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Indikasi lebih lanjut tentang AKABA dapat diketahui melalui identifikasi Penyebab Kematian Anak dan Balita dan Penyebab Anak Sakit.

1. PENYEBAB KEMATIAN ANAK DAN BALITA

Penyebab kematian anak bervariasi dari tahun ke tahun lainnya. Rata-rata penyebab kematian anak tahun 2005-2010 adalah Pneumonia/ISPA 35,29%, Diare 8,82%, Febris/Kejang 6,47%, Cacat Bawaan 4,12%, serta Malaria 2,35%.

Tabel 2.52.
Penyebab Kematian Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Penyebab	Kasus/Tahun						Rata2	
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	%
1	Pneumonia / (ISPA)	22	13	14	-	11	5	65	35.71
2	Diare	7	7	1	-	-	3	18	9.89
3	Kelainan jantung	1	-	-	-	-	-	1	0.55
4	Acites	1	-	-	-	1	-	2	1.10
5	Hepatitis	-	-	-	-	1	-	1	0.55
6	Febris kejang	1	1	5	-	4	1	12	6.59
7	Infeksi	1	-	-	-	1	-	2	1.10
8	Malaria	1	2	1	-	-	-	4	2.20
9	Asma	-	-	-	-	1	1	2	1.10
10	Cacat bawaan	1	5	1	-	-	2	9	4.95
11	Hemoroid / Ambeien	-	-	2	-	-	-	2	1.10
12	Lain-lain	34	5	6	17	-	-	62	34.07
13	Tumor	-	-	-	-	2	-	2	1.10
Total		69	33	30	17	21	12	182	100.00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Berdasarkan data penyebab kematian anak di atas maka sangat diperlukan komitmen sektor kesehatan pada upaya penyadaran pola hidup bersih dan sehat kepada

masyarakat, penyediaan air minum bersih dan jamban sehat, keterampilan petugas mengatasi kejang-kejang, serta pencegahan dan pemberantasan menular seperti malaria.

2. PENYEBAB ANAK DAN BALITA SAKIT

Penyebab Anak Sakit rata-rata tahun 2005-2010 adalah Diare 65,51%, Pneumonia/ISPA 12,14%, serta Malaria 22,32%. Secara keseluruhan penyebab anak sakit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (lihat tabel)

Tabel 2.53.
Penyebab Anak Sakit Kabupaten Manggarai Tahun 2007-2010

No	Penyebab	Kasus/Tahun				Rata2 2005-2010	
		2007	2008	2009	2010	Total	%
1	Pneumonia / (ISPA)	520	496	473	281	1,770	12.14
2	Diare		3,137	3,190	3,228	9,555	65.51
3	Campak	4	-	-		4	0.03
4	Malaria	29	1,254	1,183	790	3,256	22.32
Total		553	4,887	4,846	4,299	14,585	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

3. PELAYANAN KESEHATAN ANAK

Cakupan pelayanan kesehatan anak terlihat melalui parameter kesenjangan antara jumlah total anak usia 1-5 tahun dibandingkan dengan cakupan pelayanan kesehatan anak sebagaimana tergambar pada table berikut. (lihat tabel)

Tabel 2.54.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2007-2010

No	Parameter	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Kunjungan Neonatal (KN 2)	5,000	5,425	5,736	5,754
2	Asi Eksklusif Bulin	4,348	4,076	5,502	5,018
3	Kunjungan Bayi		3,513	6,226	6,831
4	Imunisasi :				
	- BCG	5,492	6,093	6,789	6,403
	- DPT3/HB3	5,040	8,346	6,902	6,248
	- Polio 3	5,954	5,731	7,001	6,299
	- Campak	5,450	5,517	6,524	6,228
5	Vit. A (6 - 11 bulan)	3,937	4,022	3,454	3,210
6	Vit. A (12 - 59 bulan)	24,838	21,766	18,103	22,184
7	Gizi :				
	- N/D bayi	57	66	87	81
	- N/D balita	40	46	65	73
	- Penanganan Gizi Buruk bayi MP-ASI	824	0	57	762

No	Parameter	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
	- Penanganan Gizi Buruk balita (perawatan)	408	0	35	49
	- Pemberian Kapsul Iodium bumil	4,136	0	2,229	2,133
8	Kelambu Berisektisida	0	4,100	10,850	14,459

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

3. STATUS GIZI BURUK DAN KURANG MASIH TERJADI PADA BALITA.

Status gizi buruk dan kurang merupakan masalah yang kompleks karena penyebabnya multi faktor dan multi dimensi. Penyebab langsung gizi buruk dan gizi kurang dipengaruhi oleh tidak cukupnya konsumsi energi, protein, dan zat gizi lain serta adanya penyakit infeksi yang menyertai. Penyebab tidak langsung lainnya adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya keluarga, seperti pola asuh, daya beli keluarga, ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dan juga pengetahuan ibu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Gambaran status gizi Balita di Kabupaten Manggarai tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55.
Status Gizi Balita Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

Tahun	Jumlah Balita Ditimbang	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik	
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
2005	22.865	777	3.40	5892	25.77	16.196	70.83
2006	26.127	722	2.76	5426	20.76	19.979	76.48
2007	30.653	456	1.50	3687	12.03	26.51	86.47
2008	24.96	121	0.50	2525	10.12	22.314	89.38
2009	25.027	35	0.14	1404	5.61	23.588	94.25
2010	24.142	49	0.20	779	3.23	23.314	96.57

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Jika dibandingkan dengan standard Nasional, maka kasus gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Manggarai sudah jauh lebih baik dari standard Nasional (tingkat toleransi nasional : gizi buruk <5% dan gizi kurang <20%). Namun tetap merupakan masalah karena secara kumulatif jumlah kasus gizi buruk dan gizi kurang terus terjadi sebagaimana terlihat pada tabel tersebut di atas. Dengan demikian pencegahan dan penanggulangan masalah gizi tetap perlu ditingkatkan kerjasama dengan seluruh stake holder dan pemangku kepentingan.

Parameter lain pada upaya perbaikan gizi balita juga ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan gizi di posyandu dan pemberian ASI eksklusif. Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat tahun 2005-2010 mencapai 70,92%, serta rata-rata pemberian ASI eksklusif mencapai 73,58%. (lihat tabel)

Tabel 2.56.
Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Pemberian ASI Eksklusif Kabupaten Manggarai
Tahun 2005-2010

Tahun	Jumlah Balita Seluruh (S)	Jumlah Balita Ditimbang (D)	Ratio D/S (%)	Jumlah Bayi 0-6 Bulan	Cakupan ASI Eksklusif	%
2005	35.987	22.865	63.54	6737	5415	80.38
2006	38.83	26.127	67.28	6294	4753	75.52
2007	39.338	30.653	78	6561	4348	66.27
2008	35.934	24.96	69.46	6823	4976	72.93
2009	34.783	25.027	71.95	3116	2331	74.81
2010	33.358	25.142	72.37	6947	5018	72.23

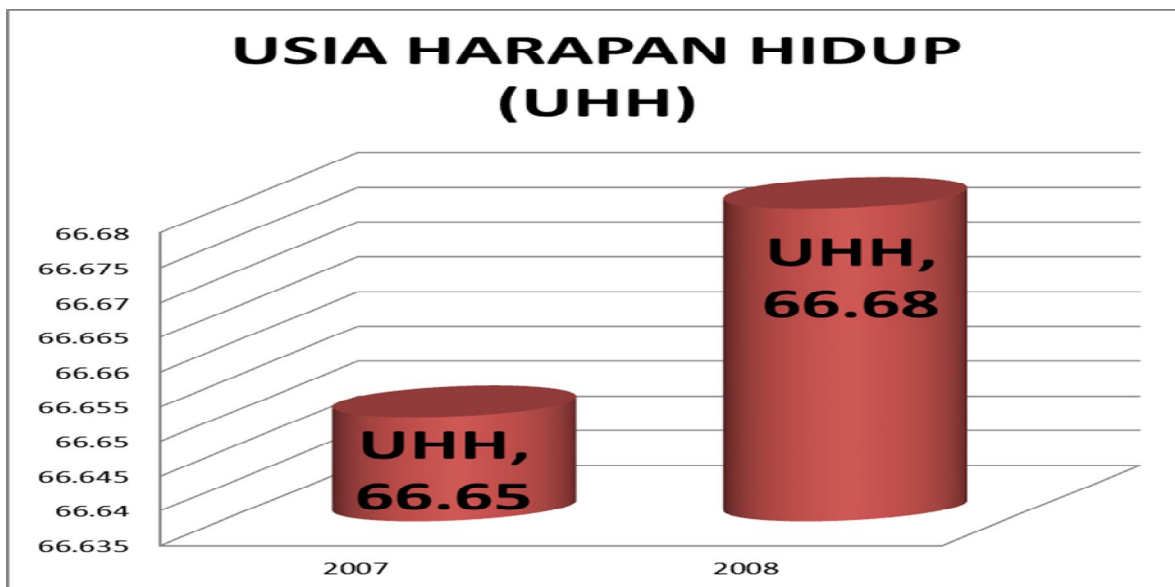
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Berdasarkan data tingkat partisipasi masyarakat (D/S) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini telah diupayakan perbaikan kecukupan gizi balita, walaupun belum mencapai target 80% sebagaimana yang diharapkan. Belum optimalnya capaian perbaikan kecukupan gizi disebabkan oleh peran Pokjanal Posyandu tingkat kabupaten dan kecamatan, serta peran Pokja dan Pengurus Posyandu tingkat desa belum optimal. Sedangkan rendahnya pemberian ASI Eksklusif yang juga berada di bawah target 80% disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kegiatan promosi dan advokasi tentang peningkatan Pemberian Air Susu Ibu masih sangat kurang, belum tersedianya tenaga konselor ASI pada unit pelayanan kesehatan, masih kurangnya penyuluhan oleh petugas tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif pada bayi.

D. USIA HARAPAN HIDUP

Tidak ada UHH absolut yang bisa dijadikan patokan UHH ideal. Cara sederhana menentukan UHH ideal adalah dengan melakukan perbandingan UHH antar wilayah dengan kemampuan sumberdaya yang sama atau setara (benchmarking).

Diagram 2.13.
Usia Harapan Hidup (UHH)



Dengan metode ini terlihat bahwa rata-rata UHH penduduk Manggarai tahun 2007 yang mencapai 66.65 tahun masih lebih rendah 5 bulan dibandingkan dengan rata-rata UHH NTT yang mencapai 66.70 tahun, serta lebih rendah 2,05 tahun dari UHH nasional sebesar 68,70 tahun pada tahun yang sama. Tahun 2008 UHH penduduk Manggarai meningkat menjadi 66.68 tahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi UHH antara lain : disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Usia Harapan Hidup :

1. Jumlah dan Jenis Penyakit yang Diderita Masyarakat.

Jumlah dan jenis penyakit yang diderita masyarakat merupakan variabel sangat menentukan UHH masyarakat. Kondisi saat ini jumlah dan jenis penyakit yang diderita masyarakat manggarai sangat bervariasi setiap tahunnya. Sepuluh jenis penyakit terbanyak yang diderita berdasarkan data kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan

kesehatan umum seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, serta klinik pelayanan kesehatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57.
Sepuluh Jenis Penyakit Terbanyak Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Jenis Penyakit	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Penyakit saluran pernapasan atas	45,225	67,165	61,949	77,370	88,188	95,575
2	Penyakit Infeksi pada Usus	22,039	28,639	27,175	35,220	35,061	46,455
3	Penyakit sistem otot dan jaringan pengikat	16,806	21,848	22,486	32,164	41,147	36,928
4	Penyakit Kulit dan Jaringan Sub Kutan	12,926	26,306	16,332	13,866	12,598	18,824
5	Riketsiasis dan Penyakit karena Arthropoda	13,015	16,657	12,964	12,974	13,221	15,199
6	Penyakit Rongga Mulut	9,999	8,275	9,765	11,426	12,904	12,465
7	Penyakit infeksi parasit akibat kemudian	4,167	15,207	12,424	8,825	7,740	10,022
8	Penyakit pada saluran pernapasan bawah	5,953	5,417	5,273	7,512	6,860	7,221
9	Penyakit tekanan darah tinggi	3,163	3,207	3,943	6,903	10,000	6,922
10	Penyakit mata dan adneksa	2,138	1,767	2,227	3,028	2,581	4,533
11	Penyakit Lainnya	24,534	36,804	37,092	56,599	57,441	56,090

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

2. Cakupan rawat jalan dan rawat inap Puskesmas dan RSUD

Jumlah dan jenis penyakit di atas meningkat setiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke berbagai pusat pelayanan kesehatan dasar yang ada. (lihat tabel)

Tabel 2.58.
Kunjungan Rawat Jalan dan Inap Puskesmas Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Kunjungan	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kunjungan rawat jalan Puskesmas	83,975	224.967	229,012	270.342	271.564	303.72
2	Kunjungan rawat inap Puskesmas	570	278	732	632	771	673

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan selama kurun waktu 2005-2010 dipengaruhi antara lain meningkatnya aksesibilitas ke berbagai pusat pelayanan kesehatan dasar,

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan fasilitas kesehatan sebagai pilihan utama untuk pengobatan.

Peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan juga tergambar dalam data kunjungan pasien pada poliklinik RSUD Ruteng. (lihat tabel)

Tabel 2.59.
Cakupan Rawat Jalan RSUD Menurut Jenis Pelayanan Kabupaten Manggarai
Tahun 2005-2010.

No	Rawat Jalan	Tahun						TOTAL 2005-2010	%
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
1	Poli Peny.Dalam	6.490	4.135	5.034	4.665	6.058	5.632	32.014	22,44%
2	UGD	3.017	3.291	3.938	4.101	5.014	7.202	26.563	18,62%
3	Poli Umum	2.964	4.247	4.548	4.269	3.937	4.223	24.188	16,96%
4	Poli Bedah	3.340	3.169	3.683	4.520	4.486	3.862	23.060	16,16%
5	Poli Anak	2.237	2.283	2.459	1.957	1.712	1.528	12.176	8,54%
6	Poli Obgin	2.869	2.011	1.050	1.005	852	1.416	9.203	6,45%
7	Poli Gigi	1.695	1.304	1.385	959	843	890	7.076	4,96%
8	Poli KB	345	313	364	354	611	595	2.582	1,81%
9	Poli Bayi Sehat	1.133	297	-	250	151	435	2.266	1,59%
10	Poli Mata	303	148	65	113	539	316	1.479	1,04%
11	Poliklinik THT	-	-	-	-	181	1.035	1.216	0,85%
12	Poli Gizi	78	120	123	133	153	226	833	0,58%
Jumlah		24.471	21.313	22.649	22.326	24.537	27.360	142.656	

Sumber: RSUD Ruteng Tahun 2010

Selanjutnya tingkat kunjungan ke fasilitas kesehatan dapat dilihat juga pada tingkat dan jenis penyakit cakupan Rawat Jalan dan Rawat Inap, **Penyebab Kematian Terbanyak** pada RSUD Ruteng yang tergambar pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.60. Sepuluh Penyakit Terbanyak Rawat Jalan RSUD
Kabupaten Manggarai 2005-2010

No	Jenis Penyakit	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	
								2005-2010	%
1	Demam tifoid	689	938	1.078	609	857	867	5.038	16,62%
2	Penyakit system kemih	968	1,000	942	1,283	953	1.275	6.421	15,86%
3	Malaria	879	819	897	629	465	430	4.119	10,18%
4	Karies gigi	915	814	632	447	-	347	3.155	10,41%
5	Hipertensi	1357	1,637	1,871	2,126	2,708	2.856	2.866	9,46%
6	Dispepsia	1,252	1,856	2,478	2,599	2,689	2.493	2.504	8,26%
7	Faringitis Akut	1477	1,597	1,420	1,465	1,368	1.453	1.46	4,82%

No	Jenis Penyakit	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	
								2005-2010	%
8	Penyakit Jantung	-	-	-	-	706	703	1.409	4,65%
9	Penyakit pulpa dan periapikal	497	400	405	-	-	-	1.302	4,30%
10	Diare & GE	-	408	440	396	-	-	1.244	4,10%
11	Infeksi kulit & jaringan sub kutan	941	1,180	1,548	1,455	2,271	-	947	3,13%
12	Diabetes Melitus	-	-	-	275	632	621	1.528	3,77%
13	Asma Bronkial	-	-	-	-	376	397	773	2,55%
14	Appendiksitis	393	-	-	-	-	-	393	1,30%
Jumlah		9.368	10.649	11.711	11.284	13.025	11.053	30.307	

Sumber: RSUD Ruteng Tahun 2010

Tabel 2.61. Sepuluh Penyakit Terbanyak Rawat Inap RSUD
Kabupaten Manggarai 2005-2010

No	Jenis Penyakit	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	%
1	Diare & GE	756	760	794	788	567	580	4.245	18,99%
2	Malaria	933	749	693	500	398	320	3.593	16,08%
3	Dispepsia	268	263	502	829	746	482	3.09	13,83%
4	Hipertensi	332	373	394	567	697	493	2.856	12,78%
5	Demam tifoid	363	378	265	302	283	384	1.975	8,84%
6	Anemia	311	351	215	313	386	318	1.894	8,47%
7	Jantung	153	194	213	208	276	252	1.296	5,80%
8	Apendiksitis	-	-	-	270	248	201	719	3,22%
9	Hepatitis	227	230	130	100	-	-	687	3,07%
10	Stroke Nonhaemoragik	-	-	-	177	244	197	618	2,77%
11	Penyakit sistem kemih	212	193	118	-	-	-	523	2,34%
12	Sirosis Hati	181	170	149	-	-	-	500	2,24%
13	Pneumonia	-	-	-	110	190	-	190	0,85%
14	Diabetes melitus	-	-	-	-	-	164	164	0,73%
Jumlah		3.736	3.661	3.473	4.054	4.035	3.391	22.350	

Sumber Data : RSUD Ruteng, Tahun 2005-2010

Tabel 2.62. Penyebab Kematian Terbanyak di RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai
Tahun 2005-2010

No	Jenis Penyakit	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	
								2005-2010	%
1	Gagal Nafas Bayi / Anak	29	47	98	37	52	53	316	18.58%
2	Koma Hepatikum	39	25	40	20	25	36	185	10.88%
3	Gagal Jantung	19	25	27	33	35	22	161	9.47%
4	Perdarahan Intra Kranial	26	27	23	48	52	-	176	10.35%
5	Sepsis	20	-	-	7	50	42	119	7.00%

No	Jenis Penyakit	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	
								2005-2010	%
6	Stroke	-	-	-	21	52	46	119	7.00%
7	Syok Hipovolemik	17	13	16	12	22	15	95	5.58%
8	Gagal Nafas Dewasa	29	29	8	22	17	23	128	7.52%
9	Gagal Ginjal			5		36	20	61	3.59%
10	Malaria Cerebral	13	7	18	11	-	-	49	2.88%
11	Koma Ketoasidosis	11	18	12	17	-	-	58	3.41%
12	Syok Sepsis	4	13	11	12	-	-	40	2.35%
13	Hepatitis Fulminan	-	5	-	3	8	10	26	1.53%
14	GGK						24	24	1.41%
15	Encephalitis				10		10	20	1.18%
16	Diabetes Melitus	-	-	-	-	9	10	19	1.12%
17	Multiple organ failure	10	6					16	0.94%
18	Pneumonia berat				8		6	14	0.82%
19	Susp. Rabies				3		8	11	0.65%
20	KP						10	10	0.59%
21	Cedera Kepala				8			8	0.47%
22	Asma	-	-	-	-	-	7	7	0.41%
23	AIDS				4		1	5	0.29%
24	Anemia				3		2	5	0.29%
25	Tumor Otak						4	4	0.24%
26	Ca paru				4			4	0.24%
27	Cedera Kepala Berat						4	4	0.24%
28	Kelainan Jantung Bawaan						3	3	0.18%
29	Acidosis Metabolik				3			3	0.18%
30	Sirosis hepatis				2			2	0.12%
31	Eklamsi				2			2	0.06%
32	Luka bakar				1			1	0.06%
33	Syok Irreversibel				1			1	0.06%
34	Ca Nasofaring				1			1	0.06%
35	Ca. Pankreas				1			1	0.06%
36	Epilepsi				1			1	0.06%
37	Epiderma				1			1	0.06%
38	Ca. Colon						1	1	0.06%
Total		217	215	258	296	358	357	1,701	

Sumber Data : RSUD Ruteng Tahun 2010

3. Jumlah dan Jenis Penyakit Menular

Penyakit menular secara spesifik sangat mempengaruhi UHH, terlebih jika penyakit tersebut bersifat endemik atau wabah. Rata-rata jenis dan jumlah penderita penyakit menular tahun 2005-2010 di Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut lihat table :

Tabel 2.63. Jumlah dan Jenis Penyakit Menular
Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Jenis Penyakit	Tahun											
		2005	Mati	2006	Mati	2007	Mati	2008	Mati	2009	Mati	2010	Mati
1	TB Paru BTA (+)	164		137	4	101	2	91	3	82	14	50	7
2	TB Paru Klinis	607	17	1,058		1,391	14	456	16	947	6		
3	Diare	7,738	18	6,399	3	6,695	2	9,077	9	8,286	3	9.183	4
4	Malaria Klinis (AMI)	19,383	5	16,916	1	13,609	1	14,782	5	13.375	2	8.870	2
5	Malaria Positif (API)	508		1.054		762		1.010		1.095		1.890	
6	Pneumonia	1,555	50	1,442	17	978	1	898	21	876	39	524	38
7	Kusta	4	0	6	0	5	0	1	0	0	0	0	0
8	Campak	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	Suspek AFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tetanus Neonatorum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hepatitis Klinis	107	17	111	3	119	25	132	39	49	17		
12	HIV*)	2	0	1	0	13	0	14	0	8	2	11	0
13	AIDS*)	1	1	1	1	8	3	5	2	12	9	14	7
14	Infeksi Menular seksual (IMS)	0	0	4	0	0	0	5	0	118	0		
15	Filaria	0	0	5	0	12	0	11	0	29	0	0	0
16	P2 Rabies	1,098	9	380	4	357	3	361	2	444	3	881	11

Sumber Data : RSUD *) dan Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat bahwa kasus pneumonia cenderung menurun dari tahun 2005 sebesar 1.555 kasus menjadi 524 kasus tahun 2010, akan tetapi masih kurang dari target 10% dari jumlah balita dan masih merupakan penyebab kematian tertinggi. Tingginya angka kematian pneumonia pada balita, disebabkan karena kualitas penatalaksanaan kasus pneumonia belum memadai, belum optimalnya pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit (MTBS), belum semua petugas dilatih tentang MTBS, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pneumonia pada balita yang juga mempengaruhi rendahnya angka penemuan kasus.

Perkembangan Penyakit Diare berfluktuasi selama tahun 2005-2010. Tahun 2005 sebesar 7.738 kasus menurun menjadi 9.183 kasus tahun 2010. Tetapi angka penemuan ini masih kurang dari target 60% jumlah balita dan masih merupakan penyebab kematian balita. Kondisi ini disebabkan karena terlambatnya pertolongan, jangkauan dan waktu tempuh ke sarana pelayanan kesehatan yang cukup sulit serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Kasus Malaria Klinis (Annual Malaria Incidence/AMI) mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu 19.383 (AMI 73,68%) tahun 2005 menjadi 8.870 (AMI 30,08%) pada tahun 2010. Mengacu pada stratifikasi daerah malaria Kementerian Kesehatan RI yaitu Daerah endemis tinggi (High Incidence Area = AMI>50%), Daerah endemis sedang (Medium Incidence Area = AMI 10-50%), dan daerah endemis rendah (Low Incidence Area = AMI<10%). Berdasarkan AMI tahun 2010, Kabupaten Manggarai berada dalam kategori daerah endemis sedang. Tetapi apabila melihat kasus malaria positif (Annual Parasite Incidence/API) mengalami peningkatan dari 508 kasus (1,93 %) tahun 2005 menjadi 1.890 kasus (6,41%) tahun 2010. Kabupaten Manggarai berada pada kategori daerah endemis tinggi sesuai stratifikasi daerah malaria Kementrian Kesehatan RI yaitu Daerah endemis tinggi (API >5%), Daerah endemis sedang (API 1-5%), dan daerah endemis rendah (API <1%). Secara program perbedaan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan program malaria sesuai dengan kebijakan program yang mengharuskan penegakan diagnosa malaria dengan diagnosa pasti baik mikroskopis maupun *Rapid Diagnostic Test* (RDT) sehingga dengan sendirinya dapat menekan angka malaria klinis (AMI). Tingginya kasus malaria disebabkan oleh pengobatan malaria yang tidak tuntas, perilaku masyarakat yang masih mencari pengobatan alternatif, rendahnya upaya pencegahan oleh masyarakat itu sendiri seperti tidur tidak menggunakan kelambu, sering keluar pada malam hari dan rendahnya mutu kesehatan lingkungan yang menyebabkan banyaknya tempat perindukan vektor penular malaria yaitu nyamuk *Anopheles* Spesies, pola tanam yang tidak seragam serta koordinasi lintas sektor belum berjalan dengan baik, tenaga mikroskopis yang telah dilatih hanya ada di tingkat puskesmas (15 puskesmas), Masih kurangnya tenaga kesehatan di desa, belum semua tenaga kesehatan di desa dilatih tentang pencegahan dan pengendalian malaria.

Penemuan kasus TB paru BTA (+) mengalami penurunan dari tahun 2005-2010. Tahun 2005 sebanyak 164 kasus (18,67%) menjadi 50 kasus (8,08%) tahun 2010. Keadaan ini masih jauh dari target nasional penemuan TB BTA positif (CDR 70%). Sedangkan angka kesembuhan (cure rate) mengalami fluktuatif. Tahun 2005 sebanyak 108 (65,85%),

tahun 2009 sebanyak 67 (78,82%) dari target angka kesembuhan $\geq 85\%$. Rendahnya penemuan kasus TB BTA positif dan angka kesembuhan disebabkan belum semua petugas memahami tentang program TB DOTS, terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih, tenaga yang sudah dilatih kurang mensosialisasikan kepada petugas lainnya, penjangkaran masih bersifat pasif atau tidak diikuti dengan aktifitas promosi, belum semua puskesmas melaksanakan program TB DOTS (dari 15 puskesmas hanya 11 puskesmas yang melaksanakan program TB DOTS) hal ini disebabkan karena tenaga pelaksana TB DOTS belum dilatih, RS belum melaksanakan TB DOTS, penderita tidak teratur minum Obat Anti Tuberculosis (OAT) yang disebabkan karena kurangnya peran Pengawas Minum Obat (PMO), petugas kurang patuh dalam melaksanakan manajemen pencatatan dan pelaporan, disamping pengaruh perilaku masyarakat yang masih mencari pengobatan alternative.

Demikian pula dengan penyakit menular lainnya seperti HIV dan AIDS mengalami peningkatan dari tahun 2005 yaitu 2 kasus HIV dan 1 Kasus AIDS menjadi 45 kasus HIV dan 29 kasus AIDS dengan korban meninggal sebanyak 14 orang. Peningkatan penemuan kasus HIV dan AIDS dari tahun ke tahun terjadi karena sudah terbentuk Komite Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), gerakan penemuan kasus yang semakin intensif melalui VCT Rumah Sakit, upaya penjangkaran melalui survey HIV pada kelompok risiko tinggi, surveilans/pengamatan kasus AIDS, skrining darah donor melalui UTD PMI dan RS serta penjangkaran oleh LSM Peduli HIV dan AIDS. Faktor yang menghambat tingkat penemuan kasus HIV dan AIDS adalah kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri secara sukarela masih rendah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang HIV dan AIDS. Masih adanya diskriminasi dan stigmanisasi terhadap seseorang yang menderita HIV dan AIDS di masyarakat.

Kondisi temuan kasus HIV/AIDS sampai tahun 2010 belum menggambarkan masalah HIV dan AIDS yang sebenarnya mengingat penyakit ini seperti "*fenomena gunung es*" artinya kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kasus yang telah menular di masyarakat. Karena itu aspek KIE tentang penyakit menular umumnya dan HIV/AIDS khususnya perlu mendapat perhatian serius pada masa mendatang.

Kasus gigitan binatang tersangka rabies akan selalu ada setiap tahun sepanjang populasi HPR (anjing) masih tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi kematian akibat tertular virus rabies adalah terbatasnya ketersediaan vaksin anti rabies (VAR) dan belum optimalnya tim Gerakan Anti Rabies (GAR) dalam mengeliminasi Hewan Penular Rabies (HPR).

4. Kesadaran Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Pada tataran implementasi, PHBS sangat berpengaruh terhadap jumlah penderita sakit dan UHH masyarakat. Parameter PHBS yang lazim dipakai antara lain : jumlah rumah tangga yang memiliki jamban sehat, ketersediaan air minum bersih, kesesuaian luas rumah dengan jumlah penghuni, serta aksesibilitas ke pusat pelayanan kesehatan. (lihat tabel)

Tabel 2.64.
Capaian Hasil Pantauan PHBS Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Parameter PHBS	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Rumah	39.215	39.400	46.536	49.605	50.721	50.810
	- Diperiksa	12.965 (33,06%)	13.381 (33,96%)	11.461 (24,63%)	19.405 (39,12%)	20.062 (39,55%)	33.888 (66,70%)
	- Memenuhi syarat	7.553 (58,26%)	7.697 (57,52%)	6.447 (56,25%)	10.580 (54,52%)	10.287 (51,28%)	18.174 (53,63%)
2.	Jumlah Jamban	26.457	26.603	29.547	33.793	33.859	35.643
	- Diperiksa	11313 (42,76%)	14731 (55,37%)	14885 (50,38%)	15279 (45,21%)	16793 (49,60%)	18784 (52,70%)
	- Memenuhi syarat	3.580 (31,65%)	5.776 (39,21%)	6.827 (45,86%)	7.191 (47,07%)	8.573 (51,05%)	13.557 (72,17%)
3.	Jumlah Sarana Air Bersih (SAB)	9.848	10.375	12.695	12.966	13.125	13.923
	- Diperiksa	1.585 (16,09%)	2.890 (27,86%)	6.780 (53,41%)	7.582 (50,48%)	6.379 (48,60%)	8.412 (60,42%)
	- Memenuhi syarat	1.317 (83,09%)	2.186 (75,64%)	5.600 (82,60%)	6.022 (79,42%)	5.516 (86,47%)	7.335 (87,20%)
4.	Jumlah Sarana Pembuangan Air limbah (SPAL)	18.786	18.501	18.045	10.566	8.091	9.420
	- Diperiksa	9.174 (48,83%)	3.205 (17,32%)	2.712 (15,02%)	3.318 (31,40%)	3.916 (48,40%)	4.535 (48,14%)
	- Memenuhi syarat	1.414 (15,41%)	236 (7,36%)	1.834 (67,62%)	1.846 (56,18%)	2.338 (59,70%)	3.906 (86,13%)

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Data di atas memperlihatkan perkembangan tingkat perbaikan kesehatan lingkungan berdasarkan perubahan kesadaran masyarakat pada beberapa aspek dasar lingkungan sehat yang berpengaruh terhadap UHH. Berdasarkan parameter kesesuaian antara luas rumah dengan jumlah penghuni dan jumlah rumah berlantai tanah, terlihat bahwa baik jumlah rumah maupun rumah memenuhi syarat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

5. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) adalah pemberdayaan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dengan melibatkan secara langsung masyarakat itu sendiri, mendorong peran aktivis dan tokoh masyarakat setempat, disamping pemerintah sebagai pendukung utama. Wujud dari upaya kesehatan berbasis masyarakat antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Desa Siaga dan Usaha Kesehatan sekolah (UKS). (lihat tabel)

Tabel 2.65.
Jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Jenis UKBM	UKBM/Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Posyandu	436	448	469	512	544	547
2	UKS				225	233	238
3	Desa Siaga				49	100	149

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tingkat partisipasi masyarakat tidak diukur dari berapa banyak UKBM yang telah dibentuk secara formal, namun lebih fokus pada tingkat keaktifan anggota masyarakat dalam UKBM tersebut. Tinggi rendah keaktifan masyarakat tersebut tercermin melalui penstrataan posyandu yaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Idealnya tingkat partisipasi masyarakat diukur berdasarkan banyaknya jumlah posyandu dengan strata Purnama dan Mandiri. Dari total 547 posyandu di Manggarai tahun 2010 ternyata baru terdapat 115 (21,02%) posyandu strata Purnama dan 9 (1,65%) posyandu strata Mandiri. Sedangkan 423 (77,33%) posyandu lainnya masih dalam taraf perkembangan yang membutuhkan ekstra upaya pembinaan dan penguatan kelembagaan.

Berdasarkan upaya kesehatan melalui sekolah (UKS) telah dilakukan promosi kesehatan pada 238 SD yang ada melalui kerjasama petugas kesehatan dan masing unit sekolah dasar. Kedepan diharapkan kerjasama tersebut dapat dikembangkan modul khusus tentang UKS sebagai suplemen mata pelajaran tertentu dalam kurikulum sekolah.

Berdasarkan keaktifan masyarakat dalam Desa Siaga, baru terdapat 49 desa yang bisa dikategorikan siaga. Sama halnya dengan permasalahan posyandu, keaktifan Desa Siaga tidak diukur melalui berapa jumlah desa yang dibentuk, tetapi lebih difokuskan pada proses pematangan kelembagaan dan pengurus Desa siaga. Secara formal telah terbentuk 149 Desa/Kelurahan Siaga tahun 2010.

6. Sarana dan Prasaran Pelayanan Kesehatan

Komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan selama tahun 2005-2010 sangat nyata melalui pembangunan berbagai pusat pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan poskesdes. Disamping itu Pemerintah Daerah juga telah melengkapi berbagai sarana RSUD Ruteng. Jumlah pusat pelayanan kesehatan di Manggarai tahun 2005-2010 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.66.

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Jenis Fasilitas Pelayanan	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Umum Swasta	1	1	1	1	1	1
3	Klinik Khusus Kusta Swasta	1	1	1	1	1	1
4	Puskesmas Non Rawat Inap	8	12	12	11	11	11
5	Puskesmas Rawat Inap	3	3	3	4	4	4
6	Puskesmas dengan laboratorium	11	12	13	13	13	12
7	Puskesmas Pembantu/Pustu	33	42	53	60	61	62
8	Poskesdes		1	10	24	37	42
9	Polindes	26	26	28	28	28	28
10	Puskesmas Keliling	20	23	23	21	24	26
11	BKIA/Poliklinik	2	2	2	2	2	3
12	Optikal			1	1	2	2
13	Apotek	5	5	5	6	6	6
14	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Peningkatan jumlah pusat pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai tahun 2005-2010 ditandai oleh perubahan rasio jumlah penduduk dibanding puskesmas dimana pada tahun 2005 sebesar 1:24.276 jiwa menjadi 1:19,469 jiwa tahun 2010, serta telah melampaui rasio ideal puskesmas per penduduk yakni 1:20.000 jiwa. Demikian pula rasio Pustu dibanding jumlah penduduk sebesar 1:8.093 tahun 2005 menjadi 1:4.710 jiwa tahun 2010. Sedangkan rasio Poskesdes dibanding jumlah desa sebesar 1:3,55, idealnya rasio Poskesdes dan Desa sebesar 1:1.

Kapasitas sarana dan prasarana kesehatan di RSUD Ruteng diukur melalui kesesuaian antara jumlah penderita dengan kapasitas daya tampung ruangan, tempat tidur dan lama hari perawatan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.67.
Indikator Pelayanan RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	INDIKATOR	TAHUN						STANDAR NASIONAL
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Tempat Tidur	97	101	101	106	137	137	
2	Penderita MRS	5,441	6,630	7,959	8,898	9,102	9.080	
3	Penderita KRS Hidup	4,970	6,383	7,382	8,285	8,249	8.269	
4	BOR (%)	59.25	69.57	84.25	85.33	73.83	57	50-85
5	ALOS (HARI)	3.83	3.39	3.3	3.17	3.00	3	4-5 HARI
6	TOI (HARI)	2.92	1.63	1.17	2.00	1.17	2	1-3 HARI
7	BTO (KALI)	55	67.92	79	75.00	76.00	65.00	30-40X/TH
8	GDR (‰)	39.58	33.52	35.92	34.17	37.42	34	<45‰
9	NDR (‰)	23.08	31.77	20.88	18.50	18.00	19	<25 ‰

Sumber : RSUD Ruteng Tahun 2010

Berdasarkan *Bed Occupancy Rate (BOR)* atau tingkat pemanfaatan tempat tidur terlihat mengalami Fluktuasi dari Tahun ke Tahun, tetapi pada tahun 2008 mengalami sedikit peningkatan dari standar Nasional 50%-85%, mencapai 85,33% hal ini disebabkan karena Jumlah Pasien Miskin(Jamkesmas & Jamkesda) yang dirawat di RS cukup banyak disamping kemudahan akses dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan di RSUD . Sedangkan BOR pada tahun-tahun lainnya masih dalam batas toleransi standar BOR nasional . *Average Long of Stay (ALOS)* atau rata-rata lama hari rawat terjadi perubahan dari 3.83 hari tahun 2005 menjadi 3 hari rawat tahun 2010 atau berada dibawah standar nasional sebesar 4-5 hari. Namun pendeknya hari rawat ini tidak identik dengan tingkat kesembuhan pasien. Sering terjadi pendeknya hari perawatan karena pasien datang dalam keadaan telah parah dan keluar RS sebelum dinyatakan sembuh dengan berbagai alasan sosial ekonomi. Indikator *Turn Over Interval (TOI)* atau jeda penggunaan tempat tidur yang idealnya selama 1-3 hari juga masih dalam batas kewajaran. Tahun 2005 TOI mencapai 2.92 hari, tahun 2010 TOI berubah menjadi 2,25 hari. Sedangkan perbedaan terlihat pada indikator penggunaan tempat tidur (BTO) yang idealnya 30-40 kali dalam setahun, ada kecenderungan peningkatan BTO dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan jumlah tempat tidur pada tahun 2006-2010 masih

kurang dibandingkan jumlah pasien yang dirawat, selain itu bayi baru lahir yang rawat gabung dirawat satu tempat tidur dengan ibunya.

Terhadap mutu pelayanan RSUD Ruteng tergambar melalui Indikator angka kematian setelah 48 jam (NDR) yang dicapai, (Standar Nasional sebesar <25%), sedangkan di RSUD Ruteng pada tahun 2005 pencapaian NDR 23,5%, dan pada tahun 2010 mencapai 19%. Indikator angka kematian seluruhnya (GDR) menggambarkan mutu pelayanan di unit pelayanan tingkat pertama dengan (target nasional <45%), sedangkan di RSUD Ruteng pada Tahun 2005 angka GDR 39,58 % dan pada tahun 2010 mencapai 34 %. Indikator NDR dan GDR ini sangat dipengaruhi tingkat keparahan penyakit yang diderita pasien saat tiba di RS.

7. Tenaga Kesehatan (Nakes)

Tenaga kesehatan berperan penting sebagai agen perubahan di bidang kesehatan masyarakat. Disamping berperan sebagai pelaksana tindakan kuratif terhadap pasien, Nakes juga berperan besar dalam upaya preventif promotif.

Jumlah, jenis dan Kebutuhan Nakes di Kabupaten tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68.
Rasio Tenaga Kesehatan dibanding Target Nasional
Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010.

No	Rasio Tenaga Kesehatan	Tahun						Target Nasional
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Rasio Dokter Spesialis Per 100.000 Pddk	1,12	1,47	1,43	1,79	1,77	1,71	6
2	Rasio Dokter Umum Per 100.000 Pddk	4,49	2,56	4,66	1,79	6,02	7,19	40
3	Rasio Dokter Gigi Per 100.000 Pddk	1,12	1,83	2,51	2,51	2,83	3,42	11
4	Rasio Apoteker Per 100.000 Pddk	0,37	0,37	0,72	1,08	1,77	3,08	10
5	Rasio Bidan per 100.000 Pddk	35,82	39,94	44,48	41,97	48,53	51,71	100
6	Rasio Perawat per 100.000 Pddk	46,06	45,07	59,19	74,25	78,64	112,31	100
7	Rasio Ahli Gizi Per 100.000 Pddk	2,25	2,93	2,87	4,66	5,67	5,82	22
8	Rasio Ahli Sanitasi Per 100.000 Pddk	4,87	5,87	10,04	11,48	12,75	14,72	40
9	Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Per 100.000 Pddk	2,62	2,93	4	3,95	4,61	6,51	40

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Berdasarkan target nasional, setiap 100.000 penduduk idealnya dilayani oleh 6 orang dokter spesialis. Dengan demikian penduduk Manggarai yang berjumlah 292.037 jiwa tahun 2010, idealnya perlu dilayani oleh $292.037/100.000 \times 6$ (target nasional) = 17.52 dibulatkan menjadi 18 orang dokter spesialis. Kabupaten Manggarai tahun 2010 memiliki 5 orang dokter spesialis, berarti membutuhkan 12 orang dokter spesialis lagi. Kebutuhan terhadap tenaga dokter umum sebanyak $292.037/100.000 \times 40 = 116.81$ orang dibulatkan menjadi 117 orang dokter umum. Kabupaten Manggarai tahun 2010 memiliki 21 orang dokter umum, berarti membutuhkan tambahan 96 orang dokter umum. Demikian juga dengan perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan lainnya.

Secara keseluruhan, perbandingan antara target nasional dan jumlah penduduk tahun 2010 maka diperoleh rasio kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai sebagaimana ditampilkan pada table berikut.

Tabel 2.69.
Perkembangan dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Tahun						Target Nasional (orang)	Kebutuhan Tenaga Kesehatan Baru
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
1	Dokter Spesialis	3	4	4	4	5	5	18	13
2	Dokter Umum	12	7	13	5	17	21	117	96
3	Dokter Gigi	3	5	7	7	8	10	33	23
4	Apoteker	1	1	2	3	5	9	30	21
5	Tenaga Bidan	95	109	124	117	137	151	292	141
6	Tenaga Perawat	123	123	165	207	222	328	344	15
7	Tenaga Gizi	16	8	8	8	13	16	65	49
8	Tenaga Sanitasi	13	16	28	32	36	43	117	74
9	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7	8	11	11	13	19	117	98

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Secara umum terjadi peningkatan jumlah tenaga kesehatan tahun 2010 sebesar 12,79% dibanding kondisi tahun 2005. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan antara tahun 2005 ke tahun 2010 sangat signifikan terjadi pada jumlah tenaga perawat sebanyak 205 orang, bidan sebanyak 56 orang, tenaga sanitasi 30 orang, dokter umum 9 orang, apoteker 8 orang, serta dokter gigi 7 orang, sedangkan untuk tenaga dokter spesialis sampai saat ini jumlahnya belum memadai yakni kebutuhan idealnya 18 orang baru terpenuhi 5 orang untuk seluruh masyarakat Manggarai.

2.3.1.3. Keluarga Berencana

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai selama kurun waktu 2005 – 2010 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.70.
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Jumlah PUS dan Cakupan Pelayanan KB
Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No.	Indikator	Satuan	Tahun					2010
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	267,067	272,937	275,214	278,773	282,289	292.533
2	Pertumbuhan Penduduk	%	1.79	2.20	0.83	1.29	1.26	3.63
3	Angka Kelahiran Total/TFR	%	4.25	3.69	3.46	3.41	3.35	3.24
4	Peserta KB Aktif	Akseptor	19,228	23,430	26,354	30,638	33,797	33.111
5	Jumlah PUS	PUS	38,463	40,816	42,217	44,569	45,780	48.093
6	CPR	%	49.99	57.40	62.42	68.74	70.71	68.84
7	KB "Unmet need"	PUS	23,063	17,827	13,739	12,462	7,970	9.554
		%	30.38	22.27	32.54	27.96	22.86	19.86
8	Jenis Pelayanan KB :							
	- Pil	Akseptor	1,161		1,578	9,131	9,026	9.568
	- Suntik	Akseptor	2,340		3,074	13,095	18,357	14.148
	- IUD	Akseptor	416		572	7,009	5,654	7.525
	- Implant	Akseptor	17		50	486	448	706
	- MOW	Akseptor	34		179	1,027	1,079	947
	- MOP	Akseptor					22	136
	- Kondom	Akseptor				54	63	140

Sumber Data : BKKBPP, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Tahun 2010

Dari tabel di atas tergambar bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010 sebesar 1,83 jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 1.80 maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tersebut belum mencapai target.

B. Faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk

1. Total Fertility Rate (TFR)

Tingkat kelahiran adalah penyebab utama tingginya pertambahan penduduk. Hasil Perhitungan Efek dan Dampak penggunaan alat dan obat kontrasepsi oleh peserta KB di

Kabupaten Manggarai sampai tahun 2010 sebesar 3,24 (rata-rata melahirkan melahirkan seorang wanita di usia reproduksi 15-49 tahun rata-rata 3-4 orang anak). Jika dibanding dengan target RPJMD sebesar 3,25 maka dapat disimpulkan sudah melampaui target RPJMD.

2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

Para pasangan usia subur yang aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi di Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2010 sebesar 68,84% artinya tiap 100 pasangan usia subur (PUS) terdapat 68 sampai 69 pasang yang menggunakan alat dan obat kontrasepsi. Jika dibanding dengan target RPJMD sebesar 72% maka dapat disimpulkan belum mencapai target RPJMD.

2.3.1.4. Pekerjaan Umum

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi barang dan jasa. Infrastruktur lainnya seperti energi dan kelistrikan, irigasi, jaringan air bersih merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi dan memberikan jaminan keterjangkauan bagi pelayanan publik serta membangkitkan iklim investasi.

A. Pembangunan Prasarana dan Sarana Jalan dan Jembatan

1. Prasarana Jalan

Realisasi Pembangunan Jalan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2005-2010 jika dibandingkan dengan target menurut jenis jalan yakni:

- a. Aspal (HRS dan Lapen), Target 625 Km dengan Realisasi 702,50 Km (112,4 %)
- b. Telford, Target 220,59 Km dengan Realisasi 202,24 Km (119,8 %)
- c. Pembukaan Jalan Baru, Target 357,61 Km dengan Realisasi 359,77 Km (101 %)
- d. Rehabilitasi Jalan, Target 70,10 Km dengan Realisasi 102,30 Km (146 %)

Proporsi panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi eksisting di Kabupaten terlihat pada table berikut ini:

Tabel 2.71.
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Manggarai Tahun 2005 s.d 2010

No.	Status Jalan	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jalan Negara :						
	b. Panjang	43,60	43,60	43,60	43,60	61,79	127,89
	c. Kondisi :						
	8. Baik	43,60	43,60	43,60	43,60	61,79	98,79
	9. Sedang	-	-	-	-	-	14,60
	10. Rusak	-	-	-	-	-	14,50
2.	Jalan Provinsi :						
	a. Panjang	95,00	95,00	95,00	95,00	100,15	34,50
	b. Kondisi :						
	11. Baik	95,00	95,00	95,00	95,00	56,55	30,50
	12. Sedang	-	-	-	-	23,60	4,00
	13. Rusak	-	-	-	-	20,00	-
3.	Jalan Kabupaten :						
	a. Panjang						
	1. HRS	17,50	24,00	43,00	46,70	53,46	66,50
	2. Lapen	80,00	129,70	232,90	333,52	518,75	636,02
	3. Telford	62,00	25,20	38,70	97,25	162,33	202,24
	4. Jalan Tanah	121,61	7,00	25,00	112,00	185,10	238,16
	b. Kondisi :						
	1. Baik						
	a. HRS	17,50	24,00	43,00	46,70	53,46	66,50
	b. Lapen	80,00	129,70	220,26	301,84	473,11	544,08
	c. Telford	62,00	25,20	35,76	87,38	142,22	154,35
	d. Jalan Tanah	-	-	-	-	-	-
	2. Sedang						
	a. HRS	-	-	-	-	-	-
	b. Lapen	-	-	11,65	16,68	25,94	59,35
	c. Telford	-	-	1,93	4,86	8,12	26,10
	d. Jalan Tanah	-	-	-	-	-	-
	3. Rusak						
	a. HRS	-	-	-	-	-	-
	b. Lapen	-	-	1,00	15,00	19,70	32,60
	c. Telford	-	-	1,00	5,00	12,00	19,94
	d. Jalan Tanah	-	-	-	-	-	-

No.	Status Jalan	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4.	Panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, & kabupaten/kota)	419.71	324.5	478.195	827.965	1,081.582	1,305.31

Sumber Data: Dinas Kimpraswil Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Proporsi panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi eksisting menurut Kecamatan Tahun 2005-2009, terlihat pada table berikut ini:

**Tabel 2.72. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 2010
Kabupaten Manggarai**

NO	Kecamatan	Kondisi Baik	Kondisi Sedang Rusak	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat	Jalan secara keseluruhan
1	Satar Mese	143.74	16.6	14	-	184.9
2	Satar Mese Barat	71.37	4	-	-	180
3	Langke Rembong	107.56	9.5	9.94	-	152.49
4	Ruteng	106.726	14.15	-	-	120.35
5	Wae Rii	76.61	6.9	-	-	74.50
6	Lelak	27.77	6.4	8.1	-	55.7
7	Rahong Utara	21.98	17.4	-	-	56.8
8	Cibal	99.39	10.5	19	-	128.3
9	Reok	104.28	5.5	3.37	-	152.2
10	Jumlah	759.426	90.95	54.41	-	1.105.24

Sumber Data: Dinas Kimpraswil Kabupaten Manggarai Tahun 2010

3. Prasarana Jembatan

Realisasi Pembangunan Jembatan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2005-2010 sebanyak 75 buah dari target 94 buah atau sekitar 77,8 %.

Tabel 2.73. Pembangunan Jembatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No.	Konstruksi	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Beton	30	7	10	5	7	5
2.	Komposit	3	-	-	-	1	-
3.	Baja	1	1	2	1	2	-

Sumber Data: Dinas Kimpraswil Kabupaten Manggarai Tahun 2010

B. Pembangunan Sumberdaya Air

Dalam periode selama kurun waktu tahun 2005-2010, pemerintah Kabupaten Manggarai telah membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi baik teknis maupun sederhana sepanjang 73.889 m (216,5 %). Selain kegiatan tersebut, dalam rangka menjamin kualitas dan pasokan air, juga telah dilakukan pengerukan, pembersihan sungai sepanjang 300 m

(28,6 %) dan pembangunan prasarana pengamanan kali 738 m (64,6 %), pembangunan atau rehabilitasi bendungan 58 buah (89,2 %). Pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan air sepanjang tahun yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi padi lahan basah.

Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya berupa saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi yang secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier, terdiri dari:

Rasio jaringan irigasi tahun 2005-2010 Kabupaten Manggarai, sebagaimana terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.74.
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Manggarai Tahun 2005 s.d 2010

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jaringan Primer	234	448	1.084	1.576	9.303	5.409
2.	Jaringan Sekunder	651	532	1.651	1.708	17.521	6.184
3.	Jaringan Tersier	1.015	720	2.565	2.016	15.137	6.126
4.	Luas lahan budidaya	157.495	157.972	166.148	165.640	56.324	?
5.	Rasio						

Sumber Data: Dinas Kimpraswil Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Rasio jaringan irigasi menurut Kecamatan tahun 2010, sebagaimana terlihat pada table 2.73. di bawah ini:

Tabel 2.75.
Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

NO	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas lahan budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)	(7)	(8=7/6)
1	Satar Mese	3.690	7.774	6.177	17.641	2.983	17
2	Satar Mese Barat	3.643	4.554	4.107	12.304	679	6
3	Langke Rembong	3.730	6.501	7.150	17.381	400	2
4	Ruteng	2.069	4.838	6.183	13.090	1.099	8
5	Wae Rii	1.127	2.473	2.779	6.379	687	11
6	Lelak	275	-	-	275	521	189
7	Rahong Utara	1.280	400	371	2.051	150	7
8	Cibal	1.675	2.611	2.973	7.259	65	1
9	Reok	2.348	1.520	1.489	6.357	520	8
	Jumlah	19.837	31.671	31.229	82.737	7.104	250

Sumber Data: Dinas Kimpraswil Kabupaten Manggarai Tahun 2010

C. Pembangunan Perumahan dan Permukiman

1. Pembangunan Perumahan

Pembangunan perumahan ditinjau dari kuantitas dan kualitas rumah yakni dari status kepemilikan rumah, luas rumah, jenis lantai rumah yang dominan maupun fasilitas pendukung yaitu: fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah atau air bekas dan pembuangan sampah.

Data prosentase status dan konstruksi rumah tinggal sebagaimana terlihat pada table-tabel berikut:

Tabel 2.76.
Status Rumah tinggal

Uraian	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Milik sendiri		-	80,22	83,57	74,18
Kontrak		-	1,24	1,37	3,51
Sewa		-	0,15	0,18	0,19
Bebas sewa		-	0,82	0,84	0,66
Dinas		-	0,78	1,98	1,01
Milik Orangtua		-	16,12	12,07	18,34
Lainnya		-	0,66	0,00	2,12
Total		-	100,00	100,00	100,00

Sumber : Manggarai Dalam Angka, Tahun 2010

Tabel 2.77.
Konstruksi Rumah Tinggal di kabupaten Manggarai

Uraian	Tahun			
	2006	2007	2008	2009
Luas Lantai				
0 < 20	3,30	1,96	2,31	4,48
20 – 49	73,98	54,75	59,35	61,74
50 – 99	19,27	40,39	34,27	28,19
100 – 149	3,46	2,44	2,88	4,01
➤ 150	-	0,46	1,19	1,58
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00
Jenis lantai				
Tanah	51,30	46,47	54,79	34,08
Bukan tanah	48,70	53,53	45,21	65,92
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00
Dinding				

Uraian	Tahun			
	2006	2007	2008	2009
Tembok	15,80	13,48	15,29	20,15
Kayu	43,16	35,60	38,62	42,93
Bambu	39,57	48,93	43,44	35,46
Lainnya	1,47	1,99	2,65	1,45
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00
Jenis atap				
Beton	0,33	0,15	-	0,35
Genteng	0,83	1,15	0,34	1,01
Sirap	1,16	1,33	-	0,16
Seng	90,39	83,3	90,29	93,41
Asbes	0,17	-	0,18	0,00
Ijuk/rumbia	4,47	3,15	1,64	2,68
Lainnya	2,65	10,93	7,55	2,40
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Manggarai Dalam Angka, Tahun 2010

Prosentase kepemilikan rumah sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa status rumah milik sendiri cenderung berkurang pada kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2009. Hal tersebut memperlihatkan tingkat pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat penyediaan rumah milik. Secara kuantitas persentase rumah dengan konstruksi, yaitu atap layak, dinding permanent, lantai bukan tanah, luas lantai diatas 20 m², mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konstruksi rumah penduduk beransur-ansur semakin berkualitas dan memenuhi standar rumah yang ideal.

2. Pembangunan permukiman.

Permukiman yang ideal adalah tersedianya sarana dan prasarana dasar meliputi, sarana air minum bersih, sanitasi, jalan lingkungan dan drainase. Dalam periode tahun 2005-2010 pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menata lingkungan permukiman, baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan secara bertahap melaksanakan penataan melalui pembangunan sarana air minum bersih, jalan lingkungan dan drainase.

Dengan demikian cakupan perolehan air minum bersih menurut jumlah jiwa dan kepala keluarga tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.78.
Pelayanan Air Minum Bersih Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

Kecamatan	Target Pelayanan		2007				2008				2009				2010			
			Sudah Terlayani		Belum Terlayani		Sudah Terlayani		Belum Terlayani		Sudah Terlayani		Belum Terlayani		Sudah Terlayani		Belum Terlayani	
	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
Langke Rembong	55,503	11,685	37,556	6,905	15,515	3,444	39,158	7,172	13,913	3,177	49,953	10,516	5,550	1,168	52,728	11,101	2,775	584
Wae Rii	26,213	5,519	15,706	3,570	9,171	1,786	17,836	3,925	7,041	1,431	20,970	4,415	5,243	1,104	22,281	4,691	3,932	828
Ruteng	38,941	8,198	44,719	7,423	22,941	7,470	52,153	8,662	15,507	6,231	27,259	5,739	11,682	2,459	29,206	6,149	9,735	2,050
Satar Mese	31,413	6,613	33,231	5,879	28,753	6,717	45,981	8,004	16,003	4,592	21,989	4,629	9,424	1,984	23,560	4,960	7,853	1,653
Satar Mese Barat	34,390	7,240	-	-	-	-	-	-	-	-	22,354	4,706	12,037	2,534	24,073	5,068	10,317	2,172
Cibal	38,839	8,177	26,454	5,366	10,936	3,122	32,046	6,298	5,344	2,190	27,187	5,724	11,652	2,453	29,129	6,132	9,710	2,044
Lelak	12,397	2,610	-	-	-	-	-	-	-	-	9,298	1,957	3,099	652	9,918	2,088	2,479	522
Reok	32,042	6,746	20,563	4,265	9,581	2,672	21,481	4,418	8,663	2,519	25,634	5,397	6,408	1,349	27,236	5,734	4,806	1,012
Rahong Utara	22,298	4,694	-	-	-	-	-	-	-	-	18,953	3,990	3,345	704	20,068	4,225	2,230	469

Sumber Data: PDAM Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Realisasi pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan permukiman pedesaan adalah sepanjang 43,45 Km (7,24 %), jalan lingkungan perkotaan kota kecamatan 17,10 Km (2,85 %). Rinciannya sebagaimana terlihat pada tabel-tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.79.
Jalan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan Tahun 2005-2010

No.	Kecamatan	Konstruksi	Tahun					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Langke Rembong	Telford/Lapen (Km)	-	-	-	-	-	-
2	Wae Rii		-	0,6	1,2	7,8	-	-
3	Ruteng		-	1,2	2,35	4,5	-	-
4	Satar Mese		-	2	3,5	-	-	-
5	Satar Mese Barat		-	2	3	5,2	-	-
6	Cibal		-	-	2,5	2,5	-	-
7	Lelak		-	-	-	1	-	-
8	Reok		-	-	1,5	2	-	-
9	Rahong Utara		-	-	-	0,6	-	-
Total			-	5,8	14,05	23,06	-	-

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.80.
Jalan Lingkungan Perkotaan (Kota Kecamatan) Tahun 2005-2010

No.	Kecamatan	Konstruksi	Tahun					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Langke Rembong	Telford/Lapen (Km)	-	-	3,7	5,5	-	0,75
2	Wae Rii		-	-	-	-	0,9	-
3	Ruteng		-	-	-	-	0,3	1,75
4	Satar Mese		-	-	-	2,1	-	-
5	Satar Mese Barat		-	-	-	-	-	-
6	Cibal		-	-	-	-	-	-

No.	Kecamatan	Konstruksi	Tahun					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
7	Lelak		-	-	-	-	1	-
8	Reok		-	-	-	1	-	-
9	Rahong Utara		-	-	-	-	-	-
Total			-	-	3,7	8,6	2,2	2,5

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Selain pembangunan jalan lingkungan, pemerintah juga telah melaksanakan pembangunan drainase permukiman yang bertujuan mengatasi persoalan sanitasi lingkungan khususnya system pembuangan limbah rumah tangga sesuai standar kesehatan.

Capaian kinerja pembangunan drainase permukiman dalam kurun waktu tahun 2005-2010 adalah 6,708 Km (1,118 %), sebagaimana terlihat pada table berikut di bawah ini:

Tabel 2.81.

Pembangunan Drainase Perkotaan (Kota Kecamatan) Tahun 2005-2010

Perencanaan Drainase Perkotaan (Kota Kecamatan) Tahun 2005-2010								
No.	Kecamatan	Konstruksi	Tahun					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Langke Rembong	Drainase (Km)	-	-	0,7	1,6	1,5	2
2	Wae Rii		-	-	-	-	-	-
3	Ruteng		-	-	0,2	-	-	0,108
4	Satar Mese		-	-	-	-	-	-
5	Satar Mese Barat		-	-	-	-	-	-
6	Cibal		-	-	-	-	-	-
7	Lelak		-	-	-	-	-	-
8	Reok		-	-	0,5	1	-	-
9	Rahong Utara		-	-	-	-	-	-
Total			-	-	1,4	1,7	1,5	2,108

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2010

2.3.1.5. Penataan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;

- b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- c. didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

2.3.1.6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

A. Perhubungan Darat

Untuk meningkatkan layanan publik bidang perhubungan darat maka Pemerintah Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2010 telah membangun terminal penumpang sebanyak 4 (empat) buah yakni: Terminal Kota Ruteng, Cancar, Carep dan terminal Mena. Selain itu untuk mengatur, menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas telah dilakukan kegiatan pengujian kelaikan angkutan umum yang akan beroperasi serta pembangunan marka jalan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Dalam rangka meningkatkan akses transportasi untuk daerah tertinggal, pemerintah kabupaten Manggarai juga mendapat dukungan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berupa bantuan kendaraan untuk Pokmas pada tahun 2010 sebanyak 4 unit kendaraan roda empat (Kecamatan Reok, Cibal, Rahong Utara dan Satarmese Barat).

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah penumpang angkutan umum pada tahun 2005 sebanyak 3.234.630 orang meningkat menjadi 4.071.881 orang pada tahun 2010 atau rata-rata 79,44 %. Sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.82.

Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Jumlah penumpang	3.234.630	3.167.175	3.363.840	3.543.055	3.751.470	4.071.881

Sumber Data : Dishubkominfo Kabupaten Manggarai

Pada tahun 2010 jumlah penumpang angkutan umum dari kecamatan ke ibu kota kabupaten atau sebaliknya tergambar pada table berikut :

Tabel 2.83.
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Menurut Kecamatan
Tahun 2010 Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Jumlah penumpang		Total Jumlah Penumpang	
		Bis	Kapal Laut	Pesawat Udara	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=3+4+5+6)
1	Satar Mese	144.540	-	-	144.540
2	Satar Mese Barat	197.100	-	-	197.100
3	Langke Rembong	1.675.350	-	6.929	1.682.279
4	Ruteng	446.760	-	-	446.760
5	Wae Rii	157.680	-	-	157.680
6	Lelak	6.570	-	-	6.570
7	Rahong Utara	131.400	-	-	131.400
8	Cibal	295.650	-	-	295.650
9	Reok	676.710	11.768	-	688.478
	Jumlah	3.731.760	11.768	6.929	3.750.457

Sumber Data : Dishubkominfo Kabupaten Manggarai Tahun 2010

2. Rasio Ijin Trayek

Pengaturan ijin trayek merupakan suatu upaya penertiban dan pemerataan pendistribusian layanan angkutan umum dalam wilayah Kabupaten Manggarai. Rasio ijin trayek angkutan umum tingkat Kabupaten dan Kecamatan tergambar pada tabel – tabel berikut ini :

Tabel 2.84.
Rasio Ijin Trayek Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Izin Trayek perkotaan	322	326	329	230	202	198
2.	Izin Trayek perdesaan	304	307	354	346	389	402
3.	Jumlah Ijin Trayek	626	633	683	576	591	610
4.	Jumlah penduduk	267.067	272.937	275.214	278.773	282.289	292.533
5.	Rasio Ijin Trayek	0,23	0,23	0,25	0,20	0,20	0,2

Sumber Data : Dishubkominfo Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.85.
Rasio Ijin Trayek Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Ijin Trayek		Total Jumlah Ijin Trayek	Rasio Ijin Trayek
			Perkotaan	Perdesaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)	(7=6/3)
1	Satar Mese	32.507	5	16	21	0,0006
2	Satar Mese Barat	34.115	-	21	21	0,0006
3	Langke Rembong	58.209	210	-	210	0,0036
4	Ruteng	40.964	1	64	65	0,0016
5	Wae Rii	25.884	-	19	19	0,0007
6	Lelak	11.607	-	2	2	0,0002
7	Rahong Utara	21.399	-	12	12	0,0006
8	Cibal	38.540	-	40	40	0,001
9	Reok	31.650	13	29	42	0,0013
	Jumlah	292.533	229	203	432	0,0015

Sumber Data : Dishubkominfo Kabupaten Manggarai Tahun 2010

3. Uji Kir Angkutan Umum

Pengujian atas kelaikan angkutan umum sebelum beroperasi merupakan suatu keharusan dalam rangka menjaga kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas. Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah angkutan umum yang diuji kelaikannya menurun dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Penurunan jumlah ini karena banyaknya kendaraan yang sudah tidak layak untuk beroperasi baik di tingkat Kabupaten maupun angkutan umum di Kecamatan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.86.
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai

No	Angkutan Umum	2005			2006			2007			2008			2009		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Mobil Penumpang Umum	633	633	100	573	573	100	576	576	100	571	571	100	571	571	100
2	Mobil Bus	482	482	100	492	492	100	460	460	100	462	462	100	443	443	100
3	Mobil Barang	801	801	100	817	817	100	870	870	100	951	951	100	918	918	100
4	Kereta Gandeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kereta Tempelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1,916	1,916	60	1,882	1,882	60	1,906	1,906	60	1,984	1,984	60	1,932	1,932	60

Sumber Data : Dishubkominfo Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.87.
Jumlah uji kir angkutan umum selama 1 (satu) tahun Menurut Kecamatan Tahun 2010
Kabupaten Manggarai

No	Angkutan Umum	Mobil Penumpang Umum			Mobil Bus		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Satar Mese	22	22	100	16	16	100
2	Satar Mese Barat	30	30	100	21	21	100
3	Langke Rembong	255	255	100	250	250	100
4	Ruteng	68	68	100	64	64	100
5	Wae Ri'i	24	24	100	20	20	100
6	Lelak	1	1	100	-	-	-
7	Rahong Utara	20	20	100	15	15	100
8	Cibal	45	45	100	37	37	100
9	Reok	103	103	100	89	89	100
	Jumlah	568	568	100	512	512	100

Sumber Data : Dishubkominfo Kabupaten Manggarai Tahun 2010

B. Perhubungan Laut

Sampai dengan tahun 2010 Kabupaten Manggarai hanya memiliki satu pelabuhan laut yaitu pelabuhan regional Kedindi Reo. Posisi pelabuhan tersebut sangat strategis untuk pelayaran baik dalam wilayah NTT maupun antar provinsi di Indonesia. Arus naik turun penumpang melalui pelabuhan laut regional kedindi Reo tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.88.
Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Jumlah penumpang Kapal laut	676	772	1.424	1.012	1.964	1.321

Sumber Data : Dishubkominfo Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan laut rata – rata meningkat setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan transportasi laut masih sangat penting untuk memperlancar roda perekonomian daerah.

Selain pelabuhan regional, Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2010 telah membangun 1 (satu) unit dermaga rakyat Dintor di wilayah Kecamatan Satarmese Barat. Diharapkan dengan terbangunnya dermaga tersebut dapat mendukung kelancaran kegiatan perekonomian di wilayah tersebut.

C. Bidang Perhubungan Udara

Kabupaten Manggarai sampai saat ini memiliki satu pelabuhan udara yaitu pelabuhan udara Frans Sales Lega yang hanya didarati oleh Pesawat Jenis Casa atau pesawat jenis Foker 27. Animo masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi udara sangat tinggi, dilihat dari jumlah arus kedatangan dan keberangkatan penumpang dan volume bongkar muat barang. Sampai dengan tahun 2010 jumlah penumpang yang berangkat 42.572 orang dan yang datang 44.004 orang. Dengan melihat kondisi ini Pemerintah Kabupaten Manggarai telah meningkatkan prasarana dan sarana pelabuhan udara Frans Sales Lega yaitu dengan membangun ruangan VIP dan perpanjangan landasan pacu dari 1.300 m menjadi 1.500 m. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah penumpang layanan angkutan udara di Kabupaten Manggarai.

Tabel 2. 89.

Jumlah Penumpang Angkutan Udara Kabupaten Manggarai Tahun 2005 s.d 2010

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Jumlah penumpang Pesawat udara	4.721	10.796	9.790	11.768	6.929	8.791

Sumber Data : Dishubkominfo Kabupaten Manggarai Tahun 2010

D. Pembangunan Komunikasi dan Informatika

Pembangunan jaringan komunikasi dan informatika merupakan upaya untuk memperlancar akses komunikasi dan informasi baik lokal maupun global disuatu wilayah. Dalam rangka meningkatkan akses komunikasi dan informasi sejak tahun 2007 telah berlangganan *AMC Speedbroad Band Internet Accses* dengan PT. Artha Mas Cipta Jakarta, melakukan kontrak kerja sama dengan TVRI regional Kupang serta memfasilitas pihak swasta untuk berinvestasi di bidang telekomunikasi di Kabupaten Manggarai.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa akses layanan telekomunikasi di Kabupaten Manggarai semakin berkembang dengan tersedianya jaringan komunikasi, Wartel, Warnet, media elektronik dan media cetak baik milik pemerintah maupun swasta, seperti tergambar pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.90.

Jaringan Komunikasi Tahun Kabupaten Manggarai 2005 s.d 2010

NO	Uraian	Tahun 2005	Tahun 2010
1	Jumlah jaringan telepon genggam	2	2
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	1	1
3	Total jaringan Komunikasi (1+2)	3	3

Sumber Data : Dishubkominfo Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jaringan komunikasi yang tersedia di Kabupaten Manggarai tidak mengalami perubahan sejak tahun 2005 – 2010. Hal yang sama juga terjadi

pada jenis dan jumlah surat kabar yang beredar baik surat kabar terbitan nasional maupun terbitan lokal sebagaimana tergambar pada table berikut :

Tabel 2.91.

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Manggarai Tahun 2005 s.d 2010

NO	Uraian	Tahun 2005	Tahun 2010
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	7	7
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	1	1
3	Total jenis surat kabar (1+2)	8	8

Sumber Data : Dishubkominfo Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Manggarai hanya memiliki 1 (satu) media elektronik radio. Jumlah penyiaran radio hingga tahun 2010 di Kabupaten Manggarai sebanyak 3 buah (1 radio pemerintah daerah dan 2 radio swasta).

2.3.1.7. Perusahaan Daerah

Perusahan Daerah Air Minum

Tabel 2.92.

Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Komodo Tahun 2006-2010

NO	UNIT	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010*
1.	PDAM Kota Ruteng	6.167	6.531	7.059	7.431	7.677
2.	IKK Pagal	280	319	334	365	367
3.	IKK Reo	528	545	585	621	656
4.	IKK Cancar	145	129	132	162	217
5.	IKK Iteng	-	375	654	962	1.127
TOTAL		7.120	7.899	8.764	9.541	10.044

*Keadaan Bulan Oktober 2010

Sumber Data: PDAM Tirta Komodo Kabupaten Manggarai

Tabel 2.93.

Debit Air PDAM Tirta Komodo Tahun 2005-2010 (Liter/detik)

NO	UNIT	TAHUN					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	PDAM Kota Ruteng	56	56	56	167		129
2.	IKK Reo	9	9	9	9		12
3.	IKK Cancar	1,5	1,5	1,5	1,5		4

4.	IKK Pagal	2,5	2,5	2,5	2,5		4
5.	IKK Iteng	-	-	-	40		22

Sumber Data: PDAM Tirta Komodo Kabupaten Manggarai, Tahun 2010

Tabel 2.94.
Data Pelayanan PDAM Tahun 2010

No	Kota / IKK	Jumlah Penduduk	Jumlah Pelanggan	Jumlah Penduduk yg menikmati air	Cakupan (%)
1	2	3	4	5 (kolom 4 x 6)	6
1	Kota Ruteng	58.209	7.677	46.062	79
2	IKK PAGAL	38.540	367	2.202	6
3	IKK REO	31.650	656	3.936	12
4	IKK CANCAR	40.964	217	1.302	3
7	IKK ITENG	32.507	1.127	6.762	21
	JUMLAH	201.870	10.044	60.264	

Sumber Data: PDAM Tirta Komodo Kabupaten Manggarai, Tahun 2010

2.3.1.8. Lingkungan Hidup

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tingkat Kabupaten Manggarai telah dilaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah kepada 3 program prioritas yaitu : 1) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan sumber Daya Alam; 2) Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam; 3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;. Adapun pencapaian program-program tersebut adalah :

A. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dilakukan berbagai upaya, antara lain melaksanakan :

1. Rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 260,7 hektar melalui kegiatan antara lain kegiatan Gerakan Penghijauan Berbasis Masyarakat (GPBM), dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.95.
Luas lahan yang direhabilitasi mulai tahun 2006 s/d 2010

No.	Kecamatan	Rehabilitasi					Total rehabilitasi
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Langke Rembong	0	0	0	0	0	0
2	Ruteng	0	0	0	24	0	24
3	Wae Ri'i	50	0	5	0	0	55
4	Reok	0	0	0	0	0	0
5	Satar Mese	50	0	0	0	16.7	66.7
6	Satar Mese Barat	0	0	0	0	0	0
7	Cibal	110	0	0	0	0	110
8	Rahong Utara	0	0	5	0	0	5
9	Lelak	0	0	0	0	0	0
Total		210	0	10	24	16.7	260.7

Sumber Data : BLHD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

2. Rehabilitasi Mangrove seluas 12 hektar di Kecamatan Reok. Kegiatan ini masih dilakukan pada satu kecamatan yang memiliki potensi Mangrove terbesar di Kabupaten Manggarai yaitu 375 hektar dengan kondisi kerusakan sebesar 60,8% atau 190,5 hektar dari seluruh potensi mangrove yang ada di Kecamatan Reok. Kegiatan rehabilitasi belum dilakukan pada 2 kecamatan yang memiliki potensi mangrove yaitu Kecamatan Satar Mese dengan kondisi kerusakan sebesar 79% atau 28,9 hektar dari total 36 hektar. dan Kecamatan Satar Mese Barat dengan kondisi kerusakan sebesar 27,5% atau 6,75 hektar dari total 24 hektar

Tabel 2.96.
Kondisi Mangrove di Manggarai per Desember 2010

NO.	KECAMATAN	Potensi (ha)	Kondisi (%)		Kondisi (ha)	
			Baik	Rusak	baik	rusak
1	Satarmese	36	21	79	7.1	28.9
2	Satarmese Barat	24	72.5	27.5	17.25	6.75
3	Reok	375	39.2	60.8	184.5	190.5
		435			208.85	226.15

Sumber : BLHD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.97.
Rehabilitasi hutan Mangrove tahun 2006 s/d 2010

NO.	KECAMATAN	Potensi (ha) Tahun 2006	Rehabilitasi					Total rehabilitasi
			2006	2007	2008	2009	2010	
1	Satarmese	36	0	0	0	0	0	0
2	Satarmese Barat	24	0	0	0	0	0	0
3	Reok	375	12	0	0	0	0	12
Total		435	12	0	0	0	0	12

Sumber : BLHD Kabupaten Manggarai Tahun 2010



Sumber : BLHD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

B. Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam telah dilaksanakan kegiatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air seluas 440.8 hektar dengan jumlah 34 titik sumber mata air.

Tabel. 2.97.
Konservasi Daerah Tangkapan air & sumber-sumber air tahun 2006 s/d 2010

No	Kecamatan	Jml Sumber mata air	Luas lahan Konservasi (Ha)					Total luas lahan konservasi (Ha)	Total sumber mata air yang dikonservasi
			2006	2007	2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Langke Rembong	110	0	0	10	32	16	58	5
2	Ruteng	55	5	0	10	32	16	63	6
3	Wae Ri'i	47	0	0	5	16	16	37	2
4	Reok	20	0	0	0	32	16	48	3

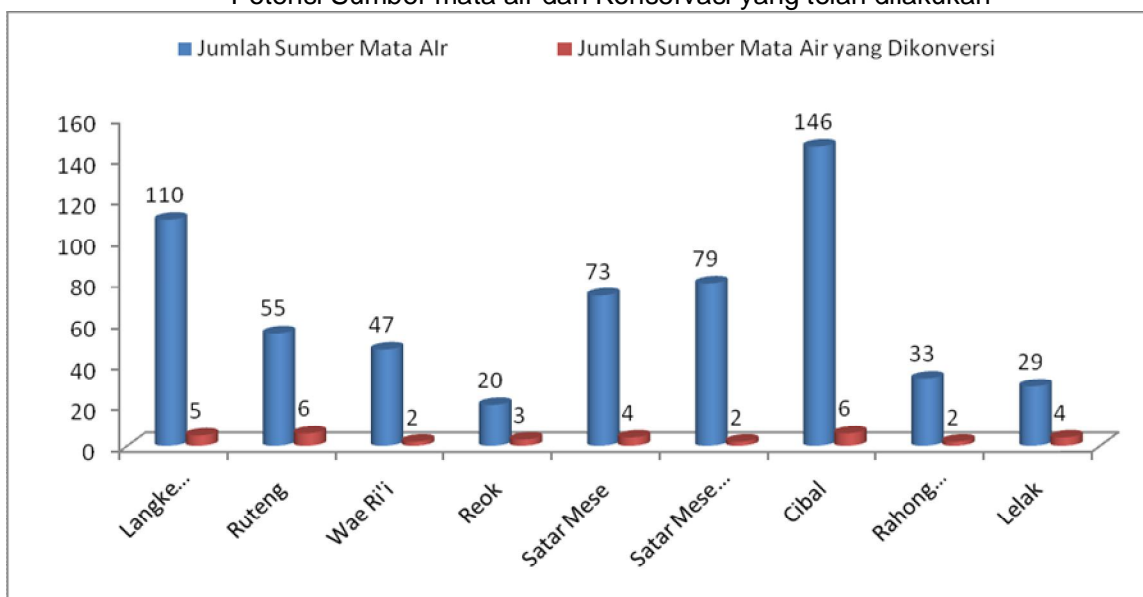
No	Kecamatan	Jml Sumber mata air	Luas lahan Konservasi (Ha)					Total luas lahan konservasi (Ha)	Total sumber mata air yang dikonservasi
			2006	2007	2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Satar Mese	73	0	0	10	16	16	42	4
6	Satar Mese Barat	79	0	0	0	16	16	32	2
7	Cibal	146	0	0	10	32	30	72	6
8	Rahong Utara	33	0	0	0	16	16	32	2
9	Lelak	29	0	0	12.8	32	16	60.8	4
Total		555	5	0	57.8	224	158	440.8	34

Sumber : BLHD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Bila dibandingkan potensi sumber mata air dan sumber mata air yang sudah dilakukan konsevasi maka dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Diagram 2.14.

Potensi Sumber mata air dan Konservasi yang telah dilakukan



Sumber : BLHD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

C. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti :

1. Upaya penanganan sampah yang dilakukan di Kecamatan Langke Rembong yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi dan industri, dengan jumlah penduduk tertinggi dibandingkan delapan kecamatan lain di Kabupaten Manggarai. Penanganan sampah masih pada proses dikumpulkan, diangkut dan

dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Kecamatan Langke Rembong dengan luas wilayah 9.944 Ha belum sepenuhnya dapat dilayani oleh armada pengangkut sampah. Rata-rata volume sampah perkotaan yang dihasilkan dari berbagai sumber per hari adalah 131 m³/hari atau 47.815 m³/tahun berdasarkan data tahun 2006. Pada tahun 2010 produksi sampah meningkat menjadi 142 m³/hari atau 51.830 m³/tahun. Dari jumlah tersebut sampah terangkut tahun 2006 rata-rata 54 m³/hari atau 19.710 m³/tahun, hanya sebesar 36% dari total produksi sampah dan tahun 2010 volume sampah terangkut rata-rata 72 m³/hari atau 26.280 m³/tahun, hanya sebesar 44% dari total produksi sampah. Kondisi umum penanganan sampah di Kecamatan Langke Rembong dapat dilihat pada Tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 2.99.
Data sampah terangkut dari tahun 2006 s/d 2010

No.	Tahun	Sampah terangkut (m3)/hari	Sampah terangkut (m3)/thn
1	2006	54	17,118
2	2007	54	17,118
3	2008	78	24,726
4	2009	54	17,118
5	2010	72	22,824

Sumber Data : BLHD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

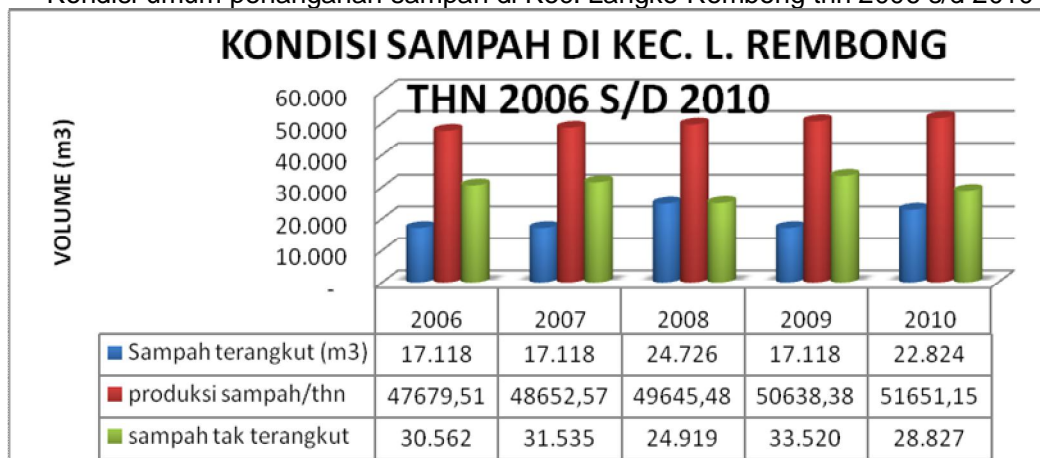
Tabel 2.100.
Produksi sampah dari tahun 2006 s/d 2010

No	Tahun	pddk	produksi sampah/thn (m3)	Sampah terangkut (m3)	Sampah tak terangkut
1	2006	52252	47679.51	17,118	30,562
2	2007	53318	48652.57	17,118	31,535
3	2008	54406	49645.48	24,726	24,919
4	2009	55494	50638.38	17,118	33,520
5	2010	56604	51651.15	22,824	28,827

Sumber Data : BLHD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Diagram 2.15.

Kondisi umum penanganan sampah di Kec. Langke Rembong thn 2006 s/d 2010



Sumber Data : BLHD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air yang dilakukan di beberapa sumber mata air . secara umum kualitas air sumber mata air yang dipantau memenuhi standar baku mutu air Kelas I (air baku untuk air minum). Beberapa yang menunjukkan kualitas menurun adalah Sumber mata air Wae Cia parameter kekeruhannya (5,05 NTU), sedikit lebih tinggi dari standar baku mutu (≤ 5 NTU) sedangkan mata air Wae Narang kekeruhannya sangat tinggi (9,8 NTU). Sumber mata air Wae Laja nilai parameter pH dan Do (5,86 mg/l dan 5,23 mg/l) tidak memenuhi standar baku air minum (6-9 mg/l dan ≥ 6 mg/l).

Tabel 2.101.
Data kualitas sumber mata air

No.	Mata Air	Parameter								
		Hasil Pengukuran					Baku Mutu			
		Suhu (°C)	pH (mg/l)	DO (mg/l)	TDS (mg/l)	Kekeruhan (NTU)	pH (mg/l)	DO (mg/l)	TDS (mg/l)	Kekeruhan (NTU)
1.	Wae Nao	20	7,1	6,3	80	1,07	6 - 9	≥ 6	1000	≤ 5
2.	Wae Rowang	19,9	7,2	6,6	40	1,73	6 - 9	≥ 6	1000	≤ 5
3.	Wae Cia	22,7	7,02	6,36	80	<div>5,05</div>	6 - 9	≥ 6	1000	≤ 5
4.	Wae Watu Gak	20,1	7,77	5,55	110	2,20	6 - 9	≥ 6	1000	≤ 5
5.	Wae Ruis	24,9	7,18	6,19	440	0,10	6 - 9	≥ 6	1000	≤ 5
6.	Wae Rura	28,4	6,84	<div>3,78</div>	400	0,09	6 - 9	≥ 6	1000	≤ 5
7.	Wae Rungkung	20,5	6,85	6,37	30	2,36	6 - 9	≥ 6	1000	≤ 5

No.	Mata Air	Parameter								
		Hasil Pengukuran					Baku Mutu			
		Suhu (°C)	pH (mg/l)	DO (mg/l)	TDS (mg/l)	Kekeruhan (NTU)	pH (mg/l)	DO (mg/l)	TDS (mg/l)	Kekeruhan (NTU)
8.	Wae Cumbi	21,5	7,32	6,70	40	1,82	6 - 9	≥ 6	1000	≤ 5
9.	Wae Wiko	23,2	5,86	5,23	30	1,92	6 - 9	≥ 6	1000	≤ 5
10.	Wae Ganggong	23,7	6,8	6,65	70	2,20	6 - 9	≥ 6	1000	≤ 5
11.	Wae Rii	19,1	7,21	6,7	40	0,54	6 - 9	≥ 6	1000	≤ 5
12.	Wae Narang	25,2	6,71	6,1	150	9,8	6 - 9	≥ 6	1000	≤ 5

Sumber Data : BLHD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Pelaksanaan pengukuran kualitas air sungai/kali menunjukkan kualitas air pada kedua sungai/kali memenuhi standar baku mutu air Kelas II (air untuk budidaya perikanan air tawar dan pertanian). Walaupun demikian jika diperhatikan nilai-nilai dari setiap parameter menunjukkan adanya perbedaan antara daerah hulu, tengah dan hilir. Secara umum pada kedua sungai/kali terjadi sedikit penurunan kualitas air pada daerah tengah dibandingkan dengan daerah hulu, kemudian meningkat lagi di daerah hilir. Kondisi ini menunjukkan adanya pengaruh aktivitas masyarakat Kota Ruteng terhadap kualitas air dimana aktivitas tersebut menghasilkan sampah/limbah rumah tangga dan industri yang dibuang ke sungai/kali. Namun pengaruh dari limbah-limbah tersebut terlihat tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas air pada kedua sungai/kali tersebut. Hal ini disebabkan adanya pengenceran limbah secara alamiah oleh air hujan dimana pemantauan ini dilakukan pada saat musim hujan.

Tabel 2.102.
Kualitas air sungai

No.	Sungai/kali	Lokasi pengukuran	Parameter						
			Hasil Pengukuran				Baku Mutu		
			Suhu (°C)	pH (mg/l)	DO (mg/l)	TDS (mg/l)	pH (mg/l)	DO (mg/l)	TDS (mg/l)
1.	Wae Ces	Hulu wae ces dekat pos KSDA	17,9	7,78	7,6	60	6 - 9	≥ 4	1000
		Dekat SDK Ruteng IV (tengah)	19,7	7,04	6,1	100	6 - 9	≥ 6	1000
		Tempat Cuci Kendaraan Karot (hilir)	21,1	7,52	6,7	80	6 - 9	≥ 6	1000
2	Wae Locak	Hulu Wae Locak (Rowang)	20	7,83	7,07	80	6 - 9	≥ 6	1000
		Belakang terminal Ruteng (tengah)	20	7,32	7,06	110	6 - 9	≥ 6	1000
		Jembatan Woang (hilir)	21,5	7,76	7,01	90	6 - 9	≥ 6	1000

Sumber Data : BLHD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

2.3.1.9. Penanggulangan Bencana Alam

Kabupaten Manggarai sangat rentan terhadap bencana antara lain :

A. Gempa Bumi

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Nasional terdapat 25 daerah di Indonesia yang rawan gempa bumi yaitu : Aceh, Sumatra Utara (Simeulue), Sumatra Barat-Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten Pandeglang, Jawa Barat, Bantar Kawung, Yogyakarta, Lasem, Jawa Timur, Bali, NTB, **Nusa Tenggara Timur**, Kepulauan Aru, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sangir Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Kepala Burung Papua Utara, Jayapura, Nabire, Wamena, dan Kalimantan Timur.

Seluruh wilayah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari 9 Kecamatan, 132 Desa dan 17 Kelurahan merupakan daerah potensi rawan bencana gempa bumi karena kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik.

Lempeng Eurasia dan Australia bertumbukan di lepas pantai barat Pulau Sumatra, lepas pantai selatan Pulau Jawa, lepas pantai selatan Kepulauan Nusa Tenggara, dan berbelok ke arah utara ke perairan Maluku sebelah selatan.

Antara lempeng Australia dan lempeng Pasifik terjadi tumbukan di sekitar pulau Papua. Sementara pertemuan antara ketiga lempeng itu terjadi di sekitar Sulawesi. Itulah sebabnya mengapa di pulau-pulau sekitar pertemuan 3 lempeng itu sering terjadi gempapumi.

B. Gunung Api.

Kabupaten Manggarai memiliki sebuah gunung api yang masih aktif yaitu : Gunung Anak Gunung Ranaka. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1987. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pos Pemantauan Gunung api di Lando, selama bulan April 2010 dari pagi hingga malam hari Gunung kebanyakan tertutup kabut 0I-0III. Adakalanya pada pagi dan siang hari gunung tampak jelas dan terlihat asap putih tipis, tekanan gas lemah serta tinggi asap antara 0 - 15 m di atas puncak. Hal ini menunjukkan bahwa gunung ini dinyatakan aktif normal.

Desa-desanya yang berdampak langsung antara lain desa Golo Cador, desa Wae Ri'i, desa Golo Mendo, desa Bangka Jong, desa Longko dan desa Ranaka.

C. Tsunami / Gelombang Pasang.

Wilayah rawan bencana tsunami di Indonesia meliputi 21 wilayah, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung-Banten, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Timur Bagian Selatan, Bali Nusa Tenggara Barat, **Nusa Tenggara Timur**, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak-Yapen, Balikpapan, Sekurau, Palu, Talaud dan Kendari.

Daerah / wilayah kabupaten Manggarai yang berada di pesisir pantai merupakan daerah/wilayah potensi rawan bencana tsunami yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.103.
Potensi Tsunami

Kecamatan	Desa / Kelurahan
Kecamatan Reok	Kelurahan Reok, Salama, Baru, Mata Air, Desa Lemarang, Wangkung, Robek dan Para Lando.
Kecamatan Satar Mese Barat	Desa Borik, Satar Ruwuk, Nuca Molas, Satar Lenda, Satar Luju, Ceka Luju, Terong dan Hilihintir
Kecamatan Satar Mese	Tal, Paka, Legu, Langgo, Koak dan Tado

Sumber Data : BLHD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

D. Banjir

Banjir adalah peningkatan debit air diatas kondisi normal yang melebihi daya tampung badan alirnya (Sungai dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang sangat lebat dan dapat melanda daerah yang dekat dengan sungai dan terletak bagian bawah.

Tabel 2.104.
Sungai-sungai dan anak sungai potensi banjir

No	Kecamatan	Sungai	Desa/Kelurahan
1	Reok	Wae Kuli	Desa Toe, Desa Lemarang dan Desa Para Lando
		Wae Mbeak	Desa Bajak, Desa Watu Tango dan Desa Ruis
		Wae Kaap	Sebagian Desa Ruis, Kelurahan Wangkung dan Mata Air
		Wae Pesi	Bajak Reo, Mata Air, Baru, Salama
2	Rahong Utara	Wae Ri,i	Dimpong, Buar, Bangak Ruang dan Manong
		Wae Racang	Desa Golo Langkok, Liang Bua dan Manong
		Wae Lega	Desa Tengku Lese, Buar dan Banga Ruang
3	Cibal	Sungai Wae Renca	Riung dan Wae Renca
		Wae Naong	Desa Pinggang, Bea Mese, Rado dan desa Riung
4	Satar Mese Barat	Wae Mese	Hilihintir, Terong, Popo dan Golo Ropong
5	Satar Mese	Wae Mese	Jaong, Golo Lambo, Ngkaer, Pongkor dan Tal
		Sungai Wae Koe	Paka dan Legu
6	Kec. Langke Rembong	Wae Garit	Kelurahan Golo Dukal dan Kelurahan Wali

No	Kecamatan	Sungai	Desa/Kelurahan
7	Kec. Ruteng	Wae Palo, Wae Rajong, Wae Ireng dan Wae Kunce	Desa Kakor, Benteng Kuwu, Belang Turi, Meler dan Pong Leko
8	Kec. Wae Rii	Wae Mulu, Wae Racang dan Wae Kokak	Desa Lalong, Golo Wua, Golo Watu, Ranggi, Wae Mulu, Golo Cador, Compang Ndehes, Golo Cual, desa Bere dan desa Poco

Sumber Data : BPBD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Dampak Bencana Banjir Tahun 2005 – 2010

Dampak bencana banjir dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.105.
Dampak Bencana banjir

Wilayah Kecamatan	Dampak
9 Kecamatan	1. Kerusakan : a. Pemukiman b. Lahan Pertanian dan Perkebunan c. Kehilangan ternak karena terhanyut d. Infrastruktur dan Irigasi e. Sarana Air dan Minum Bersih
	2. Timbulnya Wabah Penyakit a. Diare b. Ispa c. Penyakit Kulit d. Malarai
	3. Gangguan Keseimbangan dan Kejiwaan pada Masyarakat Korban.

Sumber Data : BPBD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

E. Tanah Longsor

Intensitas curah hujan yang melampaui batas normal menyebabkan wilayah Kabupaten Manggarai sering Mengalami longsor yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda. Daerah Potensi

Daerah bencana tanah longsor berdasarkan hasil pemetaan bersama pada Lokakarya Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Hotel Dahlia yang dilakukan oleh Fird, YBDM dan unsur terkait Pemerintah Kabupaten Manggarai yang diundang ikut serta dalam kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.106.
Lokasi dan dampak bencana longsor di Kabupaten Manggarai

Sebaran Wilayah	Desa	Waktu Kejadian	Dampak
Kec. Cibal	Gapong, Perak, Riung, Langkas, Bea Mese, Timbu, Lenda, Nenu, Compang Cibal, Rado, Bere, Golo, Welu, Golo Ncuang dan Wae Codi	2007	- Terjadi Korban jiwa meninggal dunia dan hilang sebanyak 29 orang dan puluhan lainnya cedera berat dan ringan. - Jalan Raya yang menghubungkan transportasi Ruteng-Reo putus, sarana air minum bersih rusak, lahan pertanian rusak, rumah tinggal warga tertimbun dan rusak, tanah terbelah.
Kecamatan Ruteng	Beo Rahong, Golo Worok, Poco Likang dan Belang Turi	2007	Jalan raya terputus, sarana air minum bersih rusak, rumah ada yang hancur dan tertimbun longsor, tanaman perkebunan rusak.
Kecamatan Rahong Utara	Golo Langkok, Dimpong, Compang Dari, Manong, Pong Lenggong dan Buar	2007	Jalan Raya terputus, sarana air minum bersih rusak, rumah ada yang hancur dan tertimbun longsor, tanaman perkebunan rusak.
Wae Rii	Desa Nakana, Compang Ndehes	2007	Desa Ranak terputusnya jalan negara lintas Flores dan Desa Ndehes terputusnya jalur transportasi Ruteng – Reok.
Langke Rembong	Kelurahan Wali	2007	Jalur transportasi jalan negara menuju Manggarai Barat terputus di Wae Garit
Satar Mese Timur	Wilayah Golo Lusang	2008	Transportasi Ruteng-Iteng terputus

Sumber Data : BPBD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

F. Kebakaran

Ancaman kebakaran di Kabupaten Manggarai biasanya terjadi pada musim hujan maupun musim kemarau

G. Kekeringan

Ancaman kekeringan kerap kali menjadi langganan setiap tahun bagi masyarakat Kabupaten Manggarai. Dampak langsung dari ancaman kekeringan adalah Gagal tanam, gagal panen dan Kebakaran.

Wilayah Kecamatan yang sering dilanda kekeringan adalah Kecamatan Satar Mese, Kec. Satar Mese Barat, Kec. Reok dan Kecamatan Cibal bagian Utara.

H. Bencana Sosial

Bencana sosial merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Manggarai terutama wabah penyakit dan masalah konflik sosial perebutan batas tanah dan masalah tanah baik orang perorangan maupun kelompok.

Tabel 2.107.
Data Bencana di Kabupaten Manggarai Tahun 2005 - 2010

No.	Jenis Bencana	2006		2007		2008		2009		2010	
		Jumlah Korban		Jumlah Korban		Jumlah Korban		Jmlh Korban		Jumlah Korban	
		Jmlh	Sat.	Jmlh	Sat.	Jmlh	Sat.	Jmlh	Sat.	Jmlh	Sat.
1	Longsor	-									
	a. Manusia	8	Org	43	Org	-	-	8	Org	-	
	b. Perkebunan	120	Phn	1160	Phn	85	Phn	65	Phn	43	Phn
	c. Pertanian	3952,42	ha	343,93	ha	4,4	ha	14,7	ha	10.5	ha
	d. Perumahan	-	-	474	Unit	32	Unit	14	Unit	15	unit
	e. Sarana Umum									46	lokasi
2	Banjir	-								-	
	a. Manusia	4	Org	2	Org	6	Org	2	Org	6	Org
	b. Perkebunan	104	Phn	3.074	Phn	1.022	Phn				
	c. Pertanian	-	-	39,45	ha	15	ha	10	ha	350	ha
	d. Perumahan									1	unit
	e. Sarana Umum									18	lokasi
3	Kebakaran	-								-	
	a. Manusia									4	Org
	b. Perkebunan										
	c. Pertanian										
	d. Perumahan	14	Unit	8	Unit	29	Unit	67	Unit	28	unit
	e. Sarana Umum									-	
4	Angin	-									
	a. Manusia	1	Org					1		-	
	b. Perkebunan			270	Phn					-	
	c. Pertanian										
	d. Perumahan	252	Unit	458	Unit	1.070	Unit	1.212	Unit	305	Unit
	e. Sarana Umum										
5	Kekeringan	-									
	a. Manusia									-	
	b. Perkebunan	70	Ha							-	
	c. Pertanian	104	Ha	94	Ha			279	Ha	,915.6	Ha
	d. Perumahan									-	
	e. Sarana Umum									-	
6	Bencana Sosial										
	a. Manusia					5	Org	9	Org	14	Org
	b. Perkebunan									-	
	c. Pertanian									-	
	d. Perumahan									-	
	e. Sarana Umum	-								-	

Sumber Data : BPBD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

2.3.1.10. Pertanian

Pertanahan sebagai lembaga pemerintah non departemen diberikan kewenangan untuk mengelola dan memberikan status hak atas tanah dalam kawasan budidaya. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan tentang adanya hak menguasai negara di bidang pertanahan yang perwujudannya terakumulasi dalam UU No. 5 Tahun 1960 yang memberikan kewenangan yuridis dan kewenangan fisik / teknis kepada pemerintah. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan bidang kebijakan publik, baik dalam pengaturan, perencanaan maupun dalam pelaksanaan yang mengarah pada perwujudan unifikasi hukum dalam sistem hukum pertanahan dan sistem manajemen pertanahan.

Pengelolaan sumber daya agraria secara adil dan bijak serta berkelanjutan harus dilakukan dengan cara sinkronisasi, koordinasi dan toleransi yang terpadu dan dapat menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat. Guna lebih mendekatkan komitmen pelayanan pertanahan kepada masyarakat, perlu dibangun tatanan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang terbuka dan dapat diakses oleh berbagai kelompok kepentingan dan masyarakat bagi kebutuhan pembangunan. Sistem informasi dan manajemen pertanahan harus dibangun dalam tatanan yang dapat dimengerti dan mudah dilaksanakan oleh personal pengelola melalui pembukaan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi semua masyarakat lewat sistem satelit (SIP, SIG dan GIM).

Kegiatan pelayanan pertanahan yang sudah dan sedang berlangsung perlu dievaluasi secara terpadu guna penentuan keterukuran kualitas kinerja pelayanan bidang pertanahan kepada masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.108.
Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2006- 2010 Kabupaten Manggarai

NO	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010
1	Luas Wilayah Daratan	166,942,000	166,942,000	166,942,000	166,942,000	166,942,000
2	Luas Tanah Bersertifikat HGB	1,155,429	155,429	1,157,059	1,157,059	177,059
3	Luas Tanah Bersertifikat HGU
4	Luas Tanah Bersertifikat HM	60,529,793	64,648,918	68,989,231	80,238,671	86,370,769
5	Luas Tanah Bersertifikat HPL
6	Luas Tanah Bersertifikat HP	2,317,657	2,477,995	2,681,225	2,776,884	2,777,523
7	Total Luas Bersertifikat	64,065,879	68,282,342	72,827,515	84,172,614	90,325,351
8	Prosentase HGB dibanding Luas Daratan	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
9	Prosentase HGU dibanding Luas Daratan
10	Prosentase HM dibanding Luas Daratan	3,63%	3,87 %	4,13 %	4,81 %	5,17 %
11	Prosentase HPL dibanding Luas Daratan

NO	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010
12	Prosentase HP dibanding Luas Daratan	0,14 %	0,15 %	0,16 %	0,17 %	0,17 %
13	Prosentase Luas Lahan Bersertifikat	3,84%	4,09 %	4,36 %	5,05 %	5,41%

Sumber Data : BPN Kabupaten Manggarai

Tabel di atas menggambarkan bahwa prosentasi tanah yang bersertifikat HGB jika dibandingkan dengan luas daratan dari tahun 2006 -2010 hanya sebesar 0,07% pertahunnya, sedangkan prosentasi tanah yang bersertifikat HM terus meningkat dari 3,63 % tahun 2006 menjadi 3,87% tahun 2007, tahun 2008 meningkat menjadi 4,13 %, tahun 2009 meningkat menjadi 4,18 % dan tahun 2010 menjadi 5,17% hal ini juga terjadi pada prosentasi tanah yang bersertifikat HP terus meningkat 0,14 % tahun 2006 menjadi 0,15% tahun 2007, 2008 bertambah menjadi 0,16 % tahun 2008, tahun 2009 dan 2010 masing-masing bertambah menjadi 0,17 %. Prosentase luas tanah yang bersertifikat dari tahun ketahun terus bertambah dari 3,84 % tahun 2006, tahun 2007 bertambah menjadi 4,09 %, tahun 2008 menjadi 4,36 % , tahun 2009 menjadi 5,05 % dan tahun 2010 meningkat menjadi 5,41 % jika dibandingkan dengan luas wilayah daratan Kabupaten Manggarai.

2.3.1.11. Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada sektor kependudukan tergambar penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.109.

Tabel Jumlah penduduk, KK dan perkembangan kepemilikan KK dan KTP di Kabupaten Manggarai tahun 2005 - 2010

No	Tahun	PENDAFTARAN PENDUDUK						
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Kepemilikan KK		Penduduk Wajib KTP	Penduduk Ber-KTP	
				Jumlah	%		Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2005	267.067	53.292	1.391	2,61	163.614	21.410	13,09
2	2006	272.937	58.165	4.310	7,41	164.019	44.597	27,19
3	2007	275.214	59.887	9.148	15,28	164.834	61.881	37,54
4	2008	278.773	60.823	28.992	47,67	167.846	66.003	39,32
5	2009	282.289	61.631	34.151	54,08	170.057	57.344	33,72
6	2010	292.533	62.538	40.086	64,62	172.121	69.421	40,33

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel di atas menggambarkan jumlah dan prosentase kepemilikan dokumen identitas diri lima tahun terakhir berbanding total penduduk wajib-KTP dan wajib-KK. Secara umum tren tahunan kepemilikan KTP dan KK memang meningkat, namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib-KTP dan wajib-KK jumlah tersebut masih harus terus ditingkatkan. Sampai dengan tahun 2010, sebagaimana tampak pada Tabel, menunjukkan hampir 2/3 (64,62 persen) Kepala Keluarga telah ber-KK, namun kepemilikan KTP belum mencapai 50 persen (baru 40,33 persen) dari total penduduk wajib-KTP.

Perkembangan Jumlah dan Prosentase Kepemilikan Akta-akta Sipil di Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010 terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.110.

Perkembangan Jumlah dan Prosentase Kepemilikan Akta-akta Sipil di Kabupaten Manggarai
Tahun 2005 – 2010

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Perkembangan Jumlah dan Prosentase Kepemilikan Akta-akta Sipil							
				Jenis-jenis Akta Pencatatan Sipil							
				Kela- hiran*)	%	Perka- winan**)	%	Kema- tian	Penga- kuan/ Penge- sahan Anak	Peng- ang- katan Anak	Perce- raian
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
1	2005	267.067	53.292	2.373	0,89	252	0,47	26	64	1	3
2	2006	272.937	58.165	5.780	2,12	519	0,89	80	73	2	6
3	2007	275.214	59.887	5.922	2,15	994	1,66	140	73	2	6
4	2008	278.773	60.823	30.820	11,06	2,218	3,65	195	74	2	7
5	2009	282.289	61.631	37.971	13,45	2,851	4,63	269	76	4	7
6	2010	292.533	62.538	60.975	20,84	3,407	4,87	316	76	4	7

Sumber : Dinas Kabupaten Manggarai

Catatan: *) Berbanding total jumlah penduduk

**) Berbanding total jumlah KK

Dari tabel tersebut di atas tergambar sampai dengan Tahun 2010 baru 1/5 (20,88 persen) penduduk Manggarai yang memiliki Akta Kelahiran, demikianpun keluarga yang memiliki Akta

Perkawinan hanya 5,68 persen dari total jumlah Kepala Keluarga. Demikian halnya dengan tingkat kepemilikan Kartu Keluarga dan rendahnya minat masyarakat untuk memiliki akta-akta lainnya.

2.3.1.12. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; adalah *orang, keluarga atau komunitas masyarakat yang oleh karena suatu sebab kehilangan keberfungsian (disfungsi) sosialnya sehingga mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dan interaksi sosialnya dalam lingkungan masyarakat.*

Disfungsi sosial yang dimaksud adalah berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi, dan interaksi sosial secara wajar yang diakibatkan oleh kondisi kecacatan, keterlantaran, ketunaan, kemiskinan atau perlakuan salah lainnya.

Dengan keadaan ini maka mereka menjadi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang beruntung sehingga memerlukan bantuan, perlindungan dan pemberdayaan.

Yang termasuk golongan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (**PMKS**) tersebut adalah seperti tampilan tabel di bawah ini:

Tabel 2.111.
Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS)
Kabupaten Manggarai Tahun 2010

NO	JENIS PMKS	SATUAN	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar	Jiwa	351
2	Anak Terlantar	Jiwa	856
3	Anak Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	Jiwa	17
4	Anak Nakal	Jiwa	43
5	Anak Jalanan	Jiwa	77
6	Anak Cacat	Jiwa	851
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WARSOSEK)	Jiwa	3.529
8	Wanita Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	Jiwa	336
9	Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	3.859

NO	JENIS PMKS	SATUAN	JUMLAH
10	Penyandang Catat	Jiwa	2.785
11	Penyandang Eks Penyakit Kronis	Jiwa	54
12	Pengemis	Jiwa	112
13	Bekas Narapidana	Jiwa	232
14	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	1
15	Keluarga Fakir Miskin	Jiwa	9.168
16	Keluarga yang tinggal di Rumah Tak Layak Huni	Jiwa	8.684
17	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	Jiwa	81
18	Komunitas Adat Terpencil	Lokasi	53
19	Masyarakat yang tinggal di Daerah Rawan Bencana	KK	387
20	Korban Bencana Alam	Jiwa	651
21	Korban Bencana Sosial/Pengungsi	Jiwa	59
22	Pekerja Migran Terlantar	Jiwa	7
23	Penyandang HIV/AIDS	Jiwa	42
24	Keluarga Rentan	KK	43.100

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Manggarai Tahun 2010

Permasalahan Kesejahteraan sosial ini dari waktu - kewaktu menunjukkan perkembangan baik secara kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Keadaan ini sebagai konsekwensi logis dan dampak ikutan dari pembangunan, industri, kondisi krisis, perkembangan komunikasi dan arus informasi, dan terjadinya pergeseran sistem tata nilai dalam masyarakat serta perubahan sosial yang terjadi.

Para penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara proporsional, dalam konteks pembangunan di segala bidang, guna memperkecil kesenjangan sosial dan atau mengeliminir dampak-dampak negatif yang ditimbulkan.

Pemberdayaan dan perlindungan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Manggarai merupakan salah satu persoalan yang harus diantaskan secara tepat untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas, runtuhnya ketahanan sosial masyarakat.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Manggarai utamanya disebabkan oleh :

1. Kemiskinan struktural sebagai akibat ketimpangan serta kesenjangan struktural dalam masyarakat;
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memenuhi kebutuhan dan tuntutan pembangunan;
3. Produktivitas, produksi dan pendapatan perkapita yang relatif rendah;
4. Daya dukung sumber daya alam yang relatif belum memadai ;
5. Perkembangan kebutuhan manusia dan pembangunan, kesenjangan pertumbuhan antar sektor maupun wilayah, sistem dan sarana perhubungan/transportasi yang belum seimbang;
6. Kondisi topografis dan geografis, akses terhadap faktor – faktor produksi kurang merata;
7. Pola pemukiman yang terpencil,terpencar dan terisolir;
8. Lemahnya lembaga ekonomi pedesaan;
9. Struktur perekonomian yang belum seimbang;
10. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap anggaran pembangunan dari Pemerintah Pusat;
11. Sarana dan prasarana jalan yang belum memadai;
12. Sarana pelayanan kesehatan dan pendidikan belum memadai terutama tenaga medis dan guru.

Dari hal tersebut di atas maka permasalahan pokok lainnya yang menjadi penghambat dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Manggarai; rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia; dan kondisi ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya kinerja perekonomian rakyat
2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin
3. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
4. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat
5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk partisipasi perempuan
6. Belum meratanya penyebaran infrastruktur pelayanan umum
7. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal; baik lingkungan alam (sumber daya alam); Lingkungan Sosial maupun Lingkungan Buatan karena kuatnya peran Komunitas Adat (Ulayat) sehingga tidak adanya kepemilikan tanah secara individu

8. Lambatnya transformasi mata pencaharian, produktivitas dan kemampuan pasar masyarakat sehingga terjadi ketidakseimbangan antara mata pencaharian penduduk yang mayoritas petani tradisional dengan potensi tanah agraris yang tersedia, serta ketidakmampuan untuk meningkatkan produksi bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi serta ketidakmampuan dalam memproduksi suatu barang atau jasa sesuai permintaan pasar
9. Tantangan Era Globalisasi dan Pasar Bebas
10. Lemahnya penegakan Hukum dan HAM

Dari beberapa permasalahan sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial; dapatlah disimpulkan bahwa : "Belum Optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara integral dan berkualitas."

Para penyandang cacat masih menghadapi problem kemandirian, produktivitas dan hak hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Para penyandang masalah kesejahteraan sosial ditandai kemiskinan karena ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja seturut nilai-nilai kemanusiaan dan ketidakadaan ketrampilan / keahlian khusus sebagai syarat dan tuntutan kemandirian sehingga mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang lain.

Data tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Manggarai menggambarkan bahwa permasalahan anak cacat, anak jalanan, fakir miskin, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan sebagainya menjadi persoalan yang harus segera ditangani oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Manggarai karena ada peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2008 di Kabupaten Manggarai terdapat Anak Terlantar, 4.560 orang, Penyandang Cacat 3.200 orang, Lanjut Usia 3.520 orang, Anak Jalanan 232 orang, Keluarga Fakir Miskin 9.643 orang, Wanita Rawan Sosial Ekonomi 3.900 orang. Dan yang menjadi perhatian ialah data anak jalanan, yang dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya yakni dari 30 orang (2005) meningkat 157 orang (2006) , 224 orang (2007) dan 232 orang pada tahun 2008.

Tabel 2.112.
Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial di Kab. Manggarai Thn. 2005 – 2008

NO.	INDIKATOR	T A H U N / O R G					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Anak Terlantar	4.221	4.333	4.404	4.243	4.598	4.560
2	Lanjut Usia Terlantar	2.995	3.220	3.342	3.241	3.460	3.520
3	Anak Jalanan	--	--	30	157	224	232
4	Penyandang Cacat	2.990	2.997	3030	3.132	3.255	3.200
5	Anak Nakal	130	160	160	185	210	453
6	Fakir Miskin	5.574	3.947	4.460	4.674	5.074	9.643
7.	Fakir Miskin Berumah Tidak Layak Huni						
8.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.000	2.250	2.800	3.100	3.940	3.900
9.	Komunitas Adat Terpencil	--	--	--	--	756	756
10.	Bekas Narapidana	10	25	30	20	35	55

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Manggarai Tahun 2010

2.3.1.13. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

A. Permasalahan Tenaga Kerja

Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka. Penganggur adalah sejumlah orang yang sedang mencari pekerjaan dan yang sama sekali tidak bekerja walaupun hanya 1 jam dalam seminggu.

Tabel 2.113.
Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu
Tahun 2005-2010

Kegiatan Utama	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Angkatan Kerja :												
Bekerja	225,234	96.97	275,338	97.38			252.158		139.311			
Pengangguran	7,038	3.03	7,408	2.62								
Sub Total	232,272	100	282,746	100								
Bukan Angkatan Kerja :												
Sekolah	69,404	50.35	77,181	55.96	2,179	9.75	64,602	56.09	67,774	31.91		
Mengurus RT	39,220	28.45	39,974	28.98	16,454	73.63	30,528	26.50	67,136	31.61		
Lainnya	29,229	21.20	20,765	15.06	3,715	16.62	20,052	17.41	77,480	36.48		
Sub Total	137,853	100	137,920	100	22,348	100	115,182	100	212,390	100		
Total	458,223		464,836		266,884		347,454		495,136			

Sumber Data : BPS, Manggarai Dalam Angka Tahun 2010

Pengangguran terbuka merupakan rasio antara jumlah penganggur terhadap angkatan kerja. Angka pengangguran terbuka di manggarai berfluktuasi dari tahun ke tahun seperti tampak dalam tabel 2.59. Demikian pula kondisi setengah pengangguran didasarkan pada penggunaan batasan jam kerja dalam seminggu yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2005 sebesar 66.85% meningkat menjadi 79,99% tahun 2009. Artinya terjadi penurunan jumlah penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok angkatan kerja. Hal ini bisa saja dipengaruhi meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang sedang bersekolah.

Tabel 2.114.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pengangguran Terbuka dan Setengah
Pengangguran Tenaga Kerja di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Tahun	Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Pengangguran Terbuka		Setengah Pengangguran	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	2005	225.234	66,85	7.038	3,03	128.052	56,85
2	2006	282.746	81,71	7.408	2,62	149.855	53,00
3	2007	341.258	85,87	4.575	1,75	-	-
4	2008						
5	2009						
6	2010						
	Jumlah						

Sumber Data: BPS, Manggarai Dalam Angka Diolah Bappeda

Beberapa dugaan yang menjadi penyebab pengangguran di Kabupaten Manggarai antara lain karena: (i) Rendahnya keterampilan kerja dan jiwa berwirausaha. (ii) Keterbatasan lapangan kerja yang disebabkan oleh lambannya perkembangan industri daerah. (iii) Masyarakat manggarai kurang menggeluti peluang berusaha pada sektor perdagangan kecil seperti pedagang kaki lima, warung makan, serta jasa pelayanan lainnya. (iv) Kurangnya jiwa kreatif dan inovatif. (v) Sistem pendidikan yang lebih menekankan pengetahuan (*knowledge*) ketimbang ketrampilan (*skill*).

B. Dominasi lapangan kerja pada sektor pertanian.

Dari tahun ke tahun jumlah pekerja di sektor pertanian terus meningkat walaupun secara ekonomis sektor ini kurang produktif atau kurang menguntungkan. Akibatnya ialah rendahnya pendapatan yang menyebabkan pekerja rawan terjatuh di bawah garis kemiskinan (*near poor*). Penduduk manggarai yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan tahun 2005 sebanyak 200.628 orang meningkat menjadi 234.227

orang tahun 2006. Disamping sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan, sektor jasa dan perdagangan, eceran dan rumah makan, industri pengolahan, bangunan juga memberi kontribusi besar bagi lapangan kerja penduduk Manggarai.

Tabel 2.115.
Penduduk Manggarai Berusia 10 Tahun ke atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utamadi
Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Lapangan Pekerjaan	Tahun						Pertumbuhan (2005-2010)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	200.628	234.227	201.538				
2	Pertambangan dan Penggalian	486	3.280	2.012				
3	Industri Pengolahan	8.478	10.603	16.747				
4	Listrik, Gas dan Air	144	198	311				
5	Bangunan	3.708	3.789	8.527				
6	Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah Makan	2.556	10.490	9.316				
7	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	3.492	5.457	7.540				
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan dan Bangunan	144	820	347				
9	Jasa Kemasyarakatan	5.598	13.883	9.797				
	Jumlah	225.234	282.747	256.135				

Sumber : BPS, Manggarai Dalam Angka Diolah Bappeda

Tabel 2.116.
Jumlah Pengiriman TKI Menurut Kecamatan Kabupaten Manggarai
Tahun 2005-2010

No	Kecamatan	Tahun																		Jumlah
		2005			2006			2007			2008			2009			2010			
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Satar Mese			43			13			53	0	35	35	0	16	16	19	0	19	136
2.	Langke Rembong			14			15			39	3	20	23	0	32	32	23	23	46	155
3.	Ruteng			16			9			70	9	13	22	0	6	6	7	0	7	114
4.	Wae Rii			27			5			11	30	9	39	0	7	7	11	0	11	73
5.	Cibal			0			1			13	0	10	10	0	1	1	0	0	0	25
6.	Reok						0			1	0	2	2	0	2	2	3	0	3	8
7.	Satar Mese Barat										0	24	24	0	11	11	0	0	0	35
8.	Rahong Utara											1	1	0	6	6	2	0	2	9
9.	Lelak																			0
				100			43			187	42	114	156	0	81	81	65	23	88	555

Sumber Data : Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.117.
Data Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Tahun 2005-2010
Kabupaten Manggarai

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	2005	160	100	260	
2	2006	124	118	242	
3	2007	423	181	604	
4	2008	95	324	419	
5	2009	0	183	183	
6	2010	128	39	167	
	Jumlah	930	945	1.875	

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.118.
Data Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Kabupaten Manggarai
Tahun 2009/2010

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	2009	0	17	17	
2	2010	0	57	57	
	Jumlah	0	74	74	

Sumber Data : Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.119.
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Kerja Kabupaten Manggarai
Tahun 2008/2009

No	Jenis Lapangan Kerja	Tahun / Jenis Kelamin						Penyerapan Tenaga Kerja	
		2008			2009			2008	2009
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Primer	116.327	100.199	216.526	46.988	47.595	94.583	187	210
2	Sekunder	7.520	3.831	11.351	12.395	9.483	21.878	0	0
3	Tersier	15.765	8.514	24.279	13.063	5.886	18.949	474	249
	Jumlah	139.612	112.544	252.156	72.446	62.964	135.410	661	459

Sumber Data : Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.120.
Data Pencari Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	2005	-	-	-	
2	2006	-	-	-	
3	2007	1.685	1.538	3.223	

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
4	2008	1.212	1.347	2.559	
5	2009	1.102	1.200	2.302	
6	2010	1.357	1.145	2.502	
	Jumlah			18.079	

Sumber Data : Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.121.
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Manggarai
Tahun 2006-2010

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	SD	303	200	269	162	200
2	SMP	36	22	88	25	10
3	SMA/Sederajat	336	284	97	3	14
4	Diploma I-III	85	53	140	10	100
5	Sarjana (S1)	36	45	170	461	135
	Jumlah	796	604	764	661	459

Sumber Data : Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Manggarai Tahun 2010

C. Transmigrasi

Program ini sangat penting mengingat kecenderungan mobilitasi penduduk ke kota tinggi dan kurangnya pemerataan penduduk di setiap lokasi sehingga perlu adanya program transmigrasi.

2.3.1.14. Koperasi dan UKM

A. Jumlah Koperasi

Perkembangan jenis koperasi di Kabupaten Manggarai pada tahun 2005-2010 tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.122.
Jenis Koperasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

NO	Jenis Koperasi	TAHUN					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	KUD	6	6	6	6	6	6
2	KopKar	6	6	6	6	6	6
3	KPRI	15	15	15	15	15	15
4	KSP	3	3	4	4	7	7
5	Kop Angkatan	2	2	2	2	2	2

6	KSU	4	4	5	5	6	6
7	Koperasi Wanita	1	1	1	1	2	2
	JUMLAH	37	37	39	39	44	44

Sumber Data: Dinas Koperasi UK dan M Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Perkembangan modal perkoperasian (modal sendiri, modal luar, SHU, jumlah anggota dan omzet) dari tahun 2006-2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.123.
Kondisi Perkoperasian di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

N O	URAIAN	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010 (30 Juni)
1	Jumlah Modal:					
	a. Modal Sendiri (Rp)	5.610.843.294	5.614.843.294	5.698.191.439	9.662.496.741	9.662.496.741
	b. Modal Luar (Rp)	3.913.167.691	3.913.167.691	3.921.087.470	5.878.029.526	5.878.029.526
2	Sisa Hasil Usaha (Rp)	416.354.504	461.525.105	481.525.105	1.304.263.308	1.213.542.954
3	Anggota Koperasi (Org)	13.606	13.666	13.686	19.250	19.250
4	Karyawan (Org)	45	45	48	101	101
5	Omset (Rp)	2.849.866.310	3.134.853.590	3.496.452.221	9.333.178.406	8.818.075.950

Sumber Data: Dinas Koperasi, UK dan M Kabupaten Manggarai Tahun 2010

B. Persentase koperasi aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 2.124.
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2005 s.d 2010
Kabupaten Manggarai

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah koperasi aktif	37	37	39	39	44	44
2	Jumlah koperasi	37	37	39	39	44	44
3	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Koperasi, UK dan M Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

C. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Perkembangan Pengusaha Kecil dan Menengah tergambar pada tabel berikut ini

Tabel 2.125.
Kondisi UKM di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

NO	KONDISI UKM	TAHUN					2010
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Jumlah Pengusaha Kecil	448	1.031	707	1.630	458	458
	a. Sektor Perdagangan	50	150	75	253	245	245
	b. Sektor Pertanian	41	75	50	200	137	137
	c. Sektor Non Pertanian	60	509	285	880	76	76
	d. PKL	297	297	297	297		
2	Jumlah Modal						
	a. Modal Sendiri	2.240.000.000	5.150.000.000	3.535.000.000	8.150.000.000	2.290.000.000	2.290.000.000
	b. Modal Luar	1.395.950.000	120.000.000	370.000.000	300.000.000	63.000.000	63.000.000
3	Omset	16.128.000.000	37.116.000.000	25.452.000.000	48.900.000	16.488.000.000	
4	Aset	3.635.950.000	5.270.000.000	3.905.000.000	8.450.000.000	2.290.000.000	
5	Tenaga Kerja	986	2.062	1.414	326	916	916

Sumber Data: Dinas Koperasi UK dan M Kabupaten Manggarai Tahun 2010

D. Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

Menghitung jumlah UKM non BPR/LKM UKM dilakukan dengan mengisi tabel berikut.

Tabel 2.126.
Jumlah UKM non BPR/LKM 2005 s.d 2010
Kabupaten Manggarai

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah seluruh UKM	448	1.031	707	1.630	458	458
2	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	1	1	1	1	1	1

Sumber Data: Dinas Koperasi, UK dan M Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

E. Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Tabel 2.127.
Jumlah BPR/LKM Kabupaten Manggarai Tahun 2005 s.d 2010

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah BPR	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah LKM	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah BPR dan LKM	1	1	1	1	1	1

Sumber Data: Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Semakin banyak jumlah BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam mendukung pendanaan UKM melalui BPR/LKM.

2.3.1.15. Penanaman Modal Daerah

A. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Analisis atas layanan urusan pilihan dalam bidang ekonomi, indikator kinerja selama lima tahun diimplementasinya menjadi tanggung jawab dari bidang urusan pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi, sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. Hasil analisis dari beberapa indikator pada fokus layanan urusan pilihan pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel. 2.128.
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2005	Jumlah Investor	15	2	17
2006	Jumlah Investor	15	2	17
2007	Jumlah Investor	15	2	17
2008	Jumlah Investor	12	2	14
2009	Jumlah Investor	21	3	24
2010	Jumlah Investor	21	3	24

Sumber Data : Bappeda Kab. Manggarai Tahun 2010

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

B. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Untuk menghitung nilai PMDN/PMA dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 2.129.
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2005	17	31.500.000.000,-	8	29.080.000.000,-
2006	17	32.580.000.000,-	8	29.080.000.000,-
2007	17	32.580.000.000,-	6	20.830.000.000,-
2008	14	26.330.000.000,-	8	6.580.000.000,-
2009	24	26.330.000.000,-	8	6.580.000.000,-
2010	24	26.330.000.000,-	8	6.580.000.000,-

Sumber Data : Bappeda Kab. Manggarai Tahun 2010

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

C. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN.

Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah seluruh PMA/PMDN dihitung dari banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu tahun berdasarkan data BKPM.

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Manggarai terlihat pada tampilan tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2.130.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Manggarai

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	377	377	377	135	444	444
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	17	17	17	14	24	24
3	Rasio daya serap tenaga kerja	22,17	22,17	22,17	9,64	18,5	18,5

Sumber Data : Dinas Sosial dan Nakertarans Kab. Manggarai Tahun 2010

2.3.1.16. Kebudayaan

Perkembangan seni budaya Daerah Kabupaten Manggarai kurun waktu 2005 – 2010 ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 2.131.
Perkembangan Seni, Budaya Daerah tahun 2005 s/d 2010

No	Kecamatan Kecamatan		Jumlah Grup Keksenian per Kecamatan					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
I.	SANGGAR KESENIAN							
	1.	Langke Rembong			12	16	16	24
	2.	Ruteng.			1	1	1	1
	3.	Wae Ri'i			1	1	1	1
	4.	Cibal			1	1	1	1
	5.	Reok			1	1	1	1
	6.	Rahong Utara			-	-	-	-

	7.	Lelak			-	-	-	-
	8.	Satar Mese			-	-	-	-
	9.	Satar Mese Barat			-	-	1	1
		TOTAL			16	20	21	29
II.		ATRAKSI SENI BUDAYA						
	1.	Pagelaran Caci	1	1	1	1	1	1
	2.	Festival Musik		1		1	1	
	3.	Festival Tari			1		1	
	4.	Festival Sastra						
	5.	Lomba Lukis						
	6.	Festival Florata						1
	7.	Pagelaran seni Budaya						
		TOTAL	1	2	2	2	3	2
III.		SENTRA KERAJINAN SOUVENIR						
	1.	Langke Rembong	4	4	4	4	4	4
	2.	Ruteng.	2	2	2	1	1	1
	3.	Wae Ri'i	-	-	-	-	-	-
	4.	Cibal	3	3	3	3	3	3
	5.	Reok	2	2	2	2	2	2
	6.	Rahong Utara	-	-	-	-	-	-
	7.	Lelak	-	-	-	1	1	1
	8.	Satar Mese	1	1	1	1	1	1
	9.	Satar Mese Barat	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	12	12	12	12	12	12

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel ini di atas menunjukan bahwa jumlah grup kesenian mengalami peningkatan jumlah di kecamatan Langke Rembong sebagai ibukota Kabupaten, pada lima (5) kecamatan yaitu Kecamatan Cibal,Reok,Ruteng,Satar Mese dan kecamatan Wae Rii tidak mengalami perkembangan serta ada tiga kecamatan yakni Kecamatan Rahong Utara,Lelak dan kecamatan Satar Mese Barat belum ada karena tiga kecamatan in merupakan kecamatan baru hasil pemekaran. Kegiatan atraksi seni budaya dan jumlah sentra kerajinan souvenir tidak mengalami perkembangan.

2.3.1.17. Pemuda dan Olah Raga

Pemuda sebagai tulang punggung bangsa dan negara memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Data kependudukan memperlihatkan kelompok umur produktif menempati komposisi yang cukup besar dari total penduduk Manggarai. Untuk maksud tersebut pemuda harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan sumber daya profesional yang dapat besaing di berbagai aspek kehidupan secara mandiri. Apabila pemuda diorganisir dengan baik dalam suatu wadah kepemudaan maka dapat dibentuk watak dan karakter yang dapat menjadikan pemuda sebagai

pelopor pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para pemuda.

Sehubungan dengan itu, peran serta pemuda dalam pembangunan termanifestasi melalui wadah-wadah dan kegiatan-kegiatan kepemudaan dalam rangka pengembangan potensi diri dikalangan pemuda.

Olahraga sebagai salah satu sektor di bidang pendidikan adalah dalam rangka mewujudkan arah kebijaksanaan nasional strategik bidang pendidikan yakni terwujudnya sistem dan iklim pendidikan yang demokratis guna memperteguh akhlak mulia, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dalam rangka mengembangkan kualitas manusia secara umum dan membangun masyarakat Manggarai yang produktif demi masa depan Manggarai yang sejahtera. Sejalan dengan itu, upaya menggali dan mengembangkan potensi daerah khususnya di bidang olahraga, mutlak dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mempersiapkan manusia Manggarai yang tangguh, kuat dan cerdas.

Tujuan pembangunan kepemudaan dan olah raga adalah meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan menjadikan olah raga sebagai budaya untuk kesehatan dan prestasi. Sasaran program pembangunan kepemudaan dan olah raga adalah :

- Meningkatkan fungsi pemberdayaan pemuda dalam pembangunan kepemudaan.
- Memberikan kontribusi/dukungan bagi pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan.
- Mengupayakan peningkatan peranan pemuda dan pengembangan kebijakan olahraga di Kabupaten Manggarai.

A. PEMUDA

1. Organisasi Pemuda

Tabel 2.132.
Data Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2006 s/d 2010 Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kecamatan Langke Rembong	17	17	19	23	24
2.	Kecamatan Reok	5	5	5	5	5
3.	Kecamatan Cibal	1	1	1	1	1
4.	Kecamatan Wae Ri'i	1	1	1	1	1
5.	Kecamatan Rahong Utara	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010
6.	Kecamatan Ruteng	2	2	2	2	2
7.	Kecamatan Lelak	1	1	1	1	1
8.	Kecamatan Satarmese Barat	1	1	1	1	1
9.	Kecamatan Satarmese	1	1	1	1	1
	Jumlah	29	29	32	36	37

Sumber Data: Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Nama- organisasi Kepemudaan : KNPI, AMPI, PMKRI, GMKI, GMMI, FORUM AUFKLARUNG, FORUM PEMUDA TANI INDONESIA, GPI Cabang Manggarai, HIMAPAL STKIP, KARANG TARUNA, MUDIKA , PEMUDA GMIT, REMAS dll.

Tabel di atas memperlihatkan jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Manggarai kurun waktu 2006 – 2010. Dari data di atas Nampak bahwa organisasi pemuda yang paling banyak terdapat di Kecamatan Langke Rembong sebagai ibukota Kabupaten Manggarai, menyusul kecamatan Reok. Satu – satunya kecamatan yang belum memiliki organisasi pemuda adalah kecamatan Rahong Utara, disebabkan karena kecamatan Rahong Utara merupakan kecamatan baru hasil pemekaran kecamatan Ruteng.

2. Pemuda/siswa berprestasi

Tabel 2.133.
Data Jumlah Siswa Prestasi Untuk Kegiatan Paskibraka Tahun 2006 s/d 2010
Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kecamatan Langke Rembong	-	-	-	19	20
2.	Kecamatan Reok	-	-	-	3	3
3.	Kecamatan Cibal	-	-	-	1	1
4.	Kecamatan Wae Ri'i	-	-	-	-	-
5.	Kecamatan Rahong Utara	-	-	-	-	-
6.	Kecamatan Ruteng	-	-	-	4	2
7.	Kecamatan Lelak	-	-	-	-	-
8.	Kecamatan Satarmese Barat	-	-	-	1	1
9.	Kecamatan Satarmese	-	-	-	-	1
	Jumlah	-	-	-	28	28

Sumber Data: Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.131. di atas menunjukan bahwa jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan paskibraka dalam rangka perayaan 17 Agustus tingkat Kabupaten Manggarai sebagai pasukan pengibar bendera. Utusan yang paling banyak adalah kecamatan Langke Rembong sebanyak 19 orang (67,86%) pada tahun 2009 dan 20 orang dari 28 siswa (71,43 %) pada tahun 2010. Tiga Kecamatan yakni Kecamatan Wae Rii, Kecamatan Rahong Utara dan Kecamatan Satar Mese Barat belum pernah mengirim utusan untuk menjadi pengibar bendera pada perayaan 17 Agustus tingkat Kabupaten.

3. Kegiatan Kepemudaan

Tabel 2.134.
Data Jumlah Kegiatan Kepemudaan Berupa Sosialisasi Kespro, Napza, HIV/Aids
Tahun 2006 s/d 2010

No	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kecamatan Langke Rembong	-	-	-	3	-
2.	Kecamatan Reok	-	-	-	1	1
3.	Kecamatan Cibal	-	-	-	1	1
4.	Kecamatan Wae Ri'i	-	-	-		1
5.	Kecamatan Rahong Utara	-	-	-	-	-
6.	Kecamatan Ruteng	-	-	-	2	2
7.	Kecamatan Lelak	-	-	-	-	-
8.	Kecamatan Satarmese Barat	-	-	-		1
9.	Kecamatan Satarmese	-	-	-	1	1
Jumlah		-	-	-	8	7

Sumber Data: Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel di atas merupakan gambaran kegiatan bidang Pemuda pada Dinas PPO Kabupaten Manggarai pada tahun 2009 dan 2010. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kerjasama antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan UNFPA Kabupaten Manggarai. Kegiatan sosialisasi Kespro, Napsa, HIV/AIDS didanai oleh UNFA sebagai badan dunia yang secara khusus memperhatikan masalah kesehatan reproduksi remaja secara khusus. Sosialisasi ini dilaksanakan di sekolah – sekolah baik SMP maupun SMA juga bagi kelompok muda non sekolah seperti Pemuda Paroki, pemuda Mesjid atau kelompok pemuda lainnya.

B. OLAH RAGA

Kondisi sampai dengan tahun 2010 terdapat 12 cabang/organisasi olahraga di Kabupaten Manggarai yakni ;

Tabel 2.135.
Cabang Olahraga / Organisasi Olahraga di Kabupaten Manggarai

No	Cabang Olah Raga	Nama Induk Organisasi	Ket.
1	Ateletik	PASI	
2	Bola Kaki	PERSIM	
3	Bola Volley	PBVS	
4	Tenis Meja	PTMSI	
5	Tenis Lantai	PELTI	
6	Bulu Tangkis	PBSI	
7	Kempo	PERKEMI	
8	Karate	FORKI	

No	Cabang Olah Raga	Nama Induk Organisasi	Ket.
9	Taekwondo	TAEKWONDO	
10	Pencak silat	IPSI	
11	Sepak Takraw	PSTI	
12	Tinju	PERTINA	

Sumber Data: Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.136.

Data Jumlah Lapangan Bola sepak milik Pemda Manggarai :

Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1 buah stadion	1 buah stadion	1 buah stadion

Sumber Data: Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.137.

Data jumlah Lapangan Bola Volley milik Pemda Manggarai

Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
2 buah	2 buah	2 buah

Sumber Data: Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.138.

Data jumlah Lapangan Bola Basket milik Pemda Manggarai

Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1 buah	1 buah	1 buah

Sumber Data: Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.139.

Data jumlah Lapangan Tenis Lantai milik Pemda Manggarai

Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
2 buah	2 buah	2 buah

Sumber Data: Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel-tabel di atas menggambarkan bahwa sarana/prasarana untuk meningkatkan prestasi dalam memajukan dunia olah raga di Kabupaten Manggarai terutama untuk cabang olah raga bola sepak, bola volley, bola basket dan tenis lantai masih minim yaitu baru satu stadion, 2 buah lapangan bola volley, 1 lapangan basket dan 2 buah lapangan tenis lantai yang dibangun oleh pemerintah sementara minat masyarakat semakin meningkat. Meningkatnya minat masyarakat ditandai oleh bermunculan klub – klub olah raga di Kabupaten Manggarai saat ini. Saat ini stadion yang sudah dibangun itu belum digunakan secara maksimal karena berbagai kendala. Diharapkan ke depan sarana yang telah menelan

dana miliaran rupiah ini bias digunakan secara lebih maksimal demi memajukan dunia persepakbolaan di Manggarai.

Tabel 2.140.
Jumlah organisasi Olah raga di Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun			Ket
		2008	2009	2010	
1	Langke Rembong	10	12	12	12 Cabang semua ada
2	Ruteng	2	2	3	Bola sepak,Bola Volley,Bulu Tangkis
3	Cibal	2	3	2	Bola sepak,Bola Volley,Taekwondo
4	Reok	4	5	6	Bola sepak,volley,Tenis Meja,Bulu tangkis,Taekwondo,Kempo
5	Wae Rii	2	2	2	Bola sepak dan Bola Volley
6	Satar Mese	2	2	2	Bola sepak dan Bola Volley
7	Satar Mese Barat	2	2	2	Bola sepak dan Bola Volley
8	Rahong Utara	2	2	2	Bola sepak dan Bola Volley
9	Lelak	2	2	2	Bola sepak dan Bola Volley
Jumlah		28	32	34	

Sumber Data: Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Dari table di atas menunjukkan jumlah organisasi olahraga yang sudah ada di kecamatan – kecamatan di Kabupaten Manggarai.Cabang olah raga yang paling banyak terdapat di kota Ruteng sebagai ibu kota Kabupaten.Hal ini beralasan karena kota Ruteng merupakan pusat kegiatan pemerintahan,pendidikan dan konsentrasi penduduk yang paling besar.Ke depan diharapkan supaya semua pemangku kepentingan secara saksama memperhatikan sarana/prasarana olah raga yang sungguh masih sangat kurang.

Tabel 2.141.
Data Kegiatan/Pertandingan Olah raga yang pernah diikuti

1. Kegiatan Pertandingan O2SN Tingkat Kabupaten Manggarai

Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010
SD	-	2 cabang	5 cabang
SMP	-	2 cabang	6 cabang
SMA	-	-	2 cabang
Total	-	4 cabang	13 cabang

2. Kegiatan O2SN Tingkat Provinsi

Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010
SD	-	2 cabang	5 cabang
SMP	-	2 cabang	6 cabang
SMA	-	-	2 cabang
Total	-	4 cabang	13 cabang

Sumber Data: Dinas PPO Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Kedua tabel di atas adalah kegiatan olah raga siswa yang setiap tahun diselenggarakan Departemen Pendidikan mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat Nasional. O2SN menjadi ajang siswa menunjukkan prestasi dalam bidang olah raga dalam rangka mencari bibit – bibit yang nantinya bisa mewakili Indonesia dalam berbagai ajang olah raga tingkat regional maupun internasional.

2.3.1.18. Politik, Perlindungan Masyarakat dan Hukum

Pemilihan anggota legislatif dan suksesi Kepala Daerah selama ini mencerminkan iklim politik yang cukup kondusif. Peran lembaga politik untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat sangat ditentukan figur wakil partai politik di lembaga legislatif. Pada sisi lain, dinamika proses politik sangat dipengaruhi kejelasan peraturan perundangan politik.

Gambaran partisipasi politik di Kabupaten Manggarai dapat dijelaskan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) **Data Pemilihan Presiden:** Jumlah pemilih pada tahun 2004 sebanyak 275.420 orang (perempuan sebanyak 141.333 orang (51,36%) dan pemilih laki-laki sebanyak 131.215 orang (48,64%)). Dari total tersebut, terdapat 46.491 wajib pilih (16,88%) yang tidak menggunakan hak pilih. Pada tahun 2009, jumlah pemilih sebanyak 166.541 orang. (perempuan sebanyak 87.107 orang (52,30%) dan pemilih laki-laki sebanyak 179.434 orang (47,70%)). Dari total tersebut, terdapat 38.694 wajib pilih (23,23%) yang tidak menggunakan hak pilih.
- 2) **Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2005:** Jumlah pemilih sebanyak 278.931 orang. Dari total tersebut, jumlah pemilih perempuan sebanyak 144.768 orang (51,90%) dan pemilih laki-laki sebanyak 134.163 orang (48,10%); sedangkan terdapat 32.079 wajib pilih (11,50%) yang tidak menggunakan hak pilih, sedangkan dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2010 jumlah pemilih sebanyak 165.629 orang. Jumlah pemilih perempuan sebanyak 87.109 orang (52,60 %) dan pemilih laki-laki sebanyak 78.520 orang (47,41 %).
- 3) **Pemilihan Gubernur NTT Tahun 2008:** Jumlah Pemilih sebanyak 154.510 orang. Dari total tersebut, jumlah pemilih perempuan sebanyak 82.695 orang (53,52%) dan

pemilih laki-laki sebanyak 71.815 orang (46,48%); sedang terdapat 30.000 wajib pilih (19,42%) yang tidak menggunakan hak pilih.

- 4) **Pemilihan Legislatif Tahun 2009:** Jumlah pemilih sebanyak 160.545 orang. Dari total tersebut, jumlah pemilih perempuan sebanyak 84.145 orang (52,41%) dan pemilih laki-laki sebanyak 76.400 orang (47,59%); sedangkan terdapat 28.924 wajib pilih (18,02%) yang tidak menggunakan hak pilih.
- 5) **Partai Politik:** Jumlah partai politik meningkat dari 24 buah pada tahun 2005 menjadi 37 buah pada tahun 2010; sedangkan yang memperoleh kursi di lembaga legislatif meningkat dari 13 tahun 2004 menjadi 18 partai politik tahun 2009.

2.3.1.19. Keamanan dan Ketertiban Sosial

Secara umum gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Manggarai saat ini masih dalam tingkat terkendali; kendatipun pada tahun 2005 pernah menduduki peringkat 1 (satu) rawan keamanan dan ketertiban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan peringkat 10 (sepuluh) untuk nasional. Beberapa jenis gangguan keamanan dan ketertiban sosial yang sering terjadi, tergambar pada beberapa indikator seperti:

A. Kasus Kriminalitas

Tabel 2.142.
Jumlah Kasus Kriminalitas dan Kasus Kriminaliaas yang diselesaikan
Tahun 2006 - 2010

Tahun	Jumlah	Yang Diselesaikan
2006	231	132
2007	341	161
2008	340	174
2009	279	227
2010	350	249

Sumber Data: Kepolisian Resort Manggarai Tahun 2011

Data pada tabel di atas menunjukkan jumlah kasus kriminalitas pada 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2009. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2010. Jumlah kasus kriminalitas yang diselesaikan mengalami peningkatan dari 57,14% tahun 2006 menjadi 71,14% pada tahun 2010.

B. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.

Tabel 2.143.
Jumlah LSM Aktif Kabupaten Manggarai Tahun 2006 s.d 2010

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah LSM terdaftar	47	49	54	56	60
2.	Jumlah LSM aktif	47	49	54	56	60

Sumber Data: Badan Kesbangpolinmas Kab. Manggarai Tahun 2010

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) aktif di Kabupaten Manggarai terus meningkat dari 47 pada tahun 2006 menjadi 60 pada 2010. Tingginya jumlah LSM aktif menggambarkan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

C. Perlindungan Masyarakat

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio perkembangan jumlah Linmas di Kabupaten Manggarai sejak tahun 2006-2010 tergambar pada table berikut ini:

Tabel 2.144.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2006 s/d 2010 Kabupaten Manggarai

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Linnmas	2.189	2.189	2.531	3.300	1.956
2.	Jumlah Penduduk	510.744	519.868	282.289	294.863	292.037
3.	Rasio Jmlh Linnmas Per 10.000 Penduduk	1:43	1:42	1:90	1:112	1:67

Sumber Data: Badan Kesbangpolinmas Kab. Manggarai Tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan rasio jumlah Linmas di Kabupaten Manggarai terus meningkat pada 5 (lima) tahun terakhir yang mengindikasikan peningkatan jumlah Linmas tidak seimbang dengan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan yang signifikan terutama terjadi pada tahun 2008 dan 2009.

Berbagai gangguan keamanan yang belum diimbangi dengan penuntasan masalah penegakan hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan yang berakibat pada ketidaktenteraman masyarakat.

2.3.1.20. HUKUM

Dalam upaya meningkatkan kualitas substansi produk hukum daerah untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi dan meningkatnya relevansi antara pembangunan hukum dengan pembangunan sektoral serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan produk hukum daerah maka pengembangan subsistem hukum daerah harus mempunyai fungsi untuk memberikan arah baik terhadap persoalan hukum yang bersifat strategis maupun yang bersifat mencegah kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan setiap program pembangunan pemerintah daerah.

Persoalan hukum yang paling menonjol dan bersifat massal di Kabupaten Manggarai ialah saling klaim kepemilikan antar-berbagai pihak terhadap kawasan hutan, tanah ulayat dan penyerobotan tanah individu. Indikator hukum dan HAM mencakupi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah kasus penyalahgunaan wewenang, terutama yang berkaitan dengan penyimpangan atas pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

Data tahun 2006-2010 menunjukkan adanya fluktuasi jumlah obyek pemeriksaan baik kejadian reguler maupun kejadian khusus. Pada hasil pemeriksaan terjadi peningkatan yang signifikan baik kejadian administrasi maupun kejadian keuangan terutama pada tahun 2007. Secara akumulatif dari tahun 2006-2010, dari total 566 hasil pemeriksaan administrasi yang telah ditindaklanjuti 383 kasus (67,67%) dan dari 317 hasil pemeriksaan keuangan terdapat 167 yang telah ditindaklanjuti (58,99%).

Tabel 2.145.

Hasil Audit/Pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Manggarai Tahun 2006-2010

PKPT	Obyek Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan		Tindak Lanjut		Sisa	
	Kejadian	Kejadian	Kejadian	Kejadian	Kejadian	Kejadian	Kejadian	Kejadian
	Reguler	Khusus	AMD	Keuangan	AMD	Keuangan	AMD	Keuangan
2006	40	27	63	54	63	32	-	22
2007	73	30	165	80	165	45	-	35
2008	51	16	106	62	40	46	66	16

PKPT	Obyek Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan		Tindak Lanjut		Sisa	
	Kejadian	Kejadian	Kejadian	Kejadian	Kejadian	Kejadian	Kejadian	Kejadian
	Reguler	Khusus	AMD	Keuangan	AMD	Keuangan	AMD	Keuangan
2009	37	21	134	57	90	36	44	21
2010	41	15	98	64	25	28	73	36
JML	242	109	566	317	383	187	183	130

Sumber Data: Inspektorat Kab. Manggarai Tahun 2010

2) Jumlah Peraturan Daerah

Selama kurun waktu 2006 sampai 2008 jumlah Peraturan Daerah tidak mengalami perubahan. Tahun 2009 menurun (5 Perda) dan meningkat kembali pada tahun 2010 (22 Perda).

3) Jumlah Peraturan Bupati

Jumlah Peraturan Bupati menurun dari 30 buah pada tahun 2006 menjadi 14 buah pada tahun 2007, pada tahun 2008 meningkat menjadi 44 buah, tahun 2009 menurun menjadi 12 buah dan pada tahun 2010 meningkat kembali menjadi 24 buah.

4) Jumlah Keputusan Bupati

Jumlah Keputusan Bupati meningkat dari 322 buah tahun 2006 menjadi 374 buah tahun 2007. Pada tahun 2008 menurun menjadi 350 buah, tahun 2009 menurun menjadi 312 buah dan tahun 2010 meningkat menjadi 297.

Tabel 2.146.
Jumlah Produk Hukum Kabupaten Manggarai Tahun 2006 - 2010

Tahun	Produk Hukum		
	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Keputusan Bupati
2006	14	30	322
2007	14	14	374
2008	14	44	350
2009	5	12	312
2010	22	24	297
Jumlah	69	124	1655

Sumber Data Bagian Hukum Setda Kab. Manggarai Tahun 2011

5) Jumlah Desa penyuluhan hukum

Jumlah desa penyuluhan hukum meningkat dari 6 desa pada 2006 menjadi 26 desa tahun 2007, tahun 2008 menurun menjadi 16 desa, tahun 2009 meningkat menjadi 23 desa dan pada tahun 2010 menurun menjadi 20 desa.

Tabel 2.147.
Jumlah Desa Penyuluhan Hukum tahun 2006 - 2010

No	Tahun	Jumlah Desa Penyuluhan
1	2006	6
2	2007	26
3	2008	16
4	2009	23
5	2010	20
Jumlah		95

Sumber Data Bagian Hukum Setda Kab. Manggarai Tahun 2011

6) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2006 s/d 2010 Kabupaten Manggarai

Tabel 2.148.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2006 s/d 2010

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	51	54	48	50	47
2.	Jumlah penduduk	510.744	519.868	282.289	294.863	292.037
3.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1:1,00	1:1,04	1:1,70	1:1,69	1:61

Sumber Data : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Setda Kab. Manggarai Tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan Rasio jumlah Polisi Pamong Praja di kabupaten Manggarai pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi.

7) Tingkat pelanggaran terhadap hukum positif.

Kepolisian Resort Manggarai dan Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai mengungkapkan beberapa jenis pelanggaran hukum positif seperti:

a) Kasus Pencurian:

Kasus pencurian di Kabupaten Manggarai cenderung mengalami i penurunan dari 57 kasus tahun 2007, menjadi 54 kasus tahun 2008,menurun menjadi 44 kasus tahun 2009,dan meningkat menjadi 48 kasus tahun 2010.

- b) Penganiayaan: meningkat dari 2 kasus tahun 2006 menjadi 86 kasus tahun 2007, menurun menjadi 82 kasus tahun 2008, menurun menjadi 65 kasus tahun 2009, meningkat menjadi 46 kasus pada tahun 2010.
- c) Kasus Pemerkosaan: menurun dari 8 kasus tahun 2006 menjadi 6 kasus tahun 2007, meningkat menjadi 7 kasus tahun 2008, menurun menjadi 3 kasus pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 4 kasus pada tahun 2010.
- d) Kasus Perzinahan: pada tahun 2006 dan 2007 dari 3 kasus menjadi 6 kasus tahun 2008, pada tahun 2007 meningkat menjadi 7 dan meningkat menjadi 8 Kasus 2010
- e) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : meningkat dari 3 kasus tahun 2006 menjadi 11 kasus tahun 2007 dan meningkat menjadi 16 kasus tahun 2008, meningkat menjadi 18 Kasus 2009, meningkat menjadi 28 Tahun 2010;
- f) Kasus Perjudian: meningkat dari 8 kasus tahun 2006 menjadi 31 kasus tahun 2007 dan menurun menjadi 12 kasus tahun 2008, meningkat menjadi 14 kasus tahun 2009 dan menurun menjadi 5 kasus tahun 2010
- g) Kasus Penipuan: meningkat dari 15 kasus tahun 2006, menurun menjadi 5 kasus tahun 2007, meningkat menjadi 25 kasus tahun 2008, menurun menjadi 19 kasus tahun 2009 dan menurun menjadi 11 kasus tahun 2010;
- h) Kasus Penyerobotan: menurun dari 16 kasus tahun 2006 menjadi 8 kasus tahun 2007 dan menurun menjadi 2 kasus tahun 2008; meningkat menjadi 7 kasus tahun 2009 dan meningkat menjadi 14 kasus tahun 2010;
- i) *Illegal Logging*: terdapat 6 kasus pada tahun 2006, menurun menjadi 5 kasus tahun 2007, menurun menjadi 2 kasus tahun 2008, meningkat menjadi 7 kasus tahun 2009 dan menurun menjadi 2 kasus pada tahun 2010;
- j) Kasus Penggelapan: Tahun 2006 dan tahun 2007 sebanyak 13 kasus, Tahun 2008 dan 2009 menurun menjadi 10 kasus dan menurun menjadi 9 kasus pada tahun 2010.

Tabel 2.149.
Pelanggaran terhadap hukum Positif di Kabupaten Manggarai Tahun 2006 - 2010

No	Angka Kriminalitas	Tahun									
		2006		2007		2008		2009		2010	
		Lanjut	Selesai	Lanjut	Selesai	Lanjut	Selesai	Lanjut	Selesai	Lanjut	Selesai
1	Pencurian			57	16	54	17	44	38	48	24
2	Penganiayaan	2	-	86	13	82	35	65	34	80	63
2	Pemeriksaan	8	5	6	4	7	5	3	1	4	3
3	Perzinahan	3	3	3	1	6	6	7	5	8	7
4	KDRT	3	4	11	4	16	15	18	4	28	17
5	Perjudian	8	8	31	51	12	12	14	28	5	15
6	Penipuan	15	5	5	4	25	6	19	5	11	16
7	Penyerobotan	16	8	8	-	2	-	4	3	14	4
8	Illegal Logging	6	7	5	5	2	4	7	14	2	8
9	Penggelapan	13	3	13	1	10	2	10	5	9	6
Jumlah		72	43	225	99	216	102	191	137	209	163

Sumber data : Kepolisian Resort Manggarai Tahun 2011

Tabel diatas menggambarkan pelanggaran terhadap hukum positif yang cenderung meningkat di Kabupaten Manggarai yaitu kasus kriminal Penganiayaan 2 kasus tahun 2006 meningkat menjadi 80 kasus .

Penyelesaian kasus-kasus tersebut di atas, terutama kasus yang berkaitan dengan klaim kepemilikan belum diselesaikan secara komprehensif. Secara vertikal, penyelesaian masalah tersebut perlu memperhatikan semua kerangka regulasi yang pernah ditetapkan pemerintah mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat kabupaten. Secara horisontal, sub sistem hukum tidak tertulis (kebiasaan dan hukum adat) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengembangan sistem hukum nasional untuk menyelesaikan berbagai masalah sengketa dan klaim kepemilikan kawasan hutan, tanah ulayat dan hak-hak individu. Selain itu terjadi pula jenis pelanggaran hukum berupa: pelanggaran hukum positif seperti pembunuhan, pemeriksaan, korupsi, KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perjudian dan pelanggaran susila.

2.3.1.21. Agama

Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama dan kehidupan beragama. Pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama melalui upaya peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar-kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan.

Tabel 2.150.
Jumlah Tempat Ibadah dan Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Manggarai Tahun 2006-2010

No	Bangunan Tempat Ibadah	Tahun 2006			Tahun 2007			tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010		
		Jml unit	Jml pemelu	Rati o	Jml unit	Jml pemelu	Ratio	Jml Unit	Jml pemelu	Ratio	Jml Uni	Jml pemeluk	Ratio	Jml Uni	Jml pemeluk	Rati o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Mesjid	67	25,400	1:37	76	32,454	1:427	34	20,190	1:594	28	20,247	1:723	28	20,408	1:728
2	Gereja	458	525,26	1:14	464	539,97	1:116	171	322,43	1:188	171	323,001	1:188	171	33,472	1:958
3	Gereja Kristen	5	2,519	1:50	11	2,556	1:51	5	2,182	1:436	7	2,203	1:314	12	2,203	1:183
4	Pura	1	405	1:40	1	428	1:428	1	396	1:396	1	396	1:396	1	410	1:410
7	Lain- Lain															
	Jumlah	531	553,58		552	575,41		211	345,20			345,847			56,493	

Sumber Data : Kantor Departemen Agama Kab. Manggarai Tahun 2010

Berdasarkan Tabel diatas menggambarkan jumlah tempat ibadah telah memenuhi kebutuhan dari para pemeluk agama. Jumlah tempat ibadah terus bertambah, tahun 2006 Jumlah Mesjid 67 unit, gereja katolik 458 unit, gereja Kristen protestan 5 unit, pura 1 unit, tahun 2007 meningkat menjadi Mesjid 76 unit, gereja katolik 464 unit, gereja Kristen protestan 11 unit, pura 1 unit, tahun 2008 menurun menjadi Mesjid 34 unit, gereja katolik 171 unit, gereja Kristen protestan 5 unit, pura 1 unit (data sudah dipilah dengan Kabupaten Manggarai), tahun 2009 jumlah menurun menjadi Mesjid 28 unit, gereja katolik 171 unit, gereja Kristen protestan meningkat menjadi 7 unit, pura 1 unit, tahun 2010 jumlah Mesjid 34 unit, gereja katolik 171 unit, gereja Kristen protestan meningkat menjadi 12 unit, pura 1 unit.

2.3.1.22. Pemerintahan Umum

A. Penataan Daerah Otonomi Baru

1. Dalam rangka akselerasi pembangunan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2007 Nundang NO. 36 Tahun 2007 dan pemekaran tiga kecamatan baru yaitu Kecamatan satar Mese, Kecamatan Rahong Utara dan Kecamatan Lelak berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2007 tanggal 24 Juli tahun 2007.
2. Untuk menghindari terjadinya konflik di daerah perbatasan pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan Kesepakatan penyelesaian tapal batas wilayah antar Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur serta Kabupaten Ngada yang ditandai dengan penetapan tapal batas pada wilayah perbatasan antar kabupaten dan surat kesepakatan tapal batas wilayah.
3. Pada Tahun 2005 dan 2010 telah dilaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Periode Tahun 2005-2010 dan Periode Tahun 2011-2015.

Tabel 2.151
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2005-2010 dan
Periode Tahun 2011-2015

NO	PERIODE	DASAR
1.	2005 – 2010	<p>Bupati</p> <p>Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.53 – 491 Tahun 2005, Tanggal 09 Agustus 2005</p> <p>Untuk Wakil Bupati</p> <p>Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.53 – 492 Tahun 2005, Tanggal 09 Agustus 2005</p>

NO	PERIODE	DASAR
2.	2011-2015	<p>Bupati</p> <p>Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.63 – 809 Tahun 2010,Tanggal 22 Agustus 2010</p> <p>Wakil Bupati</p> <p>Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.63 – 810Tahun 2005,Tanggal 22 Agustus 2010</p>

Sumber Data: Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Manggarai Tahun 2010

4. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Pemerintahan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2006 – 2008 telah dibangun fasilitas pemerintahan di Kabupaten Manggarai yang tersebar di bebrapa wilayah kecamatan,pembangunan fasilitas tersebut tergambar pada table berikut ini :

Tabel 2.152.
Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Perkantoran Tahun 2006 - 2008

NO	Kegiatan	Tahun			Lokasi
		2006	2007	2008	
1.	Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Bupati	1 unit			Kec. L. Rembong,Satar Mese Barat,Rahong Utara
2.	Pembangunan Kantor Bupati		1 unit		Kec. L. Rembong
3.	Pembangunan Rumah Dinas Camat	1 unit			Kec. Borong
4.	Pembangunan Rumah Dinas Camat	2 Unit			Kec. Reok dan Satar Mese
5.	Pembangunan Kantor Camat	1 unit			Kec. Kota Komba
6.	Pembangunan Kantor Camat			4 Unit	Kec. L. Rembong,Satar Mese Barat,Rahong Utara,Lelak
7.	Peningkatan Kantor Camat untuk persiapan kantor bupati	1 unit			Kec. Borong
6.	Pembangunan Pos Pengaman Perbatasan		1 Unit		Kec. Elar
7.	Rehab kantor camat	2 unit			Kec. Cibal dan Reok

Sumber Data: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Tahun 2010

B. Konflik pertanahan di Kabupaten Manggarai dari Tahun 2006 – 2010.

Pada tabel berikut terlihat jumlah konflik yang berkaitan dengan masalah tanah masyarakat mengalami fluktuasi pada 5 (lima) tahun terakhir. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2009 (47 kasus) dan terendah pada tahun 2008 (15 kasus). Jumlah kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Satar Mese (55 kasus) diikuti Kecamatan Cibal (34 kasus), Kecamatan Ruteng (19 kasus), Kecamatan Wae Ri'i (15 kasus), Kecamatan Langke Rembong (5 kasus), Kecamatan Reok (6 kasus), Kecamatan Satar Mese Barat (5 kasus) dan Lelak (1 kasus). Penyelesaian konflik pertanahan dilakukan baik melalui jalur hukum maupun melalui pendekatan sosial budaya dan kekeluargaan.

Tabel 2.153.
Jumlah dan Status Penyelesaian Konflik Pertahan Tahun 2006 – 2010
Tahun 2006

N O	Nama Kecamatan	Jumlah Kasus Pertanahan	Tingkat Penyelesaian				Status Penyelesaian			
			Kec / Desa / Masy. Adat		Pem Kab. M.Rai		Selesai		Blm selesai	
			Kasus	%	Kasus	%	Kasus	%	Kasus	%
1	L. Rembong									
2	Satar Mese	8			3	37,5	3	37,5	5	62,5
3	Satar Mese Barat									
4	Ruteng	3			1	33,33	1	33,33	2	66,667
5	Lelak									
6	Rahong Utara									
7	Wae Rii	1			1	100	1	100		
8	Cibal	12	9	75			9		3	
9	Reok									
	Jumlah	24	9	37,5	5	20,83	14	58,333	10	41,667

Tahun 2007

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kasus Pertanahan	Tingkat Penyelesaian				Status Penyelesaian			
			Kec/Desa/Masy. Adat		Pem Kab. M.Rai		Selesai		Blm selesai	
			Kasus	%	Kasus	%	Kasus	%	Kasus	%
1	L. Rembong	3								
2	Satar Mese	19			2	10,53	2	-	17	89,4737
3	Satar Mese Barat									
4	Ruteng	5	3	60			3	60	2	40
5	Lelak									
6	Rahong Utara									
7	Wae Rii	6								
8	Cibal									
9	Reok	2			2	100	2	100		

	Jumlah	32	3	9,375	4	12,5	7	21,875	19	59,375
--	--------	----	---	-------	---	------	---	--------	----	--------

Tahun 2008

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kasus Pertanahan	Tingkat Penyelesaian				Status Penyelesaian			
			Kec/Desa/Masy. Adat		Pem Kab. M.Rai		Selesai		Blm selesai	
			Kasus	%	Kasus	%	Kasus	%	Kasus	%
1	L. Rembong	1								
2	Satar Mese	5			2	40	2	40	3	60
3	Satar Mese Barat									
4	Ruteng	1	1	100			1	100		
5	Lelak									
6	Rahong Utara	1								
7	Wae Rii	5			2	40	2		3	
8	Cibal	1	1				1			
9	Reok	2								
	Jumlah	15	2	9,375	4	12,5	6		6	

Tahun 2009

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kasus Pertanahan	Tingkat Penyelesaian				Status Penyelesaian			
			Kec/Desa/Masy. Adat		Pem Kab. M.Rai		Selesai		Blm selesai	
			Kasus	%	Kasus	%	Kasus	%	Kasus	%
1	L. Rembong	4								
2	Satar Mese	13	4				4		9	
3	Satar Mese Barat	5	2				2		3	
4	Ruteng	9	3				3		6	
5	Lelak	1							1	
6	Rahong Utara	2							2	
7	Wae Rii	3	1		2		3			
8	Cibal	12	5		2		7		5	
9	Reok	2	1		1		2			
	Jumlah	47	16		5		21		26	

Tahun 2010

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kasus Pertanahan	Tingkat Penyelesaian				Status Penyelesaian			
			Kec/Desa/Masy. Adat		Pem Kab. M.Rai		Selesai		Blm selesai	
			Kasus	%	Kasus	%	Kasus	%	Kasus	%
1	L. Rembong	4								
2	Satar Mese	10	4				4		6	
3	Satar Mese Barat									
4	Ruteng	1								
5	Lelak	3	2				2		1	
6	Rahong Utara									
7	Wae Rii									

8	Cibal	9	1	1	2	7
9	Reok	2		1	1	1
	Jumlah	25	7	2	9	14

Sumber Data : Bagian Administrasi Pemerintahan Tahun 2011

2.3.1.23. Pelayanan Perijinan Terpadu

A. JENIS PERIJINAN DAN NON PERIJINAN YANG DILAYANI

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Manggarai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai, jenis perijinan dan nonperijinan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai berjumlah 25 buah, dimana 15 sudah meliki Perda, sedangkan 10 lainnya belum semuanya memiliki Perda (mengacu ke peraturan perundangan yang lebih tinggi) yang selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.154.
Jenis Perijinan di Kabupaten Manggarai

I. Perijinan Yang Sudah Memiliki Perda	
1 Izin Prinsip Lokasi (IPL)	9 Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	10 Izin Usaha Angkutan
3 Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	11 Izin Trayek
4 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	12 Izin Pengelolaan Usaha Tempat Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
5 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	13 Surat Izin Kepemilikan Chain Saw
6 Izin Usaha Industri (IUI)	14 Surat Izin Pemanfaatan Chain Saw
7 Tanda Daftar Industri (TDI)	15 Tanda Daftar Gudang
8 Izin Penjualan Minuman Beralkohol	
II. Perijinan Yang Belum Memiliki Perda (Mengacu Ke Peraturan PerUUan yang lebih tinggi)	
1 Izin Penelitian	6 Izin Toko Obat
2 Izin Usaha Penangkapan Ikan	7 Izin Apotik
3 Surat Izin Penangkapan Ikan	8 Surat Izin Andon
4 Surat Izin Praktek Dokter	9 Surat Izin Pembelian/Pengumpul Hasil Laut
5 Surat Izin Praktek Bidan	10 Izin Optikal

Sumber Data: Kantor KPPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2010

B. JUMLAH IZINAN YANG TELAH DITERBITKAN

Jumlah perizinan yang telah diterbitkan sejak pelayanan perdana pada tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebanyak 1.071 buah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.155.

Rekapitulasi Perizinan Dan Nonperizinan Bulan Juli-Desember 2010

N O	INDIKATOR	JUMLAH																				
		PERMOHONAN							DITOLAK							DIPROSES						
		BULAN							BULAN							BULAN						
		JU L	AG US T	SE PT	OK T	NO V	DE S	TO TAL	J U L	AG US T	SE PT	OK T	NO V	DE S	TO TAL	JU L	AG UST	SE PT	OK T	NO V	DE S	TO TAL
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	
1	IPL	0	4	1	2	2	0	9	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	2	0	9
2	IMB	0	4	1	3	3	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	3	0	11
3	SITU	16	40	33	20	31	37	177	0	0	0	0	0	0	0	16	40	33	20	31	37	177
4	SIUP:																					

RPJMD Kabupaten Manggarai 2011-2015

	- Pengurusan SIUP Baru	13	8	15	14	29	24	103	0	0	0	0	0	0	0	13	8	15	14	29	24	103
	- Registrasi SIUP	2	7	12	14	15	7	57	0	0	0	0	0	0	0	2	7	12	14	15	7	57
5	TDP	25	36	32	20	23	18	154	0	0	0	0	0	0	0	25	36	32	20	23	18	154
6	TDI	0	0	1	2	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	5
7	IUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	IUJK																					
	- Pengurusan IUJK Baru	0	2	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	5
	- Registrasi IUJK	9	5	1	3	1	1	20	0	0	0	0	0	0	0	9	5	1	3	1	1	20
10	Izin Usaha Angkutan (IUA):																					
	- Surat Izin Usaha Angkutan	5	17	7	9	8	17	63	0	0	0	0	0	0	0	5	17	7	9	8	17	63
	- Kartu Pengawasan Izin Angkutan (KPIA)	5	27	16	22	8	19	97	0	0	0	0	0	0	0	5	27	16	22	8	19	97

11	Izin Trayek (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kartu Pengawasan Izin Trayek (KPIT)	2	27	14	22	8	18	91	0	0	0	0	0	0	0	2	27	14	22	8	18	91
12	Izin Pengelolaan Usaha Tempat Penimbunan dan Penyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	4	2	1	1	2	2	12	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	2	2	12
13	Izin Penelitian																					
	- Surat Izin Penelitian	10	24	6	2	13	7	62	0	0	0	0	0	0	0	10	24	6	2	13	7	62
	- Surat Keterangan Selesai Penelitian	2	7	7	4	2	21	43	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	4	2	21	43
14	Surat Izin Praktek Dokter	0	0	0	0	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	15
15	Surat Izin Praktek Bidan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Izin Pendirian Optik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Izin Toko Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Surat Izin Apotik	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

19	Izin Kepemilikan Chain Saw	0	4	6	10	5	4	29	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	5	4	29
20	Izin Pemanfaatan Chain Saw	0	4	6	10	5	4	29	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	5	4	29
21	Izin Usaha Perikanan (IUP)	0	5	9	10	1	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	10	1	1	26
22	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	0	3	14	12	1	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	12	1	0	30
23	Surat Izin Andon	0	4	14	11	1	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	11	1	0	30
24	Surat Izin Pembelian / Pengumpul Hasil Laut	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
25	Tanda Daftar Gudang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		93	232	198	192	162	194	1071	0	0	0	0	0	0	0	95	232	198	190	162	194	1071

Sumber Data: Kantor KPPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2010

C. KINERJA PELAYANAN:

Untuk mengetahui kinerja pelayanan, untuk sementara diukur dari variabel berikut:

1) Waktu Rata-Rata Pelayanan:

Waktu rata-rata pelayanan perizinan dan nonperizinan tergambar sebagai berikut:

Tabel 2.156.

Rekapitulasi Waktu Rata-Rata Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Bulan JULI-DESEMBER 2010

NO	INDIKATOR	JANGKA WAKTU (hari)							KETERANGAN
		MAKSI MAL	WAKTU RATA-RATA						
			BULAN						
			JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IPL	14	-	17	13	9,5	7,5	-	17: Proses penerbitan surat perizinan berjalan terus, sementara tidak dilengkapi dengan persyaratan (Penanggung jawab untuk wilayah Ruteng dan gambar bangunan tidak lengkap)
2	MB	14	-	22,5	8	8,67	8,67	8,66	22,5: Proses penerbitan surat perizinan berjalan terus, sementara tidak dilengkapi dengan persyaratan (Penanggung jawab untuk wilayah Ruteng dan gambar bangunan tidak lengkap)
3	SITU	10	4	1,53	2,79	1,45	1,94	2,16	
4	SIUP:								
	- Pengurusan SIUP Baru	3	3,9	1,88	1,53	2,21	2,38	2,08	3,9: Proses penerbitan berjalan terus, sementara kelengkapan persyaratan belum tuntas (pas foto) dan pengurusan beberapa

									jenis izinan (siup, situ, tdp) secara paralel.
	- Registrasi SIUP	3	2	1,14	1,33	1,86	2,2	1,71	
5	TDP	3	3,33	2,06	1,44	1,7	1,91	1,33	3,33: Proses penerbitan berjalan terus, sementara kelengkapan persyaratan belum tuntas (pas foto) dan pengurusan beberapa jenis izinan (siup, situ, tdp) secara paralel.
6	Tanda Daftar Industri (TDI)	10	-	-	1	2,5	1	1	
7	Izin Usaha Industri (IUI)	10	-	-	-	-	-	-	
8	Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol	5	-	-	-	-	-	-	
9	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)								
	- Pengurusan IUJK Baru	10	-	2,5	11	2	-	0	11: menunggu hasil pemeriksaan lapangan.
	- Registrasi IUJK	10	2,22	1	1	1	2	1	
10	Izin Usaha Angkutan (IUA):								
	- Surat Izin Usaha Angkutan	10	5	2	2,86	2,78	1,75	2,24	
	- Kartu Pengawasan Izin	10	8	2,15	2,25	2,55	1,75	2	

	Angkutan (KPIA)								
11	Izin Trayek (IT)	10	-	-	-	-	-	-	
	- Kartu Pengawasan Izin Trayek (KPIT)	10	5	2,56	2,36	2,55	1,75	2	
12	Izin Pengelolaan Usaha Tempat Penimbunan dan Penyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	10	3,25	1	2	2	1	1,5	
13	Izin Penelitian								
	- Surat Izin Penelitian	2	1,6	1,75	2,5	1	1,31	1,14	
	- Surat Keterangan Selesai Penelitian	2	1	1,43	3,86	1,5	2	1,52	3,86: Kepala Kantor bertugas ke luar daerah, sehingga penandatanganan dokumen tertunda.
14	Surat Izin Praktek Dokter	3	-	-	-	-	2,33	2,33	
15	Surat Izin Praktek Bidan	3	-	-	-	-	-	-	
16	Izin Pendirian Optik	5	-	-	-	-	-	-	
17	Izin Toko Obat	5	-	-	-	-	-	-	
18	Surat Izin Apotik	5	-	-	-	-	-	5	
19	Izin Kepemilikan Chain	5	-	1,5	1,83	2,2	1,4	1,5	

	Saw								
20	Izin Pemanfaatan Chain Saw	5	-	1,75	3,83	1,9	1,4	1	
21	Izin Usaha Perikanan (IUP)	10	-	9	2	1,4	1	7	
22	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	10	-	9	1,93	1,25	1	-	
23	Surat Izin Andon	10	-	7,75	1,93	1,27	1	-	
24	Surat Izin Pembelian / Pengumpul Hasil Laut	5	-	9	-	-	-	-	9: proses berjalan terus, sementara kelengkapan administrasi (foto pas) tidak lengkap.
25	Tanda Daftar Gudang (TDG)	10	-	-	-	-	-	-	

Sumber Data: Kantor KPPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2010

2) Indeks Kepuasan Masyarakat:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan aparatur di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai per bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 tergambar sebagai berikut:

Tabel 2.157.
Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan DAN NON-PERIZINAN
BULAN AGUSTUS – DESEMBER 2010

N O	INDIKATOR	PENILAIAN												TOTAL RESPO NDEN	Ke t			
		Sangat Puas		%	Puas		%	Kurang Puas		%	Tidak Puas		%			Abstei n		%
1	2	3		4	5		6	7		8	9		10	11		12	13	14
1	Kemudahan prosedur pelayanan	111	Or g	53.3 7	91	org	43.7 5	5	org	2.4	1	or g	0.48	0	org	0	208	
2	Kelengkapan informasi persyaratan pelayanan	100	Or g	48.0 8	10 0	org	48.0 8	6	org	2.88	1	or g	0.48	1	org	0.48	208	
3	Pelayanan dan penjelasan petugas loket	104	Or g	50 99	org	47.6	5	org	2.4	0	or g	0	0	org	0	208		
4	Kedisiplinan petugas dalam pelayanan	96	Or g	46.1 5	10 3	org	49.5 2	9	org	4.33	0	or g	0	0	org	0	208	
5	Pertanggungjawaban petugas dlm memberikan pelayanan.	90	Or g	43.2 7 0	11 4	org	54.8 1 0	4	org	1.92 0	0	or g	0 0	0	org	0 0	208	
6	Kemampuan petugas dalam pelayanan	90	Or g	43.2 7	11 7	org	56.2 5	0	org	0	0	or g	0	1	org	0.48	208	
7	Kecepatan waktu pelayanan	30	Or	14.4	15	org	76.4	16	org	7.69	2	or	0.96	1	org	0.48	208	

			g	2	9		4					g					
8	Kedisiplinan dalam antrian untuk mendapatkan Pelayanan	98	Or g	47.1 2	10 8	org	51.9 2	1	org	0.48	0	or g	0	1	org	0.48	208
				0			0			0			0			0	
9	Kesopanan dan keramahan petugas	112	Or g	53.8 5	93	org	44.7 1	1	org	0.48	0	or g	0	2	org	0.96	208
10	Kewajaran biaya retribusi yang ditetapkan	104	Or g	42.7 50	10 89	org	49.0 9	4	org	1.92	3	or g	1.44	8	org	3.85	208
11	Kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan	89	Or g	42.7 9	10 2	org	49.0 4	9	org	4.33	0	or g	0	8	org	3.85	208
				0			0			0			0			0	
12	Ketepatan waktu pelayanan perizinan terhadap jadwal yang ditetapkan	93	Or g	44.7 1	92	org	44.2 3	17	org	8.17	1	or g	0.48	5	org	2.4	208
				0			0			0			0			0	
13	Kenyamanan dilingkungan KPPTSP	108	Or g	51.9 2	93	org	44.7 1	4	org	1.92	1	or g	0.48	2	org	0.96	208
14	Keamanan pelayanan di KPPTSP	103	Or g	49.5 2	97	org	46.6 3	2	org	0.96	2	or g	0.96	4	org	1.92	208
TOTAL		1328		638.	14		700.	83		39.9	11		5.29	3		15.9	2912

			5	57		5						3				
RATA-RATA PERSENTASE			45.6			50.0			2.85			0.38			1.13	
						3										

Sumber Data: Kantor KPPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2010

D. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Dari 1.071 perizinan yang telah diterbitkan, jumlah yang dipungut biaya sebanyak: 850 buah atau 79,37%. Retribusi atas 850 buah izinan ini sebesar: **Rp. 98,638,313,-**. Perincian retribusi per bulan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.158.
Rekapitulasi Skrd Bulan Juli - Desember 2010

NO	INDIKATOR	BULAN						
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
		RUPIAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IPL	-	180,000	60,000	120,000	85,000	-	445,000
2	IMB	-	16,300,679	764,440	2,163,934	1,166,860	-	20,395,913
3	SITU	925,000	3,775,000	2,700,000	2,200,000	2,325,000	2,865,000	14,790,000
4	SIUP	2,100,000	3,125,000	3,450,000	6,050,000	3,450,000	4,225,000	22,400,000

RPJMD Kabupaten Manggarai 2011-2015

5	TDP	490,000	940,000	835,000	550,000	630,000	1,775,000	5,220,000
6	IUI	-	-	-	-	-	-	-
7	TDI	60,000	-	120,000	100,000	-	-	280,000
8	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	-	-	-	-	-	-	-
9	IUJK	1,000,000	7,200,000	600,000	1,550,000	750,000	500,000	11,600,000
10	IUA	190,000	1,147,400	694,200	1,086,200	316,000	679,400	4,113,200
11	IT	110,000	3,397,500	1,394,300	3,364,900	1,050,800	1,551,700	10,869,200
12	SURAT IZIN KEPEMILIKAN CHAIN SAW	-	575,000	700,000	1,250,000	675,000	400,000	3,600,000
13	SURAT IZN PEMANFAATAN CHAN SAW	-	800,000	1,000,000	1,800,000	1,025,000	300,000	4,925,000
14	TANDA DAFTAR GUDANG	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	4,875,000	37,440,579	12,317,940	20,235,034	11,473,660	12,296,100	98,638,313

Sumber Data: Kantor KPPTSP Kabupaten Manggarai Tahun 2010

2.3.1.24. Kepegawaian

A. Data Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai

1. Data Prajabatan Tahun 2005-2009

Tabel 2.159.
Data Prajabatan tahun 2005-2009

Tahun	JUMLAH CPNSD	Golongan I dan II	Golongan III
2005	171	171	104
2006	179	95	84
2007	395	317	78
2008	527	483	44
2009	278	227	51

Sumber Data: BKD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Dari data terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah CPNSD yang mengikuti prajabatan didominasi oleh CPNSD golongan II. Hal ini menunjukkan formasi pegawai daerah di Kabupaten Manggarai masih didominasi oleh peserta non sarjana.

2. Data PNS yang mengikuti Diklat Struktural sampai Tahun 2010

Tabel 2.160.
Data PNS yang mengikuti Diklat Struktural sampai Tahun 2010

No	ESELON	SUDAH DIKLAT	BELUM DIKLAT	JUMLAH
1	Eselon II-B	17	9	26
2	Eselon III-A	30	8	38
3	Eselon III-B	62	28	90
4	Eselon IV	265	39	304
Jumlah		374	84	458

Sumber Data: BKD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari jumlah 458 pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2010, terdapat 374 pejabat (81,66 %) yang sudah mengikuti Diklat Jabatan sedangkan 84 pejabat (18,44 %) belum mengikuti Diklat Jabatan.

Tabel 2.161.
Data Mahasiswa Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Co-Ass Kedokteran Tahun 2005-2010

No	TAHUN	JUMLAH MAHASISWA					
		S2	S1	SPESIALIS	D-IV	D-III	Co-Ass Kedokteran
1	2005	2	13	2	1	5	-
2	2006	3	1	2	9	2	-
3	2007	6	8	3	2	5	7
4	2008	1	11	2	3	5	4
5	2009	3	7	2	-	8	10
6	2010	4	2	2	-	6	11
JUMLAH		17	29	11	14	26	32

Sumber Data: BKD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang dibiayai pemerintah Kabupaten Manggarai fluktuatif dari tahun ke tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2.162.
Data Jabatan Struktural Tahun 2010

Eselon	Terisi	Belum Terisi	Jumlah
Eselon II/A	1	-	1
Eselon II/B	25	4	29
Eselon III/A	38	5	43
Eselon III/B	90	16	106
Eselon IV/A	304	51	355
Eselon IV/B			
Jumlah	458	76	534

Sumber Data: BKD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Dari tabel 2.158 terlihat bahwa jumlah jabatan struktural di Kabupaten Manggarai pada tahun 2010 berjumlah 534 jabatan dari Eselon IV/B sampai dengan Eselon II/A. Dari tabel terlihat 458 jabatan telah terisi (85,77%) sedangkan 76 jabatan lainnya belum terisi (14,23 %). Jabatan yang belum terisi terjadi karena adanya mutasi pejabat ke luar daerah dan ada yang sudah memasuki masa purna bakti.

Tabel 2.163.
Data Kualifikasi PNS Kabupaten Manggarai

No	Jenjang Pendidikan	Tahun/Jenis Kelamin									
		2006		2007		2008		2009		2010	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	S3	1	-	1	-	1	-				
2	S2	63	11	56	8	56	8	32		26	28
3	S1/D4	837	195	785	164	785	164	1078		932	348
4	D3	503	187	411	218	411	218	625		367	346
5	D2	608	273	344	221	344	221	627		393	321
6	D1	69	73	35	77	35	77	177		71	114
7	SLTA	1.932	1.027	1.269	922	1.269	922	2342		1298	837
8	SLTP	136	17	139	27	139	27	175		1138	22
9	SD							108		91	8
	Jumlah	4.307	1.788	3.169	1.645	3.169	1.645	5164		4316	2024

Sumber Data: BKD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.159 menggambarkan komposisi PNS di Kabupaten Manggarai berdasarkan jenjang pendidikan dan gender. Dari aspek jenjang pendidikan tergambar keberadaan sumber daya manusia (SDM) PNS di Kabupaten Manggarai. Hal ini terlihat dari jumlah PNS tamatan perguruan tinggi dibandingkan dengan jumlah PNS yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Kondisi tahun 2008 terdapat 2.320 PNS (48,19 %) tamatan Perguruan tinggi dan 2494 PNS (51,89 %) tamatan SLTA ke bawah. Dari aspek gender terlihat bahwa laki-laki mendominasi komposisi PNS dengan jumlah 3169 (65,83 %) sedangkan sisanya adalah PNS perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam komposisi birokrasi di kabupaten Manggarai masih perlu ditingkatkan.

2.3.1.25. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk mendukung terciptanya keberdayaan masyarakat, pemerintah Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2006-2010 telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, pemberian bantuan P2LDT dan lain-lain kegiatan yang bertujuan agar terbinanya pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, terwujudnya pemugaran perumahan bagi KK miskin, janda dan yatim piatu. Realisasi –realisasi kegiatan tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.164.
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2006-2010

No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (LPMD/K)	-	-	27	29	-
2.	Operasional bantuan P2LDT (unit)	-	-	-	35	67
3.	Gelar TTG nasional (Kali)	1	1	1	1	1
4.	Pelatihan dan pembentukan relawan penggerak desa siaga dan paroki siaga (desa/orang)	-	-	2/120	-	3/-
5.	Operasional sekretariat pokjandal posyandu tingkat kabupaten (unit)	-	-	-	-	9
6.	Pembinaan administrasi proyek (PAP PNPM Generasi Sehat, Cerdas dan PNPM MP) (kecamatan)	5	6	3	6	8

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing perdesaan, maka telah dilakukan upaya pelatihan dan pemanfaatan potensi desa di Kabupaten Manggarai melalui kegiatan-kegiatan seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.165.
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Tahun 2006-2010

No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Pelatihan teknologi tepat guna (orang)	-	-	30	30	-
2.	Pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (unit)	-	2	-	2	-

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Dukungan masyarakat adalah faktor kunci keberhasilan pembangunan dan menjadi ciri dari pemerintahan yang baik. Partisipasi diwujudkan oleh masyarakat dengan berperan aktif dalam setiap proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi selalu menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab merawat dan memelihara. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan seperti pencaanangan bulan bakti gotong-royong, lomba desa/kelurahan. Untuk kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.166.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Tahun 2006-2010

No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Pembinaan kelompok masyarakat membangun desa (desa/kel)	1	1	1	1	1
2.	Operasional bantuan P2ADT (orang)	-	132	250	275	160
3.	Lomba desa/kel dan 10 program pokok PKK-P2WKSS (desa/kel)	6	6	9	9	13
4.	Pengembangan profil desa (desa/kel)	-	149	-	149	149
5.	Identifikasi kelayakan pemekaran desa / kel (desa/kel)	9	-	-	-	12

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, maka merupakan suatu keharusan aparatur di tingkat desa/kelurahan memiliki kemampuan manajemen dalam tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.167.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Tahun 2006-2010

No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa dan manajemen pemerintahan desa (orang)	32	65	58	241	-
2.	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa (desa/kel)	-	78	36	9	5
3.	Pembinaan administrasi pemerintahan desa dan penilaian pelaksanaan tugas kepala desa (desa/kel)	-	-	6	9	9

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

2.3.2. Urusan Pilihan

2.3.2.1. Ketahanan Pangan

Kondisi umum pertanian di Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk pertanian terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraannya.

Tujuan utama pembangunan pertanian ialah untuk menciptakan ketahanan atau kecukupan pangan bagi masyarakat, baik dari aspek ketersediaan pangan maupun pemenuhan gizinya.

a. Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketersediaan pangan pokok produksi dalam daerah sampai dengan kurun waktu 2009, jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan konsumsi penduduk, jenis pangan yang mengalami surplus adalah beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelei dan kacang hijau.

Tabel 2.168.
Posisi ketersediaan pangan pokok produksi dalam daerah dan kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Manggarai Tahun 2009

No.	Jenis Pangan Pokok	Ketersediaan (Ton EB)	Kebutuhan Konsumsi (Ton EB)	Perimbangan (Ton +/-)
1	Beras	54.495,425	43.178,456	11.316,969
2	Jagung	22.604,958	11.640,445	10.964,513
3	Ubi Kayu	3.628,450	3.060,928	567,522
4	Ubi Jalar	648,663	521,863	126,800
5	Kacang Kedelei	309,393	14,496	294,897
6	Kacang Hijau	847,675	291,318	556,357
7	Kacang Tanah	236,248	315,850	-79,602

Sumber Data : BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa posisi ketersediaan beras sebagai komoditi pangan strategis mengalami surplus dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi 3,5 bulan (posisi aman sampai dengan pertengahan bulan april 2010). Komoditi jagung dan ubi kayu, tingkat ketersediaan tergolong minus dipengaruhi faktor perilaku konsumsi yang lebih berorientasi pada beras.

Walaupun tingkat ketersediaan pangan pokok relatif surplus namun secara mikro masih ada desa/rumah tangga yang terindikasi resiko rawan pangan.

Tabel 2.169.
Hasil Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Indikator SKPG
Keadaan s/d 30 September 2010

Tahun 2009

NO	KECAMATAN	JUMLAH NILAI TERTINGGI				KET
		AMAN	TINGGI	SEDANG	RINGAN	
1	Ruteng	-	-	1	15	16 desa
2	Rahong Utara	-	2	-	10	12 desa
3	Cibal	-	-	-	27	27 desa
4	Reok	-	1	1	18	20 desa
5	Lelak	-	-	-	8	8 desa
6	Wae Rii	-	-	-	16	16 desa
7	Langke Rembong	-	-	1	10	11 desa
8	Satarmese	-	-	3	16	19 desa
9	Satarmese Barat	3	-	1	16	20 desa
JUMLAH		3	3	7	136	149 desa

Tahun 2010

NO	KECAMATAN	JUMLAH NILAI TERTINGGI				KET
		AMAN	TINGGI	SEDANG	RINGAN	
1	Ruteng	-	-	2	14	16 desa
2	Rahong Utara	-	2	-	10	12 desa
3	Cibal	-	-	-	27	27 desa
4	Reok	-	11	1	8	20 desa
5	Lelak	-	-	-	8	8 desa
6	Wae Rii	-	-	-	16	16 desa
7	Langke Rembong	2	-	1	8	11 desa
8	Satarmese	-	12	1	6	19 desa
9	Satarmese Barat	1	8	3	8	20 desa
JUMLAH		3	33	8	105	149 desa

Sumber Data: BKPPP Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Manggarai Tahun 2009 menunjukkan bahwa ketersediaan energi rata-rata kalori/kapita/hari sebagai berikut :

1. Padi-padian	: 1.368,3 Kkal
2. Umbi-umbian	: 170,8 Kkal
3. Pangan Hewani	: 217,4 Kkal
4. Minyak dan lemak	: 89,6 Kkal
5. Buah/Biji Berminyak	: 33,9 Kkal
6. Kacang-kacangan	: 96,4 Kkal
7. Gula	: 33,7 Kkal
8. Sayur dan Buah	: 173,6 Kkal
9. Bumbu-bumbuan dan Minuman	: 16,5 Kkal
Total	: 2.200,4 Kkal

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan kalori sudah mencukupi standar rata-rata ketersediaan kalori/kapita/hari (standar rata-rata 2200 Kkal/kapita/hari)

b. Aspek Distribusi dan Harga Pangan

Pendistribusian bahan pangan dari sumber produksi kepada pedagang dan konsumen di Kabupaten Manggarai pada umumnya tidak bermasalah dan berjalan secara alami dan menjangkau seluruh desa. Keadaan harga pangan mengikuti hukum pasar.

Aspek harga menunjukkan bahwa fluktuasi tertinggi adalah beras sebesar 12,5%, indeks terendah 10% (normal), artinya dari aspek harga masih relatif lebih aman.

c. Aspek Konsumsi dan Kewaspadaan

Perubahan iklim global yang tidak menentu berdampak pada perubahan pola tanam yang pada gilirannya dapat diprediksi terjadinya gagal panen. Hal ini tentu berakibat juga pada aspek konsumsi pangan di tingkat masyarakat. Langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah melalui persiapan/cadangan pangan. Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang tersedia pada mitra pemerintah sampai dengan tahun 2009 sebanyak 78,110 Ton, di tingkat petani sebanyak 15.791,141 Ton, di tingkat penggilingan sebanyak 1.995,608 Ton, di tingkat pedagang sebanyak 19.079,03 Ton sedangkan cadangan pangan di tingkat konsumen sebanyak 369,220 Ton. Sementara cadangan pangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat masing-masing sebanyak 5,425 Ton dan 4,525 Ton.

2.3.2.2. Kelembagaan Pendukung Penyuluhan Pertanian (PPL)

Untuk menunjang program Revitalisasi Pertanian, pemerintah telah memberdayakan kembali Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Terjadi penambahan jumlah BPP dari 6 buah pada tahun 2005 dengan kondisi semuanya rusak menjadi 9 Buah BPP pada tahun 2010.

Jumlah PPL di Kabupaten Manggarai pada tahun 2005 sebanyak 87 orang dan sampai dengan tahun 2010 sebanyak 134 orang dan disebar di setiap Desa dan BPP. Penambahan tersebut terutama akibat dari program Kementerian Pertanian yang melakukan rekrutmen Tenaga Honorer.

Tabel 2.170.
Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

KECAMATAN	TAHUN																	
	2005			2006			2007			2008			2009			2010		
	PNS	HON	JUM	PNS	HON	JUM	PNS	HON	JUM	PNS	HON	JUM	PNS	HON	JUM	PNS	HON	JUM
L.Rembong	9	5	14	7	8	15	7	8	15	7	4	11	6	2	8	6	2	8
Wae Rii	11	6	17	10	6	16	10	8	18	10	11	21	7	12	19	7	11	18
Cibal	5	7	12	8	9	17	8	11	19	8	11	19	9	15	24	8	13	121
Reok	5	3	8	6	7	13	6	7	13	6	7	13	7	8	15	6	7	13
Satarmese	11	6	17	13	13	26	13	17	30	13	10	23	7	8	15	6	7	13
Ruteng	11	8	19	17	14	31	17	18	35	15	14	29	9	9	18	9	8	17
Lelak													4	4	8	4	4	8
Rahong Utara													7	7	14	7	7	14
Satarmese Barat													8	4	12	6	4	10
BKP3													9	2	11	10	2	12
Jumlah	52	35	87	61	57	118	61	69	130	59	57	116	73	71	144	69	65	134

Sumber Data: BKP3 Kabupaten Manggarai Tahun 2010

2.3.2.3. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kondisi sampai dengan tahun 2010 rata-rata produktivitas komoditi padi meningkat sebesar 4,72 %, masih lebih rendah dari target yang direncanakan yaitu 6,21%. Produksi padi pada tahun 2005 sebanyak 42.874 ton, meningkat menjadi 62.267 ton pada tahun 2010 atau rata-rata 49.485 ton/tahun. Untuk komoditi jagung produksi pada tahun 2005 sebesar 11.204 ton meningkat menjadi 21.472 ton tahun 2010 atau meningkat sebesar 30,54% dengan produktivitas 11,03%. Produktivitas tanaman pangan lainnya yang melampaui target adalah kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Sementara untuk komodiiti kacang kedelai kondisi tahun 2010 produktivitasnya sebesar 0,95% masih lebih rendah dari target sebesar 0,992%. Capaian kinerja produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan tergambar pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.171.
Produksi Tanaman Pangan Tahun 2005 – 2010

Satuan Ton EB

N0.	Komoditi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata2/ Tahun
1	Padi	42,874	41,685	39,309	54,731	56,046	62,267	49,485
2	Jagung	11,204	14,187	9,594	26,068	18,620	21,472	16,858
3	Kedele	562	247	183	509	308	346	359
4	Kac. Tanah	739	1,185	329	217	237	272	497
5	Kac. Hijau	1,558	1,342	979	941	850	956	1,104
6	Ubi Kayu	4,998	7,771	3,684	2,907	3,628	4,354	4,557
7	Ubi Jalar	918	1,228	1,038	880	631	731	904

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.172.
Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2005 – 2010

Satuan Ton/Ha

N0.	Komoditi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata2/ Tahun
1	Padi	4.37	4.80	4.60	5.04	5.11	5.21	4.86
2	Jagung	2.50	2.40	3.17	4.56	3.71	3.78	3.35
3	Kedele	0.85	1.00	1.00	0.74	1.00	1.02	0.94
4	Kac. Tanah	1.41	1.04	1.01	1.10	1.06	1.08	1.12
5	Kac. Hijau	1.39	1.57	1.04	1.07	1.10	1.12	1.22
6	Ubi Kayu	8.08	8.10	8.84	8.05	8.05	8.21	8.22
7	Ubi Jalar	3.87	5.47	6.22	4.02	3.92	4.00	4.58

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Manggarai Tahun 2010

Peluang untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan di Kabupaten Manggarai masih sangat dimungkinkan dengan tersedianya lahan dan infrastruktur pertanian. Sampai dengan tahun 2010 lahan basah fungsional baru mencapai 9.850 ha. Lahan basah potensial yang belum dimanfaatkan seluas 22.251 Ha, lahan kering potensial 157.092 Ha. Penggunaan lahan kering lebih diutamakan untuk budidaya sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, padi gogo dan palawija.

Produksi tanaman sayur-sayuran sejak tahun 2006-2010 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Produksi bawang merah pada tahun 2006 sebanyak 5.400 ton menurun menjadi 2.510 Ton pada tahun 2008 dan kembali meningkat sebanyak 4.389 pada tahun 2009. Pada tahun 2010 produksi bawang merah merosot tajam menjadi 937 ton. Kondisi ini merupakan

dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim, minat petani untuk budi daya komoditi sayur – sayuran menurun dan adanya alih fungsi lahan. Produksi sayur-sayuran secara rinci tergambar pada table-tabel berikut :

Tabel 2.173.
Produksi Sayur-Sayuran Tahun 2006 – 2010

Satuan Ton

No	Komoditi	2006	2007	2008	2009	2010*)	Rata-rata
1	Bawang Merah	5.400	5.212	2.510	4.389	937	3.689
2	Bawang Putih	160	162	122	124	83	130
3	Bawang Daun	1.500	1.010	1.632	1.442	1.353	1.387
4	Kentang	1.650	2.121	453	-	312	907
5	Kubis/Kool	3.900	2.424	2.448	3.091	1.249	2.622
6	Kembang Kool	750	606	663	618	572	642
7	Petsai/Sawi	7.500	5.454	6.885	5.409	5.151	6.080
8	Wortel	5.000	3.232	3.468	3.915	6.036	4.330
9	Lobak	300	303	306	309	-	244
10	Kacang Merah	600	1.000	826	865	593	777
11	Kacang Panjang	750	909	367	216	406	530
12	Cabe Besar	600	758	826	433	312	586
13	Cabe Rawit	510	667	887	371	281	543
14	Tomat	1.400	7.077	1.122	1.545	1.145	2.458
15	Terung	1.500	909	1.632	1.752	1.353	1.429
16	Buncis	3.300	3.030	3.672	3.864	3.746	3.522
17	Ketimun	1.400	1.010	4.080	3.915	1.873	2.456
18	Labu Siam	300	1.010	816	824	624	715
19	Kangkung	300	202	510	309	728	410
20	Bayam	200	172	214	103	52	148

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Manggarai Tahun 2010

Penganekaragaman pola usaha tani (diversifikasi) sebagai salah satu sasaran program revitalisasi pertanian di Kabupaten Manggarai berdampak positif bagi perkembangan sistem budi daya. Integrasi tanaman palawija dengan tanaman buah-buahan yang dikembangkan merupakan harapan baru bagi petani dalam rangka terwujudnya peningkatan pendapatan. Indikasi dari sistem tersebut adalah meningkatnya produksi komoditi buah- buahan dan tanaman

biofarmaka. Produksi komoditi buah-buahan dan tanaman biofarmaka terlihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.174.
Produksi Buah-buahan Tahun 2006 – 2010

Satuan Ton

No	Komoditi	2006	2007	2008	2009	2010	RATA2/ TAHUN
1	Advokat	2	1,3	524,3	1.172,6	1.184,3	1.236,2
2	Belimbing	27,9	0	6,2	9,2	9,3	10,52
3	Durian	0	7,7	4,4	1,2	1,2	2,9
4	Jambu Biji	0	0	167,5	175,4	177,2	104,02
5	Jeruk Keprok	0	4,8	63	852,9	861,4	356,42
6	Mangga	26,3	6	136,8	246,3	248,8	131,24
7	Nangka	2,2	0	194,8	807,9	816	364,18
8	Nenas	21,2	3	37,2	72,1	72,8	41,26
9	Pepaya	9	44,1	257,3	838,3	846,6	399,06
10	Pisang	40	64	347,7	890,6	907,5	449,96
11	Rambutan	0	0,2	0,7	12,9	13	5,36
12	Salak	0	0,1	20	20,1	20,3	12,1
13	Sawo	0	0	0	0,9	0,9	0,36
14	Sukun	0	0	45	90	90,9	45,18

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.175.
Produksi Tanaman Biofarmaka Tahun 2006 – 2010

Satuan Ton

No	Komoditi	2006	2007	2008	2009	2010	RATA2/ TAHUN
1	Jahe	39	216	99	70	70	98,80
2	Laos/Lengkuas	35	35	107	288	291	151,20
3	Kencur	6	0	0	6	6	3,6
4	Kunyit	58	59	0	330	333	156
5	Lempuyang	17	0	0	18	18	10,6
6	Temu Lawak	10	10	0	10	10	8
7	Temu Ireng	15	0	0	15	15	9

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Manggarai Tahun 2010

Upaya strategis yang dilakukan pemerintah melalui revitalisasi pertanian guna meningkatnya jumlah dan mutu produk pertanian adalah pemberian bantuan sarana produksi berupa bibit/benih unggul, pupuk dan alat mesin pertanian serta pelatihan teknis bagi petani. Realisasi penyaluran pupuk periode tahun 2006 – 2010 tergambar pada table-label berikut :

Tabel 2.176.
Realisasi penyaluran Pupuk tahun 2006 – 2010

No.	TAHUN	UREA		SP-36		KCL		NPK PONSKA	
		PENGADAAN	PENYALURAN	PENGADAAN	PENYALURAN	PENGADAAN	PENYALURAN	PENGADAAN	PENYALURAN
1.									
2	2006	-	2,660	-	65	-	-	-	18
3	2007	1,571.00	1,219.50	1,145.00	1,145.00	566.60	80.40	150.44	65.56
4	2008	190,100	190,100	-	-	-	-	539,400	539,400
5	2009	60,000	60,000	-	-	-	-	324,500	324,500
6	2010	36,000	36,000	-	-	-	-	72,000	72,000
	Jumlah	287,671	289,980	1,145	1,210	567	80	936,050	935,984

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.177.
Kebutuhan Benih Padi Sawah, Padi Gogo, Jagung, Kedelai dan Kacang Hijau Tahun 2008 - 2010 di Kabupaten Manggarai

No	KOMODITI	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010
1	PADI SAWAH	128,750	250,000	160,750
2	PADI GOGO	-	-	25,000
3	JAGUNG	-	12,150	18,750
4	KEDELAJ	-	2,000	10,000
5	KACANG HIJAU	-	1,000	-

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.178.
Perkembangan Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Manggarai Tahun 2005 – 2010

No.	JENIS ALSINTAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Hand Traktor	122	128	131	214	160	171
2	Hand Sprayer	956	917	860	937	504	504
3	Pompa Air	348	365	736	726	413	417
4	Power Thresher / Perontok Padi	151	157	157	201	12	121
5	Alat Pengolahan Pupuk Organik	-	-	1	1	3	1
6	RMU	179	431	467	532	110	110

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Manggarai Tahun 2010

2.3.2.4. Perkebunan

Peranan sub sektor perkebunan di Kabupaten Manggarai sebagai sumber pendapatan masyarakat kedepan akan terus ditingkatkan baik melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi maupun diversifikasi perkebunan.

A. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan

Perkembangan luas areal dan produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Manggarai baik melalui pengembangan proyek maupun yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.179.
Perkembangan Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan

Jenis Komoditi	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
Kopi	6.631,46	1.923,80	6.808,75	1.544,23	6.667,73	1.630,38	6.803,62	1.595,56	7.029,28	1.629,32	7.107,04	1.536,58
Kelapa	3.580,47	538,95	3.582,58	538,95	3.578,34	541,50	3.577,19	544,15	3.577,19	580,25	3.572,69	583,40
Cengkeh	1.092,68	61,70	1.109,56	58,45	1.239,55	217,14	1.255,52	187,19	1.423,38	239,80	1.794,98	200,55
Jambu	5.832,57	654,30	5.834,96	654,67	5.888,32	684,53	5.914,75	687,59	5.781,34	750,99	6.372,09	585,69
Mete	347,54	37,14	344,37	33,31	160,17	10,98	152,43	9,01	152,43	9,01	51,22	2,80
Panili	570,24	43,45	669,36	44,51	844,06	92,65	867,55	96,45	980,86	133,55	1.160,86	120,40
Kakao	749,54	58,47	770,40	54,78	766,59	59,95	769,73	62,05	770,73	68,20	735,09	46,60
Kapuk	6.032,04	696,50	6.158,47	688,30	6.150,19	696,92	6.163,24	891,70	6.218,33	938,2	6.129,58	953,80
Kemiri	711,85	39,78	722,07	40,18	721,80	43,96	725,11	45,61	725,65	45,73	657,24	40,10
Pinang												
Jumlah	25.548,39	4.054,09	26.000,52	3.657,75	26.016,75	3.978,01	26.229,14	4.119,31	26.659,19	4.395,05	27.580,79	4.069,92

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Berdasarkan data Luas Areal dan Produksi 9 Komoditi Unggulan Perkebunan tahun 2005-2009 dapat dilihat bahwa ada komoditi yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Perkembangan luas areal tanaman Perkebunan jika dibandingkan dengan tahun 2005 pada akhir tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 1.110,80 Ha dengan kenaikan rata-rata pertahun sebesar 1 %. Jika dibandingkan prosentasi peningkatan luas areal pertahun maka komoditi Kopi mengalami peningkatan sebesar 1,5%, Kelapa 1,9%, Cengkeh 6,98%, Kakao 14,83%, Kapuk 0,71%, Kemiri 0,5% dan Pinang 0,48%. Sedangkan komoditi perkebunan yang mengalami penurunan luas areal rata-rata pertahun adalah Kelapa 0,02%, Jambu Mete 0,21% dan Panili 14,8%.

Tabel 2.180.
Perkembangan Produktivitas Rata-rata Komoditi Perkebunan

No.	Produktivitas	Tahun						Ket.
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1.	Kopi	467,08	357,81	386,06	372,31	358,87	346,09	Kg/Ha
2.	Kelapa	292,72	264,07	269,16	268,12	312,45	310,55	Kg/Ha
3.	Cengkeh	136,05	113,55	366,98	339,93	396,06	327,56	Kg/Ha
4.	Jambu Mete	257,14	202,49	283,64	219,48	285,36	228,19	Kg/Ha
5.	Panili	197,47	198,05	260,00	184,52	114,41	98,25	Kg/Ha
6.	Kakao	148,57	170,14	296,16	300,39	304,73	272,24	Kg/Ha
7.	Kapuk	153,65	151,35	184,74	261,07	177,16	131,66	Kg/Ha
8.	Kemiri	281,28	255,43	261,39	383,63	361,94	355,09	Kg/Ha
9.	Pinang	102,90	98,38	147,63	146,94	115,21	105,90	Kg/Ha

Sumber Data : Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Tahun 2010

Produktivitas rata-rata pertahun komoditi perkebunan Kabupaten Manggarai masih berada di bawah standar. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik budidaya yang tepat melalui intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi.

Tabel 2.181.
Pengembangan Pola Budidaya Pertanian / Perkebunan

No.	Kegiatan	Tahun					Jumlah	Ket.
		2006	2007	2008	2009	2010		
1.	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan							
	a. Ekstensifikasi							
	* Kakao	275	156	227	175	145	978	Ha
	* Cengkeh	38	289	563	410	38	1.338	Ha
	* Jambu Mete	-	185	96	645	168	1.094	Ha
	* Kopi	87	443	175	125	133	963	Ha
	* Jarak Pagar	-	7	2	-	-	9	Ha
	b. Intensifikasi							
	* Kopi	160	-	-	-	-	160	Ha
	* Jambu Mete	-	-	-	-	5	5	Ha
	c. Rehabilitasi							
	* Kopi	180	-	-	-	-	180	Ha
	d. Diversifikasi							
	* Kopi dengan Jahe	-	25	-	-	-	25	Ha
2.	Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan							
	• Pembangunan jalan produksi	-	-	1	5	7	13	Km
	• Pembangunan jalan usaha tani	-	-	-	-	12	12	Km
	• Embung	-	-	-	3	1	4	Unit

Sumber Data : Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Tahun 2010

Langkah antisipatif terhadap pengendalian hama yakni melalui kegiatan penyuluhan pengendalian OPT, pengendalian OPT dan SL-PHT sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.182.
Pengendalian Hama Terpadu

No.	Kegiatan	Tahun					Jumlah	Ket.
		2006	2007	2008	2009	2010		
1.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan							
	* Penyuluhan pengendalian OPT	-	300	50	-	-	350	Orang
	* Pengendalian OPT	-	-	200	-	-	200	Ha
	* SL-PHT	-	-	25	-	-	25	Orang

Sumber Data : Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Tahun 2010

Dinas kehutanan dan perkebunan melaksanakan bimbingan dan pengawasan kegiatan pengolahan dan pemasaran komoditi perkebunan guna perbaikan mutu olahan hasil komoditi.

Sampai saat ini mutu komoditi perkebunan di Kabupaten Manggarai masih rendah sehingga belum memiliki daya saing yang kuat di pasaran.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu komoditi perkebunan adalah melalui pengadaan peralatan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.183.
Penerapan Teknologi Perkebunan

No.	Kegiatan	Tahun					Jumlah	Ket.
		2006	2007	2008	2009	2010		
1.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna:							
	• Pompa Air	4	-	-	-	-	4	Unit
	• UPH Kopi	2	2	1	1	-	6	Unit
2.	Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana tepat guna :							
	• Mesin UPH Kopi	-	1	2	-	-	3	Unit
	• Mesin UPH Jambu Mete	-	-	2	-	-	2	Unit
3.	Pelatihan dan bimbingan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna							
	• Pendidikan/pelatihan petani dan petugas	-	60	200	50	-	310	Orang
	• Magang petani dan petugas	-	14	7	-	-	21	Orang

Sumber Data : Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Tahun 2010

2.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan meliputi : pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya baik budidaya ikan air tawar maupun budidaya laut dan pesisir.

Produksi lingkup kelautan dan perikanan sebagai berikut : jumlah rumah tangga perikanan tangkap 3.094 RTP, potensi lestari perikanan tangkap 712,8.km2, areal potensi pengembangan budidaya rumput laut 580 ha, teripang dan mutiara 480 ha, tambak 332 ha dan potensi pengembangan budidaya air tawar seluas 2.650 ha yang mendorong masyarakat untuk melakukan budidaya kolam maupun mina padi. Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan usaha melalui diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi laut yang didukung oleh pemanfaatan IPTEK.

Hasil pembangunan kelautan dan perikanan selama ini antara lain : peningkatan produksi ikan, konsumsi hasil-hasil ikan, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan petani nelayan. Perkembangan produksi tersebut dapat dilihat

dari meningkatnya Produksi Tangkapan ikan segar yang terus meningkat. Begitu juga produksi perikanan lainnya. Hal ini tergambar pada Tabel.

Tabel 2.184.
Perkembangan Produksi Perikanan Laut
di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Jenis Produksi	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Ikan Segar	682,91	751,20	853,64	939	3.766,260	4.244,4
2	Teripang	0,45	0,200	0,50	0,75	-	-
3	Udang/Lobster	750	750	1000	1200	-	-
4	Produksi Tambak Rakyat	1,48	0,7	0,3	0,79	2,94	-
5	Luas Tambak Rakyat	6,72	27,45	33,50	40,20	3,30	-
6	Luas areal Rumput Laut	7,86	24,34	17,29	34,60	22,80	-
7	Produksi Rumput Laut	50	75	250	500	285,60	-

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Tahun 2008

Peralatan tangkap merupakan sarana yang digunakan untuk menjaring ikan yang sangat vital bagi nelayan. Kualitas dan kuantitas hasil tangkapan nelayan sangat ditentukan oleh jenis alat, kapasitas dan keterampilan nelayan untuk menggunakan peralatan tersebut. Capaian perkembangan peralatan tangkap sampai dengan tahun 2010 tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.185.
Perkembangan Alat Tangkap
Di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Jenis Produksi	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Gill Net	7	245	295	310	Blm ada	-
2	Purse Seine	2	23	21	29	Blm ada	-
3	Bagan Perahu	4	3	3	5	-	1
4	Sero	1	3	3	3	4	4
5	Pancing	300	324	310	332	157	149
6	Pukat Pantai	46	28	34	38	2	16

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Capaian perkembangan produksi ikan air tawar dalam kurun waktu tahun 2005-2010 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.186.
Perkembangan Produksi Ikan Air Tawar
Di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Jenis Produksi	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
A	Kolam						
1	Luas (Ha)	61,61	67,77	67,77	70,17	14,50	15,7
2	RTP	820	911	974	1072	726	826
3	Produksi (Ton)	35,68	39,64	46,54	51,19	21,78	23,2
4	Produksi Benih BBI	42,000	75,000	78,000	85,800	200.000	
B	Mina Padi						
1	Luas (Ha)	50,95	37,97	39,56	43,52	6,58	7,2
2	RTP	890	1080	1123	1238	329	342
3	Produksi (Ton)	33,10	16,86	20,16	22,18	13,16	9,33

Sumber Data: Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel diatas menggambarkan produksi ikan air tawar (kolam dan mina padi) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan baik budidaya kolam maupun mina padi. Sedangkan dalam kurun waktu tahun 2009-2010, produksi ikan air tawar baik budidaya kolam maupun mina padi terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2008. Hal ini terjadi karena terbatasnya modal usaha, rendahnya SDM petani ikan serta ketersediaan air yang semakin berkurang.

2.3.2.6. Peternakan

Potensi sumber daya peternakan meliputi : pengembangan bidang peternakan dapat mengembangkan ternak besar (sapi, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing dan babi), pengembangan peternakan unggas (ayam dan itik).

Areal potensi pengembangan sektor peternakan baik pengembangan usaha peternakan pola kawasan maupun pola integrasi didukung dengan luas padang penggembalaan 16.600 ha, sawah baik irigasi teknis maupun non teknis seluas 14.687 ha, pertanian lahan kering 12.532 ha. Pembangunan sub sektor peternakan dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani ternak, membuka kesempatan kerja di daerah pedesaan. Kebijakan pembangunan peternakan diarahkan pada peningkatan usaha melalui diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi yang didukung oleh pemanfaatan IPTEK dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi peternakan, seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.187.
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

No	Jenis Ternak	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Sapi	8.990	9.159	9.331	9.499	9.682	9.748
2	Kerbau	5.971	6.061	6.152	5.051	6.327	6.328
3	Kuda	397	402	407	412	417	4.17
4	Kambing	17.541	18.095	18.667	19.077	19.865	20.066
5	Domba	1	1	1	-	-	-
6	Babi	30.002	31.446	32.981	34.613	36.300	37.487
7	Ayam Buras	84.087	86.609	89.207	88.900	95.158	102.140
8	Itik	1.755	1.843	1.939	2.021	2.089	2.194

Sumber Data: Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2010

Pengeluaran dan Antar Pulau Ternak

Perkembangan antar pulau ternak tahun 2005-2010 berfluktuasi setiap tahunnya. Komoditi ternak yang diantarpulaukan melalui pelabuhan regional Kedindi-Reo bukan hanya berasal dari Kabupaten Manggarai saja, tetapi juga mencakup komoditi peternakan dari Kabupaten di luar Manggarai. Perkembangan antar pulau ternak tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.188.
Perkembangan Antarpulau Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

NO	Jenis Ternak	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Sapi	1.173	1.328	1.948	636	984	934
2	Kerbau	2.621	2.552	2.161	558	1.606	1.530
3	Kambing	229	195	321	199	4.481	4.318
4	Babi	14	-	46	5	20	104
5	Kuda		231	380	270	203	100

Sumber Data: Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2010

Tabel 2.189.
Data Penyebaran Ternak Bantuan Pemerintah

No	Jenis Ternak	Tahun (Ekor)						Total
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Sapi	75	130	181	440	110	66	1.002
2	Kerbau		40					40
3	Kambing		347	250		750	200	1.547
4	Babi		350			40	200	590

Sumber Data: Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2010

Tabel 2.190.
Data Pemotongan Ternak (Rph Ruteng)

No	Jenis ternak	Tahun (Ekor)						Total
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Sapi	760	922	815	772	871	806	4.955
2	Kerbau	178	119	51	50	76	147	621
3	Kambing	195	133	145	100	150	215	938
4	Babi	4.123	4.421	3.902	3.398	2.837	2.628	21.309

Sumber Data: Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2010

Tabel 2.191.
Data Sarana Dan Prasarana Produksi Peternakan (2005 S/D 2010)

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Jalan Usaha Tani (JUT)	Km.	2
2.	Embung	Unit	7
3.	Sumur	Unit	7
4.	Jalan Produksi	Km.	9
5.	Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT)	Ha.	270

Sumber Data: Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2010

Tabel 2.192.
Data Anggota Kelompok Penerima Ternak Bantuan Pemerintah

No	KECAMATAN	Tahun (KK)						Total
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Cibal	-	223	40	100	30	92	485
2	Satarmese	-	36	145	20	20	-	221
3	Ruteng	-	-	40	-	50	36	126
4	Wae Rii	-	-	40	40	30	36	146
5	Reok	69	23	20	100	30	74	316
6	Lelak	-	-	-	20	30	-	50
7	Rahong Utara	-	-	-	20	70	18	108
8	Satar MeseBarat	-	85	-	100	70	46	301
9	Langke Rembong	-	-	-	-	66	108	174

Sumber Data: Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2010

2.3.2.7. Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Potensi Pertambangan dan Energi

Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Penerimaan Asli Daerah belum optimal. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Rata-rata penerimaan sektor pertambangan dalam kurun waktu 2005-2010 adalah sebesar Rp. 2.197.054.851 per tahun.

Tabel 2.193.
Penerimaan Sektor Pertambangan tahun 2005-2010

Jenis Penerimaan	Tahun						TOTAL (Rp)
	2005 (Rp)	2006 (Rp)	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	
Pajak Pengambilan Bahan Galian Batuan dan Mineral bukan logam	1.071.872.783	2.096.807.584	2.532.053.478	2.765.742.623	2.192.608.942	2.265.425.231	12.924.510.641
Mineral Logam (Mangan)	27.169.376	34.400.000	-	-	196.241.089	-	257.818.465
Jumlah	1.099.042.159	2.131.207.584	2.532.053.478	2.765.742.623	2.388.850.030	2.265.425.231	13.182.329.106

Sumber : - Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Tahun 2010

- Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

B. Potensi Pertambangan Mineral dan Batuan

Potensi pertambangan di Kabupaten Manggarai sesuai hasil Inventarisasi Dinas Pertambangan dan Energi bersama Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral Tahun 2003 adalah :

Tabel 2.194.
Potensi pertambangan, Mineral dan Batuan

No	Jenis	Jumlah	Ukuran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Mangan	545.000	Ton	Terukur pada endapan aluvial
2	Pasir Besi	671	Ton	Terukur pada endapan aluvial
3	Tembaga	200	Ton	Terukur
4	Feldspar	1.000.000	Ton	Terukur
5	Batu Gamping	1.500.000	Ton	
6	Sirtu	76.017.000	Ha	
7	Batu Silika	5.000.000	Ha	
8	Tras	50	Ha	
9	Andesit	25	Ha	
10	Oker	50	Ha	
11	Zeolit	15	Ha	
12	Basalt	1.700.000	m ²	
13	Kaolin	1.250.000	m ²	
14	Tufa	1.500.000	m ²	

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Pemerintah Kabupaten Manggarai juga memberikan peluang adanya investasi dalam sektor Pertambangan, dan saat ini usaha pertambangan yang sudah melakukan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi adalah mangan (operasi produksi) dan base metal (eksplorasi).

Tabel 2.195.
Realisasi ekspor Mangan tahun 2007-2010

No	Tahun / Jenis	Eksport			
		Jumlah	Satuan Metrik Ton	Harga Satuan (US\$)	Total Harga (US \$)
I	2	3	4	5	6
1	Tahun 2007				
	▪ Manganese Ore	-	-	-	-
	▪ Manganese Ore Lumpys	33.547,93	(MT)	- 29,25 (Per: 20/05/2007) - 45,00 (Per: 02/10/2007)	1.174.854,38
	▪ Manganese Ore Fines	26.529,43	(MT)	- 18,56 (Per: 20/05/2007) - 33,00 (Per: 02/10/2007)	696.610,85
2	Tahun 2008				
	▪ Manganese Ore	13.000,17	(MT)	39,60	514.806,65
	▪ Manganese Ore Lumpys	33.537,33	(MT)	45,00	1.509.179,67
	▪ Manganese Ore Fines	10.519,24	(MT)	33,00	347.135,05
3	Tahun 2009:				
	▪ Manganese Ore	19.695,07	(MT)	45,00	886.277,97
	▪ Manganese Ore Lumpys	59.802,37	(MT)	50,00	2.990.118,40
	▪ Manganese Ore Fines	7.553,47	(MT)	38,00	287.032,01
4	Tahun 2010				
	▪ Manganese Ore	-	-	-	-
	▪ Manganese Ore Lumpys	18.212,90	(MT)	50,00	910.645,20
	▪ Manganese Ore Fines	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Selain Potensi tambang tersebut di atas Kabupaten Manggarai memiliki potensi bahan galian golongan C yang tersebar di berbagai lokasi, seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.196.
Penyebaran lokasi bahan galian golongan C

No	Lokasi	Jenis	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	2		3	4	5
1	Golo Weol	Pasir	Meler	Ruteng	
2	Tuke Nikit,	Batu, pasir	Poco Likang	Ruteng;	
3	Wae Lengkas	Batu, pasir	Golo Dukal	Langke Rembong	
4	Bumbu	Pasir	Golo Cador	Wae Ri'i	
5	Gapong	Batu	Gapong	Cibal	
6	Wae Reno	Batu, pasir	Ranaka	Wae Rii	
7	Wae Pesi	Batu, pasir	Salama	Reok	
8	Golo Lalong	Pasir	Lalong	Wae Rii	
9	Golo Ling	Pasir	Golo Cador	Wae Rii	
10	Bea Tete Haju	Pasir	Umung	Satar Mese	
11	Tado Leka	Pasir	Ponggeok	Satar Mese	
12	Golo Ntua	Pasir	Papang	Satar Mese	
13	Wae Koe	Batu, pasir	Paka	Satar Mese	
14	Golo Rengket	Pasir	Paka	Satar Mese	
15	Cireng	Batu	Cireng	Satar Mese Barat	
16	Weol	Pasir	Wae Belang	Ruteng	
17	Golo Ndung	Pasir	Meler	Ruteng	
18	Wae Maras	Batu, pasir	Hilihintir	Satar Mese Barat	
19	Pong Pahar	Batu, pasir	Hilihintir	Satar Mese Barat	

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Tahun 2010

C. Potensi Air Tanah Dan Air Permukaan

Keadaan Sumber Mata Air, Wae Rowang Kecamatan Langke Rembong dengan potensi 30 m³/detik, Wae Ces Kecamatan Langke Rembong potensi debit 78 m³/detik, Wae Mata Kecamatan Reok potensi debit 5 m³/detik, Wae Kondo Kecamatan Cibal potensi debit 8 m³/detik dan Wae Pao Kecamatan Satar Mese potensi debit 9,5 m³/detik.

Tabel 2.197.
Jumlah Pengelolaan Air Tanah/Air Permukaan (AT/AP)

No	Nama Lokasi/Sumber	Pengelola	Debit / Sumber /Tahun (m ³ /thn)	Peruntukan	Kapasitas Output (m ³ /thn)	Sistem pengambilan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rowang dan Wae Lerong	PDAM	1.531.824	PDAM	1.531.824	Air Permukaan (AP)
2.	Pagal	PDAM	44.376	PDAM	44.376	AP
3.	Cancar	PDAM	29.976	PDAM	29.976	AP
4.	Reo	PDAM	124.020	PDAM	124.020	AP
5.	NV. Nusa Tenggara Traiding Co.	Swasta	180	Swasta	180	Air Tanah (AT)
6.	Hotel Sinda	Swasta	288	Swasta	288	AT
7.	Hotel Agung II	Swasta	288	Swasta	288	AT
8.	Hotel Agung I	Swasta	144	Swasta	144	AT
9.	Hotel Dahlia	Swasta	288	Swasata	288	AT

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Tahun 2010

D. Energi dan Ketenagalistrikan.

Untuk kepentingan pembangunan ketenaga-listrikan, di Kabupaten Manggarai terdapat sejumlah potensi sumber daya seperti energi air (air terjun), panas bumi, tenaga surya, tenaga angin.

1. Energi Air

Tabel 2.198.
Potensi Air Terjun di Kabupaten Manggarai

No	Desa/Kecamatan	Tinggi (m)	Debit Q (m ³ /detik)	Daya P (KWH)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Wae Lega-Kampung Tengku Lese, Desa Buar / Ruteng	25	0,8	96	Kalau dibendung H : 160 – 200 P : > 1000
2.	Wae Garit-Golo Dukal / Langke Rembong	20	0,8	48	
3.	Wae Lelang-Desa Lamba Ketang / Ruteng	7	0,781	40	
4.	Wae Meleng-Desa Toe / Reok	10	150	15	
5.	Wae Cincer-Desa Bangka Ara / Cibal	5	259	76	

No	Desa/Kecamatan	Tinggi (m)	Debit Q (m/detik)	Daya P (KWH)	Ket.
1	2	3	4	5	6
6.	Cunca Tengku Teong-Compang Cibal / Cibal	45	425	125	
7.	Cunca Teong Potang / Cibal	7	135	16	
8.	Wae Cecu-Papang / Sater Mese	5	120	18	
9.	Sungai Wae Lega II, Tengku Lese / Ruteng	20	445	60	

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Tahun 2010

2. Energi Panas Bumi

Potensi energi panas bumi (*geothermal*) yang dimiliki Kabupaten Manggarai terdapat di Ulumbu dan Wae Pesi.

Data Potensi Panas Bumi di Kabupaten Manggarai tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.199.
Potensi Panas Bumi di Kabupaten Manggarai

No.	Lokasi	Desa/Kecamatan	Potensi	Tahap Penyelidikan
1	2	3	4	5
1.	Wae Pesi	Bajak / Reok	54 Mwe (hipotesis)	Penyelidikan pendahuluan
2.	Ulumbu	Wewo / Satar Mese	> 24 Mwe (terbukti)	Pengeboran Deliniasi

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Khusus mengenai potensi panas bumi di Ulumbu, cadangan pasti pada sumur bor 2 sebesar 15 MW. Mengingat sifatnya yang dapat diperbarukan, kapasitas unitnya dapat berkisar antara skala kecil dan menengah yang berimplikasi pada pengembangan industri hilir. Kondisi itu tergambar pada Tabel berikut.

Tabel 2.200.
Hasil Pengeboran Sumur PLTP Ulumbu

No.	Uraian	Sumur		
		ULB-1	ULB-2	ULB-3
1.	Kedalaman	1.887 m (Vertikal)	878 m (Miring)	946 m (Miring)
2.	Cadangan Uap	700 – 1000 m	633 m	Tidak diuji
3.	Suhu	2300 C	2300 C	Tidak diuji
4.	Tekanan	120 Bar	120 Bar	Tidak diuji
5.	Potensi	3,5 MW	12,5 MW	Tidak diuji

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Tahun 2010

3. Energi Angin

Data Kecepatan Angin dan Perkiraan Besarnya Potensi Listrik yang Bisa Dibangkitkan.

Tabel 2.201.
Kecepatan Angin dan Perkiraan Besarnya Potensi Listrik yang bisa dibangkitkan

No.	Lokasi	Kecamatan	V rata-rata	Daya W/m ²	Kemungkinan Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6
1.	Satar Tacik	Langke Rembong	3.88	20.4222	Skala menengah (dapat digunakan untuk pembangkit listrik dengan sistem Hibrida/ angin-diesel)
2.	Papang	Satar Mese	2.88	7,6751	Skala kecil

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Tahun 2010

4. Energi Surya

Potensi Energi Surya untuk PLTS dapat digunakan hampir di seluruh desa dengan intensitas matahari 8 jam/hari.

Sampai pada Tahun 2010, di Kabupaten Manggarai telah terpasang energi PLTS yang tersebar di berbagai desa pada 5 (lima) kecamatan.

Data Realisasi Pemasangan PLTS sampai pada Tahun 2010 di Kabupaten Manggarai

Tabel 2.202.
Realisasi Pemasangan PLTS sampai pada tahun 2010 di Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Desa	Jumlah unit		Jumlah Terpasang (unit)	Sumber Dana / Proyek
			Sebelum Tahun 2010	Pada Tahun 2010		
1	2	3	4	5	6	7
1	Cibal	Golowoi	55	-	55	APBN
		Riung	26	-	26	APBN
2	Wae Rii	Ndehes	25	-	25	APBN
		Wae Mulu	26	-	26	APBN
3	Lelak	Urang	105	-	105	APBN
		Bangka Lelak	26	-	26	APBN
		Gelong	25	-	25	APBN
4	Rahong Utara	Benteng Tubi	26	-	26	APBN

No	Kecamatan	Desa	Jumlah unit		Jumlah Terpasang (unit)	Sumber Dana / Proyek
			Sebelum Tahun 2010	Pada Tahun 2010		
1	2	3	4	5	6	7
5	S. Mese Barat	Gulung	17	-	17	APBN
		Nuca Molas	50	-	50	APBN
		Hilihintir	-	32	32	APBD I
Total (unit)			381	32	413	

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Tahun 2010

5. Pelayanan Listrik Perusahaan Negara

Pelayanan Listrik oleh PT. PLN (Persero) Ranting Ruteng

Tabel 2.203.

Pelayanan Listrik Perusahaan Negara Ranting Ruteng

No.	UNIT	Pelayanan PT. PLN (KK)		
		Kondisi Sebelum Tahun 2010	Kondisi Tahun 2010	Jumlah Penambahan Pelanggan
1	2	3	4	5
1	Ruteng (melayani Kec. Langke Rembong, Kec. Wae Rii, Kec. Ruteng)	8.118	8.548	430
2	Cibal	352	365	13
3	Satar Mese	361	412	51
4	Reok	1.143	1169	26
JUMLAH		9.974	10.494	520

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Tahun 2010

2.3.2.8. Pariwisata

A. Potensi Obyek Wisata

Kabupaten Manggarai memiliki potensi obyek wisata, baik obyek wisata alam, budaya, bahari/tirta maupun religius. Dari sekian banyak obyek dan daya tarik wisata dimaksud sebagiannya sudah dikenal dan sering dikunjungi wisatawan seperti: Liang Bua, Kampung Ruteng, Niang Todo, Wae Rebo, Lodok di Cara, Inembele, Ulumbu dan lain-lain. Disamping itu potensi wisata lainnya ialah budaya dan tarian tradisional Manggarai seperti caci.

B. Usaha Jasa Pariwisata.

Usaha jasa pariwisata sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sektor pariwisata. Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata yang baik perlu didukung oleh ketersediaan sarana prasarana wisata dan aksesibilitas menuju lokasi wisata.

Perkembangan sarana pariwisata di Kabupaten Manggarai sampai tahun 2010 terdiri dari 12 buah hotel/losmen dengan jumlah kamar sebanyak 182 buah dan tempat tidur sebanyak 385 buah. Sedangkan aksesibilitas menuju lokasi wisata saat ini kondisinya belum optimal.

C. Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2005-2010 menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun.

Tabel 2.204.
Data Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2005-2010

No	Uraian	Jumlah/Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Wisatawan Asing	779	543	630	1,420	1,835	984
2	Wisatawan Domestik	6,575	8,241	9,557	3,270	6,415	8,086
JUMLAH		7,354	8,784	10,187	4,690	8,250	9,070

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Peningkatan kunjungan wisatawan sesuai data di atas berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dan penerimaan masyarakat. Berdasarkan perhitungan penerimaan tahun 2009, rata-rata setiap wisatawan membelanjakan uangnya sebesar Rp. 461.000/hari/orang dengan lama menginap 3 (tiga) hari.

2.3.2.9. Perdagangan dan Industri

A. Perdagangan

Perkembangan Perusahaan perdagangan selama 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat signifikan yaitu dari 613 pada tahun 2005 menjadi 1.381 pada

tahun 2010 dengan rata-rata kenaikan 41,76% / tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.205.

Perkembangan perusahaan perdagangan, penyerapan tenaga kerja Dan pedagang non formal/eceran/asongan di kabupaten Manggarai TAHUN 2006-2010

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN					LAJU PERTUMBUHAN RATA-RATA
			2006	2007	2008	2009	2010	
1.	Perusahaan Kecil (PK)	Buah	525	670	841	989	1.060*	
2.	Perusahaan Menengah (PM)	Buah	134	226	270	323	355*	
3.	Perusahaan Besar (PB)	Buah	54	99	116	144	168*	
	Total	Buah	713	995	1.227	1.456	1.751*	25,18%
4.	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	5.060	5.465	5.929	6.530	6.881*	7,99%
5.	Pedagang Non Formal / Eceran / Asongan	Orang	3.967	4.225	4.478	4.728	4.953*	5,71%

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Keterangan: *) Keadaan sampai dengan Juni 2010

B. Industri

Perkembangan jumlah unit usaha di Kabupaten Manggarai pada tahun 2005-2010 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.206.

Jumlah Unit Usaha di Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010

NO	Uraian	TAHUN					2010
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Jumlah Unit Usaha	1.925	1.953	1.975	1.997	2.183	
	a. Usaha Formal	241	267	285	304	335	
	b. Usaha Non Formal	1.684	1.686	1.690	1.693	1848	
2	Nilai Investasi	7.584.265.000	8.403.155.000	9.929.900.000	827.151.000	12.251.962.000	
3	Nilai Produksi	7.235.597.000	7.340.843.000	7.625.950.000	8.992.011.000	11.115.047.000	
4	Penyerapan Tenaga Kerja	2.887	2.929	2.962	3.384	3.771	

Sumber Data: Dinas Perindag Kabupaten Manggarai Tahun 2010

2.3.2.10. Kehutanan

Kabupaten Manggarai memiliki 8 (delapan) kelompok kawasan hutan dengan luas 62.455,32 ha. Dari kedelapan kawasan hutan tersebut, terdapat satu kawasan hutan dikelola oleh BKSDA NTT II yaitu Hutan TWA Ruteng (RTK. 118) dengan luas 32.248,60 Ha yang mempunyai fungsi konservasi. Sedangkan 7 (tujuh) kawasan hutan lainnya dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai yaitu seluas 30.206,72 ha. Data kawasan hutan di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.207.
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Manggarai

No.	Fungsi Hutan / Nama Kawasan Hutan	RTK	Keliling (Km)	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Hutan Lindung (HL): a. Gapong b. Meler Kuwus c. Todo d. Nggalak Rego e. Ramut f. Bajak g. Pisok	18 111 14 103 15 103.A 103.C	20,72 65,20 122,68 319,19 180,80 7,875 14,7	952,36 3.040,00 10.089,20 14.690,30 1.165,90 112,35 156,61	Dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Manggarai
	Jumlah		731,165	30.206,72	
2.	Hutan Konservasi (HK): Taman Wisata Alam Ruteng	118	-	32.248,60	Dikelola oleh BKSDA NTT II Ruteng
	Total Jumlah		731,165	62.455,32	

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Dari seluruh kawasan hutan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan tersebut, telah terjadi degradasi akibat pembalakan liar dan perambahan hutan sehingga menyebabkan adanya lahan kritis di dalam kawasan hutan.

Luas lahan kritis di Kabupaten Manggarai cenderung mengalami penurunan setiap tahun seiring dengan adanya upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Sampai dengan tahun 2010 luas lahan kritis secara keseluruhan Kab. Manggarai adalah 12.859,30 Ha yang terdiri dari di dalam kawasan hutan sebanyak 3.177,30 Ha atau 24,71% dari luas lahan kritis dan di luar kawasan hutan sebanyak 9.682,00 Ha atau 75,29% dari luas lahan kritis.

Tabel 2.208.
Luas Lahan Kritis di dalam kawasan hutan

No.	Kelompok Hutan	Luas (Ha)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Gapong RTK. 18	152,5	152,5	152,5	52,5	52,5	52,5
2	Meler Kuwus RTK. 111	2.740,3	2.690,3	2.690,3	1.890,3	1.890,3	1.865,3
3	Todo RTK. 14	466	416,0	391,0	266,0	241,0	241,0
4	Nggalak Rego RTK. 103	458,5	458,5	418,5	218,5	218,5	218,5
5	Ramut RTK. 15	800	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
	Jumlah	4.617,3	4.517,3	4.452,3	3.227,3	3.202,3	3.177,3

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.209.
Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan

No.	Kecamatan	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Langke Rembong	622,13	572,13	459,38	254,38	177,00	133,50
2.	Ruteng	3.110,75	2.910,75	2.856,75	753,45	590,00	461,00
3.	Wae Rii	1.042,76	942,76	892,76	783,63	725,00	668,50
4.	Reok	4.027,63	3.952,63	3.905,13	3.727,88	3.588,00	3.541,50
5.	Satar Mese	2.391,52	2.231,52	2.161,02	845,00	708,00	657,00
6.	Cibal	2.219,32	2.119,32	2.090,32	1.901,57	1.796,00	1.702,00
7.	Satar Mese Barat	-	-	-	1.164,60	1.062,00	913,00
8.	Lelak	-	-	-	875,81	826,00	715,50
9.	Rahong Utara	-	-	-	1.016,54	944,00	890,00
	Jumlah	13.414,11	12.729,11	12.365,36	11.322,86	10.416,00	9.682,00

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

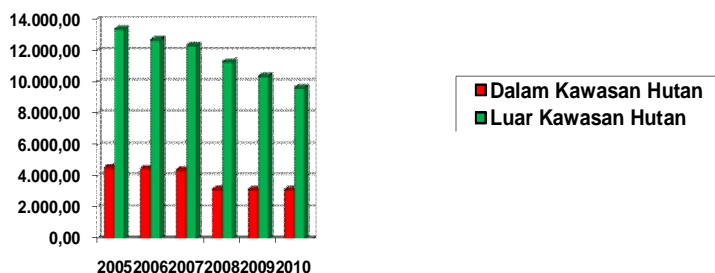
*Keterangan : Data Tahun 2005 s/d 2007 sebelum pemekaran kecamatan

Tabel 2.210.
Rekapitulasi Perkembangan Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

No.	Lahan Kritis	Tahun (Ha)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Dalam Kawasan Hutan	4.617,30	4517,3	4.452,30	3.227,30	3.202,30	3.177,30
2.	Luar Kawasan Hutan	13.414,11	12.729,11	12.365,36	11.322,86	10.416,00	9.682,00
	Jumlah	18.031,41	17.246,41	16.817,66	14.550,16	13.618,30	12.859,30

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Diagram 2.16.
Luas Lahan Kritis Dalam dan Luar Kawasan Hutan



Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.211.
Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam Kawasan Hutan

No	Kelompok Hutan	Perkembangan Rehabilitasi dalam Kawasan Hutan (Ha)						Total
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1.	Gapong RTK. 18	-	-	100	-	-	-	100
2.	Meler Kuwus RTK. 111	50	-	800	-	-	25	875
3.	Todo RTK. 14	50	25	125	25	-	-	225
4.	Nggalak Rego RTK. 103	-	40	200	-	-	-	240
5.	Ramut RTK. 15	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	100	65	1.225	25	-	25	1.440

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.212.
Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan

No.	Kecamatan	Perkembangan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan (Ha)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Langke Rembong	50	112,75	205	74,23	43,5	7,88
2.	Ruteng	200	54	210,95	172,88	129	55,88
3.	Wae Rii	100	50	109,13	55,49	56,5	2,81
4.	Reok	75	47,5	177,25	136,74	46,5	62,1
5.	Satar Mese	160	70,5	151,42	140,15	51	57
6.	Cibal	100	29	188,75	102,43	94	3,75
7.	Satar Mese Barat	-	-	-	102,6	149	120,5
8.	Lelak	-	-	-	49,81	110,5	13,38
9.	Rahong Utara	-	-	-	72,54	54	57
	Jumlah Akumulasi	685	1.048,75	2.091,25	2.998,12	3.732,12	4.112,42

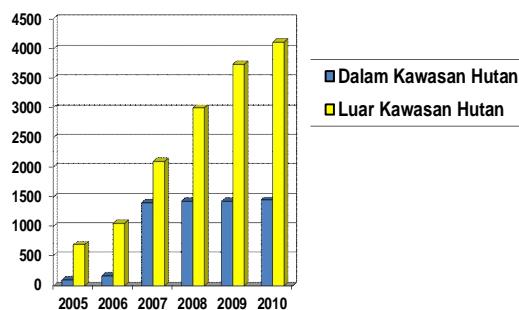
Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 2.213.
Rekapitulasi Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

No	Lahan Kritis	Target RPJMD 2005- 2010	Tahun (Ha)					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Dalam Kawasan Hutan	1.000	100,00	165,00	1.390,00	1.415,00	1.415,00	1.440
2.	Luar Kawasan Hutan	5.000	685,00	1.048,75	2.091,25	2.998,12	3.732,12	4.112,42
	Jumlah	6.000	785,00	1.213,75	3.481,25	4.413,12	5.147,12	5.552,42

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Diagram 2.17.
Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan



Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Perkembangan luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan sejak tahun 2005 – 2010 mengalami penurunan dari 18.031,41 ha menjadi 12.859,30 ha, yaitu sebesar 5.172,11 ha dengan penurunan rata-rata pertahun sebesar 6,46%. Penurunan luas lahan kritis ini terjadi akibat adanya upaya rehabilitasi hutan dan lahan setiap tahun. Target rehabilitasi hutan dan lahan RPJMD tahun 2005-2010 sebanyak 6.000 ha yang terdiri dari dalam kawasan hutan

sebesar 1.000 ha dan luar kawasan hutan sebesar 5.000 ha. Realisasi rehabilitasi lahan kritis pada akhir tahun 2010 di dalam kawasan hutan sebanyak 1.440 ha atau 144% dari target RPJMD (melampaui target) dan di luar kawasan hutan sebanyak 4.112,42 ha atau 82,25% dari target RPJMD (belum mencapai target).

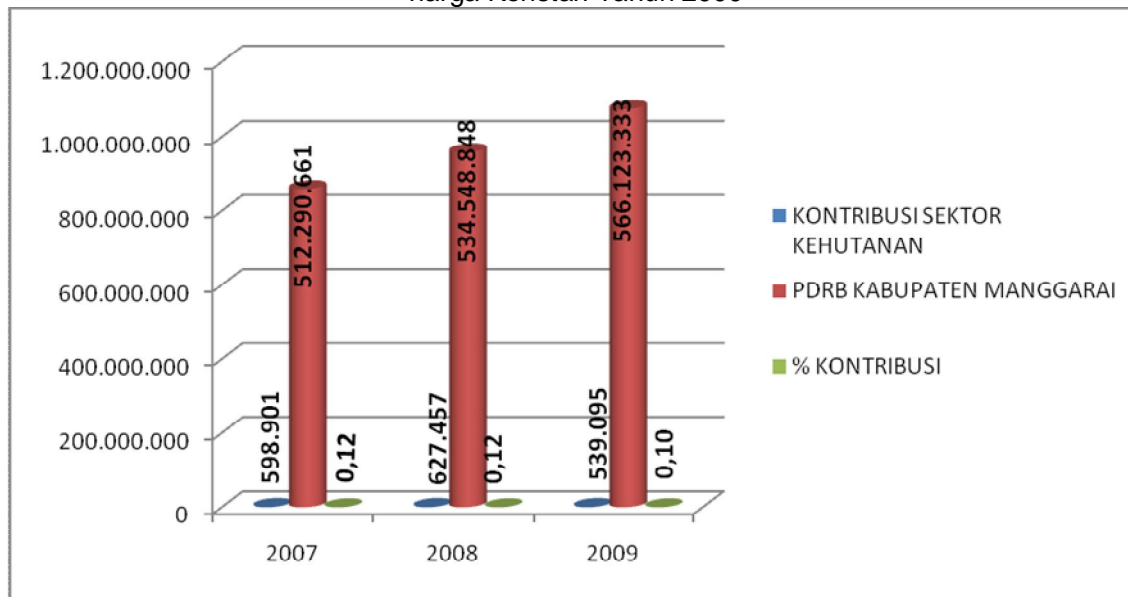
Tabel 2.214.
Prosentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Manggarai atas dasar harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Ribuan Rp)

TAHUN	KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN	PDRB KABUPATEN MANGGARAI	% KONTRIBUSI
1	2	3	4
2007	598.901	512.290.661	0,12
2008	627.457	534.548.484	0,12
2009	539.095	566.123.333	0,10

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Diagram Prosentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Manggarai atas dasar harga Konstan Tahun 2000

Diagram 2.18.
Prosentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Manggarai atas dasar harga Konstan Tahun 2000

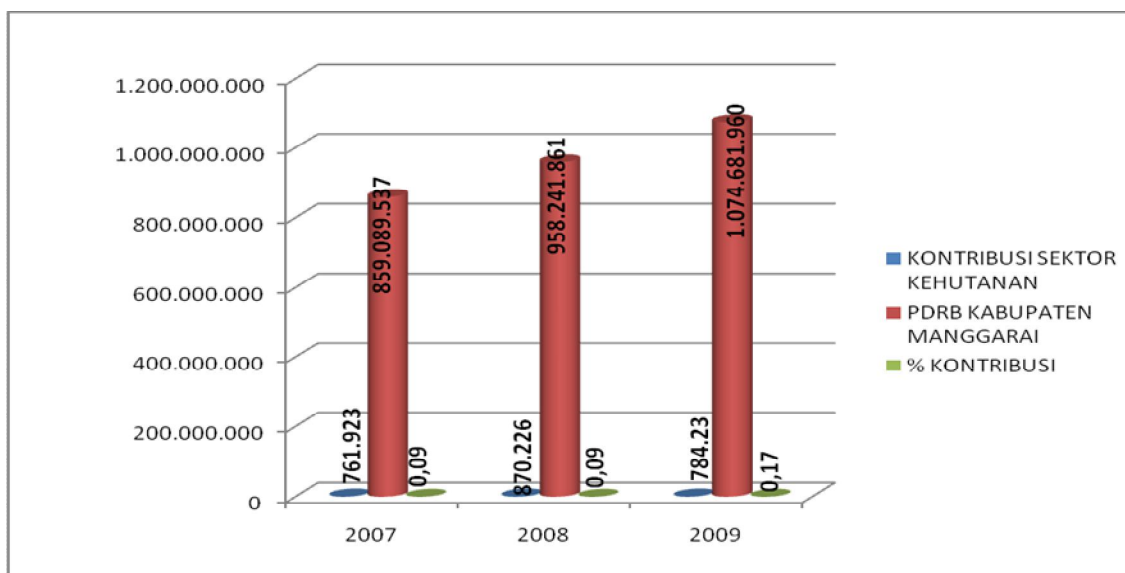


Tabel 2.215.
Prosentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Manggarai atas dasar Harga Berlaku (Dalam Ribuan Rp)

TAHUN	KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN	PDRB KABUPATEN MANGGARAI	% KONTRIBUSI
1	2	3	4
2007	761.923	859.089.537	0,09
2008	870.226	958.241.861	0,09
2009	784.237	1.074.681.960	0,07

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Diagram 2.19
Prosentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Manggarai atas dasar Harga Berlaku



2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi

Analisis kinerja atas kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, produktivitas total daerah dan nilai tukar petani, semua itu dapat dijelaskan melalui tabel-tabel di bawah ini.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita

Tabel 2.216.
Angka Konsumsi RT per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2005 s.d 2009

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Total Pengeluaran RT	70.215.620.688	111.079.566.000	117.868.611.744	118.012.190.688	186.497.361.960
2.	Jumlah RT	53.292	58.500	60.749	60.823	63.245
3.	Rasio (1./2.)	1.317.564	1.898.796	1.940.256	1.940.256	2.948.808

Sumber Data: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Untuk mengetahui pemerataan distribusi konsumsi per wilayah tabel di bawah ini menunjukkan hal itu.

Tabel 2.217.
Angka Konsumsi RT per Kapita Menurut Kecamatan Tahun 2005-2009 Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Tahun	Total Pengeluaran	Jumlah RT	Ratio
1	Satar Mese	2005	6,968,595,996	5,289	1,317,564
		2006	12,019,378,680	6,330	1,898,796
		2007	12,634,947,072	6,512	1,940,256
		2008	12,518,531,712	6,452	1,940,256
		2009	19,984,071,816	6,777	2,948,808
2	Satar Mese Barat	2005	7,602,344,280	5,770	1,317,564
		2006	12,429,518,616	6,546	1,898,796
		2007	13,343,140,512	6,877	1,940,256
		2008	13,298,514,624	6,854	1,940,256
		2009	20,621,014,344	6,993	2,948,808
3	Langke Rembong	2005	12,970,100,016	9,844	1,317,564
		2006	19,265,184,216	10,146	1,898,796
		2007	20,190,303,936	10,406	1,940,256
		2008	20,584,175,904	10,609	1,940,256
		2009	32,283,549,984	10,948	2,948,808
4	Ruteng	2005	9,342,846,324	7,091	1,317,564
		2006	15,065,047,464	7,934	1,898,796
		2007	14,121,183,168	7,278	1,940,256
		2008	15,426,975,456	7,951	1,940,256
		2009	26,206,056,696	8,887	2,948,808

No	Kecamatan	Tahun	Total Pengeluaran	Jumlah RT	Ratio
5	Wae Rii	2005	6,274,239,768	4,762	1,317,564
		2006	10,010,452,512	5,272	1,898,796
		2007	11,284,528,896	5,816	1,940,256
		2008	10,750,958,496	5,541	1,940,256
		2009	17,778,363,432	6,029	2,948,808
6	Lelak	2005	2,830,127,472	2,148	1,317,564
		2006	4,312,165,716	2,271	1,898,796
		2007	4,965,115,104	2,559	1,940,256
		2008	4,904,967,168	2,528	1,940,256
		2009	7,557,794,904	2,563	2,948,808
7	Rahong Utara	2005	4,885,527,312	3,708	1,317,564
		2006	8,379,386,748	4,413	1,898,796
		2007	11,090,503,296	5,716	1,940,256
		2008	9,208,454,976	4,746	1,940,256
		2009	14,054,018,928	4,766	2,948,808
8	Cibal	2005	10,391,627,268	7,887	1,317,564
		2006	16,874,600,052	8,887	1,898,796
		2007	16,738,588,512	8,627	1,940,256
		2008	16,880,227,200	8,700	1,940,256
		2009	26,238,493,584	8,898	2,948,808
9	Reok	2005	8,950,212,252	6,793	1,317,564
		2006	12,723,831,996	6,701	1,898,796
		2007	13,500,301,248	6,958	1,940,256
		2008	14,439,385,152	7,442	1,940,256
		2009	21,773,998,272	7,384	2,948,808

Sumber Data: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2010

B. Nilai Tukar Petani

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tukar petani setiap kecamatan bervariasi sebagai mana yang diperlihatkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.218.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2005 s.d 2009 Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Tahun	Indeks yang diterima	Indeks Yang Dibayar	Rasio
1	Satar Mese	2005	1,906,396	1,317,564	144.69
		2006	1,990,431	1,898,796	104.83
		2007	1,896,925	1,940,256	97.77
		2008	2,059,177	1,940,256	106.13
		2009	2,110,796	2,948,808	71.58
2	Satar Mese Barat	2005	-	-	-
		2006	-	-	-
		2007	2,399,436	1,940,256	123.67

No	Kecamatan	Tahun	Indeks yang	Indeks Yang	Rasio
		2008	2,633,745	1,940,256	135.74
		2009	2,670,701	2,948,808	90.57
3	Langke Rembong	2005	4,008,227	1,317,564	304.21
		2006	4,342,499	1,898,796	228.70
		2007	4,611,991	1,940,256	237.70
		2008	5,084,730	1,940,256	262.06
		2009	5,157,924	2,948,808	174.92
4	Ruteng	2005	1,788,353	1,317,564	135.73
		2006	1,830,141	1,898,796	96.38
		2007	2,128,734	1,940,256	109.71
		2008	2,271,431	1,940,256	117.07
		2009	2,303,139	2,948,808	78.10
5	Wae Rii	2005	2,018,427	1,317,564	153.19
		2006	2,235,841	1,898,796	117.75
		2007	3,861,756	1,940,256	199.03
		2008	4,286,024	1,940,256	220.90
		2009	4,342,323	2,948,808	147.26
6	Lelak	2005	-	-	-
		2006	-	-	-
		2007	5,221,500	1,940,256	269.11
		2008	5,557,112	1,940,256	286.41
		2009	5,636,260	2,948,808	191.14
7	Rahong Utara	2005	-	-	-
		2006	-	-	-
		2007	5,310,851	1,940,256	273.72
		2008	5,674,670	1,940,256	292.47
		2009	5,764,699	2,948,808	195.49
8	Cibal	2005	1,527,764	1,317,564	115.95
		2006	1,608,216	1,898,796	84.70
		2007	2,642,520	1,940,256	136.19
		2008	2,917,438	1,940,256	150.36
		2009	2,955,745	2,948,808	100.24
9	Reok	2005	2,179,048	1,317,564	165.38
		2006	2,434,699	1,898,796	128.22
		2007	3,593,978	1,940,256	185.23
		2008	3,972,842	1,940,256	204.76
		2009	4,025,209	2,948,808	136.50

Keterangan:

1. It = Indeks yang diterima petani
2. Ib = Indeks yang dibayar petani
3. Rasio antara It dengan Ib.

C. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita

Untuk melihat daya saing kemampuan ekonomi daerah dari aspek pengeluaran konsumsi non pangan terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.219.
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2005 s.d 2009 Kabupaten Manggarai

Tahun	Uraian pengeluaran konsumsi non pangan/kapita		
	Total pengeluaran RT non pangan (Rp)	Total pengeluaran (Rp)	Persentase (%)
2005	91.798.405.776	351.877.864.788	26,09
2006	168.547.331.484	518.251.683.852	32,52
2007	156.892.937.544	536.507.947.584	29,24
2008	160.169.649.444	547.712.925.984	29,24
2009	286.308.363.192	869.515.604.580	32,93

Sumber : Data Olahan BPS Manggarai Dalam Angka.

Dilihat dari bentangan persentase yang tampilannya di bawah 40% (< 60%) dapat disimpulkan trend masyarakat dalam kegiatan konsumsi lebih mengutamakan pangan dari pada non pangan. Dengan kata lain, dalam menyusun pola konsumsi, pada umumnya RT lebih mendahulukan kebutuhan pokok pangan.

D. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Luas Wilayah Produktif

Perhitungan daya saing infrastruktur dari dimensi wilayah produktif, disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2.220.
Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2005 s/d 2009 Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Tahun (Ha)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Produktif	376.492	376.492	376.492	376.492	145.414
2.	Luas Seluruh Wilayah budidaya	157.495	157972	166148	165.640	56.324
3.	Rasio (1/2)	2,39	2,38	2,27	2,27	2,58

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2010

Tabel 2.221.
Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2009 Menurut Kecamatan Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Satar Mese	18.935	5.045	3.75
2	Satar Mese Barat	38.576	11.061	3.49
3	Langke Rembong	9.171	4.542	2.02
4	Ruteng	3.895	6.725	0.58

No	Kecamatan	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
5	Wae Rii	5.972	4.194	1.42
6	Lelak	3.692	2.948	1.25
7	Rahong Utara	5.363	2.197	2.44
8	Cibal	427	11.238	0.04
9	Reok	21.383	8.374	2.55
	Jumlah	107.414	56.324	17.54

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2010

Tabel 2.222.
Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2005-2009
Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	2005			2006			2007			2008			2009		
		LWP	LSWB	Rasio	LWP	LSWB	Rasio	LWP	LSWB	Rasio	LWP	LSWB	Rasio	LWP	LSWB	Rasio
1	Satar Mese	59.810	19.697	3.04	59.810	19.697	3.04	59.810	19.612	3.05	59.810	19.612	3.05	18.935	5.045	3.75
2	Satar Mese Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.576	11.061	3.49
3	Langke Rembong	5.972	2.471	2.42	5.972	2.471	2.42	5.972	4.194	1.42	5.972	4.194	1.42	9.171	4.542	2.02
4	Ruteng	18.090	10.661	1.70	18.090	10.661	1.70	18.090	10.553	1.71	18.090	10.553	1.71	3.895	6.725	0.58
5	Wae Rii	9.171	4.515	2.03	9.171	4.515	2.03	9.171	4.530	2.02	9.171	4.542	2.02	5.972	4.194	1.42
6	Lelak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.692	2.948	1.25
7	Rahong Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363	2.197	2.44
8	Cibal	18.931	490	38.63	18.931	490	38.63	18.931	5.045	3.75	18.931	5.045	3.75	427	11.238	0.04
9	Reok	38.576	10.960	3.52	38.576	10.960	3.52	38.576	10.951	3.52	38.576	11.061	3.49	21.383	8.374	2.55
	Total	150.550	48.794	51.34	150.550	48.794	51.34	150.550	54.895	15.47	150.549	55.007	15.44	107.414	56.324	17.54

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2010

Tabel 2.223.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi <i>belum tercapai</i> (<) <i>sesuai</i> (=) <i>melampaui</i> (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB (%) ADHK	2,68	6,16	5,24	9,59	5,24	-	5,96	6	<i>belum tercapai</i> (<)
1.1.1.2	Laju inflasi (%)	7,01	9,34	6,01	6,90	5,89	-	7,03	<10	Inflasi Ringan,
1.1.1.3	PDRB per kapita (Rp) ADHB Jumlah Penduduk	1.689.213 266.067	3.427.180 236.162	3.766.617 240.468	4.119.842 244.237	4.180.555 276.274		3.436.681 252.642	2.051.617 510.953	Melampaui (>) Berhasil
1.1.1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Sektor Primer Sektor Sekunder Sektor Tersier	4,65 10,25 4,19	15,16 14,84 -12,78	15,41 17,51 7,62	23,87 5,31 2,79	11,69 1,71 0,46	- - -	14,16 9,92 1,28		
1.1.1.5	Penduduk Miskin Angka kemiskinan yg tertangani	288.648 -	80.020 -	287.202 -	287.202 -	114.851 -	- 32.252			
1.1.1.6	Indeks Gini	0,42	0,46	0,18	0,18	0,29	-			
1.1.1.7	Pemerataan Pendapatan	0.0879	0.0959	0.0951	0.0962	0.0960	-	0.0942		
1.1.1.8	(%) Penduduk di atas garis kemiskinan	41.9	83.8	42.8	42.8	58.2	-	46.3		
2.	PELAYANAN UMUM									
2.1	PELAYANAN URUSAN WAJIB									
2.1.1.	Pendidikan									
2.1.1.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) ▪ PAUD ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SLTA/MA ▪ PT	3,86 115,42 63,08 40,13 -	3,40 107,94 67,81 36,58 0,34	3,76 106,12 74,46 45,11 0,75	4,35 117,62 66,77 54,10 0,97	3,48 119,08 70,12 58,85 1,82		3,84 113,24 68,45 46,95 0,78	110 97,5 75	> < <
2.1.1.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) ▪ PAUD									

RPJMD Kabupaten Manggarai 2011-2015

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SLTA/MA 	2,31 83,78 47,22 29,25	3,40 92,96 50,58 26,44	2,33 89,24 55,06 32,83	2,82 99,82 50,28 38,61	2,47 100,93 49,53 42,61		2,67 93,35 50,53 33,95	100 85 70	< < <
2.1.1.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) <ul style="list-style-type: none"> ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SLTA/MA 	93,44 47,39 31,58	93,02 61,7 55,59	93,92 64,39 59,93	93,55 76,77 44,69	94,69 90,03 61,07		93,72 60,06 50,57		
2.1.1.4.	Rata-Rata Lama Sekolah	-	-	-	6,43	6,61				
2.1.1.5.	Prosentase Lulusan : <ul style="list-style-type: none"> - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK 	100 84,81 69,75 75,56	100 84,17 71,87 99,44	94,84 62,5 54,39 86,27	100 84,81 69,75 75,60	98,31 43,29 26,29 47,73		98,63 71,92 44,53 76,92	100 90 90 100	< < < <
2.1.1.6.	Kualifikasi Guru				863	1018				
2.1.1.7.	Sertifikasi					567				
2.1.1.8.	Rasio Siswa terhadap Ruang Kelas PAUD SD SMP SMA	1:63 1: 91 1: 46	1: 67 1: 99 1: 38	1: 63 1: 97 1: 44	1: 31 1: 54 1: 34	1: 32 1: 45 1: 35				
2.1.1.9.	Rasio Guru terhadap Siswa PAUD SD SMP SMA				1: 13 1: 29 1: 23 1: 17	1: 11 1: 25 1: 24 1: 20				
2.1.2.	Kesehatan									
2.1.2.1.	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	442,82	277,23	170,01	224,87	258,66	172,08	257,60	200	Melampaui

RPJMD Kabupaten Manggarai 2011-2015

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
2.1.2.2.	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)	20,31	16,31	12,75	12,32	15	13,25	14,99	12,50	Belum tercapai
2.1.2.3.	Status Gizi Buruk (%)	3,40	2,76	1,50	0,5	0,14	0,20	1,4	<5%	Melampaui
2.1.2.4.	Usia Harapan Hidup			66,65	66,68				67	
2.1.3.	Keluarga Berencana									
2.1.3.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,79	2,20	0,83	1,29	1,26	3,63	1,83	1,5	Belum tercapai
2.1.3.2.	Total Fertility Rate (Jiwa)	4,25	3,69	3,46	3,41	3,35	3,24	3,57	3,25	Belum tercapai
2.1.3.3.	CPR (%)	49,99	57,40	62,42	68,74	70,71	68,84	63	72	
2.1.4.	Pekerjaan Umum									
	Pekerjaan Umum (Fokus layanan)									
	Pembangunan Jalan dan Jembatan									
	1. Peningkatan/Pembangunan Jalan Kabupaten, yang tdd:									
	ASPAL tdd:									
	- HRS	17.50	6,50 km	19,00 Km	3,70 Km	7,731 Km	13,04 Km	106,45	100	Melampaui
	- LAPEN	80,00	49,70 Km	103,20 Km	100.60 Km	185.2 Km	117.3 Km	101.91	100	Melampaui
	Telford :	62.00	25.20 Km	13.50 Km	58.55 Km	65.09 Km	39.91 Km	103,12	100	Melampaui
	Pembukaan Jalan Baru/Jalan Tanah	121.61	7.00 Km	18.00 Km	87.00 Km	73.10 Km	53.06 Km	102.27	100	Melampaui
	I. Pembangunan Jembatan Kabupaten, tdd :									
	1. Konstruksi Beton	32.00	7 bh	10 Bh	5 Bh	7 Bh	5 Bh	81.44	100	Belum Tercapai
	2. Komposit	3 Bh	-	-	-	1 Bh	-	33,33	100	Belum Tercapai
	3. Konstruksi Baja	1 Bh	1 Bh	2 Bh	1 Bh	2 Bh	-	66.67	100	Belum Tercapai
	REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN									
	1. Jalan Kabupaten	-	6 Km	19.8 Km	1.5 Km	15.00 Km	60.00 Km	113.65	100	Melampaui
	2. Jembatan Kabupaten	-	-	-	-	1.00 Bh	4.00 Bh	11.90	100	Belum Tercapai
	3. Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong									
	a. Pembangunan Drainase Perkotaan	-	-	1.4	2.6	1.5	2.108		100	Belum Tercapai
	4. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan									
	a. Pembangunan Air Minum	65.750	46.729	65.750	30.426	14.942	14.602		100	Belum Tercapai
	b. Pembangunan Jalan Pedesaan	-	5.8	34.35	17.8	15.1	0.3		100	Belum Tercapai
	c. Jalan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan	-	5.8	14.05	23.6	-	-		100	Melampaui
	5. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan									

RPJMD Kabupaten Manggarai 2011-2015

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
	a. Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan	-	-	3.7	8.6	2.2	2.5		100	Belum Tercapai
	6. IMB									
	Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi	15	19	17	28	24	37		100	Belum Tercapai
	1. Peningkatan/Rehabilitasi Irigasi (M)									
	2. Pembangunan/Rehab Bendung (buah)	1.900	1.700	5.300	5.300	41.970	17.719	12.315		
	Program Pengendalian Banjir	40	1	10	5	1	1	9,7		
	1. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai (m)									
	2. Pembangunan Prasarana Pengaman Kali/Pantai (m)	-	-	300	-	-	-	50		
		388	50	300	-	-	-	123		
	Kondisi Jalan									
	1. Jalan Negara									
	- Baik	43,6	43,6	43,6	43,6	61,79	98,79	55,83	-	
	- Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Rusak	-	-	-	-	-	14,5	2,41	-	
	2. Jalan Propinsi	95	95	95	95	56,55	30,50			
	- Baik	-	-	-	-	23,60	4			
	- Sedang	-	-	-	-	20	-			
	- Rusak									
	3. Jalan Kabupaten	159,5	178,9	299,02	435,92	668,79	764,93	417,84		
	- Baik	-	-	13,58	21,54	34,06	85,45	25,77		
	- Sedang	-	-	2	20	31,7	52,5	17,70		
	- Rusak									
2.1.5.	Perhubungan									
	Perhubungan (Fokus layanan)									
	Transportasi Darat									
	1. Terminal Barang	-	-	-	-	-	-	-		
	2. Terminal Umum	-	-	-	-	-	5	0,83		
	3. Jumlah Angkutan Umum	633	573	576	571	571	-	487,3		
	4. Jumlah Penumpang	3.234.630	3.137.175	3.363.840	3.543.055	3.751.470	-	2.838.361,6		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
	5. Rasio Jumlah Penumpang Darat/Angkutan	5.110	5.475	5.840	6.205	6.570	-	4.866,6		
	Fasilitas Lalu Lintas :									
	1. Jumlah Rambu Lalulintas	-	-	-	65	77	-	23,7		
	2. Marka Jalan	-	-	1.200	8.200	15.200	-	4.100		
	3. Traffic Light	-	-	-	-	3	-	0,5		
	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	1.468	1.467	1.551	1.492	1.945	-	1.320,5		
	Rasio Kendaraan Wajib uji	0,45	0,47	0,50	0,46	0,52	-	0,4		
	Rasio Panjang Jalan/jumlah Kendaraan	0,06	0,08	0,08	0,05	0,05	-	0,06		
	Transportasi Laut									
	1. Jumlah Penumpang									
	- Keberangkatan	676	772	1.424	1.012	1.964	-	974,6		
	- Kedatangan	579	523	1.140	1.080	1.164	-	747,6		
	2. Arus Barang									
	- Bongkar (ton)	50.384,50	39.233	44.256	58.704,50	41.532	-	39.034,6		
	- Muat	9.586,88	11.525,60	26.501.850,20	86.452,15	52.201	-	4.443.602,6		
	3. Jumlah Kapal									
	- Datang	403	333	376	356	423	-	315,2		
	- Berangkat	403	333	376	356	423	-	315,2		
	Transportasi Udara									
	1. Jumlah Penumpang									
	- Datang	4.721	10.796	9.790	11.768	6.929	-	7.334		
	- Berangkat	5.187	11.553	10.378	10.620	4.834	-	7.095,3		
	2. Arus Barang (ton)									
	- Bongkar	10.829	33.570	46.448	108.590	76.171	-	45.934,6		
	- Muat	8.658	11.929	45.348	127.677	45.089	-	39.783,5		
	3. Jumlah Pesawat									
	- Datang	255	412	330	338	188	-	253,8		
	- Berangkat	255	412	330	338	188	-	253,8		
	4. Peningkatan Pelayanan di Bandara FS Lega									
	-	-	-	1	1	1	-	0,5	1	
	- Pembangunan Ruang VIP	1.300	1300	1300	1500	1500	-	1.150	1.650	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
	- Perpanjangan Landasan Pacu (m)									
	Komunikasi dan Informatika									
	1. Pengembangan Pemanfaatan IT	1	1	1	1	1	-	0,8	1	
	- Pengadaan Fasilitas Visat	3	7	10	13	13	-	7,7	30	
	- Pengembangan Sistem Wireless	1	1	1	1	1	-	0,8	1	
	- Pelayanan Warnet	1	1	1	1	1	-	0,8	1	
	2. Radio Siaran Pemerintahan Daerah	1	1	1	1	1	-	0,8	1	
	- Peningkatan Mutu Siaran	1	1	1	1	1	-	0,8	1	
	- Pengembangan Lembaga									
2.1.6.	Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi									
	Perindustrian									
	1. Jumlah industri kecil:									
	a. Industri formal (unit)	243	259	277	297	336	348	293		
	b. Industri non formal	1.687	1.721	1.749	1.782	1.848	1.848	1.772		
	2. Jumlah penyerapan tenaga kerja	3.145	3.209	3.332	3.540	3.771	3.804	3.466		
	3. Nilai investasi	7.668.046	8.477.964.000	9.373.427.000	10.275.027.000	12.251.962.000	12.711.662.000	10.126.348.000		
	4. Nilai produksi	8.625.016	9.067.233.000	9.574.220.000	10.104.588.000	11.115.047.000	11.260.081.000	9.961.131.000		
	5. Jumlah sentra	40	44	48	51	58	56	49		
	Perdagangan									
	1. Perusahaan kecil (PK)	411	525	670	841	989	1.060	749		
	2. Perusahaan menengah (PM)	79	134	226	270	323	355	231		
	3. Perusahaan besar (PB)	39	54	99	116	144	168	103		
	4. Penyerapan tenaga kerja	4.685	5.060	5.465	5.929	6.530	6.881	5.758		
	Koperasi dan UKM									
	1. Pra koperasi (buah)	55	64	83	92	103	103	83		
	2. Koperasi yang sudah berbadan hukum	46	46	46	46	46	57	48		
	3. Modal sendiri	5.554.734.861	5.610.843.294	5.614.843.294	5.698.191.439	9.662.496.741	9.662.496.741	6.967.267.728		
	4. Modal luar	3.874.036.014	3.913.167.691	3.913.167.691	3.921.087.470	5.878.029.526	5.878.029.526	4.562.919.653		

RPJMD Kabupaten Manggarai 2011-2015

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
	5. Sisa hasil usaha 6. Anggota koperasi (orang) 7. Karyawan 8. Omset	412.191.000 13.470 45 2.821.367.650	416.354.504 13.606 45 2.849.866.310	461.525.105 13.666 45 3.134.853.590	481.525.105 13.686 48 3.496.452.221	1.304.263.308 19.250 101 9.333.178.4060	1.213.542.954 19.250 101 8.818.075.950	714.900.496 15.488 64 5.075.632.534		
2.1.7.	Pemberdayaan Masyarakat Desa									
	1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan	-	-	-	27	29	-			
2.1.8.	Air Minum (Fokus layanan) 1. Jumlah pelanggan - PDAM kota Ruteng - IKK Pagal - IKK Reo - IKK Cancar - IKK Iteng 2. Debit Air (liter/detik) - PDAM kota Ruteng - IKK Pagal - IKK Reo - IKK Cancar - IKK Iteng 3. Pelayanan PDAM - Jumlah penduduk - Jumlah pelanggan - Jumlah penduduk yang menikmati air		6.167 280 528 145 - 56 9 1,5 2,5 - 56 9 1,5 2,5 - 201.870 10.044 60.264	6.531 319 545 129 375 56 9 1,5 2,5 - 56 9 1,5 2,5 - 201.870 10.044 60.264	7.059 334 585 132 654 167 9 1,5 2,5 40 167 9 1,5 2,5 40 201.870 10.044 60.264	7.431 365 621 162 962 129 12 4 4 22 129 12 4 4 22 201.870 10.044 60.264	7.677 367 656 217 1.127 129 12 4 4 22 129 12 4 4 22 201.870 10.044 60.264			
2.1.9.	Kebudayaan									
	Pembangunan Kebudayaan 1. Sanggar Kesenian 2. Atraksi Seni Budaya Situs Sejarah Purbakala	- 1 2	10 2 -	6 2 1	2 2 4	5 3 1	9 2 -	5,3 2 1,3	30 12 10	Belum Tercapai Belum Tercapai Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<i><</i>) sesuai (=) melampaui (<i>></i>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
	Benda Cagar Budaya	-	-	-	-	34	-	5,7	16	Belum Tercapai
2.2.	PELAYANAN URUSAN PILIHAN									
	Pertanian Tanaman Pangan Produktivitas Tanaman Pangan Komoditi • Padi (TON GKP) • Jagung • Kedelai • Kacang Hijau • Kacang Tanah • Ubi Kayu • Ubi Jalar	3,58 2,25 0,92 1,34 1,40 8,12 5,78	4,80 2,40 1 1,57 1,04 8,10 5,47	4,60 3,17 1 1,04 1,01 8,84 6,22	5,04 4,56 0,74 1,07 1,10 8,05 4,02	5,11 3,71 1 1,10 1,06 8,05 4,03	5,21 3,78 1,02 1,08 1,12 8,21 4	4,72 3,31 0,95 1,11 1,22 8,23 4,92	6,2 2,5 0,992 0,992 1,01 6,2 3,1	Belum Tercapai Melampaui Belum Tercapai Melampaui Melampaui Melampaui Melampaui
	Produktifitas Buah-buahan (Kw/Ha) • Advokat • Belimbing • Durian • Jambu Biji • Jeruk Keprok • Mangga • Nangka • Nenas • Pepaya • Pisang • Rambutan • Salak • Sawo • Sukun		19,40 44,10 0 0 0 12,61 44 482,09 436,50 97 0 0 0 0	19,60 0 19,50 0 102,90 12,74 0 487,06 441 98 58,80 156,80 0 0	19,80 44,55 19,80 148,50 103,95 12,87 44,45 492,03 445,5 99 59,40 158,40 0 29,70	20 45 20 150 105 13 45 497 450 100 60 160 30 30	20,22 45,45 20,20 106,05 106,05 13,13 45,45 501,97 454,5 101 60,60 161,60 30,30 30,30	19,80 35,82 15,92 90 83,58 12,87 35,78 492,03 445,5 99 47,76 127,36 12,06 18		Melampaui Melampaui Melampaui Melampaui Melampaui Melampaui Melampaui Melampaui Melampaui Melampaui Melampaui Melampaui Melampaui Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
	Jmlh Klpk Tani penerima bantuan langsung benih unggul (ton): <ul style="list-style-type: none"> • Padi non hibrida • Padi Lahan Kering • Padi Hibrida • Jagung Hibrida 						125.000 25.000 4.500 7.500			
	Penyediaan Sarana Produksi (ton): <ul style="list-style-type: none"> • Pupuk Urea • Pupuk SP-36/Super Fosfat • Pupuk KCL/NPK Ponska 		2.554 1.277 1.277	1.219,5 1.147 80,40	2.515,16 565 706,495	1.372,53 4 3.334,45	7.348 686 605			
	Alat dan Mesin Pertanian (unit): <ul style="list-style-type: none"> • Hand Tractor • Hand Sprayer • Emposan Tikus • Pembersih Gulma manual • Pompa air • Sabit bergerigi • Power thresher 						162 694 10 385 415 8.485 138			
	Luas Lahan Sawah Menurut jenis pengairan (HA): <ul style="list-style-type: none"> • Irigasi teknis • Irigasi setengah teknis • Irigasi Sederhana • Irigasi Desa/non PU • Irigasi tadah hujan 						2.650 3.012 1.442 1.207 1.539			
	Kondisi PID (unit) : <ul style="list-style-type: none"> • PID yang rusak • PID yang diperbaiki • PID yang dibangun baru 					25	38			

RPJMD Kabupaten Manggarai 2011-2015

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
	Perkebunan Produksi Komoditi Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	1.923,80	1.544,23	1.630,38	1.595,56	1.629,32	1.536,58	1.643,31		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	538,95	538,95	541,50	544,15	580,25	583,40	555		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	61,7	58,45	217,14	187,19	239,8	200,55	161		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	654,3	654,67	684,53	687,59	750,99	585,69	670		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	37,14	33,31	10,98	9,01	9,01	2,80	63		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	43,45	44,51	92,65	96,45	133,55	120,40	89		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	58,47	54,78	59,95	62,05	68,2	46,60	58		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	696,5	688,3	696,92	891,70	938,2	953,87	811		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	39,78	40,18	43,96	45,61	-	40,10	35		
	Produktifitas Komoditi Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	467,08	357,81	386,06	372,31	358,87	346,09	381		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	292,72	264,07	269,16	268,12	312,45	310,55	236		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	136,05	113,55	366,98	339,93	396,06	327,56	280		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	257,14	202,49	283,64	219,48	285,36	228,19	246		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	197,47	198,05	260,00	184,52	114,41	98,25	175		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	148,57	170,14	296,16	300,39	304,73	272,24	249		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	153,65	151,35	184,74	261,07	177,16	131,66	177		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	281,28	255,43	261,39	383,63	361,94	355,09	316		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	102,90	98,38	147,63	146,94	115,21	105,9	119		
	Peternakan Populasi Ternak <ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kuda • Babi • Kambing • Ayam • Itik 	8.990	9.159	9.331	9.499	9.682	9.748	9.402	9.550	<
	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kuda • Babi • Kambing • Ayam • Itik 	5.971	6.061	6.152	6.246	6.328	6.800	6.181	6.508	<
	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kuda • Babi • Kambing • Ayam • Itik 	397	402	407	412	417	417	409	414	<
	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kuda • Babi • Kambing • Ayam • Itik 	30.002	31.446	32.981	34.613	36.287	37.487	33.803	33.500	<
	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kuda • Babi • Kambing • Ayam • Itik 	17.541	18.095	18.667	19.257	19.866	20.066	18.915	19.250	<
	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kuda • Babi • Kambing • Ayam • Itik 	84.087	86.609	89.207	88.900	95.158	102.140	91.017	97.500	<
	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kuda • Babi • Kambing • Ayam • Itik 	1.755	1.843	1.939	2.021	2.089	2.194	1.974	2.250	<
	Produksi Daging (Kg) <ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau 	152.280	182.520	161.370	156.420	172.440	181.981	167.835	182.000	<
	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau 	44.100	29.363	12.600	12.375	18.788	25.408	23.772	50.833	<

RPJMD Kabupaten Manggarai 2011-2015

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
	<ul style="list-style-type: none">• Kambing• Babi• Ayam	9.750 834.908 66.114	2.930 328.253 65.941	3.190 289.744 65.289	4.000 573.413 69.891	7.500 574.493 71.633	8.216 658.894 75.291	5.931 543.284 69.027	11.500 975.000 75.000	< < <
	Konsumsi Daging (Kg/KPT/Tahun) <ul style="list-style-type: none">• Sapi• Kerbau• Kambing• Babi• Ayam Kelompok binaan Peternakan	0,57 0,17 0,04 3,13 0,25 9	0,67 0,11 0,01 1,20 0,24 20	0,59 0,05 0,01 1,05 0,24 31	0,56 0,04 0,01 2,03 0,25 48	0,58 0,06 0,03 1,95 0,24 92	0,65 0,09 0,06 2,01 0,26 105	0,60 0,09 0,03 1,90 0,58 48	1,38 0,63 0,53 3,33 1,59 62	< < < < < <
	Perikanan 1. Konsumsi Ikan (Kg/KPT/Tahun) 2. Produksi Perikanan Tangkap (Kg) 3. Produksi Perikanan Budidaya <ul style="list-style-type: none">• Air Tawar (Kg)• Air Payau (Kg) 4. Produksi Rumput Laut (Kg) 5. Produksi Benih Ikan BBI (Kg) 6. Rumah Tangga Perikanan Budidaya Air Tawar 7. Armada Tangkap (unit) 8. Alat Tangkap (unit) 9. Kelompok Binaan Perikanan Budidaya/ Tangkap (Kelompok)	7,68 2.277.600 17.580 1.480 50.000 42.000 412 512 536 21	10,89 3.302.250 21.980 700 75.000 75.000 503 488 458 43	9,35 2.860.100 27.450 300 250.000 78.000 632 477 684 54	10,31 3.232.350 30.430 790 500.000 85.800 837 421 892 86	10,71 3.515.120 34.940 2.940 285.600 200.000 1.055 577 974 115	9,95 3.406.860 44.564 2.140 708.000 22.155 1.145 691 823 138	10 3.099.047 29.491 1.035 311.433 83.826 764 527 728 76	7 1.964.218 74.632 2.333 133.533 98.833 1.875 613 821 88	> > < < > < < < < <
	Ketahanan Pangan KLPK Bahan Pangan (%): 1. Padi-padian 2. Umbi-umbian 3. Pangan hewani 4. Minyak Lemak 5. Buah/Biji Berminyak 6. Sayur dan Buah	92 10,81 3,09 2,82 1,80 8,10	85,9 7,50 6,68 2,83 1,83 7,97	74,63 9,30 11,85 4,88 1,84 7,86	74,71 7,91 11,95 5,02 2,01 7,52	74,73 7,61 11,96 5,26 2,23 7,28	 80,31 8,63 9,11 4,16 1,74 7,75	92 10,81 7,19 5,81 3,39 7,18	Belum Tercapai Belum Tercapai Melampaui Belum Tercapai Belum Tercapai Belum Tercapai	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
	KEHUTANAN									
	Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan									
	1. Gapong RTK 18	152,5	152,5	152,5	52,5	52,5	52,5	102,5		
	2. Meler Kuwus TRK 111	2.740,3	2.690,3	2.690,3	1.890,3	890,3	1.865,3	2.127,8		
	3. Todo RTK 14	466	416	391	266	241	241	336,83		
	4. Nggalak Rego RTK 103	458,5	458,5	418,5	218,5	218,5	218,5	331,83		
	5. Ramut RTK 15	800	800	800	800	800	800	800		
	Total	4.617,3	4.517,3	4.452,3	3.227,3	3.202,3	3.177,3			
	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan									
	1. Langke Rembong	622,13	572,13	459,38	254,38	177	133,5	369,75		
	2. Ruteng	3.110,75	2.910,75	2.856,75	753,45	590	461	1.780,45		
	3. Wae Rii	1.042,76	942,76	892,76	783,63	725	668,5	842,57		
	4. Reok	4.027,63	3.952,63	3.905,13	3.727,88	3.588	3.541,5	3.790,46		
	5. Satarmese	2.391,52	2.231,52	2.161,02	845	708	657	1.499,01		
	6. Cibal	2.219,32	2.119,32	2.090,32	1.901,57	1.796	1.702	1.971,42		
	7. Satarmese Barat	-	-	-	1.164,60	1.062	913	523,26		
	8. Lelak	-	-	-	875,81	826	715,50	402,88		
	9. Rahong Utara	-	-	-	1.016,54	944	890	475,09		
	Total	13.414,11	12.729,11	12.365,36	11.322,86	10.416	9.682			
	Perkembangan Rehabilitasi Lahan Kritis dalam kawasan hutan									
	1. Gapong RTK 18	-	-	100	-	-	-	16,7		
	2. Meler Kuwus TRK 111	50	-	800	-	-	25	145,8		
	3. Todo RTK 14	50	25	125	25	-	-	37,5		
	4. Nggalak Rego RTK 103	-	40	200	-	-	-	40		
	5. Ramut RTK 15	-	-	-	-	-	-	-		
	Total	100	65	1.225	25	-	25	-		
	Perkembangan Rehabilitasi Lahan Kritis di luar kawasan hutan									
	1. Langke Rembong	50	112,75	205	74,23	43,5	7,88	82,3		
	2. Ruteng	200	54	210,5	172,88	129	55,88	137,11		
	3. Wae Rii	100	50	109,13	55,49	56,5	2,81	62,32		
	4. Reok	75	47,5	177,25	136,74	46,5	62,1	90,84		
	5. Satarmese	160	70,5	151,42	140,15	51	57	105,01		
	6. Cibal	100	29	188,75	102,43	94	3,75	86,32		
	7. Satarmese Barat	-	-	-	102,6	149	120,5	62,01		
	8. Lelak	-	-	-	49,81	110,5	13,38	28,94		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
	9. Rahong Utara Total	- 685	- 363,75	- 1.042,5	72,54 906,87	54 734	57 380,3	30,59		
	PARIWISATA 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Rata-rata lama tinggal (Hari) 3. Rata-rata belanja wisatawan/hari (Rp)	7.454 3 357.390	8.784 3 376.200	11.964 3 396.000	1.974 3 417.000	7.896 3 439.375	9.070 3 461.000	7.856,5 3 407.827,5		
3.	DAYA SAING DAERAH									
3.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah 1. Pengeluaran Konsumsi RT/Kapita 2. Nilai Tukar Petani 3. Pengeluaran Konsumsi nonpangan Fasilitas Wilayah/infrastruktur 1. Ketaatan terhadap RTRW 2. Luas Wilayah Produktif Iklim berinvestasi 3. Angka kriminalitas 4. Jumlah Demonstrasi Sumberdaya Manusia 2. Kualitas Tenaga Kerja 3. Tingkat Ketergantungan	1.317.564 1.019,15	1.898.796 760,58	1.940.256 1.632,13	1.940.256 1.775,9	2.948.808 1.185,8	- -	2.009.136 1.062,26		
3.1	Kemampuan Ekonomi									
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
3.1.2	Peningkatan Daya Saing Komoditi Perkebunan Alat Pengolah Komoditi Perkebunan (unit) • UPH Jambu Mete • UPH Kopi • UPH Kakao • UPH Kemiri	- - - -	1 2 - 1	- 2 1 -	1 2 - 1	- 2 1 -	2 - - 3	2 10 2 -	3 10 2 -	Belum Tercapai Sesuai Sesuai Sesuai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Hasil Analisis							Standar RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Capaian		
3.1.2.1	Kelembagaan Petani dan Kemitrausahaan (orang) <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Tani Binaan • Kelompok Tani Baru • Peningkatan Kelas Kelompok Tani Dari Pemula ke Lanjutan • Peningkatan Kelas Kelompok Tani Dari Lanjutan ke Madya • Pembinaan Asosiasi Petani Perkebunan (orang) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kopi ▪ Fanili ▪ Cengkeh 	-	150	150	150	150	150	750		Sesuai Sesuai
		-	50	50	50	50	50	250		
		-	25	25	30	30	30	375		
		-	-	-	5	5	5	20		
				1	-	9	-	1		
				-		-		9		
3.2.2.1	Luas wilayah produktif	376.492	376.492	376.492	376.492	145.414	-	275.230,33		
3.2.2.2	Luas Lahan Budidaya	157.495	157.972	166.148	165.640	56.324	-	117.263,16		

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah sebagai penjabaran Panca Program Pembangunan Kabupaten Manggarai berisikan langkah-langkah strategis dan prioritas pembangunan daerah dan dicerminkan ke dalam biaya setiap tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga sebagai salah satu titik ungkit mendongkrak perekonomian daerah melalui investasi sektor pemerintah berakumulasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan terbatasnya investasi sektor swasta yang berasal dari rumah tangga perusahaan dalam membiayai pembangunan daerah, maka peran APBD semakin dominan dalam meningkatkan kinerja perekonomian daerah. Dengan demikian, pengelolaan anggaran sektor pemerintah benar-benar dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip anggaran yang efisien, efektif, demokratis dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakekatnya merupakan salah satu alat instrument yang dipakai sebagai tolok ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu APBD hendaknya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sehingga terpenuhi tuntutan akan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Pengelolaan keuangan daerah juga dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas fiskal yang dimiliki, tingkat ketergantungan fiskal, realisasi belanja yang menggambarkan tentang keterkaitan aspek perencanaan dan penganggaran serta bagaimana pengelolaan kas telah dilakukan untuk menjamin likuiditas dan pemanfaatan unsur pembiayaan secara efisien dan efektif. Karena itu pengelolaan keuangan daerah mencakup 3 (tiga) aspek keuangan daerah yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rasio pendapatan, belanja dan pembiayaan menggambarkan bagaimana wujud pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dinyatakan dalam total penerimaan daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2006 s/d Tahun 2010 Kabupaten Manggarai

No	Uraian	Tahun (Rp.)					Rata-rata Pertum- buhan (%)
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	PENDAPATAN	401,183,335,064.00	490,992,665,762.00	527,715,591,198.00	385,356,510,656.00	471,542,731,093.00	
	Pertumbuhan Pendapatan daerah (%)		22.39	7.48	(26.98)	22.37	6.31
1.1	Pendapatan Asli Daerah	17,325,208,456.00	17,404,042,314.00	17,589,308,701.00	19,453,939,349.00	30,381,955,211.00	
	Pertumbuhan PAD (%)		0.46	1.06	10.60	56.17	17.07
	Kontribusi PAD/Pend.Daerah (%)	4.32	3.54	3.33	5.05	6.44	4.54
1.1.1	Pajak Daerah	3,172,642,717.00	4,454,477,173.00	3,594,426,992.00	4,166,374,069.00	3,314,836,118.00	
1.1.2	Retribusi Daerah	4,512,946,936.00	4,889,402,229.00	6,671,738,904.00	9,629,133,459.00	18,501,208,540.00	
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	342,347,153.00	482,570,466.00	580,597,081.00	688,026,271.00	688,026,271.00	
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	9,297,271,650.00	7,577,592,446.00	6,742,545,724.00	4,970,405,550.00	7,877,884,282.00	
1.2	Dana Perimbangan	381,045,114,108.00	459,616,695,383.00	504,204,682,497.00	365,902,571,307.00	358,099,517,414.00	
	Pertumbuhan Dana Perimbangan (%)		20.62	9.70	(27.43)	(2.13)	0.19
	Kontribusi DP/Pend.Daerah (%)	94.98	93.61	95.54	94.95	75.94	91.01
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	19,887,778,091.00	21,147,334,157.00	22,720,436,339.00	16,553,854,728.00	15,901,974,414.00	
1.2.1	Dana bagi hasil sumber daya alam	380,398,596.00	460,656,554.00	244,661,984.00	299,534,619.00		
1.2.2	Dana alokasi umum	322,608,000,000.00	348,963,000,000.00	382,534,840,000.00	232,277,815,000.00	299,504,443,000.00	
1.2.3	Dana alokasi khusus	34,850,000,000.00	50,270,500,000.00	65,116,000,000.00	66,221,043,000.00	42,693,100,000.00	
	Transfer Pem. Pusat lainnya		35,571,636,000.00	30,052,673,400.00	43,620,169,000.00		
	Transfer Pem. Propinsi	3,318,937,421.00	3,203,568,672.00	3,536,070,774.00	6,930,154,960.00		
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2,813,012,500.00	13,971,928,065.00	5,921,600,000.00	-	83,061,258,468.00	
	Pertumbuhan lain2 pend.yg sah (%)		396.69	(57.62)	(100.00)		59.77

No	Uraian	Tahun (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2006	2007	2008	2009	2010	
	Kontribusi /Pend.Daerah (%)	0.70	2.85	1.12	-	17.61	4.46
1.3.1	Hibah	2,813,012,500.00	11,425,650,000.00	3,500,000,000.00		-	
1.3.2	Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya					-	
1.3.3	Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah (DPDF & PPD)					4,788,938,668.00	
1.3.4	Bantuan keuangan dari propinsi						
1.3.5	Penerimaan tunjangan Profesi Guru PNSD					34,093,881,000.00	
1.3.6	Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD					1,917,250,000.00	
1.3.7	Penerimaan Dana Percepatan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)					7,151,188,800.00	
1.3.8	Penerimaan Dana Penguatan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)					6,642,000,000.00	
1.3.9	Pendapatan lainnya		2,546,278,065.00	2,421,600,000.00		3,968,000,000.00	

Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Dari tabel 3.1, dapat diketahui, bahwa :

1. Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Manggarai selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2007 meningkat sebesar 22.39% dari Rp. 401.183.335.064 pada tahun 2006 menjadi Rp. 490.992.665.762 pada tahun 2007. Pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 527.715.591.198 atau naik 7.48%. Selanjutnya pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 26.98% menjadi Rp. 385.356.510.656, hal ini disebabkan pemekaran Kabupaten Manggarai menjadi kabupaten manggarai dan kabupaten manggarai timur yang berdampak pada penurunan penerimaan dana perimbangan dan pada tahun 2010 meningkat sebesar 22.37% menjadi Rp. 471,542,731,093.00. Dari perkembangan tersebut, maka rata-rata laju pertumbuhan pendapatan daerah kabupaten manggarai adalah 6.31% per tahun.
2. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, pertumbuhan PAD Kabupaten Manggarai dari tahun 2006 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan rata-rata 17.07% yaitu dari Rp. 17.325.208.456 pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 30.381.955.211 pada tahun 2010. Meskipun disadari bahwa selama periode tersebut perubahan PAD yang terjadi setiap tahun tidak sama, namun kecenderungan meningkat terus dari tahun ke tahun.

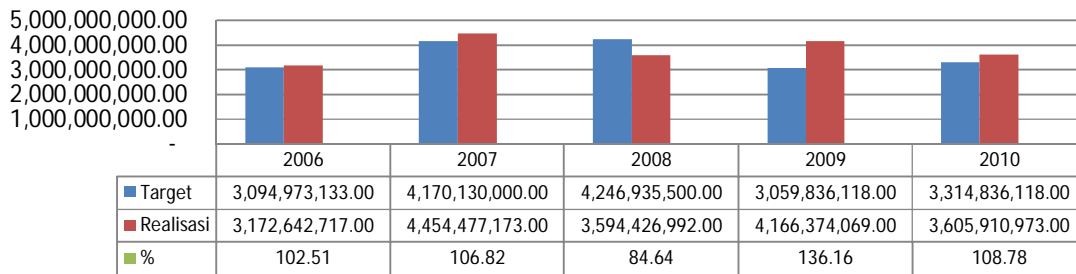
Selama tahun 2006 – 2010 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata 4.54%. Hal ini memperlihatkan peranan yang sangat kecil.

Dengan pertumbuhan positif yang cenderung naik dan kontribusi PAD masih sangat kecil diharapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD terus ditingkatkan untuk mengembangkan peluang-peluang ekonomi yang potensial di masyarakat menjadi subyek/obyek pajak dan retribusi daerah.

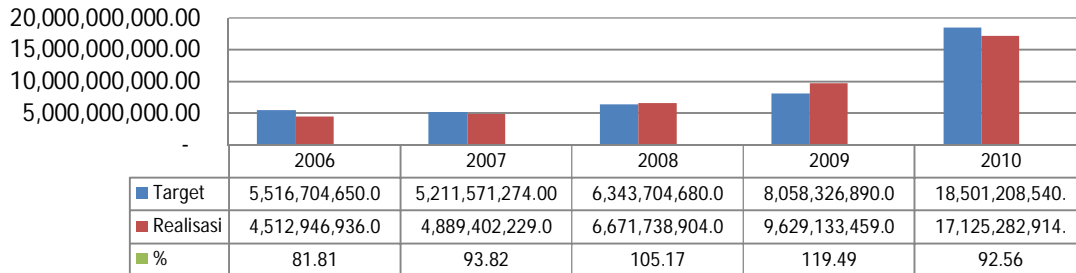
Salah satu potensi besar penerimaan PAD sejak diberlakukannya undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (perkotaan dan pedesaan) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dimana penerimaan PBB dan BPHTB akan dijadikan pajak daerah.

Perkembangan komponen-komponen PAD, dapat dilihat pada diagram berikut :

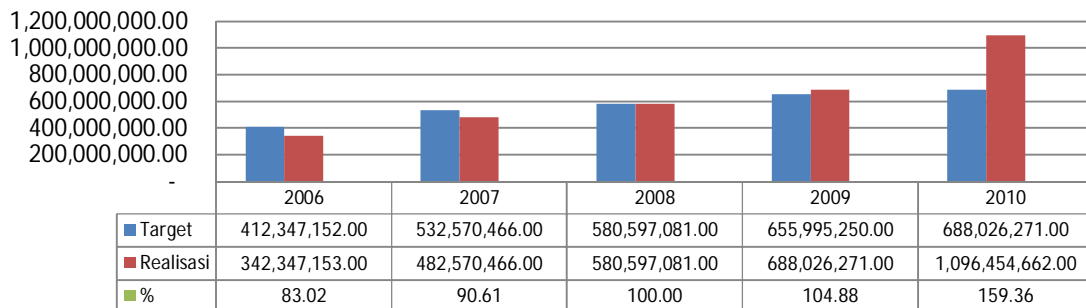
**Diagram 3.1. Target dan Realisasi Pajak Daerah
2006-2010**



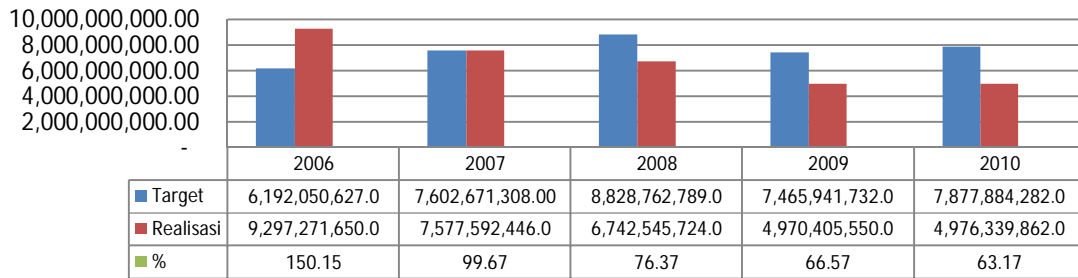
**Diagram 3.2. Target dan Realisasi Retribusi Daerah
2006-2010**



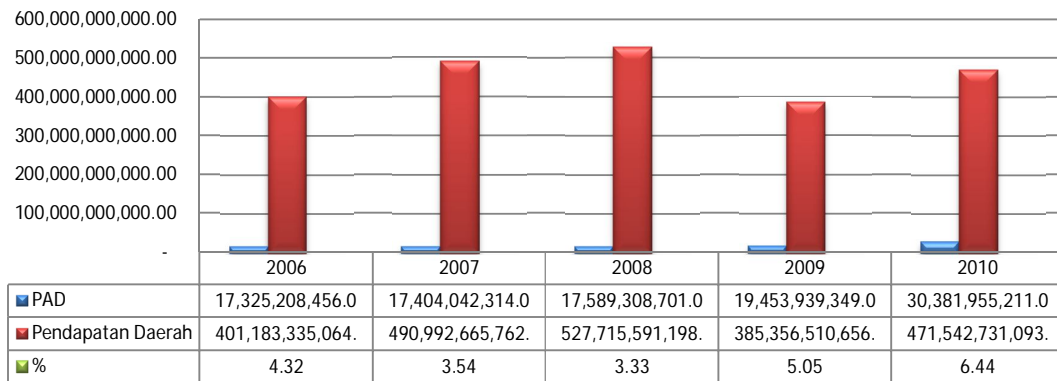
**Diagram 3.3. Target dan Realisasi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
2006-2010**



**Diagram 3.4. Target dan Realisasi
Lain-lain PAD yang sah
2006-2010**



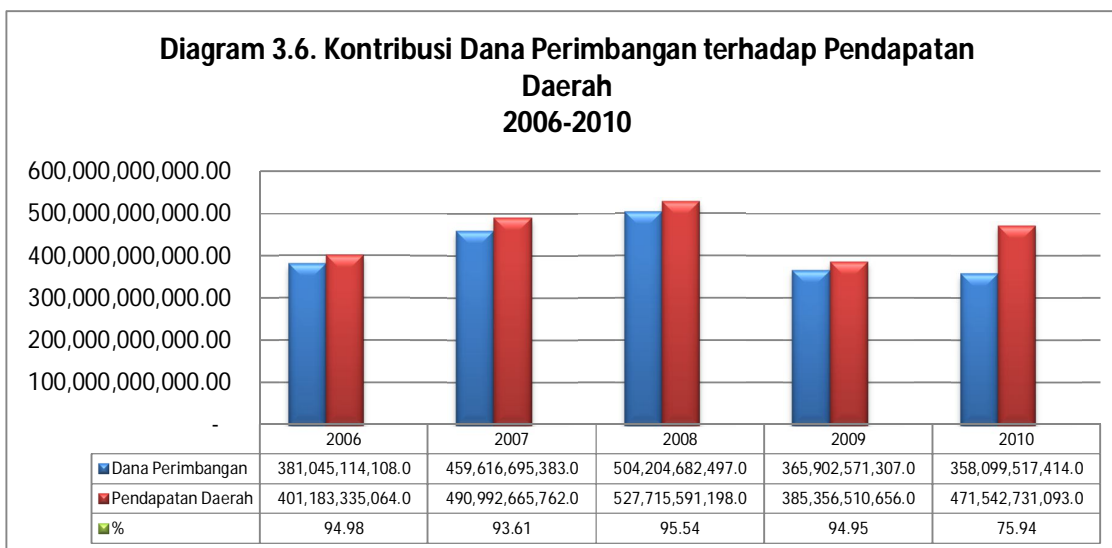
**Diagram 3.5. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
2006-2010**



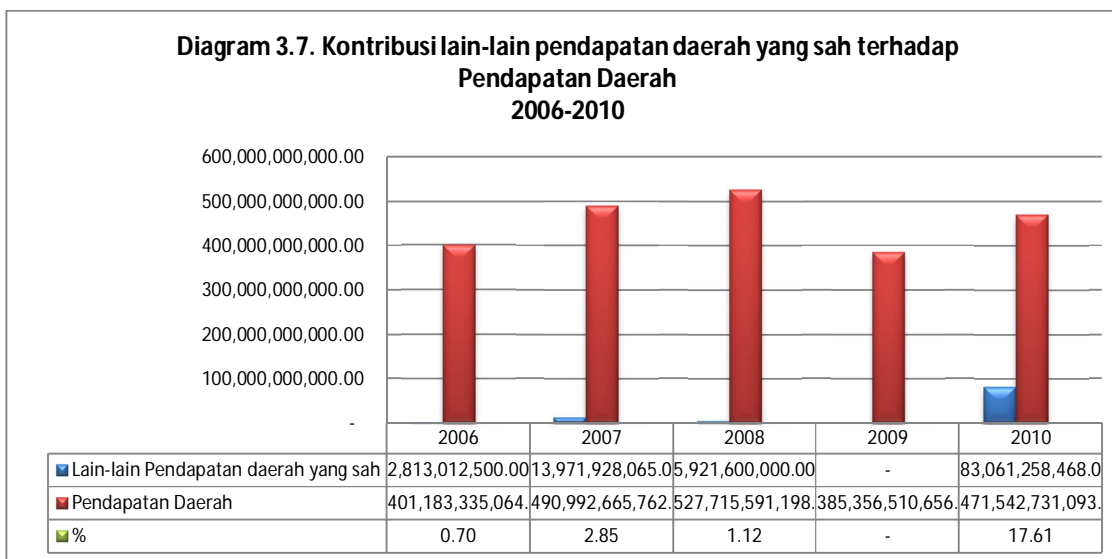
3. Pada komponen dana perimbangan, menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata 0.19 % pertahun, hal tersebut sebagai dampak dari pemekaran kabupaten manggarai menjadi kabupaten manggarai dan kabupaten manggarai timur pada tahun 2008. Sehingga pada tahun 2009 dana perimbangan turun sebesar 27.43% yaitu dari Rp. 504.204.682.497 menjadi Rp. 365.902.571.307. dan pada tahun 2010 turun 2.13% menjadi Rp. 358.099.517.414

Dilihat dari rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah selama tahun 2006 – 2010 yaitu 91.01%, nampak bahwa dana perimbangan masih dominan besarnya terhadap total pendapatan daerah setiap tahun, dan menggambarkan bahwa Kabupaten Manggarai kurang memiliki kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, padahal masih banyak potensi di atas dan di bawah permukaan yang potensial dikelola untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kontribusi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada diagram berikut :



4. Pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata 59.77% pertahun, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah rata-rata 4.46%.



3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui

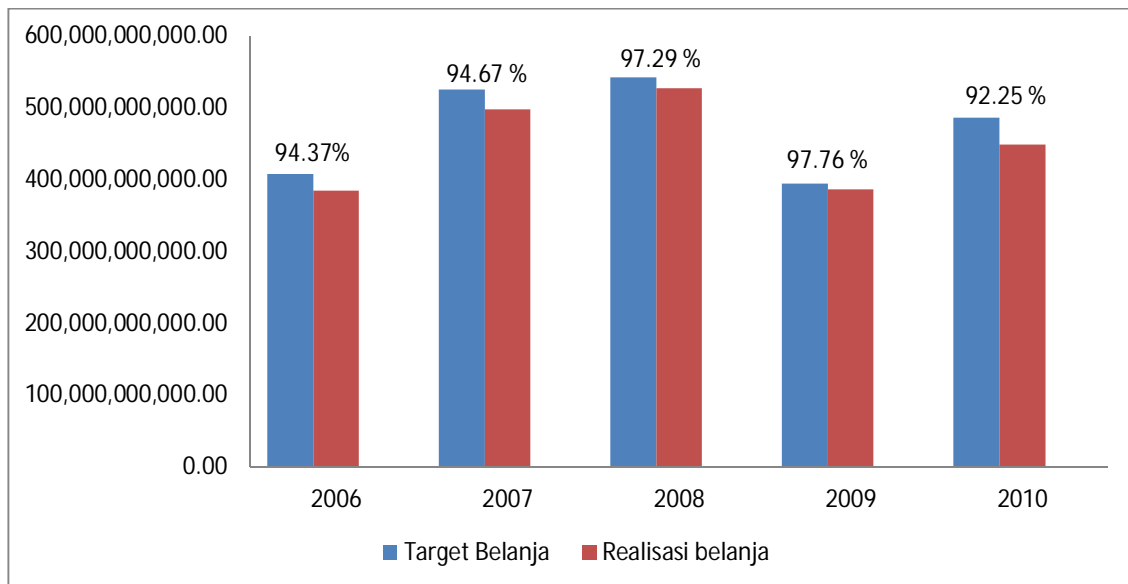
sampai sejauhmana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Untuk menyimak besarnya belanja daerah selama tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2: Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2006 – 2010

Tahun	Target Belanja (Rp)	Realisasi belanja (Rp)	(%)	Pertumbuhan (%)
2006	408,132,603,858.00	385,172,681,692.00	94.37	
2007	525,859,718,131.00	497,818,598,456.00	94.67	29.25
2008	542,310,947,530.00	527,617,506,818.00	97.29	5.99
2009	395,267,437,754.00	386,395,926,019.00	97.76	(26.77)
2010	486,188,592,010.00	448,490,789,828.00	92.25	16.07
Rata-rata				6.13

Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Diagram 3.8. Target dan Realisasi Belanja Daerah 2006 - 2010



Belanja daerah mengalami peningkatan sepanjang 2006 – 2008, kecuali tahun 2009 mengalami penurunan 26.77% sehingga rata-rata pertumbuhan belanja 6.13% pertahun. Penurunan tersebut sebagai dampak pemekaran kabupaten, dimana pendapatan dari dana perimbangan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membiayai belanja berkurang.

Belanja daerah juga diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan public disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk kepentingan ini, gambaran tentang realisasi belanja daerah

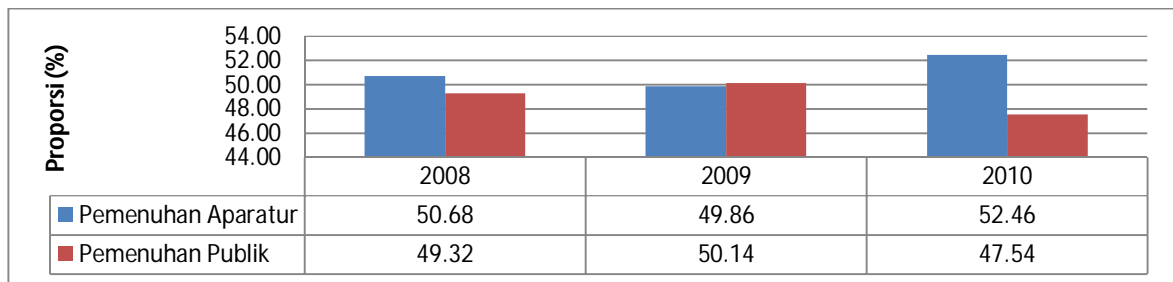
dapat diamati melalui struktur belanja daerah berdasarkan penerima manfaat, yaitu untuk pemenuhan aparatur dan pemenuhan publik, sebagaimana tampak dalam Tabel berikut.

Tabel 3.3
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Manggarai
Berdasarkan Penerima Manfaat

No	Uraian	2008		2009		2010	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pemenuhan Aparatur	267,415,721,704.00	50.68	192,664,711,676.00	49.86	235,287,165,395.00	52.46
1	Belanja Pegawai (Belanja Langsung dan Tidak Langsung)	267,415,721,704.00		192,664,711,676.00		235,287,165,395.00	
II	Pemenuhan Publik	260,201,785,114.00	49.32	193,731,214,343.00	50.14	213,203,624,433.00	47.54
1	Belanja Hibah	1,008,802,800.00		34,792,855,861.00		14,731,570,000.00	
2	Belanja Bantuan Sosial	7,444,200,000.00		2,286,058,563.00		3,049,214,040.00	
3	Belanja Bagi Hasil	-		-		-	
4	Belanja Bantuan Keuangan	5,000,000,000.00		13,040,320,000.00		19,698,330,000.00	
5	Belanja Tidak Terduga	33,881,001.00		107,526,740.00		963,118,133.00	
6	Belanja Barang dan Jasa	70,705,651,723.00		46,913,732,044.00		65,412,470,466.00	
7	Belanja Modal	176,009,249,590.00		96,590,721,135.00		109,348,921,794.00	
	Total Belanja	527,617,506,818.00	100	386,395,926,019.00	100	448,490,789,828.00	100

Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

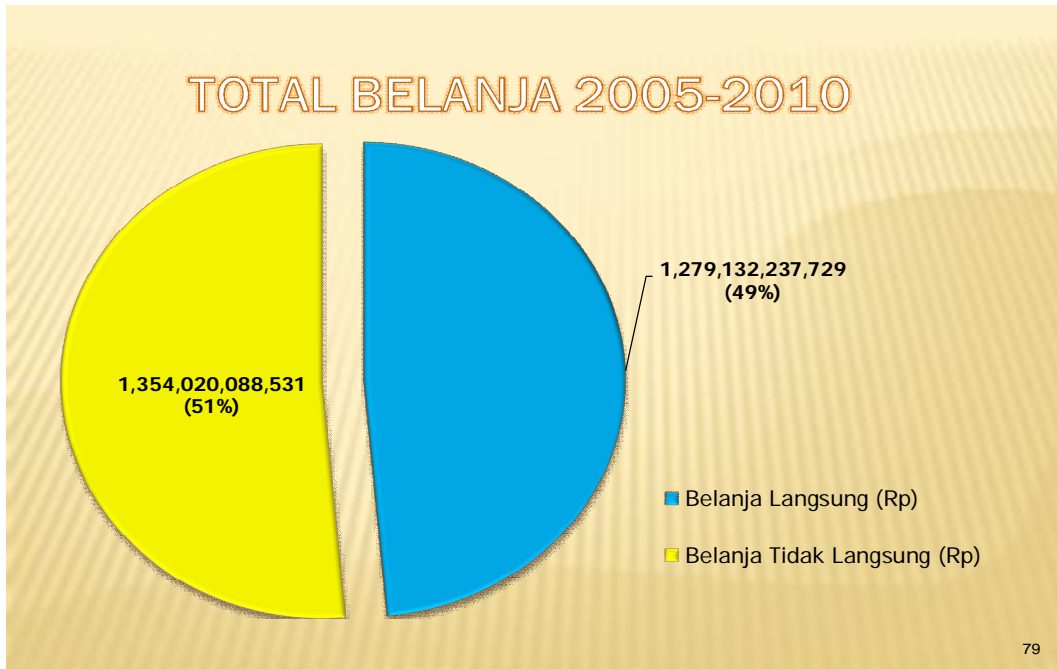
Diagram 3.9. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Manggarai
Berdasarkan Penerima Manfaat



Tabel 3.3 menunjukkan bahwa, tahun 2008 dan tahun 2010 pemenuhan aparatur lebih tinggi dibandingkan dengan pemenuhan publik tetapi masih pada batasan yang wajar, kecuali pada tahun 2009 pemenuhan public lebih tinggi (50,14%) dibandingkan pemenuhan aparatur (49.86%). Kedepan pemerintah kabupaten manggarai mempunyai komitmen yang tinggi untuk membalik keadaan. Porsi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur harus mendapat porsi yang dominan, sedangkan biaya *overhead cost* pemerintah harus ditekan seminimal mungkin.

Pada diagram berikut terlihat total belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai selama 5 (lima) Tahun (2005-2010) dengan komposisi antara belanja langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

Diagram 3.10. Total Belanja 2005 – 2010



3.1.1.2. Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan suatu manajemen kas yang mampu memanfaatkan unsur penerimaan dan pengeluaran secara efisien dan efektif serta pada sisi lain menciptakan likuiditas keuangan yang memadai bagi pemerintah. Tiga komponen pokok yang perlu mendapat perhatian dalam pembiayaan, yaitu surplus/defisit anggaran, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi pembiayaan daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai, 2006 - 2010

URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010
PEMBIAYAAN					
Surplus / Defisit	16.010.653.372	(6.823.832.694)	98.084.380	(1.039.415.363)	20.405.835.893
Penerimaan Pembiayaan					
SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	15.270.749.766	29.451.267.118	21.377.434.424	20.185.276.280	18.145.860.917
Pencairan Dana Cadangan				-	

URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				-	
Penerimaan Pinjaman Daerah				-	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	250.000.000			-	
Penerimaan Piutang Daerah				-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	15.520.749.766	29.451.267.118	21.377.434.424	20.185.276.280	18.145.860.917
Pengeluaran Pembiayaan					
Pembentukan Dana Cadangan				-	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.300.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang				-	
Pemberian Pinjaman Daerah		250.000.000		-	
Pembayaran Utang Jatuh Tempo	780.136.020			-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.080.136.020	1.250.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	13.440.613.746	28.201.267.118	20.377.434.424	19.185.276.280	14.145.860.917

Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Selisih antara pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2006-2010 menghasilkan defisit anggaran. Dari sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan tahun 2006 – 2010 berasal dari SILPA tahun lalu dan penerimaan kembali pinjaman. Pada tahun 2006, total penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 15.520.749.766 dan terus mengalami peningkatan menjadi Rp. 158.145.860.917 (2010). SILPA yang besar pada satu sisi memperkuat likuiditas dan pada sisi lain menghilangkan peluang pemerintah untuk melayani masyarakat secara optimal.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan tahun 2006-2010 digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pembayaran Utang Jatuh Tempo. Pada tahun 2006, total pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2.080.136.020 kemudian menjadi Rp. 4.000.000.000 (2010). Hal ini disebabkan karena penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah meningkat dari Rp. 1.000.000.000 menjadi Rp. 4.000.000.000

c. Pembiayaan Netto

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tahun 2006-2010 menghasilkan pembiayaan netto yang positif. Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi dan efisiensi pemanfaatan SILPA.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yaitu posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Informasi keuangan di dalam neraca dapat memberikan manfaat, antara lain, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola;
2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
3. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
4. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan

Perkembangan neraca daerah Kabupaten Manggarai, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Manggarai

NO	U R A I A N	2006	2007	2008	2009	r (%)
1	ASET					
2	ASET LANCAR					
3	Kas di Kas Daerah	26,395,383,278.00	17,110,183,036.00	15,637,158,400.00	15,391,966,855.00	
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	3,264,501,327.00	4,271,815,514.00	4,838,360,404.00	2,753,894,062.00	
5	kas di Bendahara Penerimaan	0.00	12,290,000.00	0.00	0.00	
6	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Piutang Pajak	585,257,175.00	275,235,010.00	495,947,143.00	278,212,358.00	
8	Piutang Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Piutang Bagi Hasil dari Propinsi	1,302,479,844.00	864,579,514.00	2,269,665,692.00	448,058,151.00	
10	Bagian Lancar TP/TGR	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Piutang Lainnya	668,269,312.00	770,226,658.00	753,060,606.00	662,225,269.00	
12	Persediaan	2,999,412,318.00	855,193,250.00	2,161,760,006.00	1,101,099,121.00	
13	Jumlah Aset Lancar	35,215,303,254.00	24,159,522,982.00	26,155,952,251.00	20,635,455,816.00	(14.75)
14	INVESTASI JANGKA PANJANG					
15	INVESTASI NON PERMANEN					
16	Pinjaman Modal-Dana Bergulir	5,814,283,414.00	6,342,804,290.00	5,374,374,852.00	3,188,945,070.00	
17	Jumlah Investasi Non Permanen	5,814,283,414.00	6,342,804,290.00	5,374,374,852.00	3,188,945,070.00	
18	INVESTASI PERMANEN					
19	Penyertaan pada PDAM	8,769,833,249.00	15,305,454,251.00	15,305,454,251.00	15,305,454,251.00	
20	Penyertaan pada BPD NTT	2,815,740,000.00	3,815,740,000.00	4,815,740,000.00	5,815,740,000.00	
21	Penyertaan pada PD Komodo Jaya	572,497,051.75	413,540,076.25	413,540,076.25	413,540,076.25	
22	Jumlah Investasi Permanen	12,158,070,300.75	19,534,734,327.25	20,534,734,327.25	21,534,734,327.25	
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang	17,972,353,714.75	25,877,538,617.25	25,909,109,179.25	24,723,679,397.25	19.60
24	ASET TETAP					
25	Tanah	238,732,693,443.00	240,600,295,993.00	209,078,245,993.00	209,265,645,993.00	
26	Pralatan dan Mesin	51,472,112,403.00	72,658,840,063.00	92,938,996,487.00	109,877,396,399.00	

NO	U R A I A N	2006	2007	2008	2009	r (%)
27	Gedung dan Bangunan	396,849,165,049.0 0	464,558,888,166.0 0	396,905,836,501.00	408,670,432,550.00	
28	Jalan, Irigasi dan Jaringan	428,876,743,607.0 0	543,262,545,362.0 0	498,869,213,799.21	566,494,560,773.21	
29	Aset Tetap lainnya	3,218,322,543.00	3,923,483,543.00	13,857,147,043.00	13,932,125,243.00	
30	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,415,524,829.00	27,178,656,472.00	638,869,823.00	1,292,095,000.00	
31	Akumulasi Penyusutan		0.00	0.00		
32	Jumlah Aset Tetap	1,120,564,561,874.00	1,352,182,709,599.00	1,212,288,309,646.21	1,309,532,255,958.21	4.59
33	DANA CADANGAN					
34	Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	Jumlah Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	ASET LAINNYA					
37	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	Tuntutan Perbendaharaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	Aset Tak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	Aset Lainnya	710,774,997.44	9,171,781,616.88	8,577,156,217.90	10,732,096,176.88	
43	Jumlah Aset Lainnya	710,774,997.44	9,171,781,616.88	8,577,156,217.90	10,732,096,176.88	403.01
44	JUMLAH ASET	1,174,462,993,840.19	1,411,391,552,815.13	1,272,930,527,294.36	1,365,623,487,348.34	5.88
45	KEWAJIBAN					
46	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
47	Utang PFK	208,617,487.00	4,564,126.00	0.00	0.00	
48	Utang Jangka Pendek Lainnya	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
49	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	253,617,487.00	4,564,126.00	0.00	0.00	
50	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
51	Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	Utang Dalam Negeri-Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	Jumlah Kewajiban Jangka	0.00	0.00	0.00	0.00	

NO	U R A I A N Panjang	2006	2007	2008	2009	r (%)
55	Jumlah Kewajiban	253,617,487.00	4,564,126.00	0.00	0.00	
56	EKUITAS DANA					
57	EKUITAS DANA LANCAR					
58	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	29,451,267,118.00	21,377,434,424.00	20,475,518,804.00	18,145,860,917.00	
59	Pendapatan yang ditangguhkan	0.00	12,290,000.00	0.00	0.00	
60	Cadangan Piutang	2,556,006,331.00	1,910,041,182.00	3,518,673,441.00	1,388,495,778.00	
61	Cadangan Persediaan	2,999,412,318.00	855,193,250.00	2,161,760,006.00	1,101,099,121.00	
62	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		45,000,000.00	0.00	0.00	
63	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	34,961,685,767.00	24,154,958,856.00	26,155,952,251.00	20,635,455,816.00	
64	EKUITAS DANA INVESTASI					
65	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	17,972,353,714.75	25,877,538,617.25	25,909,109,179.25	24,723,679,397.25	
66	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1,120,564,561,874.00	1,352,182,709,599.00	1,212,288,309,646.21	1,309,532,255,958.21	
67	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	710,774,997.44	9,171,781,616.88	8,577,156,217.90	10,732,096,176.88	
68	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		0.00	0.00	0.00	
69	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	1,139,247,690,586.19	1,387,232,029,833.13	1,246,774,575,043.36	1,344,988,031,532.34	
70	EKUITAS DANA CADANGAN					
71	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	
72	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	
73	Jumlah Ekuitas Dana	1,174,209,376,353.19	1,411,386,988,689.13	1,272,930,527,294.36	1,365,623,487,348.34	5.88
74	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,174,462,993,840.19	1,411,391,552,815.13	1,272,930,527,294.36	1,365,623,487,348.34	5.88

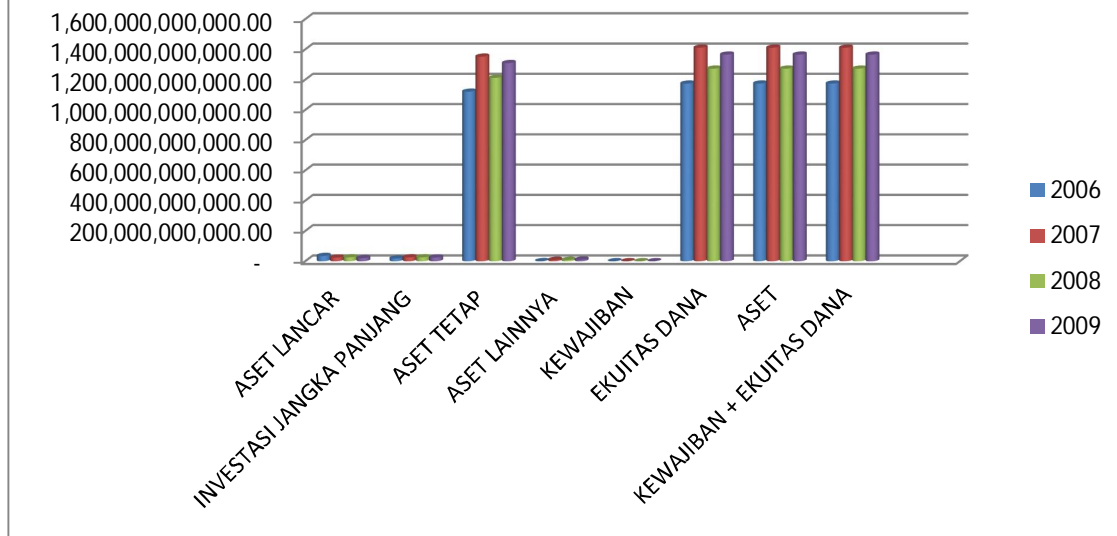
Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Tabel 3.6. Ringkasan Perkembangan NERACA DAERAH 2006-2008

NO	URAIAN	2006	2007	2008	2009	r (%)
I	ASET					
1	ASET LANCAR	35,215,303,254.00	24,159,522,982.00	26,155,952,251.00	20,635,455,816.00	(14.75)
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	17,972,353,714.75	25,877,538,617.25	25,909,109,179.25	24,723,679,397.25	19.6
3	ASET TETAP	1,120,564,561,874.00	1,352,182,709,599.00	1,212,288,309,646.21	1,309,532,255,958.21	4.59
4	ASET LAINNYA	710,774,997.44	9,171,781,616.88	8,577,156,218.74	10,732,096,176.88	403.01
	JUMLAH ASET	1,174,462,993,840.19	1,411,391,552,815.13	1,272,930,527,295.20	1,365,623,487,348.34	5.88
II	KEWAJIBAN	253,617,487.00	4,564,126.00	-	-	-
III	EKUITAS DANA	1,174,209,376,353.19	1,411,386,988,689.13	1,272,930,527,295.20	1,365,623,487,348.34	5.88
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,174,462,993,840.19	1,411,391,552,815.13	1,272,930,527,295.20	1,365,623,487,348.34	5.88

Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

**Diagram 3.12. PERKEMBANGAN NERACA DAERAH
2006-2010**



Dari table diatas dapat diketahui, bahwa ekuitas dana yang menggambarkan kekayaan bersih pemerintah kabupaten manggarai menunjukkan **pertumbuhan positif 5.88 %** dengan nilai total ekuitas dana keadaan sampai dengan 31 desember 2009 sebesar **Rp. 1.365.623.487.348,34**. Ekuitas dana tersebut terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Dari perkembangan neraca daerah tersebut, juga diketahui bahwa pemerintah kabupaten manggarai **tidak mempunyai kewajiban**, dimana kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana selama tahun 2006-2010, terkait erat dengan proporsi penggunaan anggaran (belanja) dan pembiayaan.

Analisis dilakukan terhadap proporsi belanja , yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja, juga menganalisis pembiayaan daerah, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

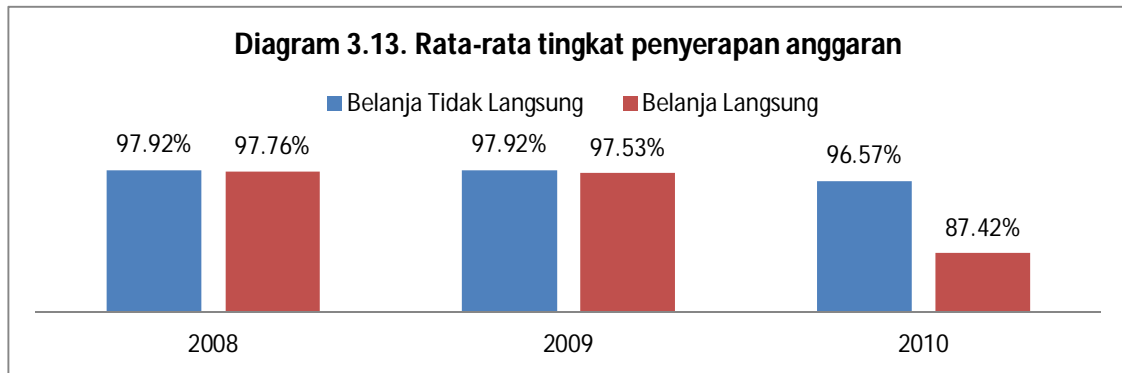
Komposisi belanja daerah yang didasarkan pada prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pada dasarnya mengacu kepada evaluasi atas berbagai perkembangan pembangunan yang telah dicapai dan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan provinsi dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dan Forum Musrenbang. Atas berbagai prioritas tersebut, ditentukan sasaran-sasaran yang mungkin dicapai serta program dan SKPD yang sesuai untuk mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan.

a. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Tabel 3.7. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Manggarai Tahun 2008 – 2010

No	Uraian	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
A	Belanja Tidak Langsung	97,92	97,92	96.57
B	Belanja Langsung	97,76	97,53	87.42

Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010



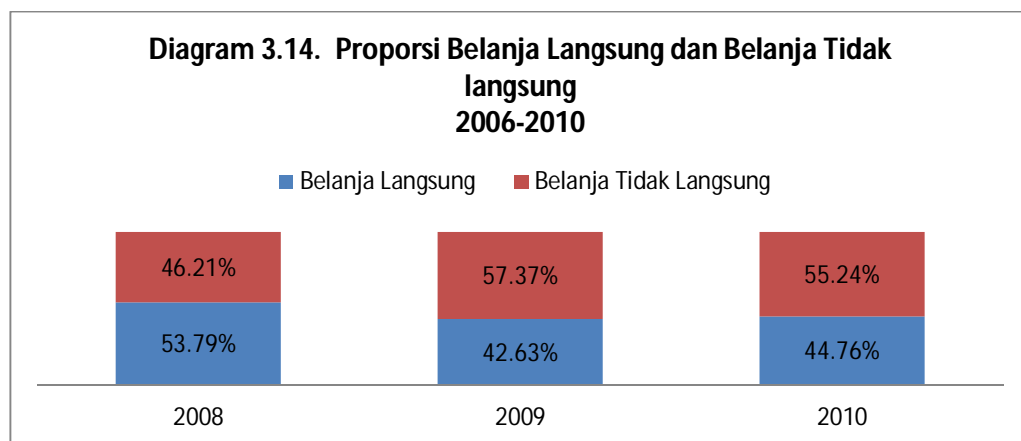
Analisis rasio realisasi belanja di atas menunjukkan **rata-rata tingkat penyerapan** adalah lebih dari 90%, hal ini menunjukkan tingkat penyerapan dana yang optimal, kecuali tahun 2010, realisasi belanja langsung 87.42% karena masih merupakan data sementara keadaan per desember 2010. Kedepan diharapkan penyerapan anggaran khususnya belanja yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan public dapat lebih optimal sehingga sesuai kebijakan umum anggaran.

b. Analisis proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung :

Tabel 3.8. Analisis Proporsi Belanja Kabupaten Manggarai

No	Tahun	Belanja Langsung (BL) (Rp)	Belanja Tidak Langsung (BTL) (Rp)	Total Belanja (Rp)	Prosentase	
					BL	BTL
1	2008	283.800.275.371	243.817.231.447	527.617.506.818	53.79	46.21
2	2009	164.725.499.654	221.670.426.365	386.395.926.019	42.63	57.37
3	2010	200.733.982.992	247.756.806.836	448.490.789.828	44.76	55.24

Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010



Dari table di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 rasio belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 rasio belanja masih jauh dari keseimbangan (keserasian) karena belanja tidak langsung masih mendominasi. Sedangkan kondisi ideal yang diharapkan adalah belanja langsung (terutama yang bermanfaat langsung bagi publik) yang lebih besar dan semakin lebih besar dari belanja tidak langsung.

Proporsi Belanja Tidak Langsung yang lebih besar dari Belanja Langsung antara lain disebabkan oleh :

- Pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahun mengalami peningkatan
- Kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah
- Kebijakan pemerintah pusat terhadap dana-daana transfer yang peruntukan semestinya pada komponen belanja langsung tetapi diarahkan untuk belanja tidak langsung.

Contoh : Hibah dan DAK Pendidikan

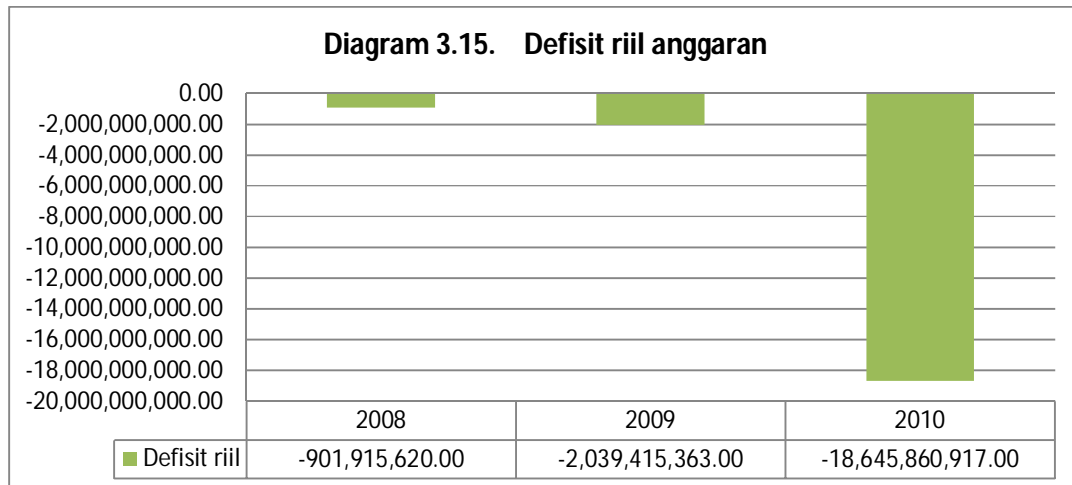
Kedepan proporsi belanja diharapkan didominasi oleh belanja langsung, terutama kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan public.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Tabel 3.9. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manggarai

NO	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	527,715,591,198.00	385,356,510,656.00	471,542,731,093.00
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	527,617,506,818.00	386,395,926,019.00	486,188,592,010.00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	4,000,000,000.00
	Defisit riil	(901,915,620.00)	(2,039,415,363.00)	(18,645,860,917.00)

Ket : Data tahun 2010 merupakan data target pendapatan, belanja dan pengeluaran pembiayaan, karena perhitungan APBD 2010 belum selesai dilaksanakan, sehingga diasumsikan target tersebut dapat direalisasikan.



Dari table diatas, dapat diketahui, bahwa deficit tahun 2008 sampai tahun 2009 semakin besar, hal ini terjadi karena besarnya belanja dan pengeluaran pembiayaan melebihi realisasi pendapatan daerah.

Komposisi penutup deficit riil tersebut, digambarkan pada table berikut :

Tabel 3.10. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	4.22	10.10	97.32
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	2.68
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	95.78	89.90	-

Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Dari tabel diatas, diketahui bahwa penutup defisit riil, adalah :

1. Tahun 2008 : sebesar 4.22 % oleh SiLPA dan 95.78% merupakan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan
2. Tahun 2009 : sebesar 10.10 % oleh SiLPA dan 89.90% merupakan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan
3. Tahun 2010 : sebesar 97.32 % oleh SiLPA dan 2.68% oleh Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Tabel 3.11. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	2008		2009		2010	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1.	Jumlah SILPA	20,475,518,804.00	100	20,185,276,280.00	100	18,145,860,917.00	100.00
2.	Pelampauan penerimaan PAD			213,839,359.00	1.06		-
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	4,807,677,733.00	23.48	3,510,334,653.00	17.39		-
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	3,385,091,708.00	16.53	11,042,500,297.00	54.71		-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	12,282,749,363.00	59.99	5,418,601,971.00	26.84	18,145,860,917.00	100.00
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7.	Kegiatan lanjutan						

Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Ket : Data tahun 2010 merupakan data SILPA sesuai target pendapatan, karena perhitungan APBD 2010 belum selesai dilaksanakan, sehingga diasumsikan SILPA diperoleh dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa tahun 2008, proporsi realisasi SILPA sebesar 59,99% diperoleh dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, tahun 2009 sebesar 54,71% diperoleh dari pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan tahun 2010 sebesar 100% diperoleh dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Kedepan diharapkan penyumbang terbesar dari SILPA adalah pelampauan penerimaan pendapatan daerah, dengan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Dalam menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten manggarai selama 5 tahun kedepan dilakukan analisis kerangka pendanaan yang terdiri dari analisis pengeluaran periodic wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Analisis pengeluaran ini mencakup :

1. Belanja tidak langsung, antara lain : Belanja gaji dan tunjangan, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, belanja bunga dan belanja bagi hasil
2. Belanja langsung, antara lain : Belanja Honorarium PNS, Belanja beasiswa pendidikan PNS, Belanja jasa kantor , Belanja sewa
3. Pembiayaan pengeluaran, antara lain : Pembentukan dana cadangan , Pembayaran pokok utang

Tabel 3.12. Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Manggarai

No	Uraian	Tahun			
		2008 Rp.	2009 Rp.	2010 Rp.	Rata-rata Pertumbuhan %
A	Belanja Tidak Langsung	230,429,562,170.00	171,443,665,201.00	214,367,939,767.00	
	Pertumbuhan		(25.60)	25.04	(0.28)
	<i>Terdiri dari :</i>				
1	<i>Belanja Gaji dan Tunjangan</i>				
2	<i>Belanja Penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH</i>				
3	<i>Belanja Bunga</i>				
4	<i>Belanja bagi hasil</i>				
B	Belanja Langsung	107,691,811,257.00	28,134,778,519.00	95,057,016,214.00	
	Pertumbuhan		(73.87)	237.86	81.99
	<i>Terdiri dari :</i>				
1	<i>Belanja Honorarium PNS</i>				
2	<i>Belanja beasiswa pendidikan PNS</i>				
3	<i>Belanja jasa kantor</i>				
4	<i>Belanja sewa</i>				
C	Pembiayaan pengeluaran				
	<i>Terdiri dari :</i>				
1	<i>Pembentukan dana cadangan</i>				
2	<i>Pembayaran pokok utang</i>				
TOTAL (A+B+C)		338,121,373,427.00	199,578,443,720.00	309,424,955,981.00	
Pertumbuhan			(40.97)	55.04	7.03

Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

3.3.2 Proyeksi APBD

Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Manggarai, baik pendapatan, belanja tidak langsung maupun belanja langsung selama tahun 2008 2010, maka diperoleh rata-rata pertumbuhan untuk memproyeksi besaran pendapatan, belanja dan SILPA 5 (lima) tahun kedepan.

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan, adalah:

1. Data tahun dasar yang digunakan adalah APBD induk Kabupaten Manggarai Tahun 2011
2. Rata-rata Pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 6.31 %
3. Rata-rata Pertumbuhan belanja (belanja langsung dan tidak langsung) sebesar 6.13 %
4. Rata-rata Pertumbuhan SILPA sebesar 12.44 %

Proyeksi pendapatan, belanja dan SILPA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13. Proyeksi pendapatan, belanja dan SILPA Kabupaten Manggarai 2012-2015

No	Uraian	Data tahun dasar (Rp) 2011	r (%)	Proyeksi (Rp)			
				2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan	483,880,006,913.00	6.31	514,412,835,349.21	546,872,285,259.75	581,379,926,459.64	618,064,999,819.24
	PAD	30,590,958,497.00	17.07	35,812,835,112.44	41,926,086,066.13	49,082,868,957.62	57,461,314,688.69
	Dana Perimbangan	394,818,893,771.00	0.19	395,569,049,669.17	396,320,630,863.54	397,073,640,062.18	397,828,079,978.30
	Lain2 Pend. yg sah	58,470,154,645.00	59.77	93,417,766,076.32	149,253,564,860.13	238,462,420,577.03	380,991,409,355.92
2	Belanja	511,214,776,016.00	6.13	542,552,241,785.78	575,810,694,207.25	611,107,889,762.15	648,568,803,404.57
	Belanja Tidak Langsung	271,967,230,798.00	3.74	282,138,805,229.85	292,690,796,545.44	303,637,432,336.24	314,993,472,305.62
	Belanja Langsung	239,247,545,218.00	10.40	264,129,289,920.67	291,598,736,072.42	321,925,004,623.95	355,405,205,104.85
3	SILPA	30,334,714,296.00	12.44	34,108,352,754.42	38,351,431,837.07	43,122,349,957.60	48,486,770,292.33

Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010

Adapun kebijakan yang dapat mempengaruhi hasil proyeksi tersebut, adalah :

1. Pendapatan daerah
 - a. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan Pendapatan Asli daerah baik pendidikan formal maupun informal (teknis)
 - b. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan system akuntansi pendapatn daerah sehingga terwujud kinerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan kontra prestasi terhadap fasilitas-fasilitas yang digunakan dan dipungut atas penggunaannyasehingga peran serta masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat meningkat
 - d. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah melalui restrukturisasi dan penyempurnaan manajemen sehingga dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Badan Usaha yang professional tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
 - e. Regulasi peraturan pajak dan retribusi daerah
2. Belanja Daerah
 - a. Penetapan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Konsistensi terhadap arah dan kebijakan yang telah disepakati
 - c. Alokasi belanja daerah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam KUA dan PPAS
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan dana bergulir (revolving) tercatat dalam penerimaan pembiayaan
 - b. Pengendalian pelaksanaan anggaran agar lebih dioptimalkan, agar sisa lebih perhitungan dari sisa anggaran belanja dapat ditekan

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

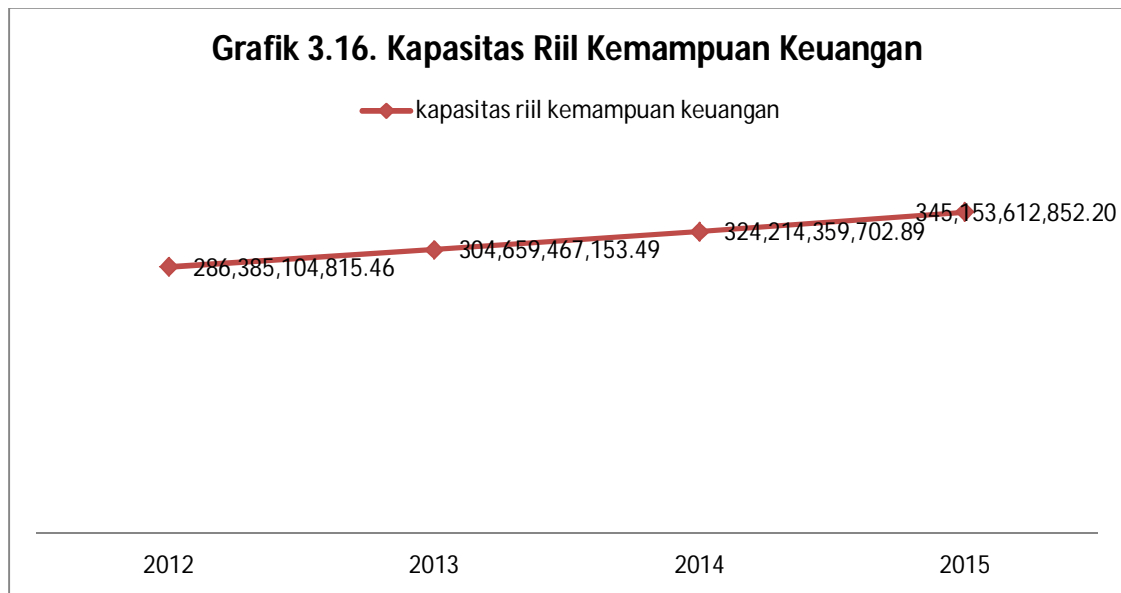
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, adalah otal penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah dan SILPA dikurangi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai dan rencana penggunaannya, digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.14. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai

No	Uraian	Proyeksi (Rp)			
		2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan	514,412,835,349.21	546,872,285,259.75	581,379,926,459.64	618,064,999,819.24
2	Pencairan dana cadangan				
3	SILPA	34,108,352,754.42	38,351,431,837.07	43,122,349,957.60	48,486,770,292.33
	Total Penerimaan	548,521,188,103.63	585,223,717,096.82	624,502,276,417.24	666,551,770,111.57
	<i>Dikurangi :</i>				
4	Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	262,136,083,288.17	280,564,249,943.33	300,287,916,714.35	321,398,157,259.36
	kapasitas riil kemampuan keuangan	286,385,104,815.46	304,659,467,153.49	324,214,359,702.89	345,153,612,852.20

Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010



Dari table diatas dapat diketahui, bahwa jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dialokasikan pada berbagai program/kegiatan sesuai prioritas, yaitu :

1. Prioritas I adalah program pembangunan Kabupaten Manggarai sesuai visi dan misi kepala daerah, dan lebih didominasi oleh kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik
2. Prioritas II adalah program prioritas pada tingkat SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai serta sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang merupakan penjabaran per urusan baik wajib maupun pilihan.
3. Prioritas III adalah alokasi belanja tidak langsung, seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan social belanja bantuan keuangan serta belanja tak terduga.

Rencana penggunaan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.15. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai

No	Uraian	Proyeksi (Rp)			
		2012	2013	2014	2015
I	kapasitas riil kemampuan keuangan	286,385,104,815.46	304,659,467,153.49	324,214,359,702.89	345,153,612,852.20
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I				
II.a	Belanja langsung	264,129,289,920.67	291,598,736,072.42	321,925,004,623.95	355,405,205,104.85
II.b	Pembentukan dana cadangan				
	<i>Dikurangi :</i>				
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	15,342,983,502.00	16,110,132,677.10	16,915,639,310.96	17,761,421,276.50
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas (II.a+II.b-II.c-II.d)	248,786,306,418.67	275,488,603,395.32	305,009,365,313.00	337,643,783,828.34
	Sisa Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	37,598,798,396.79	29,170,863,758.17	19,204,994,389.90	7,509,829,023.86
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II				
III.a	Belanja tidak langsung	282,138,805,229.85	292,690,796,545.44	303,637,432,336.24	314,993,472,305.62
	<i>Dikurangi :</i>				
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	241,821,257,787.90	253,912,320,677.30	266,607,936,711.16	279,938,333,546.72
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a - III.b)	40,317,547,441.95	38,778,475,868.15	37,029,495,625.08	35,055,138,758.90
	Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III)	(2,718,749,045.16)	(9,607,612,109.98)	(17,824,501,235.19)	(27,545,309,735.04)

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa :

Tahun 2012 sampai dengan 2016 terjadi defisit, sehingga diharapkan dilakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran pada prioritas II untuk membiayai belanja pada prioritas III.

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan pembangunan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan telah menghasilkan kemajuan di berbagai bidang namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi tantangan pembangunan lima tahun ke depan, yaitu:

1. Krisis Ekonomi Global Yang Berdampak Pada Kondisi Perekonomian Daerah.
2. Pertumbuhan Ekonomi masih di bawah rata-rata Nasional dan NTT, termasuk kontribusi persektor masih di bawah target RPJMD lima tahun sebelumnya.
3. Disparitas Pendapatan Antar Wilayah Dan Antar Penduduk.
4. Masih tingginya ketergantungan pembiayaan pembangunan pada dana perimbangan.
5. Pengurangan jumlah keluarga miskin yang relative lambat.
6. Belum teridentifikasi secara pasti peta kemiskinan berdasarkan 14 indikator MDGs pada setiap wilayah desa/kecamatan.
7. Laju pertumbuhan pembangunan infrastruktur diikuti pula dengan kelipatan bertambahnya kebutuhan ikutan.
8. Bertambahnya angkatan kerja yang kurang terampil
9. Perluasan areal produksi dan peningkatan produktifitas hasil-hasil pertanian terganggu dengan siklus musim yang berubah-ubah dan terjadinya konversi lahan.
10. Rasio ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk sasaran pelayanan yang masih terbatas
11. Sanitasi lingkungan pemukiman yang kurang mendukung pola hidup sehat
12. Prevalance jenis penyakit tertentu yang relative bertambah
13. Jumlah pasangan usia subur yang relative terus bertambah.
14. Masih tingginya angka kelahiran total.
15. Pertumbuhan penduduk yang tinggi.
16. Masih terdapat disparitas APK/APM terutama pada jenjang pendidikan dasar (SLTP) dan sekolah menengah.
17. Angka putus sekolah yang relatif besar pada tingkat pendidikan dasar

18. Terbatasnya ketersediaan perpustakaan dan laboratorium pada semua jenjang pendidikan.
19. Jangkauan pendidikan luar sekolah masih terbatas.
20. Masih rendahnya kompetensi guru.
21. Penguasaan ICT Guru masih rendah.
22. Manajemen pengelolaan pendidikan masih rendah.
23. Capaian hasil ujian nasional pada tingkat SMP dan SMU serta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional pada tingkat sekolah dasar masih perlu ditingkatkan.
24. Penetapan formasi penerimaan pegawai baru belum berdasarkan kajian.
25. Laju kerusakan lingkungan baik karena bencana alam maupun karena ulah manusia masih terus terjadi.
26. Masih terjadinya okupasi kawasan hutan oleh masyarakat.
27. Sistem evaluasi perencanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan masih perlu ditingkatkan.
28. Kesenjangan subsistem hukum daerah.
29. Rendahnya keikutsertaan masyarakat di dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah dan lingkungan;
30. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam Publik-Hearing dalam proses penetapan peraturan daerah.
31. Rendahnya capaian kinerja penyelesaian masalah hukum.
32. Belum optimalnya pemberdayaan Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB).
33. Kabupaten Manggarai merupakan daerah rawan bencana.

4.2. Isu-isu Strategis

Berdasarkan kajian terhadap berbagai permasalahan pembangunan diatas maka ditetapkan isu strategis pembangunan kabupaten manggarai, sebagai berikut :

1. Penurunan angka kemiskinan mencapai 32 %
2. Peningkatan kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan PDRB untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
3. Menekan laju pertumbuhan penduduk melalui penurunan TFR.
4. Revitalisasi sektor pertanian dan pengembangan industri pengolahan

5. Pengembangan sektor pariwisata
6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
7. Peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan
8. Peningkatan dukungan infrastruktur (ekonomi, pendidikan dan kesehatan)
9. Peningkatan kapasitas birokrasi dan layanan publik yang berkualitas
10. Peningkatan subsistem hukum daerah
11. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang
12. Optimalisasi pemanfaatan energi panas bumi (Geothermal) Ulumbu.
13. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
14. Pemetaan daerah rawan bencana dan pembentukan Masyarakat Siaga Bencana.
15. Peningkatan produktifitas dan perluasan kesempatan kerja.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai 2011-2015 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu **“TERWUJUDNYA MANGGARAI YANG MAKMUR, SEJAHTERA, ADIL, MERATA DAN BERKELANJUTAN YANG DIRIDHOI TUHAN YANG MAHA ESA”**.

Perwujudan *kemakmuran* dari masyarakat Kabupaten Manggarai ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (**Kete api one, tela galang peang**) sedangkan *kesejahteraan* ditandai oleh meningkatnya kualitas hidup masyarakatnya (**Baca tara, boleh loke**).

Secara *Adil dan Merata* diwujudkan dengan meratanya pemenuhan hak-hak dasar pada semua lapisan dan golongan masyarakat diseluruh wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Berkelanjutan (sustainable) ditandai dengan kesinambungan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana keluaran (output) dari suatu periode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebelumnya menjadi masukan (input) untuk periode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berikutnya.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Manggarai yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil untuk mewujudkan cita-cita masa depan.

5.2. MISI

Selanjutnya berdasarkan Visi tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai berupa **LIMA AGENDA POKOK PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2011-2015** yang ditetapkan sebagai **PANCA PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2011-2015**, yaitu :

- PERTAMA : MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT MANGGARAI
- KEDUA : MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN MERATA
- KETIGA : MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG DEMOKRATIS, MERATA, BERMUTU DAN AKUNTABEL
- KEEMPAT : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERWAWASAN EKOSISTEM DAN BERBASIS TATA RUANG
- KELIMA : MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

Kristalisasi dari kelima Agenda tersebut di atas yang akan menjadi spirit pembangunan Kabupaten Manggarai disebut **KON-SE-P BER-SIH**.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Visi: TERWUJUDNYA MANGGARAI YANG MAKMUR, SEJAHTERA, ADIL, MERATA DAN BERKELANJUTAN YANG DIRIDHOI TUHAN YANG MAHA ESA				
Misi		Tujuan		Sasaran
1.	Misi 1: Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Manggarai	1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi	1. Menurunnya angka kemiskinan dari 50,28 % menjadi 32,00 % pada tahun 2015
				2. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja dari 3,16 % menjadi 9,48 % pada tahun 2015
				3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari 5,9 % menjadi 6,4 % pada tahun 2015
				4. Meningkatnya pendapatan perkapita dari Rp.3.885.200,- pada tahun 2009 menjadi Rp.5.637.196,- pada tahun 2015
2.	Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Manggarai.	1. Menurunnya AKB dari 13.25 per 1.000 KH tahun 2010 menjadi 13,15 per 1.000 KH tahun 2015
				2. Menurunnya AKI dari 172,8 per 100.000 KH tahun 2010 menjadi 125 per 100.000 KH tahun 2015.
				3. Menurunkan prevalensi anak balita yang pendek menjadi kurang dari 32% pada thn 2015.
				4. Meningkatkan usia harapan hidup rata-rata penduduk laki-laki dari 67 tahun 2010 menjadi 67.30 tahun 2015.
				5. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk rata-rata dari 2.3% tahun

		2.	Terwujudnya Penduduk tumbuh seimbang yang rensponsif gender		2000-2010 menjadi 2% tahun 2015
				1.	Menurunkan TFR dari 3,24 anak tahun 2010 menjadi 2,80 anak tahun 2015
				2.	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ber-KB secara aktif (CPR) dari 68,84% tahun 2010 menjadi 75% tahun 2015
3.	Mewujudkan Pendidikan yang Demokratis, Merata, Bermutu dan akuntabel	1.	Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan.	1.	Meningkatnya APK PAUD dari 3,48% tahun 2010 menjadai 6,5% pada tahun 2015
				2.	Meningkatnya APK SMP/MTs dari 70,11% pada tahun 2010 menjadi 85% pada tahun 2015
				3.	Meningkatnya APM SMP/MTs dari 49,53% pada tahun 2010 menjadi 60,6% pada tahun 2015
				4.	Meningkatnya APK SMA/MA/SMK dari 58,86% pada tahun 2010 menjadi 67% pada tahun 2015
				5.	Meningkatnya proporsi penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan SMA dari 8,20% pada tahun 2010 menjadi 12,5% pada tahun 2015
				6.	Meningkatnya proporsi penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan SMK dari 2,38% pada tahun 2010 menjadi 4,5% pada tahun 2015
				7.	Meningkatnya APK PT dari 1,82% pada tahun 2010 menjadi 4 % pada tahun 2015
				8.	Meningkatnya jumlah kelompok belajar PNF dari 3 kober pada tahun 2010 menjadi 20 kober pada tahun 2015

				9.	Meningkatnya persentase lulus UASBN/UN dari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SD dari 98,31 % pada tahun 2010 menjadi 100 % pada tahun 2015 ▪ SMP dari 43,29 % pada tahun 2010 menjadi 80 % pada tahun 2015 ▪ SMA dari 26,29 % pada tahun 2010 menjadi 75 % pada tahun 2015 ▪ SMK dari 47,73 % pada tahun 2010 menjadi 80 % pada tahun 2015
				10.	Meningkatnya jumlah guru yang berkualifikasi S1 dari 1.018 orang pada tahun 2010 menjadi 3.550 pada tahun 2015
				11.	Meningkatnya jumlah guru yang bersertifikasi pendidik dari 549 orang pada tahun 2010 menjadi 3550 orang pada tahun 2015
4.	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang	1.	Meningkatkan mutu lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang	1.	Menurunnya luas lahan kritis diluar kawasan hutan dari 10.416,00 ha menjadi 864 pada tahun 2015.
				2.	Tersedianya rekomendasi AMDAL UKL, UPL dan PPLH dari 97 pada tahun 2010 menjadi 194 pada tahun 2015
				3.	Meningkatnya pelayanan pengolahan sampah dari 136,015 m ³ /hari pada tahun 2010 menjadi 156 m ³ /hari pada tahun 2015
				4.	Terlaksananya reklamasi lokasi bekas tambang dari 0 lokasi pada

					tahun 2010 menjadi 22 lokasi pada tahun 2015
				5.	Terlaksananya pengawasan penggalian bahan galian batuan dari 19 lokasi pada tahun 2010 menjadi 42 lokasi pada tahun 2015
				6.	Terlaksananya penurapan sumber mata air dari 3 lokasi pada tahun 2010 menjadi 10 lokasi pada tahun 2015
				7.	Meningkatkan pelanggan PLTS dari 413 unit pada tahun 2010 menjadi 1.663 unit pada tahun 2015
				8.	Tersedianya tim reaksi cepat dan terlatih dari 0 pada tahun 2010 menjadi 80 kelompok pada tahun 2015
				9.	Tersedianya rambu-rambu peringatan dini bencana dari 0 lokasi pada tahun 2010 menjadi 80 lokasi pada tahun 2015
				10.	Tersedianya mobil pemadam kebakaran dari 1 unit pada tahun 2010 menjadi 3 unit pada tahun 2015
				11.	Terlaksananya penanganan darurat dari 25 lokasi pada tahun 2010 menjadi 125 lokasi pada tahun 2015
5.	Mewujudkan Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia	1.	Meningkatkan penegakan hukum & HAM dan pembenahan subsistem hukum daerah	1.	<p>Tersedianya Produk Hukum Daerah yang ditetapkan dalam kurun waktu 2011-2015 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah dari 69 buah menjadi 149 buah • Peraturan Bupati dari 124 buah menjadi 149 buah • Keputusan Bupati dari 1.655 buah menjadi 3.330 buah

					<ul style="list-style-type: none"> • Instruksi Bupati dari dari 0 menjadi 6 buah
				2.	Terlaksananya bantuan hukum dari 12 kasus pada tahun 2010 menjadi 22 kasus pada tahun 2015
				3.	Terlaksananya penyelesaian konflik dari 52 kasus pada tahun 2010 menjadi 100 kasus pada tahun 2015
				4.	Terlaksananya penyuluhan hokum dari 95 desa pada tahun 2010 menjadi 149 desa ada tahun 2015
				5.	Terlaksananya desiminasi norma hukum dari 300 orang pada tahun 2010 menjadi 500orang pada tahun 2015
				6.	Terlaksananya pemeriksaan dari 351 obrik pada tahun 2010 menjadi 292 obrik pada tahun 2015
				7.	Terlaksananya tindaklanjut temuan hasil pemeriksan dari 150 LHP pada tahun 2010 menjadi 900 LHP pada tahun 2015
		2.	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan		1. Terlaksananya cakupan pelayanan kependudukan berbasis SIAK dari 0% tahun 2010 menjadi 100% tahun 2015 2. Terlaksananya pelayanan Kartu Keluarga (KK) per jumlah penduduk yang telah menikah dari 0,65 (40.086) tahun 2010 menjadi 0,80 (55.000) tahun 2015 3. Terlaksananya pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penduduk wajib KTP dari 40,33%

					<p>(69.421) menjadi 0,41,04 (75.163) pada tahun 2015</p> <p>4. Terlaksananya pelayanan kepemilikan pasangan berakate nikah dari seluruh pasangan nikah dari 0,05 (3.407) pada tahun 2010 menjadi 0,15 (10.000) tahun 2015</p> <p>5. Terlaksananya pelayanan kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk dari 208,44 (60.975) tahun 2010 menjadi 362,57 (120.000)</p> <p>6. Tersedianya database kependudukan yang dinamis dan akurat serta dapat diakses setiap saat dengan tingkat akurasi mencapai 90% setiap tahun sampai dengan tahun 2015</p>
		3.	Mewujudkan iklim politik yang demokratis dan meningkatkan perlindungan masyarakat		<p>1. Tersedianya tenaga satuan tugas LINMAS dari 1.956 orang pada tahun 2010 menjadi 2.403 orang pada tahun 2015</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aparat keamanan dari 15 pamtup pada tahun 2010 menjadi 83 pamtup pada tahun 2015

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi pembangunan Kabupaten Manggarai tersebut di atas pemerintah daerah menempuh 5 (Lima) Strategi Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai, yaitu :

1. Memperkuat sinergisitas tiga pilar utama pembangunan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil (*civil society*);
2. Efisiensi pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
3. Penataan birokrasi pemerintahan yang profesional;
4. Mengembangkan pola kepemimpinan partisipatif;
5. Perubahan yang berkelanjutan (*Sustainable changes*).

STRATEGI 1 : MEMPERKUAT SINERGISITAS TIGA PILAR UTAMA PEMBANGUNAN YAITU PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYAKAT SIPIL (CIVIL SOCIETY)

Strategi pertama ini dimaksudkan untuk mengembangkan semangat kebersamaan antara tiga pilar utama pembangunan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil agar pelaksanaan pembangunan oleh masing masing pilar berjalan sinergis dan simultan dalam mengoptimalkan semua Sumber Daya yang ada. Dengan demikian masing-masing komponen akan berperan sesuai dengan kapasitasnya yaitu :

a. Pemerintah Kabupaten Manggarai

Pemerintah akan berperan sebagai fasilitator dan dinamisator bagi gerakan pembangunan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan fasilitas pendorong (stimulan) kepada masyarakat agar berdaya guna dalam membangun kehidupannya secara mandiri.

b. Dunia Usaha

Dunia Usaha terus didorong agar memberikan fungsi dan peran yang optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Manggarai karena disadari peran dunia usaha yang sangat penting dan strategis sebagai pelaku pembangunan dan berperan sebagai agen dinamisasi pembangunan berupa investasi dan

penyerapan tenaga kerja dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang tersedia di kabupaten Manggarai.

c. Masyarakat Sipil

Seluruh komponen masyarakat diharapkan berperan tidak hanya sebagai obyek melainkan sebagai subyek pembangunan dan memberdayakan dirinya sendiri dalam pembangunan untuk mewujudkan derajat kemakmuran dan kesejahteraan.

STRATEGI 2 : EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Strategi ini dimaksudkan agar penetapan prioritas pengalokasikan anggaran lebih proporsional dengan menerapkan secara murni *Anggaran Berbasis Kinerja*, yang didasarkan pada prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme. Agar pengelolaan keuangan dapat lebih hemat dan efisien dengan tetap mengutamakan kualitas. Sehingga sumber dana dan pembiayaan yang tersedia dapat memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu strategi ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah.

STRATEGI 3 : PENATAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL

Strategi ketiga ini dimaksudkan untuk memperbaiki manajemen birokrasi pemerintah dalam upaya meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Strategi ini meliputi :

- a. Melaksanakan reorganisasi dan restrukturisasi birokrasi pemerintah agar lebih profesional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat fleksibel dan adaptif dan terdesentralisasi kewenangannya dengan menerapkan manajemen yang baik, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien.
- b. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pendorong pembangunan
- c. Menciptakan aparatur yang berkualitas, bersih, berwibawa serta penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- d. Meningkatkan kinerja aparatur dengan mendorong peningkatan wawasan dan ketrampilan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Mewujudkan sistem kepegawaian dengan pengembangan karir berdasarkan prestasi kerja, kemampuan profesional, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki.

Sehingga birokrasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya lebih profesional yang dapat ditandai dengan ***Semakin cepatnya kinerja pelayanan; Adanya kepastian waktu; Lebih transparan, serta setiap aparatur pemerintah daerah lebih responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya***

STRATEGI 4 : MENGEMBANGKAN POLA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF

Strategi ini menitikberatkan pada optimalisasi pemberdayaan semua fungsi, elemen dan aset daerah, agar dapat bersinergi dalam membangun daerah. Dengan menitikberatkan pada peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (pemantauan dan evaluasi) pada berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disegala bidang.

Dimulai dari Proses Perencanaan Pembangunan, Prinsip *Bottom Up Planing* atau Perencanaan dari bawah dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan kemudian Kabupaten dan Provinsi.

Pada proses Pelaksanaan Pembangunan, juga melibatkan masyarakat diantaranya dapat mengembangkan pola KSO (Kerja Sama Operasional), karena dengan terlibatnya masyarakat dalam proses tersebut rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan tersebut lebih tinggi. Serta diharapkan biaya pembangunan proyek dapat lebih murah dengan kualitas yang jauh lebih baik. Selanjutnya pada Tahap Pengawasan, masyarakat diminta untuk berpartisipasi. Untuk melibatkan masyarakat dimulai dari prinsip transparansi dengan penyampaian informasi yang benar tentang pembangunan oleh pengelola proyek.

STRATEGI 5 : PERUBAHAN YANG BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE CHANGES*)

Strategi ini menekankan pentingnya kesinambungan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama jajarannya (SKPD) dimana keluaran (output) dari suatu periode pelaksanaan pembangunan menjadi input (masukan) bagi periode pelaksanaan pembangunan berikutnya.

6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengacu kepada Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai yang telah dikemukakan terdahulu, maka fokus dan arah kebijakan umum pembangunan daerah lima tahun ke depan yakni:

1. Memperkuat struktur ekonomi daerah dengan mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keberkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, bermutu dan berkelanjutan;
3. Memperluas jaringan penyediaan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, bernuansa kesehatan ibu dan anak;
4. Memperluas akses pendidikan yang bermutu dan terjangkau;
5. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, adil, bertanggungjawab dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan upaya pengembangan budaya hukum, termasuk hukum adat.

6.2.1. Misi Ke Satu : Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Manggarai.

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Manggarai dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi dengan arah kebijakan sebagai berikut :

6.2.1.1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) Mendorong pengembangan sistem budidaya tanaman meningkatkan indeks pertanaman dan perluasan areal tanam.
- (2) Mengembangkan teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang memenuhi standar pengendalian hama terpadu (PHT);
- (3) Memfasilitasi penyediaan pedoman inventarisasi dan pemetaan kebun, pengendalian lahan, agroindustri lintas kabupaten/kota dalam rangka pengutuhan kawasan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- (4) Memfasilitasi pengembangan kemitraan usaha, kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, investasi usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta mendorong kegiatan hilir untuk memperoleh nilai tambah;

- (5) Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pertanian dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui upaya pengembangan SDM dan penguasaan teknologi tepat guna dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan pengembangan kelembagaan petani.

6.2.1.2. KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- (1) Pemantapan kawasan hutan;
- (2) Pengamanan hutan dan konservasi alam;
- (3) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
- (4) Pemberdayaan masyarakat di sekitar Hutan;
- (5) Revitalisasi pemanfaatan hasil hutan dan industri kehutanan;
- (6) Pengembangan kawasan komoditas unggulan perkebunan dan peningkatan pengendalian hama penyakit terpadu;
- (7) Peningkatan kualitas public goods dalam pengembangan infrastruktur perkebunan;
- (8) Peningkatan kualitas dan jumlah produk pertanian/perkebunan;
- (9) Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat perkebunan/kehutanan;
- (10) Validitas data statistik dan informasi kehutanan/perkebunan.

6.2.1.3. KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

a. Peningkatan kemampuan nelayan, petani ikan dan peternak serta penguatan lembaga pendukungnya. Kebijakan ini diarahkan untuk

- (1) Pemenuhan hak atas pangan.
- (2) Peningkatan akses nelayan, petani ikan dan peternak terhadap sumber daya produksi dan permodalan.
- (3) Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan perikanan dan peternakan
- (4) Menghidupkan dan memperkuat lembaga perikanan dan peternakan di pedesaan untuk meningkatkan akses nelayan, petani ikan dan peternak terhadap sarana produksi.
- (5) Peningkatan kemampuan / kualitas SDM nelayan, petani ikan dan peternak.

b. Pengamanan Ketahanan Pangan.

Kebijakan ini diarahkan untuk :

- (1) Meningkatkan ketersediaan pangan ikan dan ternak dalam daerah
- (2) Meningkatkan populasi ikan air tawar dan ternak serta produksi pangan hewani dari produksi dalam daerah agar ketersediaan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung kualitas SDM.

c. Peningkatan Produktivitas, Produksi, Daya saing dan Nilai Tambah produk Perikanan dan Peternakan.

Kebijakan ini diarahkan untuk :

- (1) Pengembangan usaha perikanan dan peternakan dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis. Pendekatan ini agar meningkatkan kelayakan akan pengembangan / skala ekonomi sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan dari perekonomian daerah.
- (2) Penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk perikanan dan peternakan. Misalnya : dorongan dalam bentuk insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan dan peternakan, peningkatan standar mutu komoditas perikanan dan peternakan, melindungi petani/peternak dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat.
- (3) Penguatan sistim pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha perikanan dan peternakan serta untuk mendukung pengembangan agroindustri

6.2.1.4. PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

a. Industri

- (1) Meningkatkan daya saing produk industri khususya Industri Mikro, Kecil dan Menengah;
- (2) Mengembangkan kompetensi daerah dengan fokus pada Industri Agro dan Kelautan;
- (3) Mendorong partisipasi masyarakat (Dunia usaha,Lembaga Perbankan, LSM, Perguruan Tinggi) untuk berperan dalam pengembangan industri.

b. Perdagangan

- (1) Menigkatkan sistim distribusi barang kebutuhan masyarakat yang efisien dan efektif;

- (2) Meningkatkan perdagangan antar pulau dan ekspor;
- (3) Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen.
- (4) Meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar dipasaran.
- (5) Meningkatkan pembinaan terhadap pedagang usaha mikro dan kecil dengan dukungan tersedianya sarana perdagangan (pasar) yang memadai.
- (6) Mengembangkan sistim dan jaringan informasi perdagangan serta pemantauan harga

c. Koperasi dan UKM

- (1) Meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum terhadap koperasi termasuk UMKM;
- (2) Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber daya produktif;
- (3) Memberdayakan anggota koperasi dan UMKM terhadap usaha-usaha produktif.
- (4) Meningkatkan akses permodalan untuk koperasi dan UMKM dengan lembaga keuangan (Bank)

6.2.1.5. INVESTASI/PENANAMAN MODAL

- (1) Meningkatkan fungsi koordinasi untuk menjamin kepastian usaha bagi investor;
- (2) Meningkatkan promosi potensi daerah

6.2.1.6. PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Internal:

- (1) Melakukan pembinaan terhadap staf serta memberikan kesempatan kepada seluruh staf untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna meningkatkan kinerja terutama dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Mengembangkan operasionalisasi sistem Komputerisasi SIMAKDA dan SIMPATDA
- (3) Jumlah staf dan SDM yang memadai
- (4) Adanya sistem insentif bagi pegawai
- (5) Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pegawai

Kebijakan Eksternal:

- (1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan daerah di Bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Meningkatkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi-instansi lain terutama instansi pengelola PAD
- (3) Meningkatkan kerja sama dengan semua SKPD terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

6.2.1.7. PERHUBUNGAN

- (1) Kebijakan penertiban administrasi bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika secara efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Kebijakan penyediaan sarana pengawasan dan pengendalian transportasi darat, laut, dan udara yang aman lancar sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Kebijakan peningkatan profesionalisme aparatur dalam bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
- (4) Kebijakan penyediaan sarana jasa transportasi yang aman, tertib, dan lancar bidang perhubungan darat, laut, dan udara sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas dan jangkauan media informasi baik cetak maupun elektronik;
- (6) Kebijakan yang bersifat lintas SKPD dan lintas wilayah dalam hal pengadaan sarana dan prasarana bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika yang memadai.

6.2.1.8. PEKERJAAN UMUM

- (1) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan kepusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan masyarakat serta kantong-kantong produksi dalam rangka kelancaran aksesibilitas barang/jasa guna mendukung sistem transportasi nasional (SISTRANAS)
- (2) Pembangunan infrastruktur kepusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan masyarakat serta kantong-kantong produksi
- (3) Pengalokasian proyek-proyek pemberdayaan masyarakat
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat dan provinsi

- (5) Peningkatan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan proyek
- (6) Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan lingkungan yang sehat

6.2.1.9. TENAGA KERJA

- (1) Memberdayakan tenaga kerja daerah secara menyeluruh agar mampu berkompetensi dalam mengisi peluang kerja di dalam maupun luar negeri; yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.
- (2) Memperluas lapangan pekerjaan non formal, industri kecil dan menengah yang bersifat padat karya.
- (3) Memberikan dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi melalui berbagai pelatihan keterampilan.
- (4) Menciptakan fleksibilitas pasar kerja melalui perbaikan aturan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, *outsourcing*, pengupahan dan membatasi aturan yang memproteksi berlebihan.
- (5) Meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan pelayanan pendidikan, pelatihan dan pelayanan kesehatan.

6.2.1.10. PEMBANGUNAN PEDESAAN

- (1) Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di pedesaan dengan merangsang pertumbuhan diversifikasi produk dan usaha pertanian ke arah komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi dan memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian pedesaan untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat dan industri olahan berbasis sumber daya lokal.
- (3) Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan ke sumber daya produktif bagi pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; dan akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar.
- (4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui peningkatan kualitasnya baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan

dan penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat pedesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.

- (5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memenuhi hak-hak dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan meminimalkan risiko kerentanan baik melalui pengembangan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun perbaikan struktur pasar yang tidak sehat.
- (6) Mengembangkan praktek-praktek budi daya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan.

6.2.1.11. KEPARIWISATAAN

- (1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sumber daya aparatur dan pengelolaan kekayaan budaya daerah
- (2) Pengembangan destinasi, kemitraan, pemasaran produk industri pariwisata dan kebudayaan

6.2.2. Misi ke dua : Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Manggarai dalam menciptakan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :

6.2.2.1. Kesehatan :

- 1) Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang berkualitas.
- 2) Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kedokteran asal Kabupaten Manggarai.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- 4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- 5) Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin.
- 6) Pemantapan pelaksanaan Revolusi KIA;
- 7) Peningkatan status gizi masyarakat;
- 8) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- 9) Peningkatan status, jumlah dan mutu fasilitas kesehatan;
- 10) Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan;

- 11) Pemenuhan kebutuhan obat esensial, obat generik dan perbekalan kesehatan.
- 12) Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA);
- 13) Pembenahan sistem pelayanan dan manajemen Rumah Sakit sesuai standar BLU

6.2.2.2. KB dan Kependudukan

- (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan keluarga berencana dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan TFR.
- (2) Meningkatkan advokasi dan KIE tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- (3) Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan lintas sektor penyelenggara keluarga berencana;
- (4) Meningkatkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
- (5) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya mempercepat pembentukan UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan keliling (mobile service)
- (6) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral/institusional untuk memperluas kepemilikan dokumen kependudukan dan mempermudah perolehan dokumen pendukung dalam rangka pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil;
- (7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya pengelola SIAK tingkat kabupaten, kecamatan dan registrar desa/kelurahan;
- (8) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan data kependudukan yang akurat dan up-to-date;

Misi Ke Tiga : Mewujudkan Pendidikan yang Demokratis, Merata, Bermutu dan akuntabel

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Manggarai dalam membangun sumberdaya manusia yang cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia melalui pembangunan pendidikan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Penyusunan Perda Pendidikan
- (2) Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan.
- (3) Memperbanyak kelompok pendidikan Non Formal

- (4) Meningkatkan kompetensi guru
- (5) Meningkatkan persentase lulusan ujian akhir sekolah sesuai standar yang ditetapkan
- (6) Merekrut calon Kepala sekolah dan pengawas sekolah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
- (7) Redistribusi tenaga guru. Disadari perluasan dan pemerataan akses pendidikan selama ini mengalami kendala diakibatkan karena distribusi guru yang tidak merata pada 9 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai
- (8) Meningkatkan kualitas pengawas pendidikan
- (9) Merekrut calon pengawas sekolah sesuai aturan yang berlaku
- (10) Dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan harus mengikuti SPM Pendidikan
- (11) Meningkatkan tata kelola pendidikan secara baik

Misi Ke Empat : Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Manggarai dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan mutu lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Lingkungan Hidup

- (1) Melaksanakan rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan dan daerah pesisir .
- (2) Melaksanakan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air serta pembangunan sumur resapan/embung.
- (3) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penertiban ijin dan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap kegiatan dan atau usaha yang berdampak penting.
- (4) Peningkatan perlindungan pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk memelihara kekayaan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati melalui upaya pengelolaan taman kehati.
- (5) Peningkatankapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan bidang lingkungan hidup.

- (6) Mendorong akses informasi lingkungan hidup dengan menyediakan Sistem Informasi Lingkungan (SIL), Data Base/neraca kualitas lingkungan hidup Daerah, Status Lingkungan hidup Daerah (SLHD).
- (7) Mendorong peran serta masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (8) Mengupayakan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW).
- (9) Melaksanakan kajian ilmiah untuk mengidentifikasi potensi SDA, mengkaji tingkat kerentanan alam terhadap perubahan iklim dan merekomendasikan upaya mitigasi (pencegahan) dan adaptasi (penyesuaian) terhadap perubahan iklim.
- (10) Melaksanakan fungsi koordinasi antara stakeholder dan pemangku kepentingan.
- (11) Mendorong penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam upaya identifikasi Sumber Daya Alam (SDA).

b. Bencana Alam

- (1) Memperkuat perangkat regulasi dan kelembagaan Penanggulangan bencana;
- (2) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan risiko bencana;
- (3) Meningkatkan sistem kewaspadaan diri terhadap bahaya bencana alam dan bencana sosial;
- (4) Meningkatkan koordinasi antar Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan desa dalam upaya mensinkronisasikan upaya mitigasi bencana;
- (5) Meningkatkan upaya revitalisasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial ekonomi di daerah pasca bencana.

c. Kehutanan

- (1) Pemantapan kawasan hutan
- (2) Pengamanan hutan, konservasi lahan dan hutan.
- (3) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
- (4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan
- (5) Revitalisasi pemanfaatan hasil hutan

- (6) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan
- (7) Penguatan kelembagaan kehutanan

d Pertambangan dan Energi

- (1) Peningkatan Jumlah Investor di sektor pertambangan dan energi.
- (2) Penerbitan dan perpanjangan Izin eksplorasi dan operasi produksi bahan mineral dan batuan.
- (3) Rapat koordinasi, konsultasi dan evaluasi
- (4) Sosialisasi kepada masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengawasan pertambangan Bahan mineral dan Batuan.
- (6) Diklat SDM Aparatur inspektur tambang dan inspektur ketenaga-listrikan.
- (7) Peningkatan jumlah pelanggan listrik khususnya Energi Baru Terbarukan.
- (8) Pelatihan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) penerima bantuan Energi Baru Terbarukan.
- (9) Pelatihan teknik tambang;
- (10) Pengawasan / monitoring pemakaian air tanah dan Air permukaan, serta Energi Baru Terbarukan.
- (11) Penelitian detail potensi sumber daya alam bagi pembangunan Energi Baru Terbarukan.
- (12) Pemetaan lokasi potensi tambang Bahan Galian C;
- (13) Penyusunan regulasi sektor pertambangan;

Misi Ke Lima : Mewujudkan Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Manggarai dalam mewujudkan supremasi hukum dan penegakan HAM dengan arah Kebijakan sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas substansi dan produk politik hukum daerah melalui pembenahan sistem dan politik hukum daerah untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi di kabupaten Manggarai.
- (2) Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
- (3) Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaring pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pelbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

Mengacu kepada Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi pembangunan daerah yang telah dikemukakan terdahulu maka supaya pelaksanaannya lebih fokus dan terarah maka ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan yakni:

- a. Memperkuat struktur ekonomi daerah dengan mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keberkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan;
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, bermutu dan berkelanjutan;
- c. Memperluas jaringan penyediaan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, bernuansa kesehatan ibu dan anak;
- d. Memperluas akses pendidikan yang bermutu dan terjangkau;
- e. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, adil, bertanggungjawab dan berkelanjutan;
- f. Meningkatkan upaya pengembangan budaya hukum, termasuk hukum adat.

7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dari ke 6 (enam) prioritas pembangunan tersebut di atas dijabarkan dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing sektor dengan indikasi capaian program tersebut sebagai berikut:

7.2.1 AGENDA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MANGGARAI

1. PERTANIAN TANAMAN PANGAN

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
- 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
- 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
- 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 6) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan lapangan

2. PERKEBUNAN

- (1) Peningkatan Kesejahteraan Petani
- (2) Program peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
- (3) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- (4) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

3. PETERNAKAN

- (1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
- (2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
- (3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
- (4) Program Peningkatan Penerapan teknologi Peternakan

4. PERIKANAN DAN KELAUTAN

- (1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
- (3) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
- (4) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- (5) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- (6) Peningkatan Mitigasi Bencana alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
- (7) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- (8) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- (9) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Kelautan, Air Payau dan Air Tawar

5. KEHUTANAN

- (1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- (2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- (3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- (4) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

6. KOPERASI DAN UMKM

- (1) Program penciptaan iklim usaha Kecil Menengah yang kondusif
- (2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- (4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

7. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- (1) Program pengembangan industri kecil dan menengah
- (2) Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- (3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- (4) Program peningkatan dan pengembangan ekspor
- (5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- (6) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

8. PENANAMAN MODAL DAERAH

- (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
- (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- (3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

9. PENDAPATAN DAERAH

- (1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

10. TENAGA KERJA

- (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

11. PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN DESA

- (1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- (2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- (3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- (5) Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan

12. PARIWISATA

- (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- (3) Program Pengembangan Kemitraan

- (4) Program Pengembangan Kemitraan

13. PERHUBUNGAN

- (1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- (2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- (3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- (4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- (5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas
- (6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

14. TRANSMIGRASI

- (1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- (2) Program Transmigrasi Lokal
- (3) Program Transmigrasi Regional

15. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- (1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
- (2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
- (3) Progra Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- (4) Program kerjasama Informasi dengan Media.

16. PEKERJAAN UMUM

- (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- (2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- (3) Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong
- (4) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- (5) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talut/Bronjong
- (6) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- (7) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- (8) Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
- (9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- (10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- (11) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- (12) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
- (13) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- (14) Program Pengendalian Banjir
- (15) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- (16) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- (17) Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

17. PERUMAHAN

- (1) Program Pengembangan Perumahan
- (2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- (3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- (4) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
- (5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- (6) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

18. PENATAAN RUANG

- (1) Program Perencanaan Tata Ruang
- (2) Program Pemanfaatan Ruang
- (3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

19. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- (1) Program Pengembangan Data/Informasi
- (2) Program Kerjasama Pemabangunan
- (3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- (4) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- (5) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
- (6) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- (8) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- (9) Program Perencanaan Sosial Budaya

(10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

7.2.2. AGENDA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MANGGARAI

1. KESEHATAN

- (1) Program Pengadaan Obat dan Perbekalan
- (2) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- (3) Program Upaya Kesehatan
- (4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- (5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- (6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- (7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- (8) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
- (9) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- (10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (11) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja
- (12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- (13) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- (14) Program Asuransi Kesehatan Pegawai
- (15) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (16) Program Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin
- (17) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- (18) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

2. Rumah Sakit Umum Daerah

- (1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa
- (4) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- (5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
- (6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- (7) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- (8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
- (9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (10) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- (11) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- (12) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- (1) Program keluarga berencana
- (2) Program pelayanan kontrasepsi
- (3) Program kesehatan reproduksi remaja
- (4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB
- (5) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat.
- (6) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja
- (7) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS
- (8) Program pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- (9) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- (10) Program pengembangan model operasional BKB Posyandu padu

4. Pemberdayaan Perempuan

- (1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- (2) Program penguatan peangarustamaan gender
- (3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- (4) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- (5) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

7.2.3. AGENDA MEWUJUDKAN IKLIM PENDIDIKAN YANG DEMOKRATIS DAN BERMUTU

1. PENDIDIKAN :

- (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

- (3) Program Pendidikan Menengah
- (4) Program Pendidikan Non Formal
- (5) Program Pendidikan Luar Biasa
- (6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (7) Program Pengembangan BUDaya Bangsa dan Pembinaan Perpustakaan
- (8) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. KEARSIPAN :

- (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- (2) Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah
- (3) Program pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
- (4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

3. PEMUDA DAN OLAH RAGA

- (1) Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda
- (2) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
- (3) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
- (4) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- (5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

4. KEPEGAWAIAN

- (1) Program Pendidikan Kedinasan
- (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- (3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

7.2.4. AGENDA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERWAWASAN EKOSISTEM DAN BERBASIS TATA RUANG

1. Lingkungan Hidup

- (1) Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
- (2) Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan
- (3) Program Perlindungan dan Konservasi SDA
- (4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
- (5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- (6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- (7) Peningkatan Kualitas dan akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

- (1) **Bencana Alam** Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Penegelolaan Bencana
- (2) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
- (3) Program Penanganan Darurat Bencana
- (4) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- (5) Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaraan

2. Pertambangan dan Mineral

- (1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- (2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi
merusak Lingkungan
- (3) Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan

**7.2.5. AGENDA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA**

1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- (1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- (2) Program Pemeliharaan kantrantimbnas dan pencegahan tindak kriminal
- (3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- (4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- (5) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertipan dan
Keamanan
- (6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- (7) Program Pendidikan Politik Masyarakat

2. Pemerintahan Umum

- (1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- (2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
- (3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- (4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
- (5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa

- (6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
- (7) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- (8) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- (9) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- (10) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- (11) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- (12) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- (13) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

2. Sosial

- (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
- (2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- (3) Program Pembinaan Anak Terlantar
- (4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- (5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- (6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
- (7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

3. Kependudukan dan Catatan Sipil

- (1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan Pemerintahan selama periode RPJMD 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendaanaan dari masing-masing SKPD.

BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Dalam hal ini, indikator kinerja daerah lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan Pemerintahan yang ditunjukkan dengan paramater kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dipergunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur. Aspek-aspek tersebut meliputi (1) aspek kesejahteraan masyarakat dan (2) aspek pelayanan umum.

Tabel 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB (%) ADHK	-	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96
1.1.1.2	Laju inflasi (%)	-	-	-	-[-	-	-
1.1.1.3	PDRB per kapita (Rp) ADHB Jumlah Penduduk		4.133.853	4.398.420	4.679.919	4.979.434	5.298.118	5.637.196
1.1.1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Sektor Primer Sektor Sekunder Sektor Tersier	- - -	6,4 - -	6,4 - -	6,4 - -	6,4 - -	6,4 - -	6,4 - -
1.1.1.5	Penduduk Miskin Angka kemiskinan yg tertangani	- 32.252	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1.1.1.6	Indeks Gini	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7	Pemerataan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.8	(%) Penduduk di atas garis kemiskinan	-	-	-	-	-	-	-
1.	PELAYANAN UMUM							
2.1	PELAYANAN URUSAN WAJIB							
1.1.1.	Pendidikan							
1.1.1.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) ▪ PAUD ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SLTA/MA ▪ PT	3,48% 119,09% 70,11% 58,86% 1,82%	4,08% 115,26% 73,09% 60,49% 2,26%	4,69% 111,45% 76,07% 62,12% 2,692%	5,29% 107,63% 79,04% 63,74% 3,13%	5,85% 103,82% 82,02% 65,37% 3,56%	6,5% 100% 85% 67% 4%	6,5% 100% 85% 67% 4%
1.1.1.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) ▪ PAUD	2,47%	2,94%	3,40%	3,87%	4,33%	4,8%	4,8%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SLTA/MA 	100% 49,53% 42,61%	100% 51,74% 45,05%	100% 53,96% 47,49%	100% 56,17% 49,92%	100% 58,39% 52,36%	100% 60,6% 54,8%	100% 60,6% 54,8%
1.1.1.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) <ul style="list-style-type: none"> ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SLTA/MA 	94,7% 90,03% 61,07%						
1.1.1.4.	Rata-Rata Lama Sekolah							
1.1.1.5.	Prosentase Lulusan : <ul style="list-style-type: none"> - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK 							
1.1.1.6.	Kualifikasi Guru							
1.1.1.7.	Sertifikasi							
1.1.1.8.	Rasio Siswa terhadap Ruang Kelas PAUD SD SMP SMA	1:32 1:45 1:35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1.1.1.9.	Rasio Guru terhadap Siswa PAUD SD SMP SMA	1:11 1:25 1:24 1:20	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
1.1.2.	Kesehatan							
1.1.2.1.	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	172,08	163,24%	153,68%	144,12%	134,56%	125%	125%
1.1.2.2.	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)	13,25	13,23%	13,21%	13,19%	13,17%	13,15%	13,15%
1.1.2.3.	Status Gizi Buruk (%)	0,20						
1.1.2.4.	Usia Harapan Hidup	67	67,06%	67,12%	67,18%	67,24%	67,30%	67,30%
2.1.3.	Keluarga Berencana							
2.1.3.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	3,63	3,30%	2,98%	2,65%	2,33%	2%	2%
2.1.3.2.	Total Fertility Rate (Jiwa)	3,24	3,15%	3,06%	2,98%	2,89%	2,80%	2,80%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awall Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
2.1.3.3.	CPR (%)	68,84	76,07%	71,30%	72,54%	73,77%	75%	75%
2.1.4.	Pekerjaan Umum							
	Pekerjaan Umum (Fokus layanan) Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Peningkatan/Pembangunan Jalan Kabupaten, yang tdd: ASPAL tdd: - HRS - LAPEN Telford : Pembukaan Jalan Baru/Jalan Tanah I. Pembangunan Jembatan Kabupaten, tdd : 1. Konstruksi Beton 2. Komposit 3. Konstruksi Baja REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN 1. Jalan Kabupaten 2. Jembatan Kabupaten 3. Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong a. Pembangunan Drainase Perkotaan 4. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan a. Pembangunan Air Mlnum b. Pembangunan Jalan Pedesaan c. Jalan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan 5. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan a. Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan 6. IMB Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi 1. Peningkatan/Rehabilitasi Irigasi (M) 2. Pembangunan/Rehab Bendung (buah) Program Pengendalian Banjir 1. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai (m) 2. Pembangunan Prasarana Pengaman Kali/Pantai (m)	 13,04 Km 117.3 Km 39.91 Km 53.06 Km 5 Bh - - 60.00 Km 4.00 Bh 2.108 14.602 0.3 - 2.5 37 17.719 1 - -						
	Kondisi Jalan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
	<ul style="list-style-type: none"> - Datang - Berangkat Transportasi Udara <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Penumpang <ul style="list-style-type: none"> - Datang - Berangkat 2. Arus Barang (ton) <ul style="list-style-type: none"> - Bongkar - Muat 3. Jumlah Pesawat <ul style="list-style-type: none"> - Datang - Berangkat 4. Peningkatan Pelayanan di Bandara FS Lega <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Ruang VIP - Perpanjangan Landasan Pacu (m) Komunikasi dan Informatika <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pemanfaatan IT <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Fasilitas Visat - Pengembangan Sistem Wireless - Pelayanan Warnet 2. Radia Siaran Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Mutu Siaran - Pengembangan Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> - - <ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - 						
2.1.6.	Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi							
	Perindustrian <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah industri kecil: <ol style="list-style-type: none"> a. Industri formal (unit) b. Industri non formal 2. Jumlah penyerapan tenaga kerja 3. Nilai investasi 4. Nilai produksi 5. Jumlah sentra 	<ul style="list-style-type: none"> 348 1.848 3.804 12.711.662.000 11.260.081.000 						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		56						
	Perdagangan 1. Perusahaan kecil (PK) 2. Perusahaan menengah (PM) 3. Perusahaan besar (PB) 4. Penyerapan tenaga kerja	1.060 355 168 6.881						
	Koperasi dan UKM 1. Pra koperasi (buah) 2. Koperasi yang sudah berbadan hukum 3. Modal sendiri 4. Modal luar 5. Sisa hasil usaha 6. Anggota koperasi (orang) 7. Karyawan 8. Omset	103 57 9.662.496.741 5.878.029.526 1.213.542.954 19.250 101 8.818.075.950						
2.1.7.	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
	1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan	-						
2.1.8.	Air Minum (Fokus layanan) 1. Jumlah pelanggan - PDAM kota Ruteng - IKK Pagal - IKK Reo - IKK Cancar - IKK Iteng 2. Debit Air (liter/detik) - PDAM kota Ruteng - IKK Pagal - IKK Reo - IKK Cancar - IKK Iteng 3. Pelayanan PDAM - Jumlah penduduk	7.677 367 656 217 1.127 129 12 4 4 22 201.870 10.044						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awall Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
	<div>- Jumlah pelanggan</div> <div>- Jumlah penduduk yang menikmati air</div>	60.264						
2.1.9.	Kebudayaan							
	<div>Pembangunan Kebudayaan</div> <div>1. Sanggar Kesenian</div> <div>2. Atraksi Seni Budaya</div> <div>Situs Sejarah Purbakala</div> <div>Benda Cagar Budaya</div>	<div>8</div> <div>2</div> <div>-</div> <div>-</div>	<div>5</div> <div>4</div> <div>-</div> <div>-</div>	<div>7</div> <div>7</div> <div>-</div> <div>-</div>	<div>9</div> <div>7</div> <div>-</div> <div>-</div>	<div>8</div> <div>7</div> <div>-</div> <div>-</div>	<div>6</div> <div>7</div> <div>-</div> <div>-</div>	<div>43</div> <div>34</div> <div>-</div> <div>-</div>
2.2.	PELAYANAN URUSAN PILIHAN							
	<div>Pertanian</div> <div>Tanaman Pangan</div> <div>Produktivitas Tanaman Pangan</div> <div>Komoditi</div> <div><div>• Padi (TON GKP)</div><div>• Padi Jogo</div><div>• Jagung</div><div>• Kedelai</div><div>• Kacang Tanah</div><div>• Kacang Hijau</div><div>• Ubi Kayu</div><div>• Ubi Jalar</div></div>	<div>5,21</div> <div>1,75</div> <div>3,78</div> <div>1,02</div> <div>1,08</div> <div>1,12</div> <div>8,21</div> <div>4</div>	<div>4,98</div> <div>1,78</div> <div>3,79</div> <div>0,99</div> <div>1,05</div> <div>1,12</div> <div>8,33</div> <div>4,04</div>	<div>5,07</div> <div>1,81</div> <div>3,86</div> <div>1,01</div> <div>1,07</div> <div>1,14</div> <div>8,48</div> <div>4,11</div>	<div>5,16</div> <div>1,85</div> <div>3,92</div> <div>1,02</div> <div>1,09</div> <div>1,16</div> <div>8,63</div> <div>4,19</div>	<div>5,25</div> <div>1,88</div> <div>4</div> <div>1,04</div> <div>1,11</div> <div>1,18</div> <div>8,79</div> <div>4,26</div>	<div>3,35</div> <div>1,91</div> <div>4,07</div> <div>1,06</div> <div>1,13</div> <div>1,2</div> <div>8,94</div> <div>4,34</div>	<div>5,35</div> <div>1,91</div> <div>4,07</div> <div>1,06</div> <div>1,13</div> <div>1,2</div> <div>8,94</div> <div>4,34</div>
	<div>Produktifitas Buah-buahan (Kw/Ha)</div> <div><div>• Advokat</div><div>• Belimbing</div><div>• Durian</div><div>• Jambu Biji</div><div>• Jeruk Keprok</div><div>• Jeruk</div><div>• Mangga</div></div>	<div>20,22</div> <div>45,45</div> <div>20,20</div> <div>106,05</div> <div>106,05</div> <div>4</div>	<div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>4</div>	<div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>4</div>	<div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>4</div>	<div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>4</div>	<div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>4</div>	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
	<ul style="list-style-type: none">• Nangka• Nenas• Pepaya• Pisang• Rambutan• Salak• Sawo• Sukun	13,13 45,45 501,97 454,5 101 60,60 161,60 30,30 30,30	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	
	Jmlh Klpk Tani penerima bantuan langsung benih unggul (ton): <ul style="list-style-type: none">• Padi non hibrida• Padi Lahan Kering• Padi Hibrida• Jagung Hibrida	125.000 25.000 4,500 7.500						
	Penyediaan Sarana Produksi (ton): <ul style="list-style-type: none">• Pupuk Urea• Pupuk SP-36/Super Fosfat• Pupuk KCL/NPK Ponska	7.348 686 605						
	Alat dan Mesin Pertanian (unit): <ul style="list-style-type: none">• Hand Tractor• Hand Sprayer• Emposan Tikus• Pembersih Gulma manual• Pompa air• Sabit bergerigi• Power thresher• Mistblower• Power Sprayer	162 694 10 385 415 8.485 138 6 1	2 5 - - - - 2 1 2	2 5 - - - - 2 1 2	2 5 - - - - 2 1 2	2 5 - - - - 2 1 2	2 5 - - - - 2 1 2	
	Luas Lahan Sawah Menurut jenis pengairan (HA): <ul style="list-style-type: none">• Irigasi teknis• Irigasi setengah teknis• Irigasi Sederhana• Irigasi Desa/non PU• Irigasi tadah hujan	2.650 3.012 1.442 1.207 1.539						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
	Kondisi PID (unit) : <ul style="list-style-type: none"> • PID yang rusak • PID yang diperbaiki • PID yang dibangun baru 	38						
	Perkebunan Produksi Komoditi Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	1.536,58 583,40 200,55 585,69 2,80 120,40 46,60 953,87 40,10						
	Produktifitas Komoditi Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> • Kopi • Kelapa • Cengkeh • Jambu Mete • Fanili • Kakao • Kapuk • Kemiri • Pinang 	346,09 310,55 327,56 228,19 98,25 272,24 131,66 355,09 105,9						
	Peternakan Populasi Ternak <ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kuda • Babi • Kambing • Ayam • Itik 	9.748 6.800 417 37.487 20.066 102.140 2.194						
	Produksi Daging (Kg) <ul style="list-style-type: none"> • Sapi 	181.981						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
	<ul style="list-style-type: none"> Kerbau Kambing Babi Ayam 	25.408 8.216 658.894 75.291						
	Konsumsi Daging (Kg/KPT/Tahun) <ul style="list-style-type: none"> Sapi Kerbau Kambing Babi Ayam Kelompok binaan Peternakan	0,65 0,09 0,06 2,01 0,26 38	47	56	65	74	83	83
	Perikanan <ol style="list-style-type: none"> Konsumsi Ikan (Kg/KPT/Tahun) Produksi Perikanan Tangkap (Kg) Produksi Perikanan Budidaya <ul style="list-style-type: none"> Air Tawar (Kg) Air Payau (Kg) Produksi Rumpaut Laut (Kg) Produksi Benih Ikan BBI (Kg) Rumah Tangga Perikanan Budidaya Air Tawar Armada Tangkap (unit) Alat Tangkap (unit) Kelompok Binaan Perikanan Budidaya/ Tangkap (Kelompok) 	9,95 3.406.860 44.564 2.140 708.000 22.155 1.145 691 823 138						
	Ketahanan Pangan KLPK Bahan Pangan (%): <ol style="list-style-type: none"> Padi-padian Umbi-umbian Pangan hewani Minyak Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang-kacangan Gula Sayur dan Buah Bumbu-bumbuan dan minuman 	1.368,30 170,8 217,4 89,6 33,9 96,4 33,7 173,6 16,5	1.294,64 160,64 221,92 111,68 39,12 97,12 46,96 162,88 25,20	1.220,98 150,48 226,44 133,76 44,34 97,84 60,22 152,16 33,90	1.147,32 140,32 230,96 155,84 49,56 98,56 73,84 141,44 42,60	1.073,66 130,16 235,48 177,92 54,78 99,28 86,74 130,72 51,30	1.000,00 120,00 240,00 200,00 60,00 100,00 100,00 120,00 60,00	1000,00 120,00 240,00 200,00 60,00 100,00 100,00 120,00 60,00
	KEHUTANAN							

BAB. IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
IX- 11

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
	PARIWISATA 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Rata-rata lama tinggal (Hari) 3. Rata-rata belanja wisatawan/hari (Rp) 4. Uang Beredar (<i>Jlh Wst x Lama Tinggal x Belanja harian</i>)	9.070 3 461.000	6,229 3 493,500 9,222,034,500	6,851 3 1,037,00 21,313,461,000	7,536 3 1,089,000 24,620,112,000	8,289 3 1,143,000 28,422,981,000	9,118 3 1,200,000 32,824,800,000	9,118 3 1,200,000 32,824,800,00
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah 1. Pengeluaran Konsumsi RT/Kapita 2. Nilai Tukar Petani 3. Pengeluaran Konsumsi nonpangan Fasilitas Wilayah/infrastruktur 1. Ketaatan terhadap RTRW 2. Luas Wilayah Produktif Iklim berinvestasi 1. Angka kriminalitas 2. Jumlah Demonstrasi Sumberdaya Manusia 1. Kualitas Tenaga Kerja 2. Tingkat Ketergantungan	- - - - - - - -						
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.2	Peningkatan Daya Saing Komoditi Perkebunan Alat Pengolah Komoditi Perkebunan (unit) • UPH Jambu Mete • UPH Kopi • UPH Kakao • UPH Kemiri	2 - - 3						
3.1.2.1	Kelembagaan Petani dan Kemitrausahaan (orang) • Kelompok Tani Binaan • Kelompok Tani Baru • Peningkatan Kelas Kelompok Tani Dari Pemula ke Lanjutan	150 50 30						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kelas Kelompok Tani Dari Lanjutan ke Madya Pembinaan Asosiasi Petani Perkebunan (orang) <ul style="list-style-type: none"> Kopi Fanili Cengkeh 	5						
3.2.2.1	Luas wilayah produktif	-						
3.2.2.2	Luas Lahan Budidaya	-						

BAB X

P E N U T U P

9.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada tahun 2016, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, selanjutnya RKPD tersebut dijadikan dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Manggarai tahun 2016. Mengingat keterbatasan waktu bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilu 2015 dalam menyusun RPJMD Tahun 2016 – 2020 dan RKPD Tahun 2016 maka Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memprakarsai penyusunan RKPD Tahun 2016 sesuai Siklus Perencanaan Pembangunan Nasional dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya terselesaikan sampai dengan tahun 2015 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2016.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil Pemilu 2015 tetap akan memiliki kewenangan untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015 merupakan pejabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Manggarai hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 3 Juni 2010.

RPJMD Kabupaten Manggarai 2011 – 2015 disamping sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Manggarai, Pelaksanaannya juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 yang diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 - 2013 (Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008) dan mengacu juga kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 14 Tahun 2010)

RPJMD Kabupaten Manggarai 2011–2015 menjadi pedoman bagi Kepala SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai untuk menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. SKPD serta Masyarakat termasuk Dunia Usaha, berkewajiban untuk melaksanakan Program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya; SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun; SKPD berkewajiban menjamin Konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD; Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai tahun 2011 – 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Manggarai berkewajiban untuk melakukan Pemantauan terhadap penjabaran RPJMD tahun 2011 – 2015 kedalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.